



# Perubahan RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kabupaten Rote Ndao  
Tahun 2019-2024



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2021**



BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur demi terwujudnya keberlanjutan pembangunan secara sinergis guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao;
  - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalami perubahan yang mendasar sehingga berdampak pada tidak sinkronnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sehingga perlu dilakukan perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Rote Ndao, maka perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten ...



Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote

Ndao ... A

Ndao Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
dan  
BUPATI ROTE NDAO.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019 - 2024.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147) diubah sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Dokumen Perubahan RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis;
  - e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
  - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
  - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
  - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - i. BAB IX Penutup.
- (2) Isi beserta uraian RPJMD yang telah diubah adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II... 4



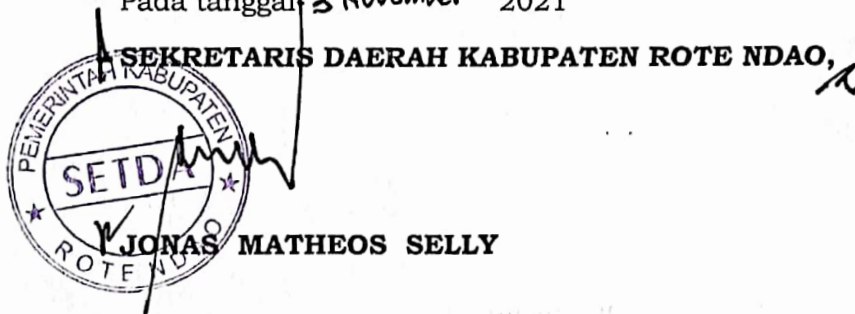
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal 3 November 2021



Diundangkan di Ba'a  
Pada tanggal 3 November 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021 NOMOR 001

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 02/2021

PENJELASAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019 - 2024

I. UMUM

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menetapkan proses pelaksanaan desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan.

Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis yang tanggap terhadap tuntutan perkembangan sesuai amanah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pasal 5 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN. RPJMD tersebut, antara lain memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja kerangka pendanaan. Dalam perjalanannya, RPJMD yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan sepanjang sisa masa berlaku RPJMD lebih dari 3 (tiga) tahun.

Perubahan RPJMD dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka ... A



Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c, maka salah satu argumentasi yuridis dilakukan perubahan RPJMD adalah "bila terjadi perubahan yang mendasar". Selanjutnya dalam ayat (3) menormakan bahwa Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan hasil pengendalian atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, ditemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan perubahan kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan perubahan kebijakan Provinsi dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Dari kondisi tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3), perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 002

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
ROTE NDAO  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN  
ROTE NDAO TAHUN 2019 - 2024

ISI DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH



## DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I-7
1.4.1 Maksud.....	I-7
1.4.2 Tujuan.....	I-7
1.5 Sistematika Penulisan .....	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-8
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana, Kerentanan dan Ancaman Bencana Iklim .....	II-13
2.1.4 Kondisi Demografi.....	II-16
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-18
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-18
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II-28
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-38
2.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar .....	II-38
2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar .....	II-52
2.3.3 Layanan Urusan Pilihan.....	II-66
2.3.4 Urusan Penunjang .....	II-72
2.4 Aspek Daya Saing Daerah .....	II-80
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-81
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-89
2.4.3 Fokus Iklim Investasi.....	II-94
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-98
2.5 Evaluasi RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 .....	II-107
2.5.1 Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 Periode RPJMD II, 2015-2020.....	II-107
2.5.2 Evaluasi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2019.....	II-109
2.5.3 Rekapitan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 .....	II-116
2.5.4 Rekapitan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Bulan Juni Tahun 2021 .....	II-117
2.6 Evaluasi Pencapaian SPM Tahun 2020 .....	II-118
2.7 Gambaran Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2020.....	II-119

BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD .....	III-1
3.1.2	Neraca Daerah .....	III-4
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	III-8
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran .....	III-9
3.2.2	Analisis Pembiayaan .....	III-10
3.3	Kerangka Pendanaan.....	III-12
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	III-12
3.3.2	Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	III-15
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH .....	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.1.1	Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-2
4.1.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	IV-2
4.2	Permasalahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2020.....	IV-8
4.3	Isu Strategis.....	IV-8
4.3.1	Isu Strategis Global.....	IV-9
4.3.2	Isu Strategis Nasional .....	IV-11
4.3.3	Isu Strategis Provinsi .....	IV-12
4.3.4	Isu Strategis Kabupaten .....	IV-12
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....	V-1
5.1	Visi .....	V-1
5.2	Misi.....	V-2
5.3	Tujuan dan Sasaran .....	V-9
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....	VI-1
6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	VI-1
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis .....	VI-6
6.3	Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 .....	VI-10
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....	VII-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....	VIII-1
BAB IX	PENUTUP .....	IX-1



## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>		<b>Hal</b>
2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao.....	II-2
2.2	Curah Hujan Rata-rata Tahun 2015-2020 Menurut Bulan di Kabupaten Rote Ndao.....	II-6
2.3	Rata-rata Temperatur dan Kelembaban Udara Tahun 2015-2020 Menurut Bulan di Kabupaten Rote Ndao.....	II-6
2.4	Rencana Pemanfaatan Lahan Kabupaten Rote Ndao.....	II-8
2.5	Indeks Resiko Bencana Per Ancaman.....	II-14
2.6	Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019.....	II-17
2.7	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Rote Ndao 2015-2019.....	II-17
2.8	PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 (dalam ribuan).....	II-20
2.9	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 (dalam ribuan).....	II-21
2.10	Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-22
2.11	Rata-rata Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) menurut Lapangan Usaha di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-23
2.12	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rote Ndao dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2015-2020.....	II-23
2.13	Laju Inflasi Kab. Rote Ndao dibandingkan Prov. NTT dan Nasional Tahun 2015-2020.....	II-24
2.14	PDRB Perkapita Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PDB Perkapita Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2020.....	II-24
2.15	Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan.....	II-25
2.16	Jumlah Rumah Tangga Kemiskinan Ekstrim Kab. Rote Ndao Tahun 2020.....	II-27
2.17	Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020....	II-28
2.18	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 ..	II-29
2.19	Usia Harapan Hidup (UHH) di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-29
2.20	Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).....	II-30
2.21	Skor Pola Pangan Harapan (PPH).....	II-37
2.22	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020.....	II-45
2.23	Capaian Indikator Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-51
2.24	Jumlah Partai Politik dan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-51
2.25	Pelayanan Urusan Sosial di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026-2020.....	II-52
2.26	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-52
2.27	Realisasi Capaian Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2020.....	II-53
2.28	Pengelolaan Sampah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016-2020.....	II-57

2.29	Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-57
2.30	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-58
2.31	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-59
2.32	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-59
2.33	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-60
2.34	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019.....	II-61
2.35	Perkembangan Indikator Kinerja Koperasi dan UKM di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-62
2.36	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-63
2.37	Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-63
2.38	Kualitas Layanan Urusan Statistik Kabupaten Rote Ndao.....	II-64
2.39	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-65
2.40	Kualitas Layanan Urusan Perpustakaan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020	II-65
2.41	Perkembangan Kinerja urusan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-69
2.42	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-69
2.43	Persentase Transmigran di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-70
2.44	Penetapan RKPD Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2021 .....	II-73
2.45	Program Inkonsisten Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 ...	II-74
2.46	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-75
2.47	Persentase SiLPA Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-75
2.48	Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019.....	II-75
2.49	Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 .....	II-76
2.50	Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2020.....	II-76
2.51	Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019.....	II-77
2.52	Penetapan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-78
2.53	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019.....	II-78
2.54	Inovasi Daerah Kabupaten Rote Ndao .....	II-79
2.55	Capaian Kinerja Pengawasan di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-80
2.56	Capaian Kinerja Sekretariat Dewan di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-80
2.57	Potensi Destinasi Wisata Kab. Rote Ndao .....	II-81

2.58	Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2019	II-88
2.59	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018-2019.....	II-88
2.60	Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Tahun 2016-2018 Kabupaten Rote Ndao.....	II-89
2.61	Panjang Jalan Kabupaten Dirinci Menurut Kondisi di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-90
2.62	Rasio Ketaatan terhadap RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-91
2.63	Realisasi Pengelolaan Listrik di Provinsi NTT .....	II-93
2.64	Jumlah Pengguna Telepon Menurut Pengguna di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-94
2.65	Angka Kriminalitas Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 .....	II-94
2.66	Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-95
2.67	Kapasitas Layanan PDAM Kab. Rote Ndao .....	II-98
2.68	Jumlah PNS, Anggota DPRD dan Pencari Kerja yang berpendidikan S1, S2 dan S3 .....	II-99
2.69	Rasio Ketergantungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2018 .....	II-99
2.70	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao .....	II-100
2.71	Evaluasi Hasil RPJPD Kab. Rote Ndao Tahun 2005-2020 Periode Tahun 2015-2019 .....	II-108
2.72	Pencapaian Kinerja RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2019 .....	II-110
2.73	Rekapan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 .....	II-116
2.74	Rekapan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Bulan Juni Tahun 2020 .....	II-117
2.75	Pencapaian SPM Kabupaten Rote Ndao sampai dengan Tahun 2020 .....	II-118
2.76	Capaian Indikator TPB Kabupaten Rote Ndao.....	II-125
2.77	Rincian Indikator TPB Kabupaten Rote Ndao .....	II-126
3.1	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015-2019 Kabupaten Rote Ndao.....	III-2
3.2	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Rote Ndao .....	III-6
3.3	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019.....	III-8
3.4	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Total Anggaran Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016-2020 .....	III-9
3.5	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2020 .....	III-10
3.6	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2020 .....	III-10
3.7	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2020 .....	III-11
3.8	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kab. Rote Ndao Tahun 2018 - 2020	III-12
3.9	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024 .....	III-14



3.10	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kab. Rote Ndao .....	III-15
3.11	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kab. Rote Ndao .....	III-16
5.1	Keselarasn Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024 dengan Visi Misi RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 .....	V-6
5.2	Keselarasn Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024.....	V-7
5.3	Keselarasn Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024 dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 .....	V-8
5.4	Tujuan, Sasaran dan Indikator yang Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah....	V-10
6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024.....	VI-2
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kab. Rote Ndao .....	VI-6
6.3	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024 Sebelum Perubahan .....	VI-13
6.4	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024 Setelah Perubahan .....	VI-19
7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2024 Kab.Rote Ndao	VII-2
7.2	Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kab. Rote Ndao Tahun 2020-2024 Sebelum Perubahan .....	VII-3
7.3	Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kab. Rote Ndao Tahun 2021-2024 Setelah Perubahan .....	VII-10
8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kab. Rote Ndao .....	VIII-2
8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab. Rote Ndao .....	VIII-3

## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar		Hal
1.1	Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Lainnya .....	I-6
2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Rote Ndao .....	II-1
2.2	Peta Kondisi Tanah Kabupaten Rote Ndao.....	II-3
2.3	Peta Hidrologi Kabupaten Rote Ndao.....	II-5
2.4	Peta Klimatologi Kabupaten Rote Ndao .....	II-7
2.5	Peta Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Rote Ndao.....	II-13
2.6	Peta Gelombang Musim Barat.....	II-15
2.7	Peta Gelombang Musim Timur .....	II-16
2.8	Piramida Penduduk Kabupaten Rote Ndao (%) Tahun 2019 .....	II-18
2.9	Tingkat Kemiskinan Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dan Nasional Tahun 2015-2020....	II-25
2.10	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2015-2020 .....	II-26
2.11	Perbandingan IPM Kab. Rote Ndao terhadap IPM Provinsi NTT dan IPM Nasional.....	II-28
2.12	Persentase Balita Gizi Buruk di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-31
2.13	Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2015-2020 .....	II-32
2.14	Prevalensi Stunting Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dan Nasional Tahun 2018-2019 ....	II-33
2.15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-34
2.16	Tingkat Penangguran Terbuka Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-35
2.17	Rasio Penduduk Bekerja Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-35
2.18	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2015-2020 .....	II-36
2.19	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan, Perdagangan dan Industri terhadap PDRB Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-38
2.20	Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-38
2.21	APK dan APM di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-39
2.22	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-40
2.23	Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-41
2.24	Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-41
2.25	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kab. Rote Ndao Tahun 2015- 2019.....	II-42
2.26	Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2019 .....	II-43
2.27	Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2019 .....	II-44
2.28	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-46
2.29	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-48
2.30	Persentase Irigasi Kondisi Baik Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-48
2.31	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020	II-49
2.32	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-50

2.33	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kab. Rote Tahun 2015-2020 .....	II-54
2.34	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-55
2.35	Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-56
2.36	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-66
2.37	Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-66
2.38	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian, Kehutan dan Perikanan terhadap PDRB Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-67
2.39	Produksi Tanaman Padi (Ton) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-67
2.40	Produksi Lontar Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-68
2.41	Jumlah Produksi Ikan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-70
2.42	Konsumsi Ikan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020.....	II-71
2.43	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-72
2.44	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RPKD Tahun 2015-2019.....	II-74
2.45	Persentase Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020 .....	II-77
2.46	Pelanggan PDAM Berdasarkan Klasifikasi Jenis Konsumen.....	II-97
2.47	Gambaran Penjabaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).....	II-120
2.48	Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional .....	II-121
2.49	Jumlah Indikator pada Setiap Pilar yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional .....	II-121
2.50	Jumlah Indikator pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional .....	II-122
2.51	Jumlah Indikator pada Setiap Pilar yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional .....	II-122
2.52	Jumlah Indikator pada Setiap Tujuan yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional.....	II-123
2.53	Jumlah Indikator Pada Setiap Pilar Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional .....	II-123
2.54	Jumlah Indikator pada Setiap Tujuan yang tidak/belum memiliki data .....	II-124
2.55	Jumlah Indikator Pada Setiap Pilar yang tidak/belum memiliki data.....	II-124
3.1	Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Rote Ndao Tahun 2016-2020 .....	III-4
6.1	Pengembangan Kawasan Ekonomi di Kabupaten Rote Ndao .....	VI-10



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa sesuai dengan kewenangannya daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada Pasal 264 Ayat (4) bahwa RPJMD disusun dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Pasangan **Ibu Paulina Haning- Bullu, SE** sebagai Bupati dan Bapak **Stefanus Mercurius Saek, SE, M.Si** sebagai Wakil Bupati Rote Ndao periode 2019-2024 yang dilantik pada tanggal 14 Februari 2019, telah melaksanakan kewajibannya menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019–2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2019.

RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan program Bupati serta Wakil Bupati Rote Ndao periode Tahun 2019-2024. Pada Tahun 2021 ini, RPJMD Kabupaten Rote Ndao telah memasuki tahun kedua. Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap RPJMD Tahun 2019-2024 memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, diantaranya adalah:

1. Perubahan kebijakan nasional dengan ditetapkannya:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
  - d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Perubahan kebijakan daerah dengan ditetapkannya:
- a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
3. Terjadinya bencana antara lain:
- a. Pandemi Covid-19 yang telah melanda secara global termasuk Kabupaten Rote Ndao sejak awal tahun 2020 dan sampai saat ini masih belum mereda;
  - b. Bencana siklon tropis seroja yang melanda Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 4 dan 5 April 2021.

Memperhatikan amanat dari kebijakan pemerintah pusat, daerah dan dampak bencana tersebut di atas yang berdampak terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja daerah.

Substansi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; urusan dan program perangkat daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 beserta indikator kinerjanya; IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU Perangkat Daerah dan target kinerjanya. Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dilakukan *mutatis mutandis* sebagaimana penyusunan RPJMD, hal ini sesuai amanat dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
15. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 019 seri E Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 090);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 030, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 118);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
32. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.660/25/DLHK/2021 Tanggal 1 November 2021 tentang Persetujuan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

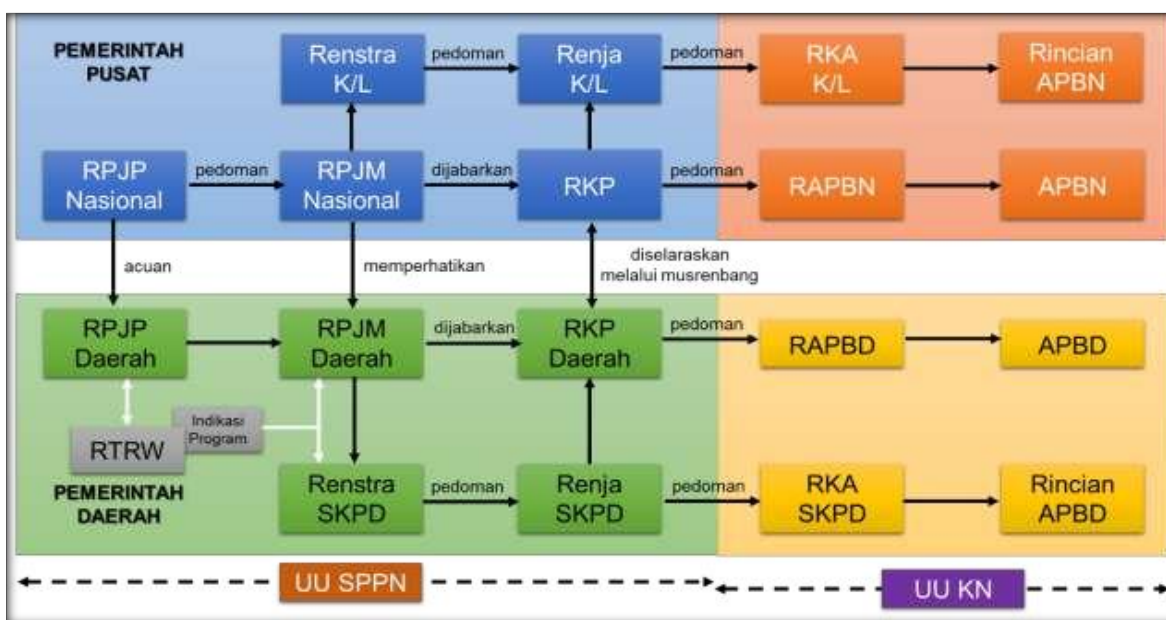
Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagai bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 harus mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 serta RTRW Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam rangka sinkronisasi dan keselarasan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dengan dokumen perencanaan lainnya, maka perlu dilakukan telaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan tersebut. Keselarasan meliputi isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah.

RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) lima tahunan. Pelaksanaan operasional RPJMD, dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta program strategis nasional untuk selanjutnya sebagai pedoman penyusunan APBD dan Renja Perangkat Daerah tahunan dalam lima tahun kedepan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menghindari kekosongan penyelenggaraan perencanaan pada periode transisi awal RPJMD tahun rencana 2020, dibutuhkan acuan sampai dengan tersedianya dokumen RPJMD, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 telah disusun mengacu pada RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 dan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024. RKPD Tahun 2020 tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2019-2024. Hubungan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1

Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen lainnya



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



## **1.4. Maksud dan Tujuan**

### **1.4.1. Maksud**

Maksud penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 adalah memperbarui kebijakan pembangunan jangka menengah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rote Ndao untuk kurun waktu tiga tahun (Tahun 2022-2024) sebagai penjabaran visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan kemajuan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dan indikator kinerja daerah dengan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kondisi daerah sebagai akibat adanya bencana.

### **1.4.2. Tujuan**

Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan strategis pembangunan yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai arahan dalam RPJPD Kabupaten Rote Ndao periode 2019-2024.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Sebagai instrumen indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

- 2.5 Evaluasi RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019
- 2.6 Evaluasi Pencapaian SPM
- 2.7 Gambaran Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

**BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3 Kerangka Pendanaan

**BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu Strategis

**BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran

**BAB VI. STRATEGI, ARAHAN KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

**BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**BAB IX. PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

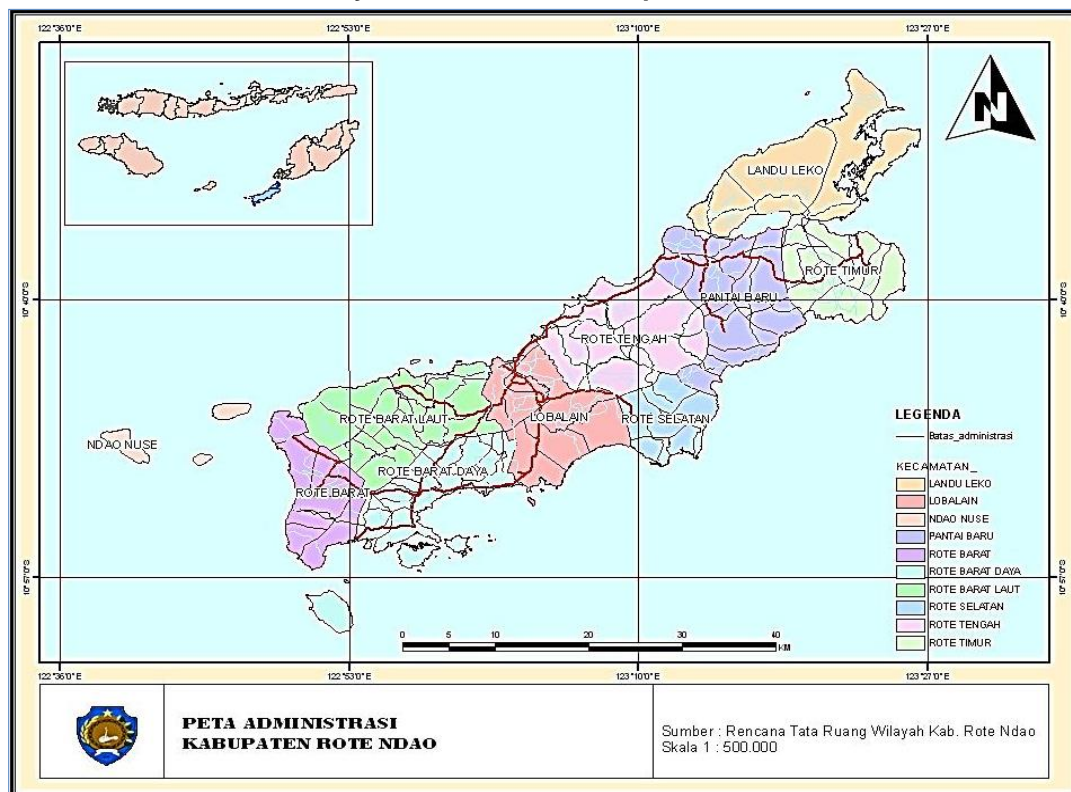
##### 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

###### 1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu dari 22 (dua puluh dua) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil di bagian paling selatan kepulauan nusantara, dengan luas wilayah daratan 1.280,10 km<sup>2</sup>, luas wilayah perairan 2.376 km<sup>2</sup>.

Secara administrasi kewilayahan Kabupaten Rote Ndao sebelah utara berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah barat berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah timur berbatasan dengan Laut Timor, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

**Gambar 2.1**  
**Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Rote Ndao**



Sumber: RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013-2033

Kabupaten Rote Ndao terdiri dari 11 kecamatan, 112 desa dan 7 kelurahan, dengan jumlah rukun warga sebanyak 804 dan rukun tetangga sebanyak 1.622. Rincian luas wilayah kecamatan dijabarkan pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao**

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Rukun Warga	Rukun Tetangga	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Luas Wilayah (%)
1.	Rote Barat Daya	19	165	335	114,57	8,95
2.	Rote Barat Laut	12	115	215	80,08	6,26
3.	Lobalain	18	75	187	145,70	11,38
4.	Rote Tengah	8	48	94	162,50	12,69
5.	Rote Selatan	7	39	78	73,38	5,73
6.	Pantai Baru	15	98	201	176,18	13,76
7.	Rote Timur	11	71	142	110,84	8,66
8.	Landu Leko	7	32	54	194,06	15,16
9.	Rote Barat	7	41	88	116,28	9,08
10.	Ndao Nuse	5	36	72	14,19	1,11
11.	Loaholu	10	66	132	76,66	5,99
Jumlah Total		119	804	1.622	1.280,10	100,00

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2020

## 2. Letak dan Kondisi Geografis

Letak astronomis Kabupaten Rote Ndao berada di antara 10°25' LS sampai 11°00' LS dan di antara 121°49' BT sampai 123°26'BT. Terdapat 101 pulau, dimana 7 (tujuh) pulau yang berpenghuni adalah pulau Rote, Ndao, Nuse, Landu, Ndana, Nusa Manuk, Usu dan sisanya 94 pulau tidak berpenghuni.

Pengelolaan 101 pulau yang tersebar di wilayah Kabupaten Rote Ndao menjadi tantangan bagi Pemerintah khususnya terkait pulau-pulau berpenghuni dalam hal menyediakan sarana dan prasarana konektivitas yang memadai untuk memudahkan transportasi antar pulau-pulau tersebut. Sedangkan untuk pulau-pulau tak berpenghuni difokuskan tata kelola aset pada pemantauan aktifitas penguasaan lahan agar tidak dikuasai secara ilegal.

Berdasarkan posisi geografis dan kondisi wilayah di atas Kabupaten Rote Ndao selain memiliki potensi daratan juga memiliki potensi bahari yang sangat besar, dengan luas wilayah perairan laut yang cukup luas dan panjang garis pantai kurang lebih 330 km, Kabupaten Rote Ndao memiliki sejumlah pantai yang eksotik, beberapa di antaranya merupakan kawasan *surfing* terbaik dunia yakni Pantai Nemberala dan Pantai Bo'a.

Ditinjau dari kondisi Geostrategis Kabupaten Rote Ndao mempunyai wilayah laut yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Negara Australia, dari sudut pandang sumber daya dan perdagangan dapat dilihat sebagai potensi, namun pada kenyataannya masih memiliki potensi konflik antara Indonesia dan Australia sehubungan dengan kegiatan melaut dari nelayan Rote Ndao dan kegiatan transit imigran gelap dari Asia ke Australia.

## 3. Topografi dan Kemiringan Lahan

Wilayah Rote Ndao memiliki topografi yang relatif datar dengan wilayah yang sebagian besar merupakan daratan berbukit-bukit dengan ketinggian 0-30 meter di atas permukaan laut (DPL) dengan rincian dataran 35% (45.250 Ha), berbukit dan gunung 25% (32.625 Ha) dan lainnya 40% (50.135 Ha). Rata-rata kemiringan lahan wilayah Kabupaten Rote Ndao berada pada rentang 0≥40%, dapat digambarkan sebagai berikut:

- Kemiringan lahan khususnya kecamatan Rote Barat dan Rote Timur lebih landai dari kecamatan lainnya di pulau Rote. Lereng dengan kemiringan lebih dari 40% hanya terdapat di Kecamatan Rote Timur sebesar 0,33% dari luas wilayahnya.

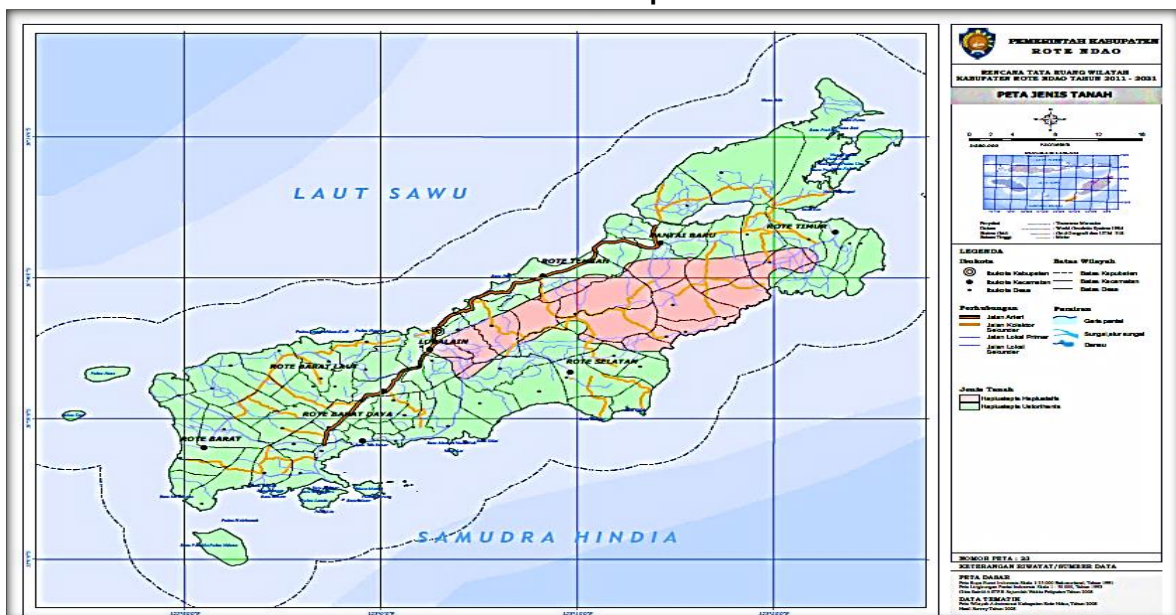


- Kecamatan Pantai Baru 47,74% dari luas wilayahnya kemiringannya 2-15%, 38% berkemiringan 15-40%, sedangkan 11,70% dari luas wilayahnya berkemiringan 0-2%.
- Kecamatan Rote Tengah merupakan daerah yang berbukit- bukit dan bergunung dilihat dari kemiringan lahan 15% sampai 40% sebesar 49,3% dari luas lahan secara keseluruhan di Kabupaten Rote Ndao.
- Dan dari luas lahan yang memiliki kemiringan >40% di Kecamatan Rote Tengah terdapat luas 70% dari luas wilayah secara keseluruhan.

#### 4. Geologi dan Tekstur Tanah

Pulau Rote dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, sama seperti pulau Timor, Sabu dan Sumba, terbentuk melalui proses pengangkatan (*uplift*), sebagai akibat pergeseran kerak bumi dari lempeng Australia dan lempeng Asia. Pergeseran antar dua lempengan tersebut mendorong kerak-kerak kepulauan Nusa Tenggara ke atas. Pengangkatan ini terus berlangsung, dan diperkirakan laju pengangkatan berlangsung beberapa mm per tahun. Akibat dari proses ini, tanah yang terbentuk di kawasan ini umumnya masih berupa tanah-tanah muda dengan solum yang relatif dangkal. Bahan induk utama pembentuk tanah adalah bahan induk koral, dan umumnya bereaksi alkalis. Tanah-tanah utama yang terdapat di pulau Rote adalah tanah-tanah Entisol, Inceptisol dan sedikit Vertisol, sedangkan potensi bahan tambang utama adalah bahan tambang golongan C dan golongan B (mangan).

**Gambar 2.2**  
**Peta Kondisi Tanah Kabupaten Rote Ndao**



Sumber : RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013-2033

Berdasarkan peta geologi jenis tanah di Kabupaten Rote Ndao secara umum dan hampir semua wilayah terdiri dari jenis tanah mediteran/renzina/litosol. Kemampuan tanah di Kabupaten Rote Ndao meliputi kedalaman efektif berkisar antara 30 cm sampai 90 cm, sehingga kendala utama terhadap pengelolaan tanah-tanah tersebut adalah jika dimanfaatkan untuk produksi pertanian adalah lapisan tanah yang tipis, kesuburan tanah yang rendah, dan ketersediaan air yang terbatas. Produktivitas lahan secara umum tergolong rendah.

Tekstur tanah di Kabupaten Rote Ndao bervariasi dari tekstur halus sampai kasar. Kecamatan Rote Barat Laut jenis tanahnya adalah tekstur halus hingga tekstur kasar, untuk

tekstur sedang sebagian besar berada di Kecamatan Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Lobalain dan Rote Tengah, sedangkan untuk tekstur halus lebih menyebar di Kecamatan Rote Selatan, Pantai Baru dan Rote Timur dan untuk tekstus kasar menyebar di seluruh wilayah di Kabupaten Rote Ndao.

## 5. Hidrologi

Potensi hidrologi di Kabupaten Rote Ndao relatif terbatas, didominasi air permukaan yang berasal dari sungai dan danau, air bawah tanah dan mata air untuk menyediakan air sepanjang tahun. Jumlah sungai yang berair sepanjang tahun hanya berjumlah 12 buah.. Sungai terbesar adalah Sungai Menggelama, dengan panjang sungai 32 km. Sementara jumlah danau yang berair sepanjang tahun ada 6 buah, dengan total volume kurang lebih 7 (tujuh) juta meter kubik. Potensi penggunaan air permukaan dari sungai atau danau sebagai sumber air baku perlu kiranya mulai diperhitungkan sebagai alternatif agar ketergantungan terhadap mata air dan sumur bor bisa dikurangi.

Selain air permukaan, sumber air baku dari air bawah tanah memiliki potensi yang besar yakni dari Cekungan air Tanah (CAT). Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah Kabupaten Rote Ndao memiliki 3 (tiga) Cekungan Air Tanah (CAT) yakni CAT Nemberala dengan luas 236 Km<sup>2</sup>, CAT Batutua luas 229 Km<sup>2</sup>, dan CAT Rote luas 250 Km<sup>2</sup>. Potensi CAT ini bila dieksplorasi secara maksimal dengan sumur bor, sumur gali ataupun dengan teknologi lainnya, dapat menopang kebutuhan air utama di Kabupaten Rote Ndao.

Potensi air baku lainnya adalah mata air yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao, dimanfaatkan penduduk untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan irigasi umumnya berasal dari perbukitan dengan debit air menurun pada musim kemarau sehingga kebutuhan air untuk musim kemarau merupakan kendala pemenuhan kebutuhan air sehari-hari. Ketersediaan air pada mata air ini juga sangat tergantung pada kondisi hutan yang memiliki kemampuan sebagai peresap air hujan. Kerusakan hutan baik karena kegiatan dalam hutan maupun alih fungsi lahan untuk kegiatan lain perlu diantisipasi untuk menjaga pasokan air serta kualitasnya.

Selain pengambilan langsung oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari pemanfaatan sumber air baku yang dikelola oleh PDAM digunakan untuk pelayanan air minum di Kabupaten Rote Ndao berasal dari 8 (delapan) sumber yakni mata air Siokoen dengan kapasitas 17,5 Liter/detik, Oemau 10 Liter/detik, Lualemba 15 Liter/detik, Lidabesi 10 Liter/detik, Nioen 15 Liter/detik, Lelebe 10 Liter/detik, Sumur Bor Kantor Camat 5 Liter/detik dan Sumur Bor Pantai Baru 5 Liter/detik. Dari total kapasitas terpasang sebesar 87,5 liter/detik dan kapasitas produksi sebesar 34,5 liter/detik terdapat *iddle capacity* sebesar 53 liter/detik yang dapat dimaksimalkan untuk perluasan jaringan pelayanan air bersih.

**Gambar 2.3**  
**Peta Hidrologi Kabupaten Rote Ndao**



Sumber : RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013-2033

## 6. Klimatologi

Seperti wilayah kabupaten lainnya di NTT, iklim wilayah Rote Ndao dipengaruhi oleh angin muson yang arah dan waktunya dipengaruhi oleh perubahan musim di benua Asia dan Australia. Pengaruh pola angin tersebut menentukan pola musim hujan dan musim kemarau di wilayah Nusa Tenggara, termasuk Kabupaten Rote Ndao.

Musim hujan berlangsung singkat sekitar empat bulan (Desember-Maret), dan musim kemarau berlangsung kurang lebih delapan bulan (April-Nopember). Berdasarkan rincian tabel 2.2 di bawah, curah hujan tertinggi di Kabupaten Rote Ndao diatas 309,7 mm dan hari hujan diatas 15 hari hujan terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret dan Desember. Penilaian faktor iklim yang digambarkan dalam bentuk curah hujan sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian terutama pada pola dan waktu menanam.

Kawasan selatan mempunyai iklim tropis dan curah hujan rata-rata yang cukup tinggi. Hal ini dapat memberikan manfaat yang besar terhadap pertanian dan perkebunan yang merupakan kegiatan dominan di kawasan selatan. Selain itu perlu pengantisipasi curah hujan yang tinggi dengan menyediakan kawasan penyangga atau konservasi sehingga apabila curah hujan yang tinggi tidak menimbulkan masalah banjir dan juga erosi.

**Tabel 2.2**  
**Curah Hujan Rata-Rata Tahun 2015-2020 Menurut Bulan di Kabupaten Rote Ndao**

No.	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hh)
1.	Januari	439,3	21
2.	Februari	267,8	14
3.	Maret	279,3	18
4.	April	49,7	6
5.	Mei	63,8	9
6.	Juni	0,0	0,0
7.	Juli	2,4	1
8.	Agustus	0,0	0,0
9.	September	0,0	0,0
10.	Oktober	9,5	2
11.	November	54,1	4
12.	Desember	370,7	20

Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

Rata-rata kelembaban udara juga tergolong rendah, yakni 71-89%. Rata-rata Suhu minimum 23°C dan maksimum adalah dan 34°C. Suhu yang relatif tinggi pada satu sisi dan kelembaban udara yang rendah pada sisi yang lain menyebabkan laju evapotranspirasi yang tinggi. Rata-rata evapotranspirasi potensial adalah 6 mm/hari atau 2.160 mm/tahun. Angka evapotranspirasi yang lebih tinggi daripada angka curah hujan mengindikasikan defisit air yang cukup besar, dan berdampak pada rendahnya potensi air permukaan dan air bawah permukaan. Kondisi ini juga berimplikasi pada sistem produksi pertanian yang bersifat musiman dan didominasi sistem pertanian lahan kering atau tadah hujan.

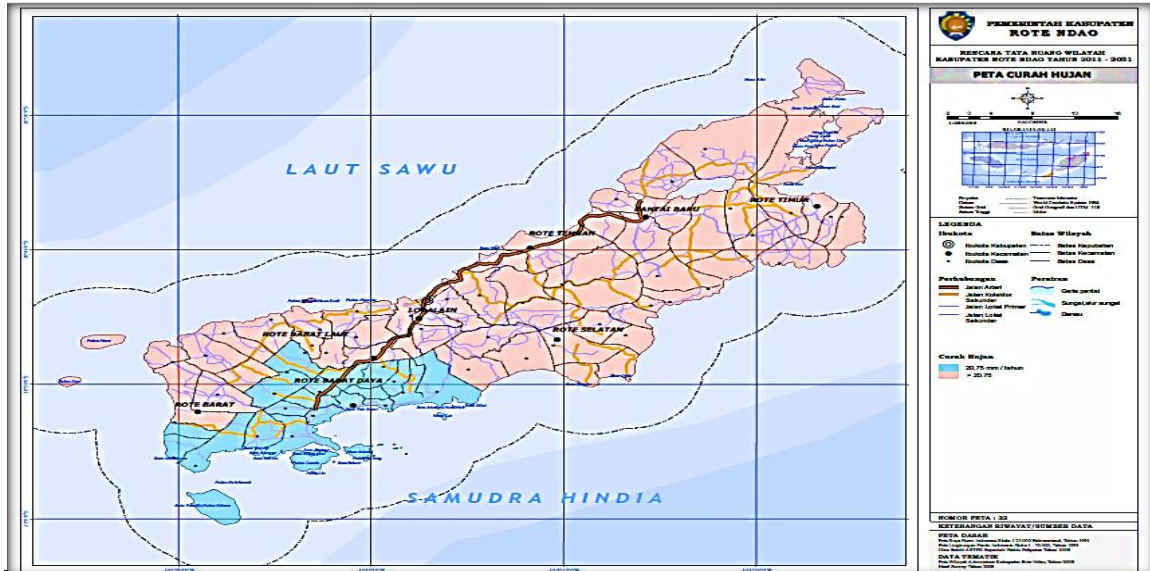
**Tabel 2.3**  
**Rata-Rata Temperatur dan Kelembaban Udara Tahun 2015-2020**  
**Menurut Bulan di Kabupaten Rote Ndao**

No	Bulan	Suhu Udara (°C)		Rata - Rata	Kelembaban (%)		Rata - Rata
		Max	Min		Max	Min	
1	Januari	32,9	21,2	22,9	94	79	81
2	Februari	32,8	21,7	23,3	96	78	81
3	Maret	33,0	21,3	23,0	96	82	84
4	April	33,3	20,5	22,3	90	73	75
5	Mei	33,0	20,4	22,2	91	74	76
6	Juni	32,1	18,4	20,3	86	66	69
7	Juli	32,5	17,6	19,7	90	68	71
8	Agustus	32,6	18,5	20,5	86	67	69
9	September	33,6	19,2	21,3	84	65	68
10	Oktober	34,7	20,8	22,8	81	63	66
11	November	35,1	21,3	23,2	83	67	69
12	Desember	34,2	22,5	24,2	91	72	75

Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020



**Gambar 2.4**  
**Peta Klimatologi Kabupaten Rote Ndao**



Sumber : RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013-2033

## 7. Penggunaan Lahan

Sebagian besar lahan di Kabupaten Rote Ndao masih berupa lahan kosong tak terbangun yaitu semak belukar dan padang rumput. Lahan terbangun hanya terdapat di kawasan permukiman perkotaan yang tersebar di hampir seluruh ibukota kecamatan. Pola penggunaan ruang di Kabupaten Rote Ndao secara umum terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan lindung (non budidaya). Kawasan budidaya terdiri dari hutan produksi, hutan rakyat, kawasan pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan peruntukan lainnya. Sedangkan kawasan lindung meliputi hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Luas masing-masing jenis peruntukan lahan disajikan pada tabel 2.4 pemanfaatan lahan.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033, peruntukan lahan dengan memperhatikan pola ruang terdiri dari kawasan budidaya seluas 98.606,06 Ha. Lahan peruntukan Kawasan Lindung seluas 29.854,39 Ha.

**Tabel 2.4**  
**Rencana Pemanfaatan Lahan Kabupaten Rote Ndao**

No.	Rencana Pola Ruang	Luas	
		Ha	%
1.	Bandar Udara	4,23	0,0033
2.	Budidaya Perikanan Darat	0,82	0,0006
3.	Danau	2.114,46	1,6460
4.	Hutan Bakau	1.480,59	1,1526
5.	Hutan Lindung	15.385,43	11,9767
6.	Hutan Produksi	22.688,00	17,6613
7.	Kawasan Sekitar Danau dan Waduk	1.208,19	0,9405
8.	Lahan Pengembalaan	12.582,50	9,7948
9.	Pariwisata	117,49	0,0915
10.	Perkebunan	5.872,94	4,5717
11.	Permukiman	4.647,38	3,6034
12.	Pertanian Lahan Basah	4.073,36	3,1709
13.	Pertanian Lahan Kering	47.158,31	36,7101
14.	Rawa	589,43	0,4588
15.	Sempadan Pantai	4.524,38	3,5220
16.	Sempadan Sungai	4.188,81	3,2608
17.	Suaka Margasatwa	445,59	0,3469
18.	Sungai	140,60	0,1094
19.	Taman Buru	1.257,50	0,9789
Total		128.280,01	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033

### 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033 rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten diprioritaskan kepada arahan yang memiliki nilai strategis nasional, provinsi maupun kabupaten yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup.

#### 1. Kawasan Strategis Pertahanan dan Keamanan

Kawasan strategis pertahanan dan keamanan yang ada di Kabupaten Rote Ndao adalah berupa kawasan militer sebagai pangkalan angkatan laut di Pulau Ndana, yang pengelolaannya tidak berada di bawah kewenangan Kabupaten Rote Ndao. Selanjutnya dalam pola ruang wilayah Kabupaten Rote Ndao, kawasan ini juga dapat disebut sebagai kawasan khusus, karena memiliki karakter dan perlakuan bersifat khusus/spesifik. Sifat khusus tersebut terkait dengan adanya kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan sebagian informasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan karakter dan kewenangan pengelolaan kawasan seperti yang telah disebutkan maka pemanfaatan ruang sebagai fungsi lainnya dilakukan melalui koordinasi dan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah/masyarakat yang akan memanfaatkannya. Beberapa hal yang memungkinkan untuk dikembangkan, diantaranya: pemanfaatan lahan terbuka sebagai lahan pertanian, kerjasama penyediaan sarana dan prasarana maupun fasilitas pendukung lainnya.

Berdasarkan sifat yang khusus itu pula, maka dalam pengelolaannya memperhatikan aspek atau batasan sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasi dan memberi batasan yang jelas pada kawasan yang dimaksud sehingga mempermudah pengelolaan, pengawasan serta menghindari konflik yang dapat terjadi. Pembatasan ini dapat berupa area atau kawasan terbuka serta batasan fisik yang jelas.
- 2) Pengendalian terhadap perkembangan kawasan di sekitar kawasan khusus yang didasarkan kepada aspek kepentingan, keamanan, kenyamanan dan fungsional.
- 3) Pemberian hak pengelolaan kepada masyarakat atau pemerintah, harus berdasarkan kerjasama sesuai ketentuan yang telah disepakati sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak.
- 4) Menetapkan kawasan Hankam pada kawasan yang saat ini merupakan kawasan bagi kegiatan militer, namun secara khusus apabila diperlukan pengembangan atau relokasi dapat dilakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan Departemen Pertahanan.

## **2. Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**

Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan Strategis Pendukung Nasional Pariwisata Nemberala dan sekitarnya;
- 2) Kawasan Agropolitan dikembangkan di Kecamatan Rote Barat Daya, Kawasan Mamaluk Kecamatan Rote Timur;
- 3) Kawasan Minapolitan dan budidaya perikanan di Rote Barat Daya dan Rote Timur;
- 4) Pelabuhan Udara D.C. Saudale, sebagai sarana transportasi udara antar pulau;
- 5) Pelabuhan Laut Ba'a, sebagai sarana transportasi laut antar pulau;
- 6) Pelabuhan Laut Pantai Baru, sebagai sarana transportasi laut antar pulau;
- 7) Pelabuhan Laut Papela, sebagai sarana transportasi laut antar pulau;
- 8) Kawasan Terpadu Mandiri Batutua yang diprioritaskan untuk memacu pengembangan kawasan barat Kabupaten Rote Ndao berupa kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan dengan fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Adapun arahan pengelolaan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan seluruh wilayah baik antar pusat produksi, pengelolaan, dan pemasaran usaha tani, sehingga menghubungkan simpul-simpul pertumbuhan, maupun dengan wilayah-wilayah desa *hinterlandnya*.
- 2) Rencana pengembangan jaringan transportasi yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan pengangkutan produksi menuju ke pasar-pasar pengumpul dan Sub Terminal Agribisnis (STA), sehingga tercipta kegiatan perekonomian yang lancar di Kawasan Agropolitan dan Minapolitan.
- 3) Penataan Arus Pemasaran di Kawasan Pariwisata, Agropolitan dan Minapolitan dalam upaya memudahkan pergerakan manusia maupun barang ke beberapa pusat-pusat

aktifitas budidaya, perdagangan serta pusat-pusat transportasi baik melalui pelabuhan laut, transportasi darat maupun pelabuhan udara lewat Kabupaten Rote Ndao.

- 4) Peningkatan dan pembangunan terminal pedesaan angkutan manusia dan barang di setiap pusat desa, untuk mendukung kemudahan memasarkan hasil panen dan hasil produksi mereka ke pasar sehingga aktivitas agrobisnis di Kawasan Agropolitan dan Minapolitan dapat berkembang pesat.

### **3. Kawasan Strategis Kabupaten Untuk Kepentingan Sosial Budaya**

Kawasan strategis ini dapat berupa kawasan budidaya maupun kawasan lindung. Kawasan strategis aspek sosial budaya yang merupakan kawasan budidaya dapat berupa kawasan pusat perkantoran pemerintah, kawasan pusat sejarah keagamaan, kawasan pusat kegiatan keagamaan, kawasan pariwisata (kawasan sejarah perkotaan, wisata buatan unggulan), kawasan makam-makam bersejarah, serta kawasan lainnya menurut kepentingan sosial budaya kabupaten. Kawasan strategis aspek sosial budaya yang merupakan kawasan lindung dapat berupa kawasan adat tertentu ataupun kawasan konservasi budaya.

Adapun kawasan strategis bidang sosial budaya di Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain terdapat Rumah Raja Rote;
- 2) Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Daya terdapat Rumah Raja Thie;
- 3) Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya terdapat wisata rohani;
- 4) Kelurahan Namodale, Gereja Tua Menggelama;
- 5) Kelurahan Metina, Masjid An-Nur Ba'a;
- 6) Desa Oelua, Gereja Tua Loaholu.

Pengaturan zona terhadap situs-situs ini adalah dengan menentukan batas antara kegiatan budidaya dengan kawasan seputar situs, dengan menetapkannya sebagai daerah konservasi cagar budaya. Penetapan kawasan cagar budaya sebagai daerah konservasi akan membantu pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian sejarah secara berkelanjutan, karena tidak menutup kemungkinan akan ditemukan beberapa informasi yang akan memperjelas mengenai keberadaan situs-situs tersebut.

Rencana pengembangan Kawasan Adat Terpencil serta kawasan konservasi budaya dan sejarah merupakan kawasan peninggalan sejarah sebagai daya tarik maupun interaksi dengan penduduk asli/suku asli. Kawasan Adat Terpencil merupakan kawasan yang ditempati masyarakat adat dan memiliki lokasi yang terpencil. Kawasan ini seringkali merupakan kawasan yang terisolasi sehingga masyarakat adat tidak memperoleh akses pelayanan yang memadai.

Untuk pengembangan kawasan adat terpencil tersebut hendaknya diberi kemudahan pelayanan dan akses terhadap fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada beberapa kawasan, wilayahnya termasuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga untuk pengembangan yang diperlukan adalah pembinaan terhadap masyarakat tersebut dalam pengelolaan lingkungan dan *agroforestry* sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya masyarakat tidak merusak lingkungan.

Adanya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Rote Ndao, tidak menutup kemungkinan memicu berkembangnya berbagai sentra kerajinan rakyat, terutama yang potensial dapat dijual



untuk industri pariwisata, berupa atraksi metode pembuatan kerajinan dari daun lontar, kain tenun khas Rote Ndao, kerang-kerang laut, dan lain sebagainya, sehingga menarik perhatian wisatawan. Berikut arahan pengembangan kawasan strategis sosial-kultur:

- 1) Revitalisasi bentuk bangunan dan kawasan kampung adat maupun pengembangan kawasan sekitarnya secara terbatas (*buffer zone*).
- 2) Pengembangan fasilitas pendukung obyek wisata seperti hotel, pusat informasi wisata, taman parkir dan sarana pendukung wisata lainnya.
- 3) Pemantapan agenda pariwisata di Kabupaten Rote Ndao.

#### **4. Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia, adapun kawasan lindung dan pelestarian lingkungan hidup adalah:

- 1) Kawasan Suaka Margasatwa Harlu yang merupakan habitat Kakatua Jambul Kuning dan Taman Buru Pulau Ndana yang merupakan habitat rusa sebagai salah satu hewan endemik.
- 2) Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Laut Sawu (Zona 3) seluas 2.953.964,37 Ha, ditetapkan sebagai kawasan suaka alam laut yang memiliki kawasan ekosistem terumbu karang seluas 714 Ha, vegetasi mangrove 1.232 Ha, padang lamun 1.429,6 Ha
- 3) Kawasan pantai berhutan bakau di Kabupaten Rote Ndao sebesar 7.157,23 Ha yang tersebar di seluruh wilayah pesisir Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao
- 4) Taman wisata alam dan taman wisata alam laut di Kabupaten Rote Ndao yang terdiri dari Pulau Ndana, Pantai Nemberala, Pantai Bo'a, Batu Termanu, Pantai Leli, Pulau Do'o, Pantai Mulut Seribu, Pantai Tiang Bendera, Pemandian Oemau, Pantai Vei, Pantai Tesabela, Pantai Tongga, Pantai Oeseli, dan Danau Oendui.

Adapun arahan pengelolaan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup, yaitu:

- 1) Menjaga dan melindungi flora dan fauna yang terdapat Kawasan Suaka Margasatwa Harlu dan Taman Buru di Pulau Ndana.
- 2) Mengusahakan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan berkelanjutan.
- 3) Mengembangkan dan mengelola wisata alam secara produktif dan berkelanjutan.
- 4) Melakukan pemantauan habitat, serta mengembangkan rencana penelitian untuk menjelaskan permasalahan kunci pengelolaan kawasan.
- 5) Terciptanya manajemen pengelolaan kawasan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan kawasan/zona tertentu dalam Taman Wisata Alam Laut secara optimal dengan memperhatikan aspek *sustainability* (kesinambungan), kelestarian, efisiensi dan keseimbangan baik dari sisi ekologi maupun sisi ekonomi.

- 6) Tertatanya kawasan ke dalam zona-zona sesuai kebutuhan dan kondisi kawasan, dimana hasil penataan serta aturan pada setiap zona tersosialisasi dan terlaksana pemanfaatannya.
- 7) Terbentuk dan tersusunnya suatu struktur organisasi pengelolaan bersama (*collaborative management*) dengan pelibatan seluruh pihak yang berkepentingan sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya masing-masing.
- 8) Melindungi, menjaga dan merehabilitasi ekosistem dan sumber daya alam hayati berupa flora dan fauna yang diimbangi oleh kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- 9) Koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain: instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat setempat, lembaga-lembaga penelitian nasional/internasional, Universitas, BUMN, BUMS, BUMD dan LSM nasional/internasional.
- 10) Mengembangkan fasilitas untuk pendidikan konservasi sumber daya alam dan meningkatkan kesadaran mengenai masalah konservasi kawasan.
- 11) Menciptakan suatu sistem pengelolaan mandiri dan berkelanjutan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam hal pengelolaan, dan para pihak (seperti masyarakat lokal dan sektor wisata) guna memberikan kontribusi yang positif terhadap pengelolaan suaka margasatwa.

## **5. Kawasan Strategis Perbatasan**

Kawasan strategis perbatasan yang terdapat di Kabupaten Rote Ndao merupakan Kawasan perbatasan Laut Wilayah Nusa Tenggara Timur dengan Australia, meliputi wilayah laut Kabupaten Rote Ndao, Pulau Rote dan Pulau Ndana. Wilayah Rote Ndao sebagai perbatasan antar negara menempati posisi yang strategis berupa kawasan pendukung strategis perbatasan yang dalam perannya merupakan kawasan pendukung strategi nasional laut dengan Negara Australia. Dari sisi geo-politik letak dan kedudukan Kabupaten Rote Ndao sebagai kabupaten terluar, gerbang terselatan yang berhadapan langsung dengan Negara Australia menyebabkan Kabupaten Rote Ndao perlu dijaga sebagai perwujudan kedaulatan NKRI.

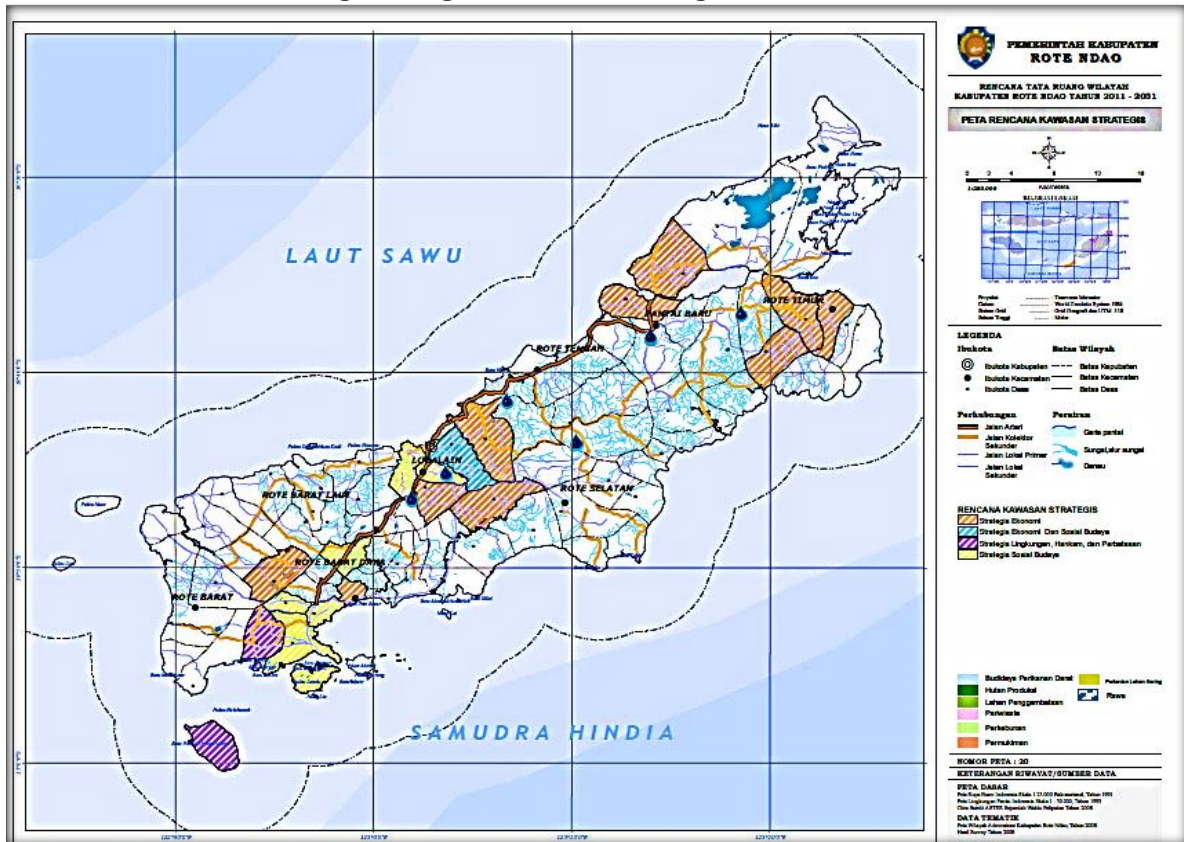
Dari sisi geo-ekonomi letak yang strategis ini memungkinkan perkembangan ke depan akan menjadi pilihan yang terbaik sebagai pintu gerbang masuk/keluar (*entry and exit gate*) orang, barang dan jasa tidak saja pada arus lokal, regional dan nasional tetapi dalam lingkup global.

Untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan negara, pengembangan fungsi dan potensi antara lain:

- 1) Pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;
- 2) Pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
- 3) Simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; serta
- 4) Pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

Rencana Penetapan Kawasan Strategis di Kabupaten Rote Ndao akan disajikan pada Gambar 2.5 berikut.

**Gambar 2.5**  
**Peta Pengembangan Kawasan Strategis di Kab. Rote Ndao**



Sumber : RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013-2033

### 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana, Kerentanan dan Ancaman Bencana Iklim

Kerentanan merupakan gambaran atau *representative* suatu wilayah atau lokasi yang menyatakan kondisi wilayah yang memiliki suatu tingkat sensitivitas tertentu pada aset-aset penghidupan dan kehidupan yang dimiliki yang dapat mengakibatkan resiko bencana, sedangkan resiko iklim adalah potensi dampak negatif perubahan iklim yang merupakan interaksi antara kerentanan, keterpaparan dan bahaya. Di Kabupaten Rote Ndao terdapat 6 desa yang memiliki kerentanan dan resiko iklim sangat tinggi (sangat rentan) di antaranya Desa Lalukoen, Desa Lekik, Desa Oelasin, Desa Landu dan Desa Bebalain.

Kerentanan dan perubahan iklim mengakibatkan tingginya resiko bencana yang merupakan bahaya yang dapat menimbulkan potensi kerugian bagi manusia atau kerusakan tertentu bagi lingkungan atau infrastruktur. Variasi curah hujan merupakan salah satu elemen yang berkaitan dengan berbagai kejadian bencana seperti kekeringan, banjir dan longsor. Pengaruh iklim yang ekstrim pada musim hujan menyebabkan banjir, sedangkan pada musim kemarau menyebabkan kekeringan, kejadian iklim yang ekstrim ini berkaitan dengan kejadian *El Nino* yang berhubungan dengan kekeringan dan *La Nina* berhubungan dengan tingginya curah hujan yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor.

Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana Indonesia tahun 2018 Kabupaten Rote Ndao termasuk dalam kabupaten dengan Indeks Rasio Bencana (IRB) kelas sedang dengan skor 142,40.

**Tabel 2.5**  
**Indeks Resiko Bencana Per Ancaman**

No	Jenis Ancaman	Skor	Kelas Resiko
1	Bencana Banjir	21,60	Tinggi
2	Bencana Gempa Bumi	21,60	Tinggi
3	Bencana Tsunami	12,80	Tinggi
	Bencana Tanah Longsor	24,00	Tinggi
4	Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan	24,00	Tinggi
5	Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi	8,80	Sedang
6	Bencana Kekeringan	16,00	Sedang
7	Bencana Cuaca Ekstrim	13,60	Sedang

Sumber : IRBI 2018

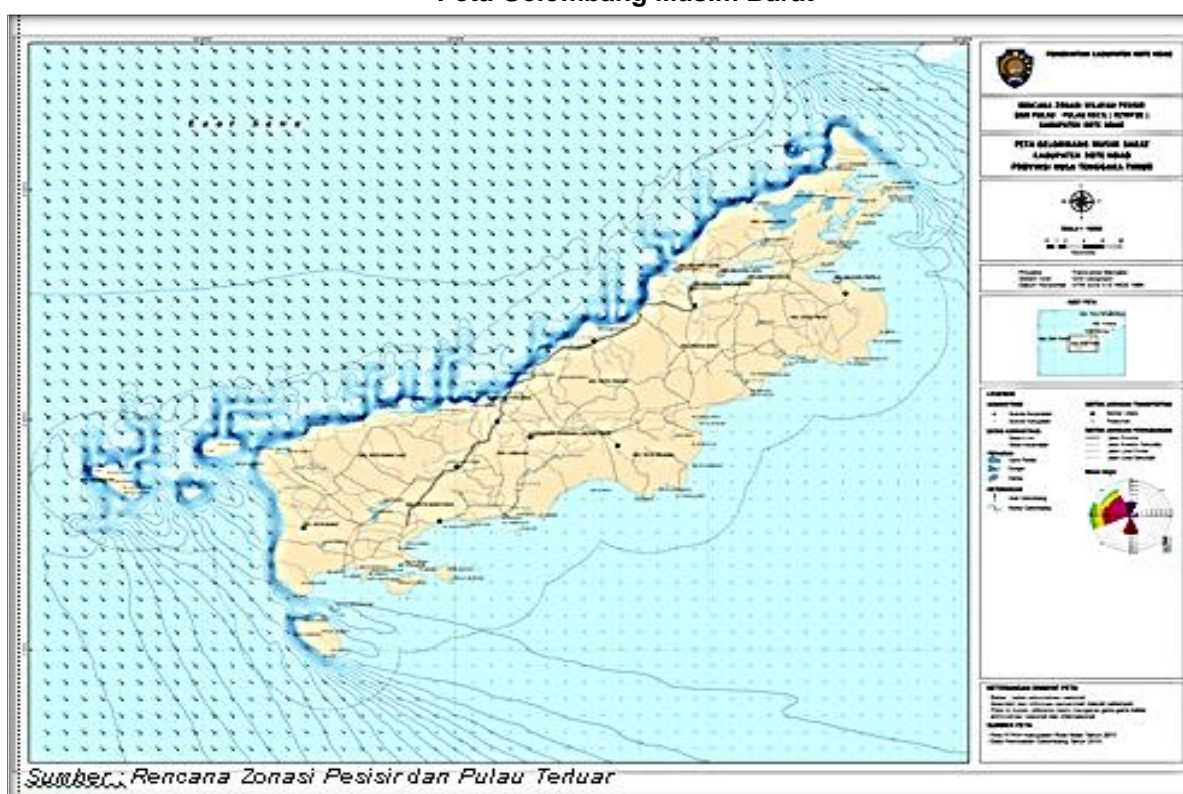
Kabupaten Rote Ndao termasuk kabupaten yang rawan terhadap bencana alam khususnya bencana banjir, longsor, gempa bumi dan kebakaran hutan.

- a. Bahaya banjir, curah hujan yang berlebihan pada musim penghujan, serta kemiringan lahan yang relatif datar semakin memperlambat pengaliran air ke laut. Bahaya banjir berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Rote Ndao, potensi kerentanan terbesar terjadi di Desa Busalangga Barat, Desa Dalek Esa, Desa Lekunik, Desa Mundek, Desa Holoama, Desa Lalukoen, Desa Lidor, Desa Meoain, Kelurahan Mokdale, Desa Oebafok, Desa Oehandi, Desa Oelua, Desa Oenitas, Desa Sanggaoen, Desa Temas, Desa Helebeik, Desa Oematamboli, Desa Kolobolon, Desa Loleoen, Desa Bebalain, Desa Suelain, dan Desa Kuli.
- b. Bahaya kekeringan, terjadi akibat curah hujan di bawah nilai tertentu umumnya berpotensi terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao yang berakibat lahan petani sulit mendapatkan air. Wilayah dengan potensi kekeringan dengan skala tinggi sampai skala sangat tinggi dapat terjadi di Desa Serubeba, Kelurahan Londalusi, Desa Hundihopo, Desa Faifua, Desa Mukekuku, Desa Batefalu, Desa Pukuafu, Desa Tenalai, Desa Daiama, Desa Loleoen, Desa Bebalain, dan Desa Suelain.
- c. Bahaya tanah longsor, potensi terbesar terjadi di Kecamatan Lobalain Kelurahan Metina, Kelurahan Namodale, Desa Oeleka, Desa Helebeik, Desa Kuli, Desa Kolobolon, Desa Suelain, Desa Bebalain, Desa Oematamboli, dan Desa Loleoen. Kecamatan Rote Tengah pada Desa Maubesi, Desa Lidabesi, Kelurahan Onatali, Desa Suebela dan Desa Limakoli. Kecamatan Rote Selatan pada Desa Tebole dan Desa Dodaek. Kecamatan Pantai Baru di Desa Nusakdale, Kecamatan Rote Barat Laut pada Desa Oetutulu dan Kecamatan Rote Barat Daya pada Desa Mbokak. Gerakan tanah terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao.
- d. Bahaya Gelombang ekstrim terjadi hampir sepanjang tahun, hal ini dipengaruhi oleh pola angin dan pola tekanan udara. Gelombang ekstrim menjadi salah satu faktor utama fluktuatifnya harga barang dan jasa serta kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Rote Ndao. Pada periode bulan Nopember sampai bulan Pebruari umum terjadi gelombang musim barat, yaitu gelombang dari barat yakni Samudera Hindia memasuki perairan Laut Sawu dan menerpa langsung daerah pesisir Kabupaten Rote Ndao yang



berhadapan dengan Samudera Hindia meliputi desa-desa di Kecamatan Landu Leko bagian utara yaitu Desa Pukuafu, Desa Sotimori, Desa Lifuleo, Desa Bolatena. Kecamatan Pantai Baru pada Desa Tesabela dan Desa Tunganamo. Kecamatan Rote Tengah pada Desa Nggodimeda, Desa Siomeda, Kelurahan Onatali, Desa Lidabesi dan Desa Maubesi. Kecamatan Lobalain pada Kelurahan Metina, Kelurahan Namodale, dan Desa Baadale. Kecamatan Rote Barat Laut pada Desa Daudolu, Desa Tualima, Desa Hundihuk, Desa Oelua, Desa Holulai, Desa Oebela, Desa Tasilo dan Desa Boni. Kecamatan Rote Barat pada Desa Mbueain, Desa Oelolot, Desa Sedeeoen, Desa Nemberala dan Desa Oenggaut. Kecamatan Ndao Nuse pada Desa Mbali Lendeiki, Desa Anarae dan Desa Mbuilombo. Kecamatan Rote Barat Daya pada Desa Oeseli. Periode gelombang musim barat umumnya terjadi pada bulan Desember sampai bulan Februari.

**Gambar 2.6**  
**Peta Gelombang Musim Barat**



Sumber : RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013-2033

Pada bulan April sampai dengan bulan November umumnya terjadi gelombang musim timur, merupakan gelombang dari selatan yakni Samudera Hindia memasuki Laut Sawu dan menerpa langsung daerah pesisir yang berhadapan dengan Samudera Hindia yakni di selatan dan timur Kabupaten Rote Ndao. Gelombang musim timur juga merupakan pertanda datangnya musim kemarau. Tingginya pola tekanan dan kecepatan angin menyebabkan gelombang timur dan selatan yang melanda Kecamatan Landu Leko pada Desa Pukuafu, Desa Tenalain, Desa Daiama, Kelurahan Londalusi, Desa Faifua, Desa Mukekuku, dan Desa Batefalu. Kecamatan Pantai Baru pada Desa Oeledo, Desa Sonimanu, Desa Lenupetu, Desa Batulilok, dan Desa Nusakdale. Kecamatan Rote Selatan pada Desa Tebole, Desa Dodaek dan Desa Inaoe. Kecamatan Lobalain pada Desa Kolobolon, Desa Bebalain, Desa Kuli Aisele, dan Desa Kuli. Kecamatan Rote Barat Daya pada Desa Fuafuni,

Desa Dolasi, Desa Sakubatun, Desa Oetefu, Desa Oebou, Desa Oeseli dan Desa Landu. Kecamatan Rote Barat pada Desa Boa, Kecamatan Ndao Nuse pada Desa Mbali Lendeiki, Desa Ndaonuse dan Desa Mbiulombo.

**Gambar 2.7**  
**Peta Gelombang Musim Timur**



Sumber : Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau Terluar  
Sumber : RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013-2033

#### 2.1.4 Kondisi Demografi

##### 1. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Rote Ndao

Penduduk sebagai salah satu komponen sistem perwilayahan memiliki peran yang penting sebagai subyek pemanfaatan ruang. Selain sebagai subyek pemanfaatan ruang, penduduk juga memainkan peran sebagai pelaku perubahan perkembangan suatu wilayah yang dinamis karena semakin tinggi kualitas sumber daya kependudukan, semakin berkualitas pula hasil pembangunan yang dicapai.

Jumlah penduduk Kabupaten Rote Ndao berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 adalah 143.764 jiwa, jika dibandingkan dengan hasil proyeksi sensus penduduk pada akhir tahun 2019 adalah 172.104 jiwa atau mengalami penurunan sebanyak 28.340 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Rote Ndao selama periode tahun 2010-2019 sebesar 30,33 %, sedangkan Laju Pertumbuhan penduduk tahun per tahun tetap berada pada posisi 3,80 % pada tahun 2018-2019. Distribusi penduduk per kecamatan, dapat dilihat bahwa kecamatan dengan penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Lobalain sejumlah 35.577 jiwa, selanjutnya Kecamatan Rote Barat Daya sejumlah 28.329 jiwa, dan Kecamatan Rote Barat Laut sejumlah 18.578 jiwa. Penyebaran penduduk pada setiap kecamatan juga tidak merata. Pada tahun 2019 luas wilayah Kabupaten Rote Ndao sekitar 1.280,10 km<sup>2</sup>, setiap km<sup>2</sup> ditempati penduduk sebanyak 312 orang dan kecamatan terpadat adalah Kecamatan Ndao Nuse dengan jumlah penduduk hanya 4.434 jiwa, luas wilayah 14.21 km<sup>2</sup> dan tingkat kepadatan sebanyak

2,89 jiwa/km<sup>2</sup>. Perkembangan penduduk, kepadatan penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:

**Tabel 2.6**  
**Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
1.	Rote Barat Daya	28.329	114,56	247
2.	Rote Barat Laut	18.578	80,08	188
3.	Lobalain	35.577	145,68	244
4.	Rote Tengah	11.565	162,44	71
5.	Rote Selatan	7.424	73,35	101
6.	Pantai Baru	17.793	176,14	101
7.	Rote Timur	17.356	110,86	157
8.	Landu Leko	6.517	194,06	34
9.	Rote Barat	10.658	116,23	92
10.	Ndao Nuse	4.434	14,21	2,89
11.	Loaholu	14.000	76,66	188
Jumlah		172.104	1.280,00	312

Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2020

## 2. Sex Ratio dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

*Sex ratio* digunakan untuk mengukur komposisi jenis kelamin. Data ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, utamanya yang berkaitan dengan kesetaraan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan.

Dari jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 143.764 jiwa, jumlah laki-laki sebesar 72.428 jiwa dan perempuan sebesar 71.336 jiwa sehingga *sex ratio* sebesar 102. Dengan demikian, terdapat 102 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Gambaran lebih lanjut mengenai jumlah penduduk sebagaimana terdapat pada tabel 2.7 berikut:

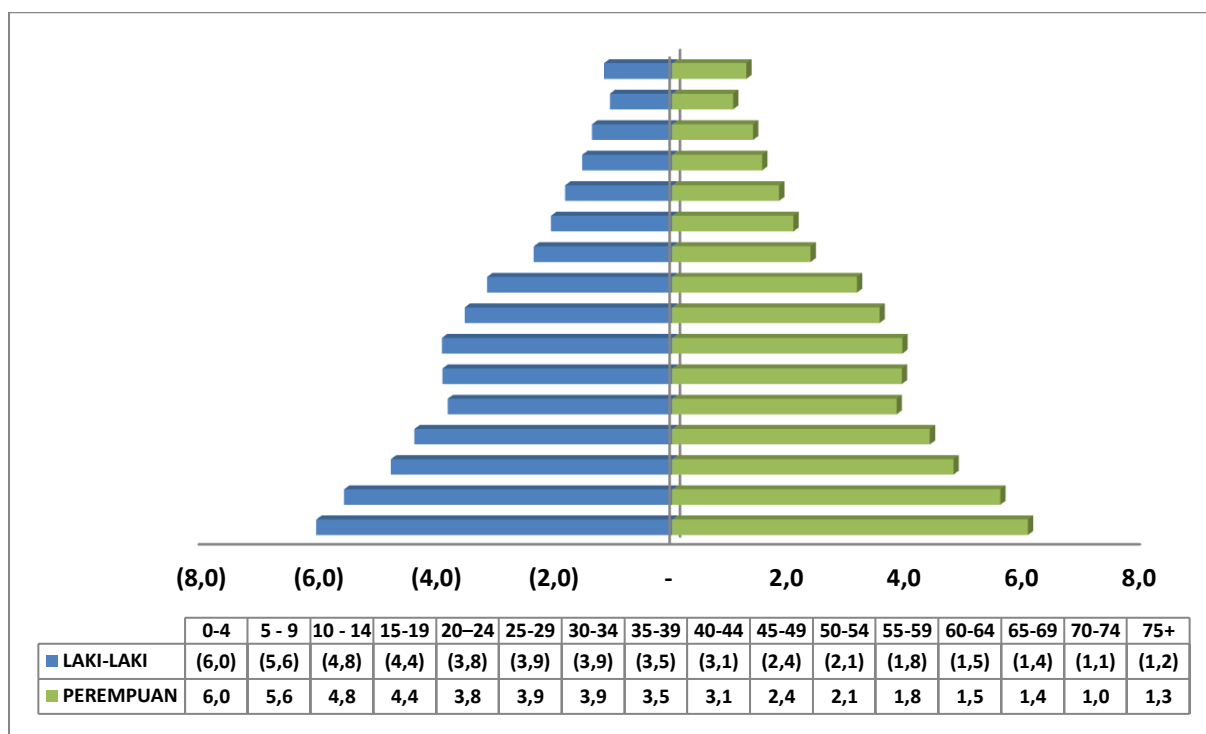
**Tabel 2.7**  
**Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin**  
**Kabupaten Rote Ndao 2015-2020**

No.	Uraian	Tahun (Jiwa)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Laki – Laki	75.292	78.435	81.207	84.283	87.380	72.428
2.	Perempuan	72.486	75.436	78.407	81.524	84.724	71.336
3.	Jumlah Penduduk	147.779	153.792	159.614	165.807	172.104	143.764
4.	Sex Ratio (%)	104	104	104	103	103	102

Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2016-2021

Dari piramida penduduk seperti yang ditunjukkan Gambar 2.8 menunjukkan bahwa Komposisi penduduk Kabupaten Rote Ndao didominasi oleh penduduk muda dan dewasa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk kelompok usia 0-14 tahun berjumlah 32,8% dari total jumlah penduduk Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2019 dan kelompok usia 15-64 tahun sebagai usia potensial atau usia kerja dengan porsi sebesar 60,8% dan usia >64 tahun mengambil porsi hanya 7,2%. Namun jika diamati lebih dalam akan terlihat bahwa untuk kelompok usia 0-14 tahun menempati posisi yang dominan dalam piramida penduduk dibandingkan kelompok penduduk usia 15 tahun ke atas.

**Gambar 2.8**  
**Piramida Penduduk Kab. Rote Ndao (%) Tahun 2019**



Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2020

Bentuk piramida ini menunjukkan bahwa angka kelahiran lebih tinggi dari angka kematian atau pertumbuhan penduduk lebih cepat. Oleh karena itu penduduk usia muda lebih mendominasi dari pada penduduk usia tua.

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau berdasarkan aspek sosial maupun ekonomi. Semakin baik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat maka dapat diasumsikan masyarakat semakin sejahtera. Kesejahteraan masyarakat akan mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing. Indikator kesejahteraan masyarakat yang digunakan di sini terdiri dari aspek ekonomi (PDRB, inflasi, kemiskinan); aspek sosial (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan); serta seni budaya dan olahraga.

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 1. Pertumbuhan PDRB

Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) Kabupaten Rote Ndao tahun 2015 sebesar Rp. 2.161.712.700.000 meningkat selama enam tahun sebesar Rp. 168.321.951.667 dengan rata-rata peningkatan Rp.28.053.658.611 atau 1,30% per tahun, hingga pada tahun 2020 mencapai Rp. 3.171.644.410.000,- Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan, pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp.1.933.396.130.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.365.913.820.000,- dari tahun 2015 sebesar Rp.1.567.482.310.000,- dengan rata-rata peningkatan Rp.60.985.636.667 pertahun atau 3,89% per tahun.

Berdasarkan lapangan usaha, PDRB Kabupaten Rote Ndao terbagi atas 17 sektor usaha, dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi perekonomian



di Kabupaten Rote Ndao. Kontribusi lapangan usaha terbesar sektor usaha terhadap struktur PDRB (atas dasar harga berlaku) di Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 47,63%, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 13,42%, disusul sektor jasa pendidikan 13,16%. Sedangkan sektor usaha dengan kontribusi terkecil dalam pembentukan struktur PDRB (atas dasar harga berlaku) adalah sektor pengadaan listrik dan gas dan sektor jasa perusahaan sebesar 0,05%, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,09%, dan sektor jasa lainnya sebesar 0,10%. Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) selama enam tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:



**Tabel 2.8**  
**PDRB atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 (dalam ribuan)**

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	743,277,580	774,317,500	812,038,060	853,964,700	889,562,060	899,722,010
2	Pertambangan dan Penggalian	12,347,130	13,166,300	13,939,610	14,414,200	15,013,6200	15,347,130
3	Industri Pengolahan	20,228,750	21,118,000	22,295,250	23,190,200	24,877,850	23,914,770
4	Pengadaan Listrik dan Gas	910,100	1,034,640	1,044,210	1,115,730	1,129,570	1,418,010
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,743,620	1,806,040	1,877,410	1,953,640	2,019,810	2,135,040
6	Konstruksi	86,909,470	93,355,330	97,407,890	102,132,620	106,012,930	95,513,080
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	125,877,510	133,851,860	139,208,880	145,603,970	155,186,120	145,672,480
8	Transportasi dan Pergudangan	49,327,760	52,828,870	55,556,100	58,352,920	62,001,620	60,570,950
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,603,120	2,792,630	3,049,180	3,396,180	3,503,040	3,219,780
10	Informasi dan Komunikasi	84,790,920	87,242,110	91,890,050	97,029,480	102,962,140	116,962,640
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,849,890	12,831,800	13,567,890	13,831,660	14,354,560	15,779,310
12	Real Estate	18,033,600	18,534,680	19,513,570	20,625,930	20,719,540	20,633,340
13	Jasa Perusahaan	1,431,180	1,450,810	1,475,250	1,502,260	1,524,690	1,450,810
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	208,364,100	221,890,350	238,169,290	255,795,500	276,440,160	272,872,100
15	Jasa Pendidikan	144,508,960	153,403,430	165,301,490	174,955,710	184,817,960	187,744,680
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53,510,130	56,869,270	59,364,390	61,747,630	65,276,320	69,014,460
17	Jasa lainnya	1,768,490	1,821,970	1,919,690	2,049,000	2,177,860	1,966,220
	<b>PDRB</b>	<b>1,567,482,310</b>	<b>1,648,315,600</b>	<b>1,737,618,220</b>	<b>1,831,661,340</b>	<b>1,927,579,85</b>	<b>1,933,396,130</b>

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

**Tabel 2.9**  
**PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 (dalam ribuan)**

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,039,388,350	1,146,128,600	1,245,999,150	1,369,432,380	1,478,604,180	1,510,563,220
2	Pertambangan dan Penggalian	17,795,360	19,369,990	20,523,180	21,489,170	22,421,450	23,016,940
3	Industri Pengolahan	27,901,310	30,504,060	33,223,710	35,691,850	38,877,300	38,549,100
4	Pengadaan Listrik dan Gas	758,970	1,020,490	1,167,660	1,287,290	1,304,050	1,642,090
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,100,150	2,200,650	2,302,260	2,419,590	2,573,930	2,737,360
6	Konstruksi	111,794,440	128,711,580	137,959,290	147,140,720	157,567,400	141,798,150
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	159,109,740	175,191,700	186,050,200	198,828,170	218,216,300	211,665,070
8	Transportasi dan Pergudangan	70,050,540	79,058,400	87,184,260	96,139,540	104,703,900	100,849,460
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,196,610	4,779,010	5,355,930	6,213,690	6,494,270	5,967,880
10	Informasi dan Komunikasi	89,242,150	95,970,410	102,227,500	110,306,350	117,750,130	132,742,150
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	14,897,900	16,783,630	18,236,370	19,280,330	20,423,300	22,305,780
12	Real Estate	25,217,670	27,777,970	29,697,260	31,500,970	31,925,500	31,541,060
13	Jasa Perusahaan	2,027,940	2,293,330	2,469,730	2,588,490	2,795,420	1,711,350
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	270,456,010	300,757,620	341,003,240	381,530,780	432,477,670	425,743,380
15	Jasa Pendidikan	256,488,350	296,626,810	338,832,270	371,382,090	405,280,170	417,334,310
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	67,709,470	74,846,130	80,023,800	85,397,510	91,063,420	100,285,750
17	Jasa lainnya	2,577,740	2,802,170	3,026,620	3,271,220	3,505,290	3,191,360
	<b>PDRB</b>	<b>2,161,712,700</b>	<b>2,404,822,550</b>	<b>2,635,282,430</b>	<b>2,883,900,160</b>	<b>3,135,983,680</b>	<b>3,171,644,410</b>

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

**Tabel 2.10**  
**Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

No	Lapangan Usaha	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	48.08	3.92	47.66	4.14	47.28	4.87	47.49	5,16	47.15	4,17	4.87	47.49
2	Pertambangan dan Penggalian	0.82	4.95	0.81	4.93	0.78	5.87	0.75	3.40	0.71	4.16	5.87	0.75
3	Industri Pengolahan	1.29	3.77	1.27	4.00	1.26	5.57	1.24	4.01	1.24	7.28	5.57	1.24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	18.00	0.04	13,68	0.04	0.93	0.04	6.85	0.04	1.24	0.93	0.04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.10	4.68	0.09	3.58	0.09	3.95	0.08	4.06	0.08	3.39	3.95	0.08
6	Konstruksi	5.17	6.03	5.35	7.42	5.24	4.34	5.10	4.85	5.02	3.80	4.34	5.10
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.36	5.91	7.29	6.34	7.06	4.00	6.89	4.59	6.96	6.58	4.00	6.89
8	Transportasi dan Pergudangan	3.24	7.13	3.29	7.52	3.31	5.16	3.33	5.03	3.34	6.25	5.16	3.33
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.19	2.73	0.20	4.21	0.20	9.19	0.22	11.38	0.21	3.15	9.19	0.22
10	Informasi dan Komunikasi	4.13	2.62	3.99	2.89	3.88	5.33	3.82	5.59	3.75	6.11	5.33	3.82
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.69	3.91	0.70	8.29	0.69	5.74	0.67	1.94	0.65	3.78	5.74	0.67
12	Real Estate	1.17	1.83	1.16	2.78	1.13	5.28	1.09	5.70	1.02	0.45	5.28	1.09
13	Jasa Perusahaan	0.09	1.48	0.10	1.37	0.09	1.68	0.09	1.83	0.09	1.49	1.68	0.09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.51	6.35	12.51	6.49	12.94	7.34	13.23	7.40	13.79	8.07	7.34	13.23
15	Jasa Pendidikan	11.87	8.92	12.33	6.15	12.86	7.76	12.88	5.84	12.92	5.64	7.76	12.88
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.13	6.71	3.11	6.28	3.04	4.39	2.96	4.01	2.90	5.71	3.16	5.73
17	Jasa lainnya	0.12	0.12	0.12	0.20	0.11	5.36	0.11	6.74	0.11	6.29	0.10	-9.72
	<b>PDRB</b>	<b>100</b>	<b>5.06</b>	<b>100</b>	<b>5.13</b>	<b>100</b>	<b>5.42</b>	<b>100</b>	<b>5.41</b>	<b>100</b>	<b>5.24</b>	<b>100.</b>	<b>0.30</b>

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020;

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha mengalami fluktuatif. Pertumbuhan lapangan usaha di dalam struktur PDRB ADHB Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 secara rata-rata paling besar disumbang oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan serta administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib, dan jasa pendidikan. Sedangkan lapangan usaha yang secara rata-rata tumbuh paling kecil adalah pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan jasa perusahaan.

Pertumbuhan sektor usaha di dalam struktur PDRB ADHK Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 secara rata-rata paling besar disumbang oleh sektor informasi dan komunikasi, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial serta sektor jasa pendidikan. Sedangkan sektor usaha yang secara rata-rata tumbuh paling kecil adalah sektor jasa perusahaan, jasa konstruksi dan jasa lainnya.

Data rata-rata pertumbuhan sektor usaha dalam PDRD Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) selama tahun 2015-2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.11**  
**Rata-rata Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)**  
**Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

No	Lapangan Usaha	Rata-rata	
		Hb	Hk
		%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40.42	11.63
2	Pertambangan dan Penggalian	1.62	4.01
3	Industri Pengolahan	1.98	4.31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.19	6.79
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.73	3.29
6	Konstruksi	5.04	5.26
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.59	5.72
8	Transportasi dan Pergudangan	3.61	5.74
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.70	5.15
10	Informasi dan Komunikasi	4.15	4.39
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.52	4.05
12	Real Estate	1.81	2.86
13	Jasa Perusahaan	0.36	1.32
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.05	8.15
15	Jasa Pendidikan	11.77	7.87
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.05	5.47
17	Jasa lainnya	0.11	1.50

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020; diolah

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menghitung kinerja perekonomian pada suatu tahun fiskal dengan menggunakan rumusan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao cenderung menurun dalam kurun waktu tahun 2015-2020. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao tercatat sebesar 5,05%, mengalami penurunan sebesar 4,75% menjadi 0,30% pada tahun 2020.

Data perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Nasional selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.12**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rote Ndao**  
**dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2015-2020**

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Rote Ndao	5,05	5,13	5,48	5,65	5,24	0,30
Nusa Tenggara Timur	5,02	5,18	5,19	5,11	5,24	-0,83
Nasional	3,35	5,00	5,01	5,02	5,00	-2,01

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, BPS Prov. NTT & BPS. Nasional, Tahun 2015-2020

## 2. Inflasi

Laju inflasi merupakan kenaikan atau penurunan dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun yang merupakan salah satu indikator yang berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah. Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut berakibat pada turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang

dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Data perkembangan Inflasi Kabupaten Rote Ndao terus mengalami penurunan dari tahun 2015-2020, bahkan berada dibawah inflasi provinsi dan nasional selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.13**  
**Laju Inflasi Kabupaten Rote Ndao**  
**dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2015-2020 (%)**

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Rote Ndao	7.06	5.74	5.41	0.54	1.62	-1.50
Nusa Tenggara Timur	4.92	2.48	2.00	3,07	0,67	0,78
Nasional	3.35	3.00	3.6	3,1	2,7	1,9

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, BPS. Provinsi NTT dan BPS. Nasional, Tahun 2015-2020.

### 3. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan gambaran daya beli masyarakat sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk, artinya tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. PDRB Perkapita menggambarkan tingkat kemakmuran di suatu wilayah. PDRB Perkapita Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2015 sebesar Rp.14.357.714, meningkat 29,16% pada tahun 2020 sebesar Rp.18.544.000.

PDRB Perkapita Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2020 terus meningkat tetapi masih berada dibawah PDRB Perkapita Provinsi NTT dan PDB Perkapita Indonesia. Selengkapnya ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.14**  
**PDRB Perkapita Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur**  
**dan PDB Perkapita Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2020**

Tingkat	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Rote Ndao	14.357.714	15.467.284	17.183.484	17.623.737	18.014.000	18.544.000
Provinsi NTT	14.880.849	16.176.114	17.240.000	18.420.000	19.560.000	19.220.000
Indonesia	45.140.688	47.957.363	51.890.000	55.992.100	59.060.100	56.938.700

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, BPS Prov. NTT & BPS Nasional, Tahun 2015-2020

### 4. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0-1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih detail:

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| a) Indeks Gini < 0,3       | = ketimpangan rendah           |
| b) 0,3=< Indeks Gini <=0,5 | = ketimpangan sedang (moderat) |
| c) Indeks Gini >0,5        | = ketimpangan tinggi           |



Indeks Gini Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 sebesar 0,336 meningkat pada tahun 2019 menjadi 0,406 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 0,400. Dari data tersebut, Indeks Gini Kabupaten Rote Ndao dikategorikan dalam ketimpangan sedang (moderat).

## 5. Persentase Penduduk Miskin

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Di Kabupaten Rote Ndao, Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 2,95% dari Tahun 2015 sebesar 69,51% menjadi 72,46% pada Tahun 2020. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

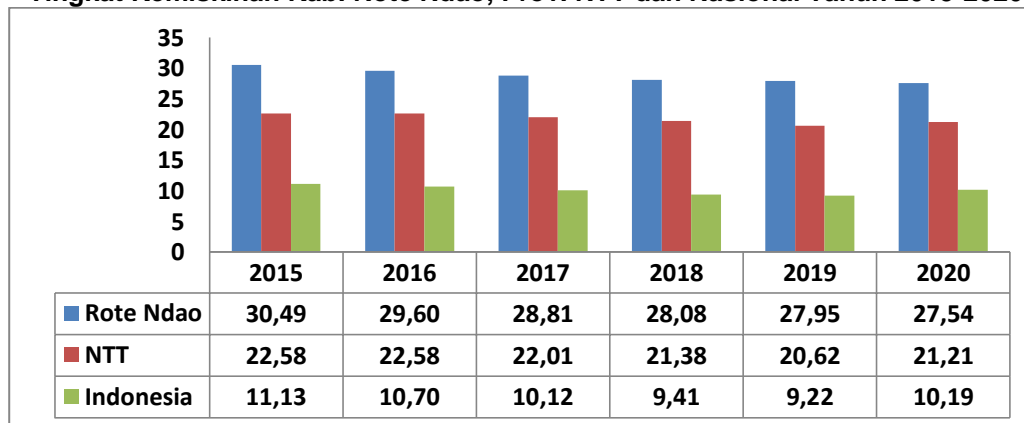
**Tabel 2.15**  
Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan (%)	69.51	70.4	71.19	71.92	72.05	72.46
2	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	45,010	45,06	45,57	46,13	47,66	48,77
3	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	255,551	279,079	283,704	287,867	305,166	322,619

Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2016-2020

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao pada Tahun 2019 sebesar 27,95% lebih tinggi 6,33% dari persentase penduduk miskin Provinsi NTT sebesar 21,21% dan tertinggal 17,35% dari persentase penduduk miskin nasional yang hanya sebesar 10,19%. Secara umum penyebab kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao dilihat dari ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari garis kemiskinan. Secara rinci angka kemiskinan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.9**  
Tingkat Kemiskinan Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dan Nasional Tahun 2015-2020

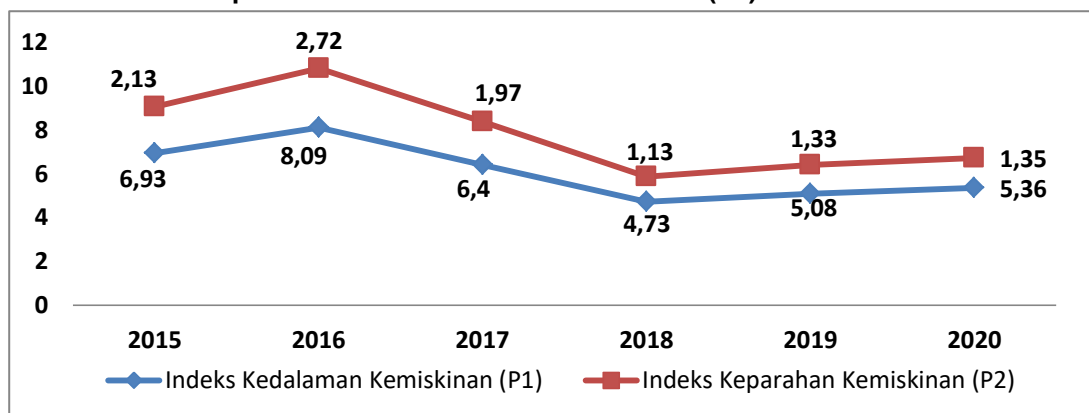


Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, BPS Prov. NTT & BPS Nasional, Tahun 2016-2020

## 6. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya menyangkut jumlah penduduk miskin dan Persentase penduduk miskin. Analisis lebih lanjut bagaimana kondisi kemiskinan yang terjadi dapat dilakukan dengan menggunakan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap Garis Kemiskinan (GK). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Sepanjang kurun waktu 2015-2020, Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Rote Ndao bersifat fluktuatif. Pada Tahun 2015 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) 6,93 berkurang hingga 4,73 pada Tahun 2018 dan kembali bertambah 5,36 pada Tahun 2020. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 2,13 pada Tahun 2015 menjadi 1,35 pada Tahun 2020 dengan penurunan sebesar 0,8 %. Secara rinci dijabarkan pada tabel di bawah:

**Gambar 2.10**  
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Rote Ndao (P2) Tahun 2015-2020



Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, BPS Prov. NTT & BPS Nasional, Tahun 2015-2020

## 7. Kemiskinan Ekstrim

Kemiskinan Ekstrim didefinisikan sebagai penduduk yang hidup dengan pendapatan dibawah Rp. 11.941 per kapita perhari atau Rp. 358.233 per kapita perbulan. Jumlah penduduk miskin ekstrim Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 sebesar 16,21% atau 28.720 jiwa, sedangkan Provinsi NTT sebesar 11,03% atau 608.900 jiwa dan Nasional sebesar 3,9% atau 10.540.000 jiwa. Kondisi kemiskinan ekstrim Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

- Sumber penghasilan utama kepala rumah tangga miskin ekstrim yang bekerja disektor Pertanian 82,58%, Industri 1,05%, lainnya 13,63% dan yang tidak bekerja 2,75%.
- Pendidikan kepala rumah tangga miskin ekstrim tidak/belum tamat SD 28,21%, tamat SD 38,83, tamat SMP 5,8% dan SMA 27,16%.

- c. Rumah tangga miskin ekstrim Kabupaten Rote Ndao yang tidak memiliki akses air minum layak sebesar 37,43% dan sanitasi sebesar 32,11%.

Sebaran rumah tangga miskin Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 pada 10 kecamatan yang tergolong dalam rumah tangga miskin ekstrim seperti tabel berikut:

**Tabel 2.16**  
**Jumlah Rumah Tangga Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020**

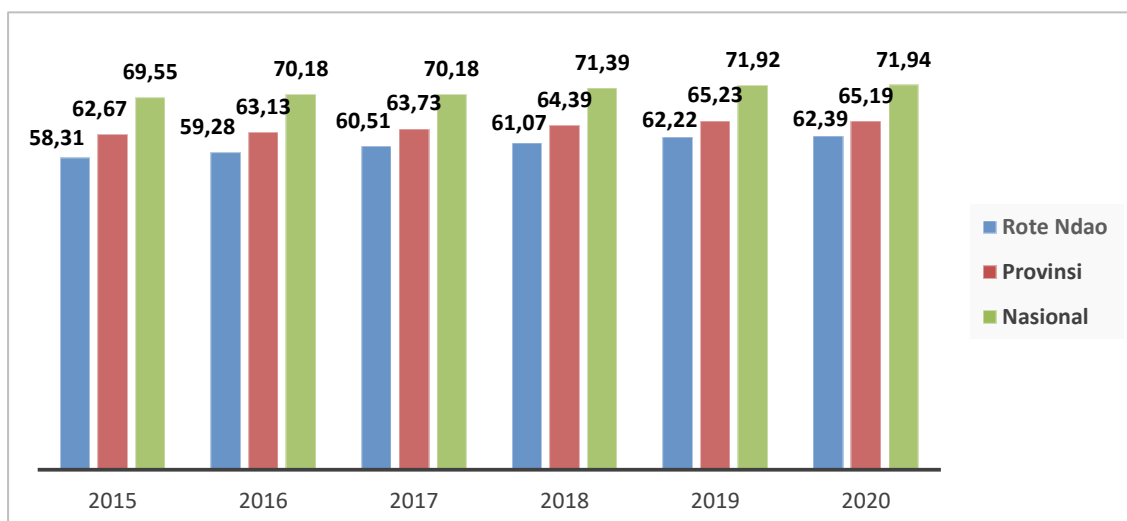
No	Kecamatan	Rumah Tangga Miskin (Ruta)	Rumah Tangga Miskin Ekstrim (Ruta)
1	Lobalain	3.421	387
2	Rote Tengah	1.043	130
3	Pantai Baru	1.775	393
4	Rote Timur	2.331	378
5	Rote Selatan	842	117
6	Rote Barat Daya	4.301	1.342
7	Rote Barat Laut	4.380	984
8	Rote Barat	1.535	202
9	Ndao Nuse	827	177
10	Landuleko	910	179
	<b>Total</b>	<b>21.365</b>	<b>4.289</b>

Sumber: Data DTKS TNP2K, Tahun 2020

## 8. Indeks Pembangunan Manusia

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi. Selama Tahun 2015-2020 angka IPM Kabupaten Rote Ndao terus mengalami peningkatan dari 58,32 pada tahun 2015 menjadi 62,39 pada tahun 2020. Angka ini menempatkan Kabupaten Rote Ndao di peringkat 8 Kabupaten dengan IPM terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas hidup penduduk Kabupaten Rote Ndao agar menjadi lebih baik lagi di tahun mendatang. Perbandingan IPM Kabupaten Rote Ndao terhadap IPM Provinsi NTT dan IPM Nasional seperti gambar di bawah ini:

**Gambar 2.11**  
**Perbandingan IPM Kab. Rote Ndao**  
**Terhadap IPM Provinsi NTT dan IPM Nasional**



Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, BPS Prov. NTT dan BPS Nasional, Tahun 2016-2021

## 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

### 1. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) menggantikan komponen angka melek huruf pada metode lama. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar. Standar HLS adalah minimal 0 tahun dan maksimal 18 tahun.

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Rote Ndao tahun 2015 adalah sebesar 12,22 tahun menjadi 13,18 tahun pada tahun 2020. Artinya, pada tahun 2020 penduduk usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Rote Ndao berpotensi menempuh pendidikan hingga Perguruan Tinggi. Perkembangan HLS dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.17**  
**Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

Kab. Rote Ndao	Harapan Lama Sekolah (Tahun)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	12,22	12,51	12,91	13,16	13,17	13,18

Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2016-2021

### 2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan, yaitu rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, yaitu tamat SD/ sederajat adalah 6 tahun, tamat SMP/ sederajat adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.18**  
**Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kab. Rote Ndao</b>	<b>6,40</b>	<b>6.67</b>	<b>6.98</b>	<b>6,98</b>	<b>7,00</b>	<b>7,59</b>
<b>Prov. Nusa Tenggara Timur</b>	<b>6,93</b>	<b>7,02</b>	<b>7,15</b>	<b>7,30</b>	<b>7,55</b>	<b>7,63</b>

*Sumber : BPS Kab. Rote Ndao dan BPS Prov. NTT, Tahun 2016-2021*

Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 adalah 7,59 tahun sedangkan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur umur 15 tahun ke atas pada tahun 2020 adalah 7,63 tahun atau secara rata-rata penduduk di Kabupaten Rote Ndao maupun di Nusa Tenggara Timur pada umumnya baru mencapai pendidikan pada kelas 8 atau tahun kedua di SMP/ sederajat.

### **3. Usia Harapan Hidup**

Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam evaluasi kinerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Usia Harapan Hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat dan diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Usia Harapan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.19**  
**Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

<b>Indikator</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
UHH Rote Ndao (tahun)	62,86	63,13	63,41	63,59	63,78	64,60
UHH NTT (tahun)	65,96	66,04	66,07	66,38	66,85	67,01

*Sumber : BPS Kab. Rote Ndao dan BPS Prov. NTT, Tahun 2016-2020*

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa usia harapan hidup penduduk Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2015, yaitu 62,86 tahun dan meningkat hingga pada tahun 2020 mencapai 64,60 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa program pemerintah di bidang kesehatan belum berpengaruh secara nyata selama lima tahun terakhir. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Rote Ndao terus meningkat, akan tetapi masih di bawah Usia Harapan Hidup Provinsi NTT yakni 67,01 tahun.

### **4. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)**

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) bukan hanya merupakan indikator kesehatan ibu dan anak, namun juga dapat menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan program kesehatan. Penilaian terhadap kinerja upaya kesehatan ibu dan bayi sangat penting untuk dilakukan karena hal ini merupakan salah satu indikator yang peka dalam menggambarkan kesejahteraan negara dan daerah.

AKI adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42



hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Indikator AKI secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan.

AKB adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi.

Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya bidang kesehatan.

**Tabel 2.20**  
**Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)**  
**di Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun 2015-2020**

**Angka Kematian Ibu (AKI)**

2015	2016	2017	2018	2019	2020
7 kasus (298 per 100.000 KH)	9 kasus (376 per 100.000 KH)	3 kasus (125 per 100.000 KH)	4 kasus (189 per 100.000 KH)	5 kasus (208 per 100.000 KH)	5 kasus (170 per 100.000 KH)
<b>Angka Kematian Bayi (AKB)</b>					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
19 kasus (8 per 1.000 KH)	19 kasus (8 per 1.000 KH)	20 kasus (8,38 per 1.000 KH)	42 kasus (19, 92 per 1.000 KH)	46 kasus (19 ,21 per 1.000 KH)	57 kasus (19,46 per 1.000 KH)

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, Tahun 2015-2020*

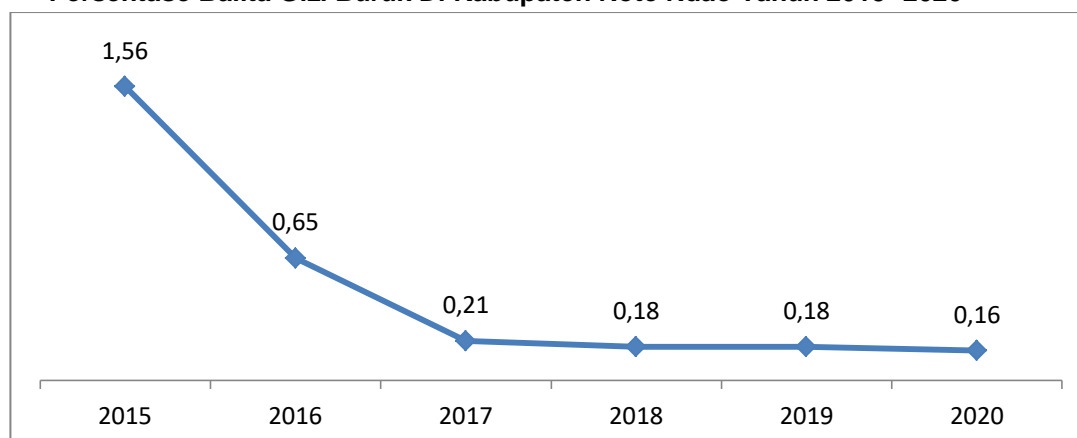
Pada tabel di atas tampak bahwa sejak tahun 2015-2020 AKI tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu tercatat 9 kasus kematian ibu dengan AKI 376 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab tingginya AKI adalah karena pertolongan persalinan masih dilakukan oleh dukun bersalin. Kondisi ini diperberat dengan adanya faktor risiko 3 Terlambat, yaitu terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk/transportasi dan terlambat menangani di fasilitas kesehatan dan 4 Terlalu, yaitu melahirkan terlalu muda (dibawah 20 tahun), terlalu tua (diatas 35 tahun), terlalu dekat (jarak melahirkan kurang dari 2 tahun) dan terlalu banyak (lebih dari 4 kali).

Sejak tahun 2015-2020 kematian bayi tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu tercatat 57 kasus kematian dengan AKB sebesar 19,46 per 1000 kelahiran hidup. Penyebab utama kematian bayi adalah asfiksia. Ini juga merupakan penyebab yang paling utama di Indonesia. Asfiksia adalah kondisi saat bayi kekurangan oksigen sebelum atau selama kelahiran. Ini mengakibatkan bayi sulit bernafas dan mengalami perlambatan pada detak jantung.

## 5. Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi (*malnutrisi*), atau dengan kata lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat, dan kalori. Gizi buruk merupakan bentuk terparah akibat kurang gizi menahun. Selain akibat kurang mengkonsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang mengakibatkan gangguan pencernaan atau penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh. Kelaparan yang lama bisa berujung kepada status gizi buruk. Masalah gizi buruk merupakan sindrom kemiskinan yang erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga serta juga berkaitan dengan aspek pengetahuan dan perilaku yang kurang mendukung pola hidup sehat. Perkembangan balita Gizi buruk tahun 2015-2020 disajikan dalam gambar berikut:

**Gambar 2.12**  
**Persentase Balita Gizi Buruk Di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015- 2020**



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

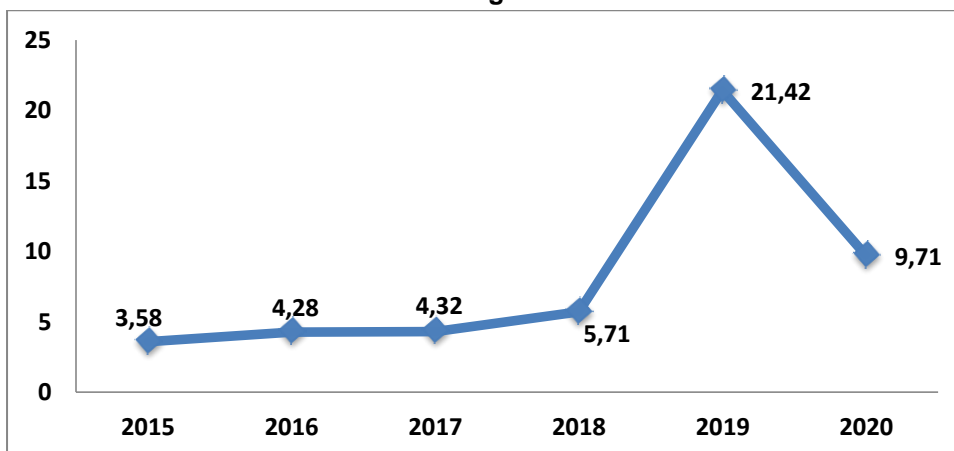
Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa Persentase Balita gizi buruk di Kabupaten Rote Ndao mengalami penurunan. Pada Tahun 2015 sebesar 1.56% menjadi 0.16% pada tahun 2020. Penyebab terjadinya kasus gizi buruk diantaranya ekonomi keluarga, makanan, pola asuh anak, sanitasi, perilaku masyarakat yang belum sesuai dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta keterbatasan anggaran dalam pencegahan dan penanganan kasus. Anak dengan kondisi gizi buruk berpotensi menderita *stunting*.

## 6. Balita Gizi Kurang

Seperti halnya Balita gizi buruk, kecenderungan serupa juga diperlihatkan oleh prevalensi balita gizi kurang. Keadaan status gizi Balita di Kabupaten Rote Ndao dipantau berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan program perbaikan gizi masyarakat yang

tercermin dalam penimbangan Balita setiap bulan di Posyandu. Perkembangan Balita Gizi Kurang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 tersaji dalam gambar berikut:

**Gambar 2.13**  
**Persentase Balita Gizi Kurang Tahun 2015-2020**



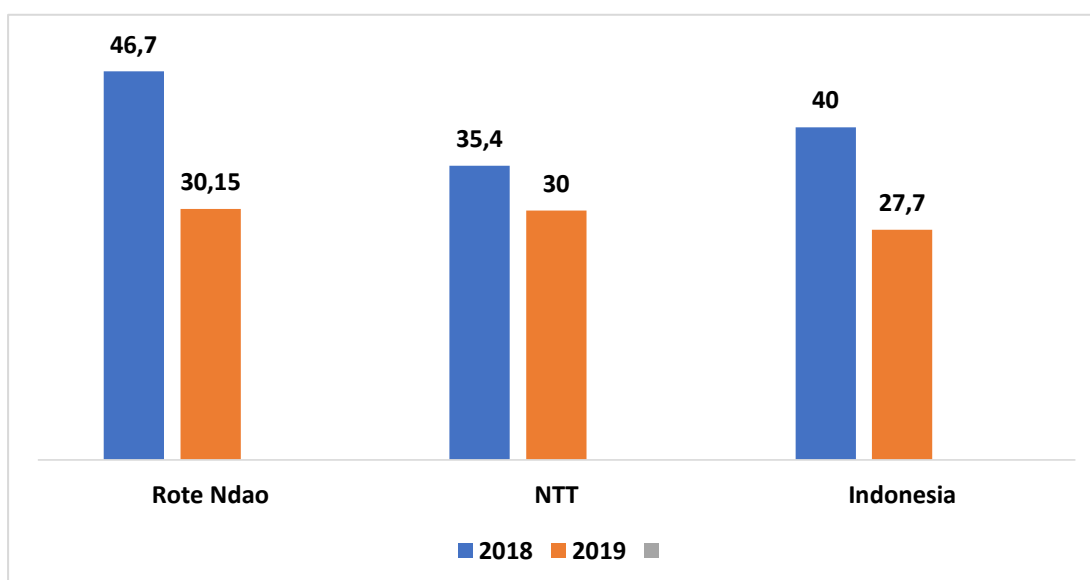
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao Tahun 2015-2020

Pada gambar di atas tampak bahwa capaian Balita gizi kurang meningkat pada tahun 2019 oleh karena meningkatnya cakupan layanan Balita di Posyandu. Ini merupakan dampak dari penanganan *stunting* yang sistematis dan terstruktur di Kabupaten Rote Ndao sebagai akibat dari tingginya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam mengatasi *stunting* sehingga banyak Balita yang hadir di Posyandu untuk dilayani. Ini menyebabkan terjadinya peningkatan persentase Balita gizi kurang di Kabupaten Rote Ndao dalam dua tahun terakhir. Penemuan terhadap Balita gizi kurang di lapangan merupakan hal yang baik untuk mencegah serta menuntaskan *stunting* di Kabupaten Rote Ndao. Capaian Balita gizi kurang menurun menjadi 9,71% pada tahun 2020 karena intervensi lintas sektor pada penanganan *stunting* sejak tahun 2019 juga berdampak perbaikan status Balita gizi kurang pada tahun 2020.

## 7. Stunting

*Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak Balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Kondisi gagal tumbuh pada anak Balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, pola asuh, dan lingkungan (ketersediaan sanitasi dan akses air bersih). Prevalensi *stunting* Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 berdasarkan Riskesdas 2018 sebesar 46,7, lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur 40,3 dan Nasional 40. Prevalensi *stunting* Kabupaten Rote Ndao terus menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2019 prevalensi *stunting* menurun menjadi 30,15%, selisih 0,15% dibandingkan prevalensi *stunting* provinsi NTT dan 2,45% dengan nasional.

**Gambar 2.14**  
**Prevalensi Stunting Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dan Nasional Tahun 2018-2019**



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Tahun 2018-2019

Sejak ditetapkan sebagai Kabupaten Locus *Stunting* pada tahun 2018, berbagai pendekatan penanganan *stunting* terus dilakukan dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan *stunting*. Pendekatan pencegahan *Stunting* dilakukan melalui Gerakan RevOlusi TERpadu (**ROTE**) **CERDAS** yaitu:

- C : Cek kehamilan secara rutin dan bersalin di faslitas kesehatan (revolusi KIA)
- E : Enyahkan asap rokok dan ingat tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri
- R : Rutin ke Posyandu untuk pantau pertumbuhan dan perkembangan balita
- D : Dekatkan ibu dan anak pada pangan lokal serta nutrisi yang cukup (gemar makan ikan/revolusi laut)
- A : Ayo imunisasi balita secara lengkap dan selalu gunakan jamban sehat
- S : Selalu beri ASI eksklusif

Pendekatan CERDAS dalam penanganan *stunting* merupakan salah satu pendekatan penanganan *stunting* di Kabupaten Rote Ndao yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rote Ndao No. 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi. Pendekatan ini merupakan payung terhadap berbagai inovasi dalam mencegah dan menangani *stunting* di Kabupaten Rote Ndao.

## 8. Desa Siaga

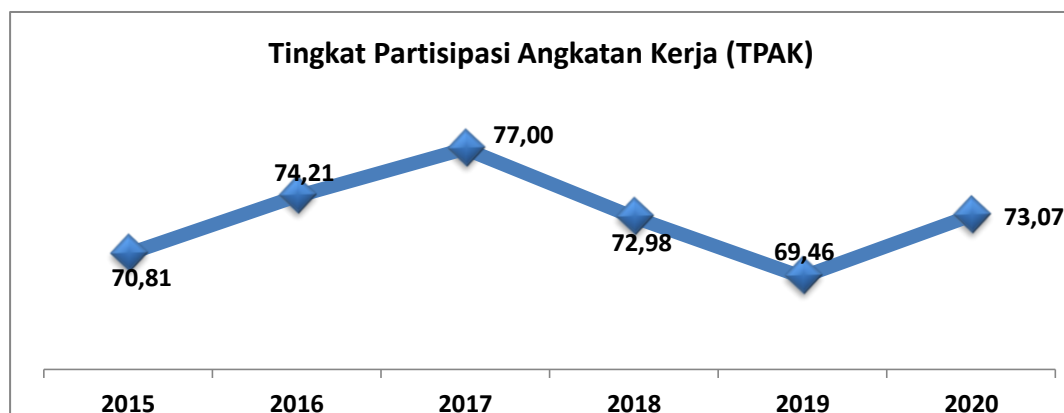
Desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa siaga aktif merupakan bentuk peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri. Jumlah desa siaga aktif tahun 2015-2020 adalah 50 desa.

## 9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan/kemudahan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia, sehingga untuk mendapatkannya relatif mudah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 sebesar 73,07%, dengan kata lain dari 100 orang Penduduk Usia Kerja, menanggung sekitar 73 orang penduduk yang tidak produktif. TPAK di Kabupaten Rote Ndao dari tahun ke tahun cenderung menurun yang berarti beban semakin berkurang dengan banyaknya penduduk usia muda. Secara rinci perkembangan TPAK dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.15**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**



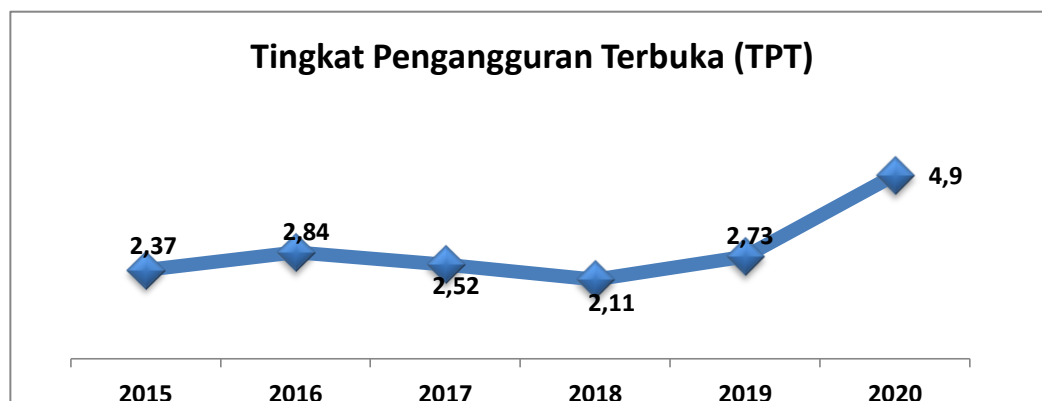
Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

## 10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran Terbuka adalah pengangguran sementara yang terjadi secara alami ketika seseorang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih cocok. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara Penganggur terhadap Angkatan kerja. Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengangguran di bidang Angkatan Kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Rote Ndao di jabarkan dalam gambar berikut:



**Gambar 2.16**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**



Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

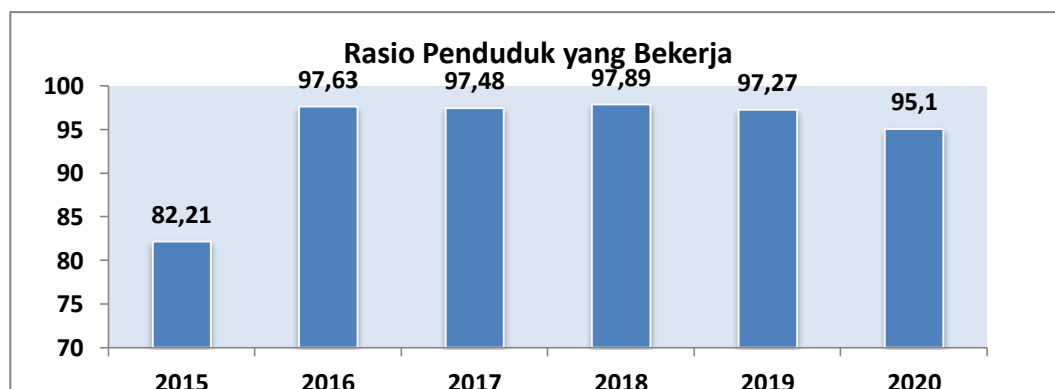
Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Tahun 2015 TPT sebesar 2,37% mengalami peningkatan sebesar 0,47% di tahun 2016 menjadi 2,84%, pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2,11% dan meningkat kembali sebesar 2,79% atau menjadi 4,9% pada tahun 2020.

### 11. Rasio Penduduk Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Gambar dibawah ini memperlihatkan bahwa rasio penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Rote Ndao memperlihatkan tren fluktuatif seperti berikut:

**Gambar 2.17**  
**Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**



Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

### 12. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja unit

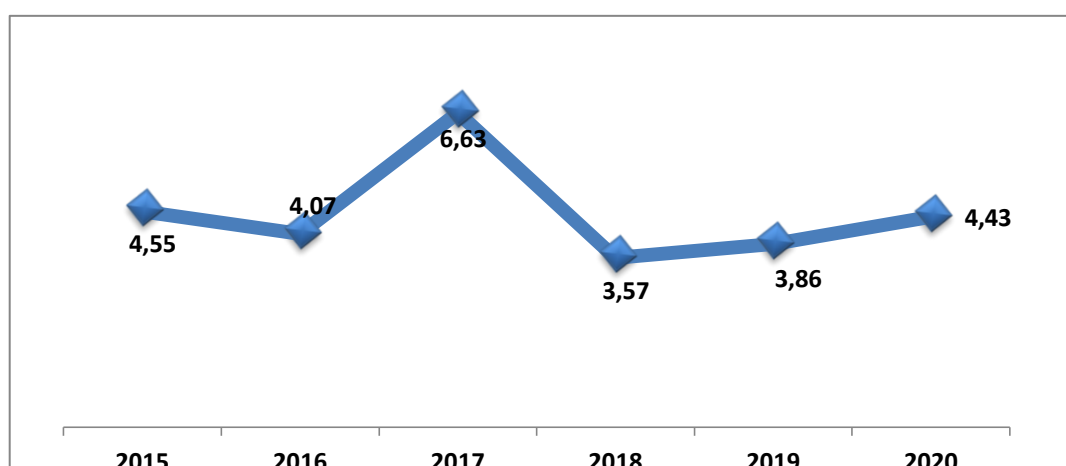
pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. IKM Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 sebesar 78,74%.

### 13. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Pendapatan Daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.18

Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2015-2020



Sumber : BKA Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 mengalami fluktuatif dikarenakan belum optimalnya Organisasi Perangkat Daerah dalam menggali dan menagih obyek pajak. Pendapatan Daerah masih tergantung dari Dana Pusat, sehingga kedepan perlu diperhatikan agar dapat mengoptimalkan potensi daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rote Ndao.

### 14. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan evektifitas system pengendalian system. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Audit terhadap evaluasi kinerja keuangan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 yakni Kabupaten Rote Ndao berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

## 15. Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola Pangan Harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, Persentase energi dan gizi aktual dan skor kecukupan energi. Hasil analisis Pola Pangan Harapan (PPH) dari aspek ketersediaan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.21**  
**Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Aspek Ketersediaan Pangan**  
**Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020**

Kelompok Pangan	ENERGI (kalori)	% AKE	Bobot	Skor Riil	Skor Maks	Skor PPH
Padi-padian	3310	137,5	0,5	68,8	25,0	25,0
Umbi-umbian	84	3,5	0,5	1,7	2,5	1,7
Pangan Hewani	210	8,7	2,0	17,5	24,0	17,5
Minyak dan Lemak	400	16,7	0,5	8,3	5,0	5,0
Buah/Biji berminyak	44	1,9	0,5	0,9	1,0	0,9
Kacang-kacangan	27	1,1	2,0	2,3	10,0	2,3
Gula	59	2,4	0,5	1,2	2,5	1,2
Sayur & Buah	232	9,7	5,0	48,3	30,0	30,0
Lain-lain	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Jumlah</b>	<b>4.756</b>	<b>181,5</b>		<b>149,0</b>	<b>100,0</b>	<b>83,6</b>

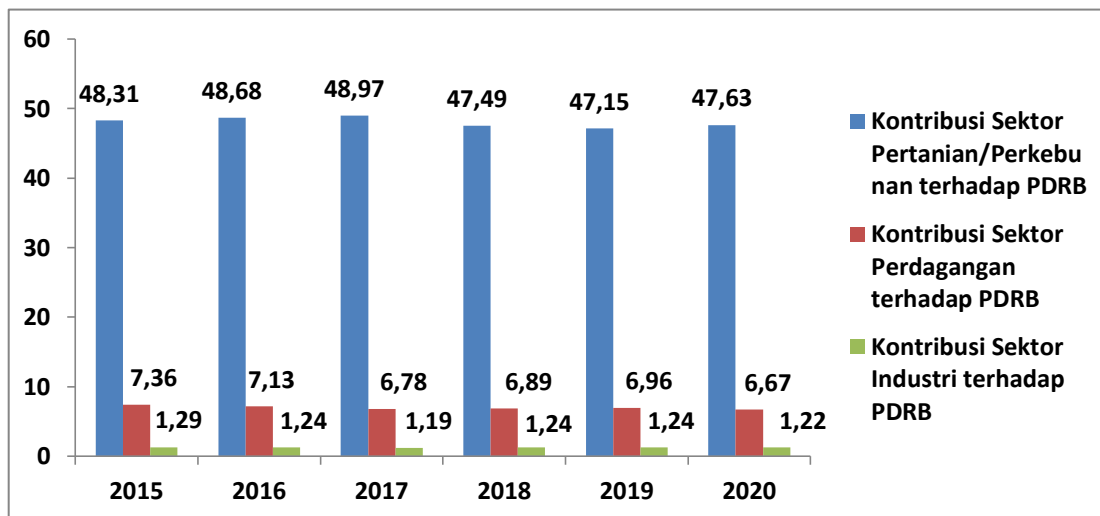
Sumber : Dinas Pangan Kab. Rote Ndao, Tahun 2020

## 16. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutan dan Perikanan terhadap PDRB

Sektor pertanian, Kehutan dan Perikanan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Rote Ndao, yakni dari Tahun 2015 sebesar 48.31% terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 47.63%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Rote Ndao beralih mata pencaharian dari sektor pertanian, Kehutan dan Perikanan.

Dalam hal menciptakan nilai tambah sektor perdagangan dan industry menjadi kontributor PDRB Kabupaten Rote Ndao keempat dan kesembilan, meskipun trennya menurun. Sektor perdagangan berkontribusi sebesar 7.36% pada tahun 2015, yang mana mengalami penurunan sebesar 0.69% menjadi 6.67% pada tahun 2020. Sedangkan sektor Industri juga mengalami penurunan pada tahun 2015 dari 1.29% menjadi 1,22% pada tahun 2020 atau penurunan sebesar 0.07%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Gambar 2.19**  
**Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan, Perdagangan dan Industri terhadap PDRB Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**



Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

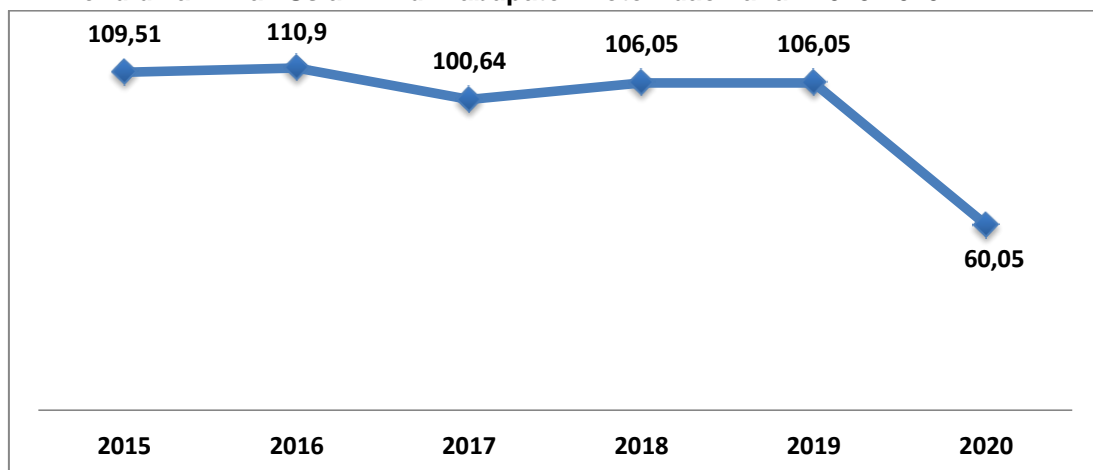
### 2.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

#### A. Urusan Pendidikan

##### 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini mengindikasikan besarnya presentasi anak-anak usia 3-6 tahun yang mendapat pendidikan dasar seperti pada Taman Kanak-kanak (TK), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain (KB). Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2020 disajikan sebagai berikut:

**Gambar 2.20**  
**Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**



Sumber : Dinas PKO Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

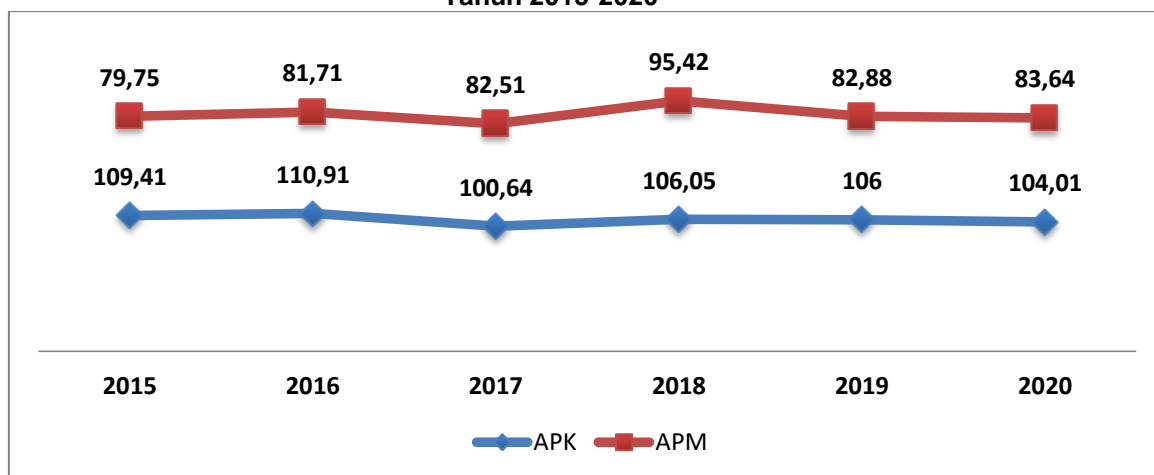
Dari grafik di atas, tampak bahwa capaian PAUD menurun dari 109,51% pada tahun 2015 menjadi 60,05% pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan karena belum semua anak usia 3-6 tahun terdaftar pada PAUD di Kabupaten Rote Ndao. Ini sudah menjadi perhatian dalam penanganan *stunting* sehingga diperlukan pendataan yang baik untuk intervensi pada anak usia PAUD yang lebih efektif.

## 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapa pun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat Pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APK dan APM di Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2020 disajikan sebagai berikut:

**Gambar 2.21**  
**Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**



Sumber : Dinas PKO Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

APK dan APM tidak banyak berubah walaupun fluktuatif. Pada tahun 2015 APM sebesar 79,75% mengalami fluktuasi hingga mencapai 83,64% pada tahun 2020. APK cenderung meningkat sejak tahun 2015-2016, yaitu 109,41% pada tahun 2015 hingga 110,91% pada tahun 2016, kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 100,64% lalu naik menjadi 104,01% pada tahun 2020. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

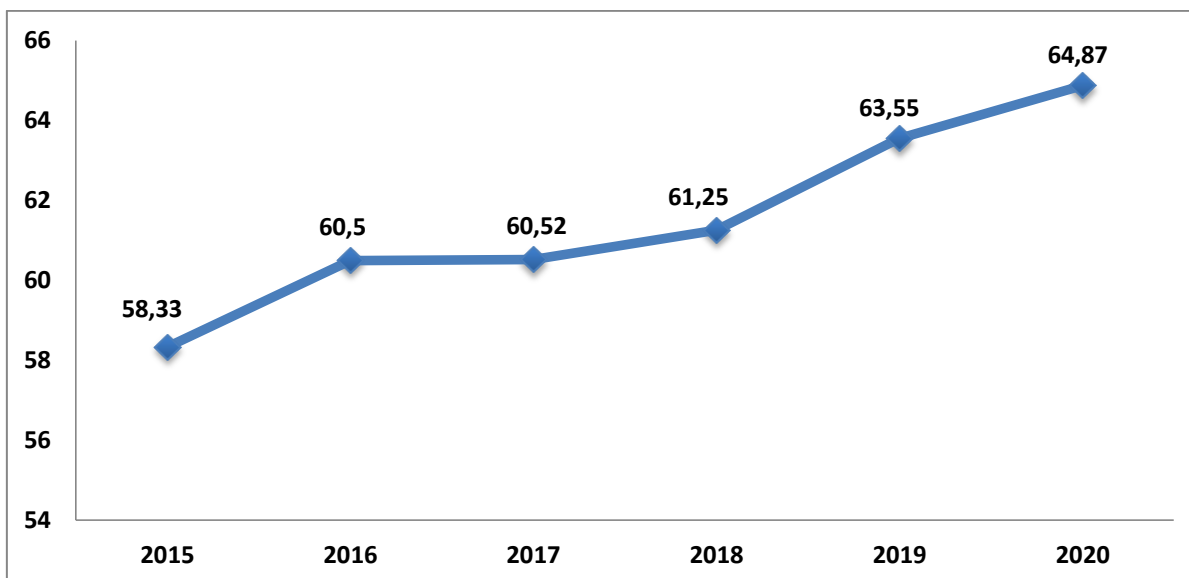
## 3. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah dalam setiap 10.000



penduduk. Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Rote Ndao untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2020 tersaji pada gambar berikut:

**Gambar 2.22**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah**  
**Di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**



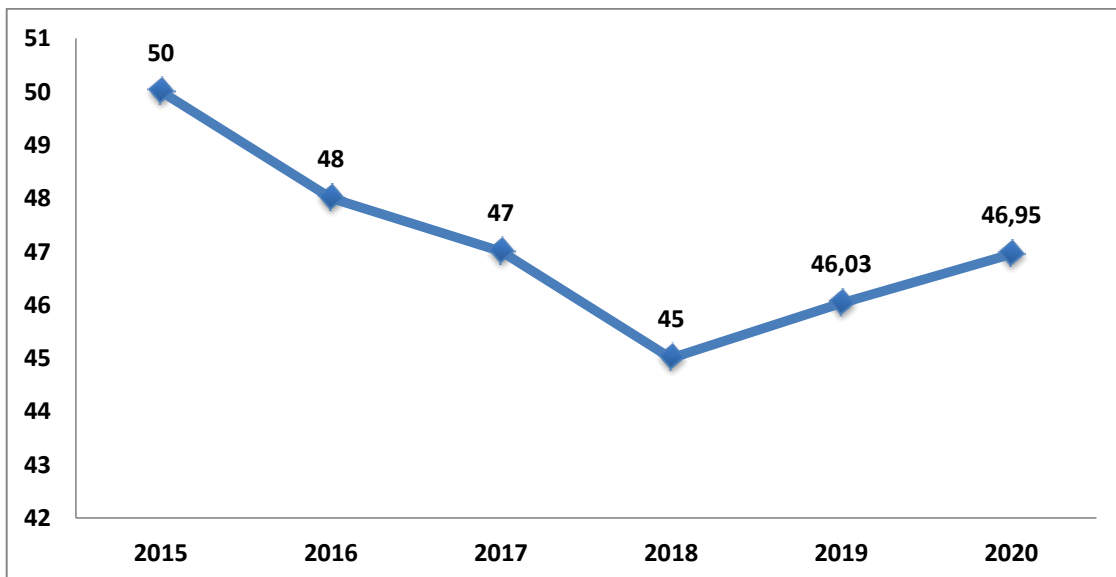
Sumber : Dinas PKO Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

Berdasarkan Grafik di atas terlihat bahwa rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dalam kurun waktu 2015-2020 cenderung meningkat secara signifikan. Pada tahun 2015, untuk setiap 10.000 penduduk usia pendidikan dasar 7-15 tahun tersedia 58 sekolah dan setiap sekolah menampung sekitar 165 murid dan pada tahun 2020 tersedia 63 sekolah menampung sekitar 163 murid.

#### **4. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar**

Rasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid pada suatu jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Selain itu, rasio ini juga digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya jumlah ideal murid untuk setiap guru agar dapat mendukung proses belajar mengajar yang bermutu. Rasio guru/murid jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2020 tersaji pada gambar di bawah ini:

**Gambar 2.23**  
**Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**



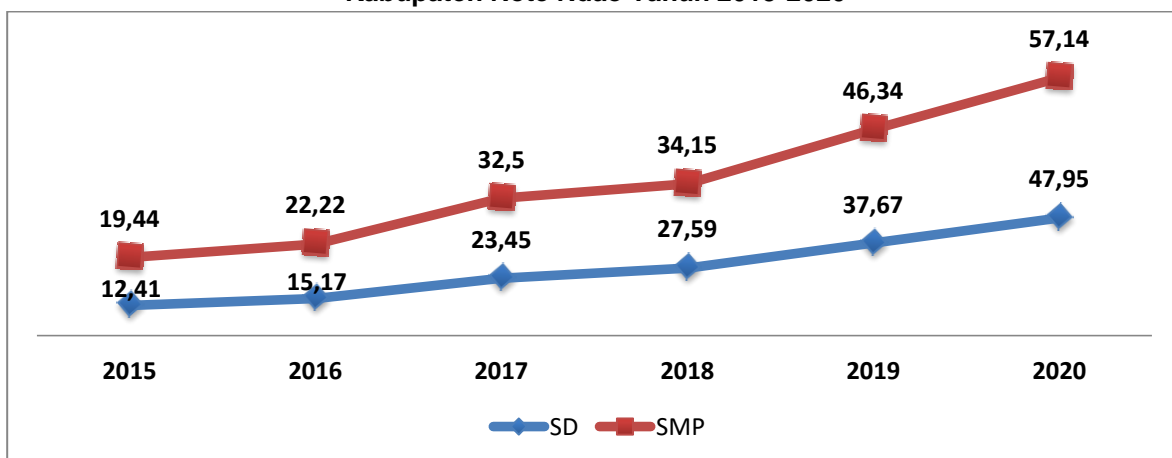
Sumber : Dinas PKO Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

Dari gambar di atas, terlihat bahwa perkembangan rasio guru/murid dalam kurun waktu 2015-2020 pada jenjang pendidikan dasar cenderung fluktuatif. Rata-rata rasio guru/murid SD/MI tahun 2015-2020 adalah 40,42 per 1.000.

#### 5. Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik

Kondisi bangunan sekolah yang baik dapat menunjang kegiatan belajar mengajar dengan baik. Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik tersaji pada gambar berikut:

**Gambar 2.24**  
**Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**



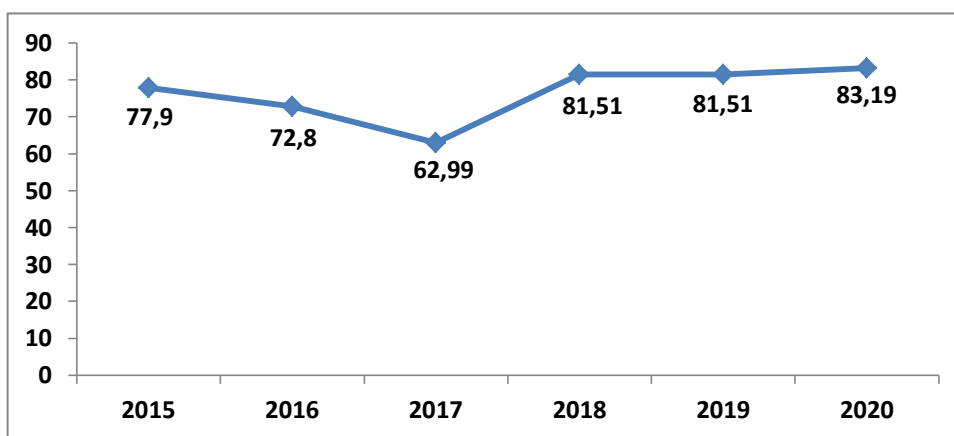
Sumber : Dinas PKO Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

Dari gambar di atas terlihat bahwa persentase sekolah dengan kondisi bangunan baik pada sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs semakin meningkat dalam kurun waktu 2015-2020 namun masih jauh dari angka 100%.

## 6. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik. Data guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Rote Ndao disajikan pada gambar berikut ini:

**Gambar 2.25**  
**Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019**



Sumber : Dinas PKO Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

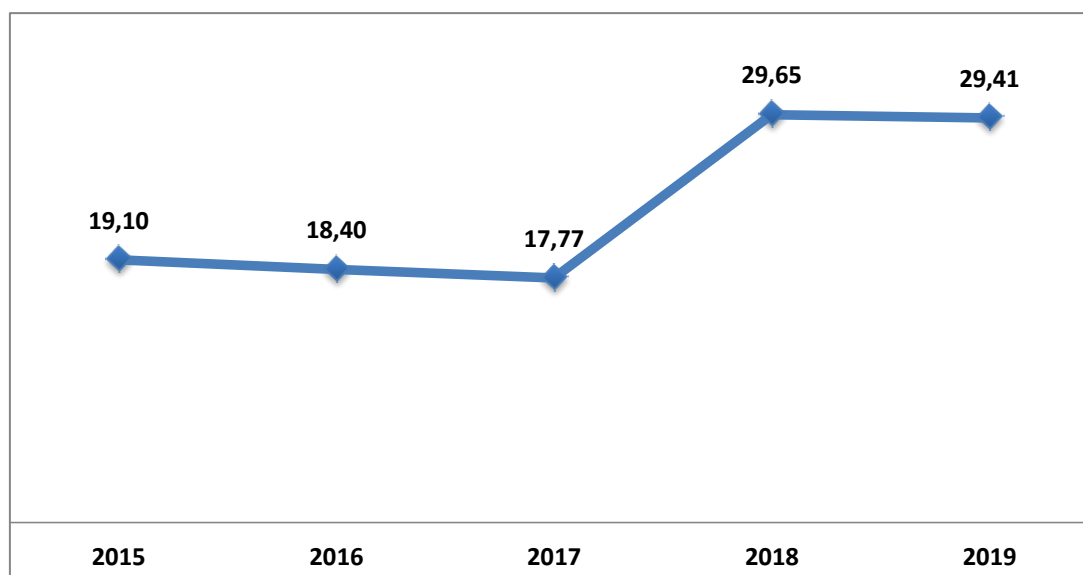
Pada gambar ini tampak ada peningkatan persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2015-2020, di mana meningkat dari 77,9% pada tahun 2015 menjadi 83,19% pada tahun 2020 (terdapat peningkatan sebesar 5,29%).

## B. Urusan Kesehatan

### 1. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu adalah Pos Pelayanan Terpadu yang merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Posyandu menyelenggarakan 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Posyandu juga merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal oleh masyarakat. Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2019 tersaji dalam gambar 2.26 di bawah ini:

**Gambar 2.26**  
**Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019**



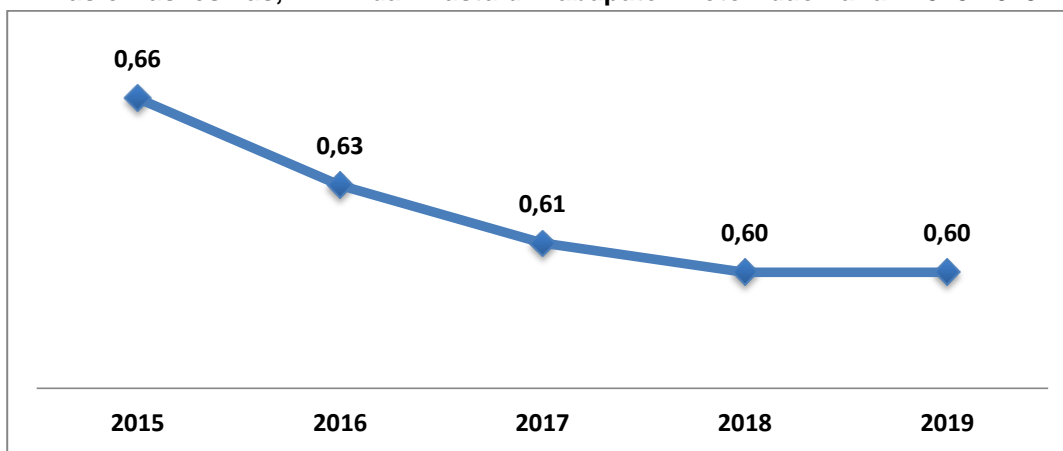
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2019

Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Rote Ndao mengalami penurunan dalam tahun 2015-2017 lalu meningkat pada tahun 2018. Pada tahun 2015, rasio posyandu per satuan balita sebesar 19,10 yang artinya dalam setiap 1.000 balita dilayani oleh 19 posyandu. Namun pada tahun 2019, rasio posyandu per satuan balita naik menjadi sebesar 29,41 yang artinya dalam setiap 1.000 balita dilayani oleh 29 posyandu. Semakin besar rasio posyandu mempresentasikan semakin baiknya daya layanan fasilitas kesehatan dalam memenuhi kebutuhan akan kesehatan balita dan sebaliknya.

## **2. Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu per Satuan Penduduk**

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkait erat dengan jumlah fasilitas Kesehatan. Puskesmas, Klinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah fasilitas kesehatan, maka masyarakat semakin mudah dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio puskesmas, klinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per satuan penduduk di Kabupaten Rote Ndao disajikan dalam gambar 2.27 berikut ini:

**Gambar 2.27**  
**Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019**



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2019

Rasio puskesmas dan pustu di Kabupaten Rote Ndao periode 2015-2019 cenderung menurun. Hal ini menjadi dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2015 sampai dengan 2019 namun tidak diimbangi dengan bertambahnya jumlah puskesmas dan pustu yang signifikan sejak tahun 2015-2019. Sementara, semakin meningkatnya rasio diharapkan dapat semakin memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.

Dalam dua tahun terakhir yaitu 2018-2019, komposisi jumlah Puskesmas dan jumlah Pustu adalah sama, yaitu 12,37% untuk Puskesmas dan 87,63% untuk jumlah Pustu karena jumlah Puskesmas dan Pustu masih sama selama periode waktu tersebut di atas. Dengan komposisi yang demikian, maka rasio Puskesmas pada tahun 2019 adalah sebesar 0,60 dan rasio Pustu 0,53. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018, satu Puskesmas melayani sekitar 13.301 penduduk dan satu Pustu melayani 1.878 penduduk.

### **3. Rasio Dokter dan Tenaga Medis per Satuan Penduduk**

Rasio tenaga medis (dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi) dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung menurun. Pada tahun 2015, rasio tenaga medis 1,5 per 1.000 penduduk artinya setiap 1.000 penduduk dilayani oleh 1-2 tenaga medis atau rata-rata 1 tenaga medis melayani 714 penduduk. Sedangkan rasio ini mengalami penurunan dari 1,5 per 1.000 penduduk pada tahun 2015 menjadi 1,3 per 1.000 penduduk pada tahun berikutnya. Rasio ini mengalami stagnasi hingga tahun 2019.

### **4. Indikator Kesehatan Lainnya**

Tabel di bawah ini menggambarkan pencapaian kinerja urusan kesehatan lainnya pada tahun 2020 di Kabupaten Rote Ndao.



**Tabel 2.22**  
**Capaian Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Tahun 2020</b>
1.	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	70,47
2.	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	55,67
3.	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	81,63
4.	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	62,64
5.	Persentase Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	24,42
6.	Persentase Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	31,70
7.	Persentase Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	34,30
8.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	14,13
9.	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	20,98
10.	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlayani (%)	88,11
11.	Persentase Pasien Tuberculosis (TB) yang terlayani (%)	30,72
12.	Persentase penduduk resiko terinfeksi HIV yang terlayani (%)	64,79

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Tahun 2020*

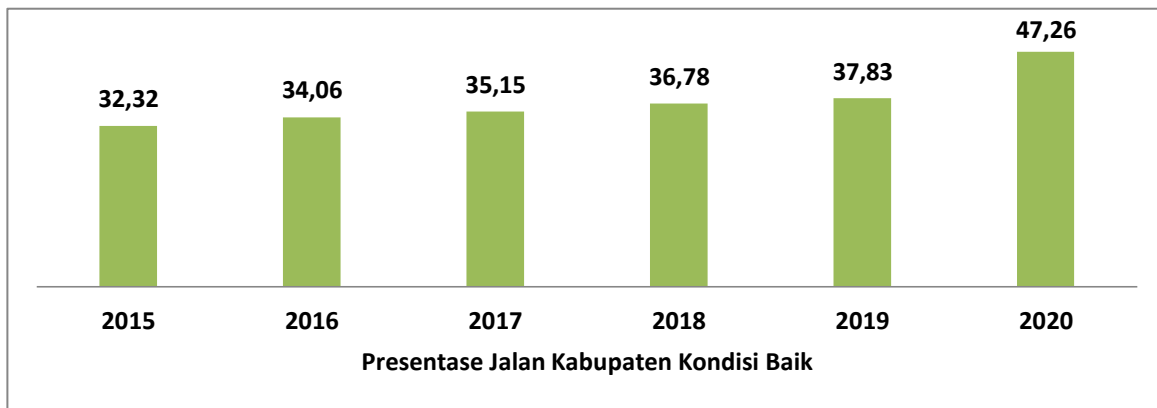
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian beberapa indikator pada tahun 2020 masih sangat rendah. Ini disebabkan 12 indikator di atas juga merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan yang merupakan urusan wajib yang perlu dilakukan dengan standar 100%. Dari 12 indikator di atas, hanya terdapat 1 indikator dengan capaian di atas 80%, yaitu persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlayani, sedangkan 11 indikator lainnya belum mencapai standar yang diharapkan.

### **C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### **1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**

Perbaikan kualitas infrastruktur jaringan jalan terus menunjukkan perkembangan yang baik. Dilihat dari tren, proporsi panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2015 adalah 32,32% dari total panjang jalan 459,83 KM dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 47,26%. Secara rinci proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Gambar 2.28**  
**Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun 2015-2020**



Sumber: Dinas PUPR Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

Selain jalan kabupaten, panjang jalan provinsi di Kabupaten Rote Ndao 28,01 Km dengan kondisi baik 23,01 Km atau 82,15% dan kondisi sedang 5 Km atau 17,85%.

## 2. Jalan Strategis Desa

Ruas Jalan Strategis Desa memegang peran yang penting dalam sistem jaringan jalan, merupakan jalan di kawasan strategis kabupaten yang berfungsi sebagai penghubung antar kawasan strategis kabupaten dengan Jalan Kabupaten, Jalan Provinsi, Jalan Nasional maupun Jalan Desa yang berada di kabupaten Rote Ndao. Ruas Jalan Desa Strategis dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 408.a/KEP/HK/2019 yang mencakup 59 ruas jalan dengan panjang total 339,92 Km. Sampai dengan tahun 2018 telah terbangun sepanjang 68,87 Km (20,32%), tahun 2020 terbangun sepanjang 85,42 Km (22,42%).

## 3. Drainase

Drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan suatu tempat dengan cara mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan air. Drainase berfungsi untuk mengatur air demi pencegahan adanya genangan air dan banjir. Oleh sebab itu drainase merupakan salah satu bagian penting dalam sistem penataan suatu kota, karena dengan adanya drainase maka suatu kawasan dapat difungsikan secara optimal sesuai dengan kepentingannya.

Panjang saluran drainase terbangun sampai dengan tahun 2020 sepanjang 1.231 M, namun saluran drainase ini tidak berfungsi secara baik dalam menyalurkan air hujan ke laut. Hal ini disebabkan karena sistem drainase yang ada pada umumnya hanya berfungsi untuk mengamankan jalan dan daerah sekitarnya dari genangan air dan tidak memperhitungkan arah alirannya. Di lain sisi kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dengan membuang sampah di saluran drainase serta terjadinya pendangkalan saluran memperparah kondisi saluran drainase. Akibatnya saat frekuensi curah hujan tinggi dan ditambah adanya pengaruh pasang air laut, maka air meluap menggenangi jalan dan masuk ke permukiman/pertokoan.

Daerah rawan genangan dan banjir di Kota Baa terjadi pada saat curah hujan tinggi dengan lama waktu genangan berkisar 5 – 12 jam tersebar di 11 (sebelas) titik, yaitu:

1. Kawasan perkantoran akibat adanya daerah cekungan ada 2 (dua) titik dengan durasi genangan sekitar 5 jam;
2. Kawasan permukiman di Jalan ABRI ada 1 (satu) titik dengan durasi genangan sekitar 6 jam;
3. Kawasan pertokoan pertigaan depan Toko Safari s.d. Kelapa Satu ada 3 (tiga) titik akibat tidak berfungsinya saluran, dengan lama genangan sekitar 12 jam. Kawasan Permukiman di Namodale dan Metina ada 3 (tiga) titik dengan lama genangan sekitar 6-7 jam;
4. Kawasan Pelabuhan 1 (satu) titik dengan lama genangan sekitar 2 (dua) jam;
5. Kawasan Perkantoran Telkom Baa 1 (satu) titik dengan lama genangan 12 jam.

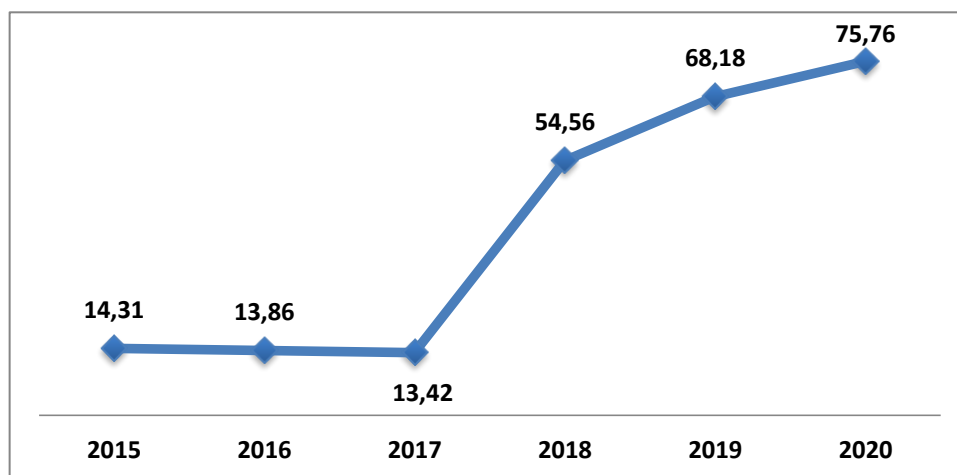
Untuk mengurangi terjadinya genangan dan daerah banjir, maka harus dilakukan pembangunan saluran drainase di daerah rawan genangan yang belum memiliki saluran drainase, melakukan pemeliharaan rutin saluran drainase yang mengalami penyumbatan akibat sedimentasi dan banyaknya sampah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pemeliharaan saluran yang sudah ada sehingga drainase dapat berfungsi optimal.

#### **4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan bahan buangan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan, sehingga menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar masih memprihatinkan baik secara nasional maupun di tingkat kabupaten. Permasalahan bidang sanitasi yang muncul tidak selalu disebabkan oleh aspek teknis, namun juga berhubungan dengan aspek ekonomi, budaya masyarakat dan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan lain dalam pembangunan bidang sanitasi. Oleh sebab itu penanganan sanitasi menjadi kesepakatan nasional yang harus diimplementasikan dalam rangka meningkatkan derajat sanitasi secara nasional maupun di tingkat daerah.

Capaian rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2020 baru sekitar 75,76%. Masih jauh dari target nasional 100%. Untuk itu perlu dukungan dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan swasta bersama-sama berkomitmen dan terintegrasi dalam pembangunan sanitasi. Secara rinci perkembangan pembangunan sanitasi dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.29**  
**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun 2015-2020**

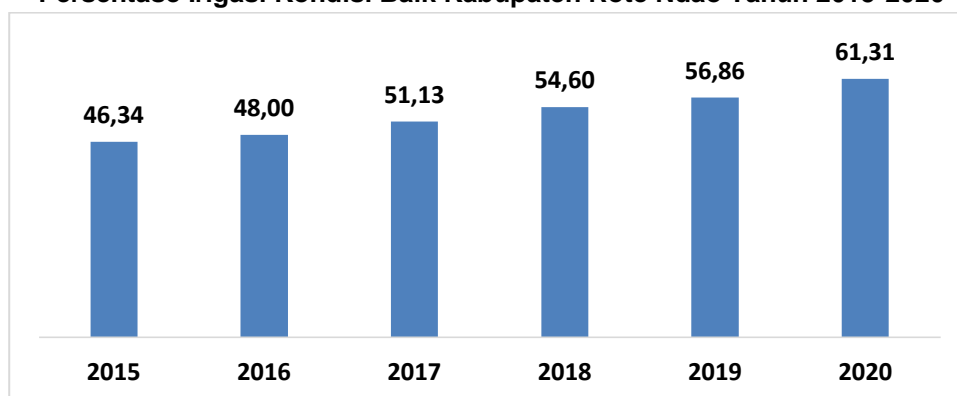


Sumber: Dinas PUPR Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

### 5. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Secara Kualitas Kinerja sektor Irigasi terus mengalami perbaikan dari tahun 2015 tercatat 46,34% irigasi dalam kondisi baik dan terus meningkat menjadi 61,31% pada tahun 2020. Namun dari segi kuantitas harus terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pengairan bagi lahan persawahan yang baru karena rasio jaringan irigasi masih rendah yaitu pada tahun 2020 sebesar 60,19%, kondisi ini menggambarkan bahwa ketersediaan saluran irigasi untuk menyalurkan air bagi lahan pertanian baru mencapai 60,19% untuk lahan seluas 132,69 Km<sup>2</sup>.

**Gambar 2.30**  
**Persentase Irigasi Kondisi Baik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**



Sumber: Dinas PUPR Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

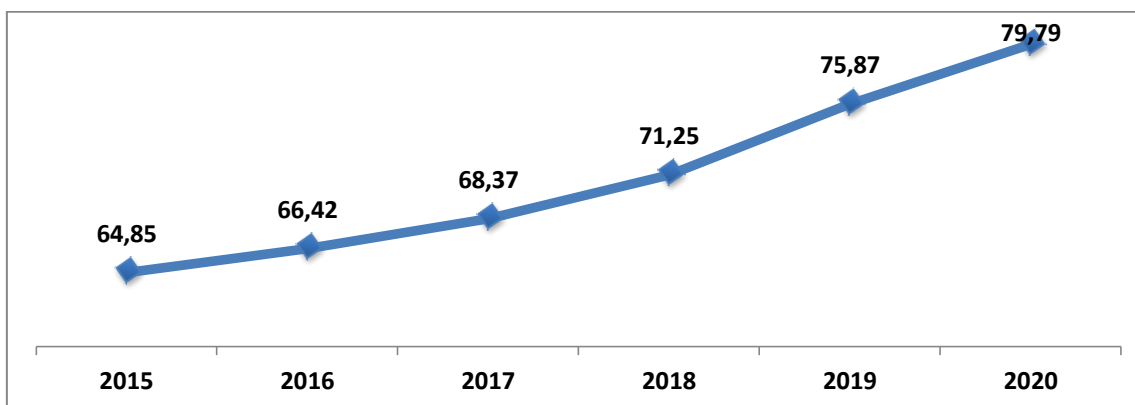
Irigasi provinsi yang ada di Kabupaten Rote Ndao adalah Daerah Irigasi Manubulu dengan luas areal 1.250 Ha. Daerah Irigasi tersebut terletak di Kecamatan Rote Tengah.

### 6. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak

Air minum merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus tersedia dengan layak dan mudah diakses. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Sampai dengan tahun 2020 penduduk berakses air

minum mencapai 79,79%. Angka tersebut jauh dari target nasional sebesar 100% penduduk terakses air minum. Capaian rumah tangga akses air minum baru pada kondisi desa ber air minum, belum rumah tangga dengan air minum. Artinya bahwa akses air minum belum semuanya mencapai rumah tangga/sambungan rumah (SR). Perlu kerja keras pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk dapat mencapai target tersebut. Secara rinci perkembangan penduduk berakses air minum dapat dilihat pada gambar berikut

**Gambar 2.31**  
**Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**



Sumber: Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao, 2015-2020

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa trend penduduk berakses air minum cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah melakukan upaya yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan akses air minum layak.

## 7. Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang disiapkan Pemerintah Daerah pada tahun 2005 berada di dusun Ndudale, Desa Baadale Kecamatan Lobalain dengan luas 7 Ha. Namun TPU ini sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Kebiasaan masyarakat Rote Ndao lebih memilih memakamkan keluarga/kerabat di halaman rumah tanpa memperhitungkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Sampai dengan tahun 2020, selain TPU tersebut terdapat TPU swadaya masyarakat yaitu di Kelurahan Metina (Kec. Lobalain), Desa Tungganamo (Kec. Pantai Baru) dan di Desa Papela (Kec. Rote Timur).

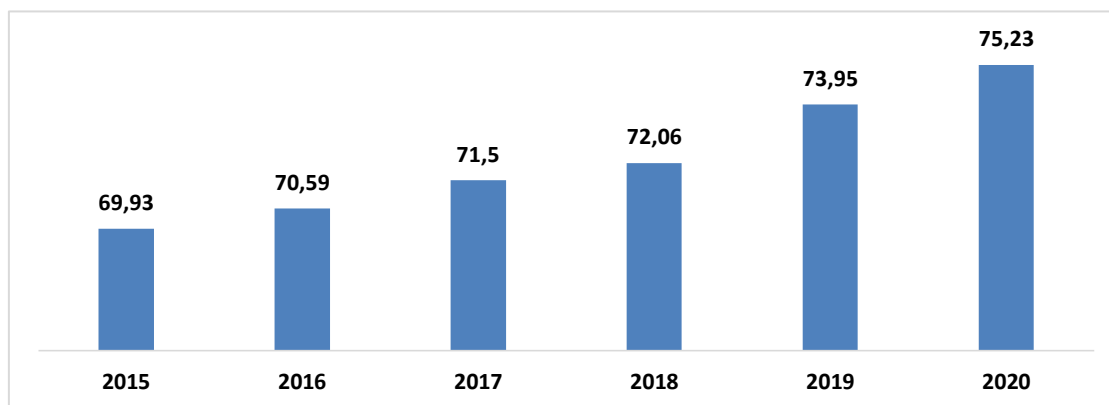
## D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

### 1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni merupakan perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah rumah keseluruhan. Dari tahun ke tahun Persentase rumah layak huni terus meningkat. Pada tahun 2015 mencapai 69,93% dan pada tahun 2020 mencapai 75,23% atau meningkat sebesar 5,30%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 2.32**  
**Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun 2015-2020**



Sumber: Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

## 2. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Sedangkan Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Permukiman Kumuh di Kabupaten Rote Ndao pada Tahun 2017 sesuai SK Bupati Nomor 408/KEP/HK/2017 sebesar 77,33 Ha terdiri dari 14,56 Ha kategori Kumuh Berat, 29,96 Ha Kategori Kumuh Sedang, 32,81 Ha kategori kumuh ringan. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Rote Ndao yaitu 1.280,10 km<sup>2</sup>, maka rasio permukiman kumuh adalah 0,06%.

### E. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi ketenteraman dan ketertiban yang mantap pada suatu daerah merupakan salah satu dasar suksesnya pelaksanaan pembangunan. Secara umum kondisi di Kabupaten Rote Ndao kondusif dan terkendali meskipun ada gejolak/konflik masyarakat, namun tidak sampai mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Kondisi yang kondusif membuat masyarakat dan pemerintah dapat melakukan kegiatan dengan aman, nyaman dan tenteram. Indikator kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah jumlah penegakan perda, cakupan petugas linmas, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan), Jumlah layanan bencana kebakaran, dan tingkat waktu tanggap bencana kebakaran. Capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada meningkatnya jumlah petugas Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta menurunnya jumlah kasus-kasus yang mengganggu ketertiban umum. Sedangkan indikator kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada jumlah partai politik dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Capaian indikator ketenteraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.23**  
**Capaian Indikator Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat**  
**Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

No.	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penegakan Perda (%)	100	100	100	100	100	84,09
2.	Jumlah Layanan Bencana Kebakaran	3	12	0	0	0	3
3.	Cakupan layanan Bencana Kebakaran	24,85	24,85	24,85	24,85	24,85	100
4.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (%)	60	100	67	80	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

Jumlah partai politik yang terdata adalah partai politik pemenang pemilu, bukan peserta pemilu. Pembinaan terhadap partai politik dan LSM/Ormas dilakukan setiap tahun dengan pemberian bantuan operasional bagi Parpol pemenang pemilu. Sedangkan bagi LSM/Ormas dilakukan sosialisasi dan monitoring kegiatan masing-masing LSM/Ormas, namun masih ada beberapa LSM/Ormas yang tidak melaporkan secara berkala kegiatan mereka sehingga tidak diketahui keberadaannya masih aktif atau sudah tidak beroperasi lagi di Kabupaten Rote Ndao. Jumlah Partai Politik, dan Pembinaan terhadap LSM, Ormas & OKP di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 2.24**  
**Jumlah Partai Politik, dan Pembinaan terhadap LSM, Ormas & OKP**  
**di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

No.	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah partai politik	9	9	9	9	9	9
2.	Jumlah LSM/ORMAS	7	7	7	7	7	7
3.	Jumlah pembinaan thd LSM, Ormas & OKP	2	2	2	2	2	2

Sumber : Kantor Kesbangpol Kab Rote Ndao, Tahun 2015-2020

## **F. Urusan Sosial**

Pemerintah daerah membutuhkan peran aktif dari semua pihak guna membangun kebersamaan dalam upaya mengurangi angka penyandang masalah kesejahteraan sosial. Disisi lain, pemerintah daerah tetap berupaya untuk memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan pada tahun 2019 adalah sebesar 46.15% menurun dari tahun 2018 sebesar 65,38. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya alokasi anggaran baik dari dana alokasi umum maupun dana bantuan dari Kementerian Sosial. Disamping itu, bantuan untuk penyandang cacat dan lansia tidak ada serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berkurang. Berikut capaian kinerja pelayanan urusan sosial di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2016-2020:

**Tabel 2.25**  
**Pelayanan Urusan Sosial di Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun 2016-2020**

<b>Indikator</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Persentase PMKS yang tertangani (%)	65.38	65.38	65.38	46.15	65,38
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	13.75	14.37	14.91	10.71	19,70
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	96.10	94.94	89.02	90.10	100
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	96.10	94.94	89.02	90.10	100
Persentase korban bencana dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	24.00	19.00	17.00	17.00	17.00

Sumber : Dinas Sosial Kab. Rote Ndao 2016-2020

### 2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

#### A. Urusan Tenaga Kerja

Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Capaian kinerja urusan tenaga kerja selama kurun waktu tahun 2015-2020 di Kabupaten Rote Ndao disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.26**  
**Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 – 2020**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (Perusahaan)	25	50	52	72	20	50
2.	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Orang)	-	-	-	41	40	-
3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (Orang)	30	20	30	20	30	36
4.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (Orang)	-	-	-	40	40	40

Sumber : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rote Ndao, Tahun2015- 2020

#### B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

##### 1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan dalam rangka peningkatan peran perempuan dalam segala bidang pembangunan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan, fasilitasi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak serta perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Capaian kinerja dapat dilihat pada partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, makin meningkatnya proporsi perempuan di lembaga legislatif, partisipasi perempuan di lembaga swasta, menurunnya KDRT terhadap perempuan dan

anak, partisipasi angkatan kerja perempuan, angka melek huruf perempuan, dan kontribusi perempuan dalam pembangunan. Capaian kinerja secara rinci disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.27**  
**Realisasi Capaian Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

No.	INDIKATOR	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.1	4,69
2	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	97.29	95	95	93	91,20
5	Rasio KDRT	0.16	0.10	0.08	0.08	0.08	0.10
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	60.10	60.10	60.10	60.10	64.27	65.77
7	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas P3AP2KB Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

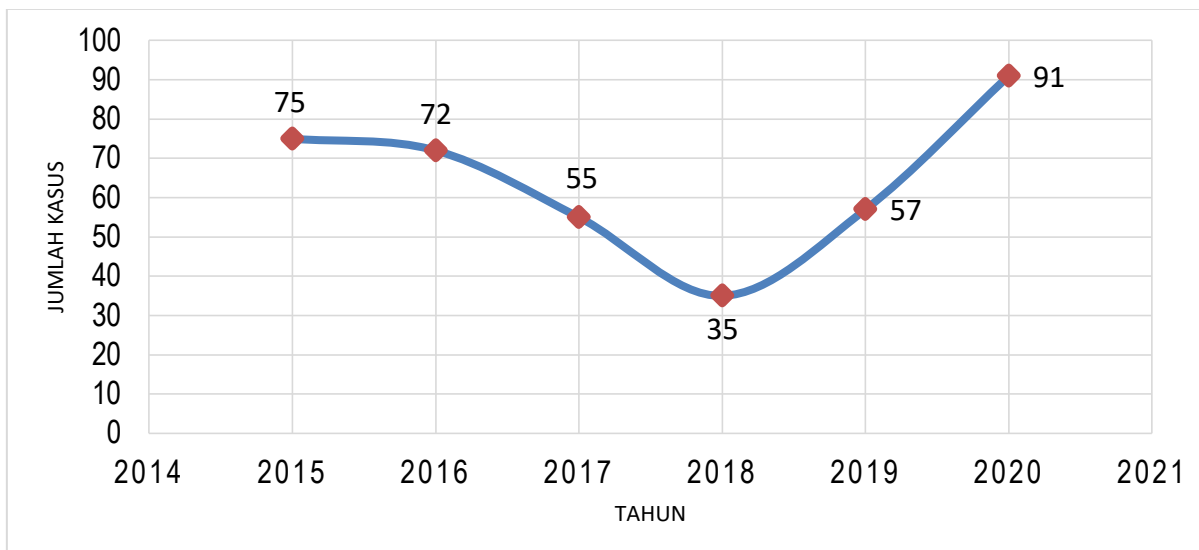
Persentase perempuan di Lembaga pemerintah pada tahun 2015-2020 sebesar 3%, meningkat pada tahun 2020 menjadi 4,69%. Layanan rehabilitasi sosial diberikan kepada seluruh perempuan dan anak korban kekerasan. Sejak tahun 2015-2020 seluruh perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan bantuan hukum. Rasio KDRT cenderung mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 0,16 menjadi 0,10 pada tahun 2015-2020. Partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari tahun ke tahun hingga 65,77% pada tahun 2020. Artinya, dari 100 angkatan kerja perempuan, terdapat 66 perempuan yang berpartisipasi aktif.

Upaya mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pemberdayaan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Nda dan seluruh instansi yang terkait bersinergi dalam rangka mengurangi KDRT dan kekerasan seksual terhadap anak.

## 2. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Maraknya kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak menunjukkan adanya *gap gender*. Ini merupakan kondisi dimana adanya perasaan superioritas dan lebih besarnya kekuatan antara satu gender ke gender yang lain yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan. Kekerasan pada perempuan dan anak dapat dicegah apabila perempuan dan anak diposisikan setara dengan laki-laki. Padahal, di Kabupaten Rote Ndao, perempuan mampu berperan, menyuarakan pendapat, memimpin dan bahkan memberikan sebuah perubahan.

Gambar 2.33  
 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak  
 di Kabupaten Rote Ndao  
 Tahun 2015-2020



Sumber: Dinas P3AP2KB Kabupaten Rote Ndao, Tahun 2015- 2020

Pada tahun 2015 tercatat 75 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jumlah kasus ini menurun hingga 35 kasus pada tahun 2018, namun kembali meningkat hingga mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yaitu 91 kasus terhadap perempuan dan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Rote Ndao darurat terhadap kekerasan perempuan dan anak. Menyikapi ini, maka dari aspek perencanaan, penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak telah menjadi salah satu indikator kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao.

### 3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Sejak tahun 1990 United Nations Development Programme (UNDP) telah mempublikasikan Human Development Report (HDR) pertama yang menekankan bahwa manusia sebagai tujuan akhir pembangunan dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung pada peran seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Selain sebagai pelaku pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan sebagai pemanfaat hasil akhir dari pembangunan.

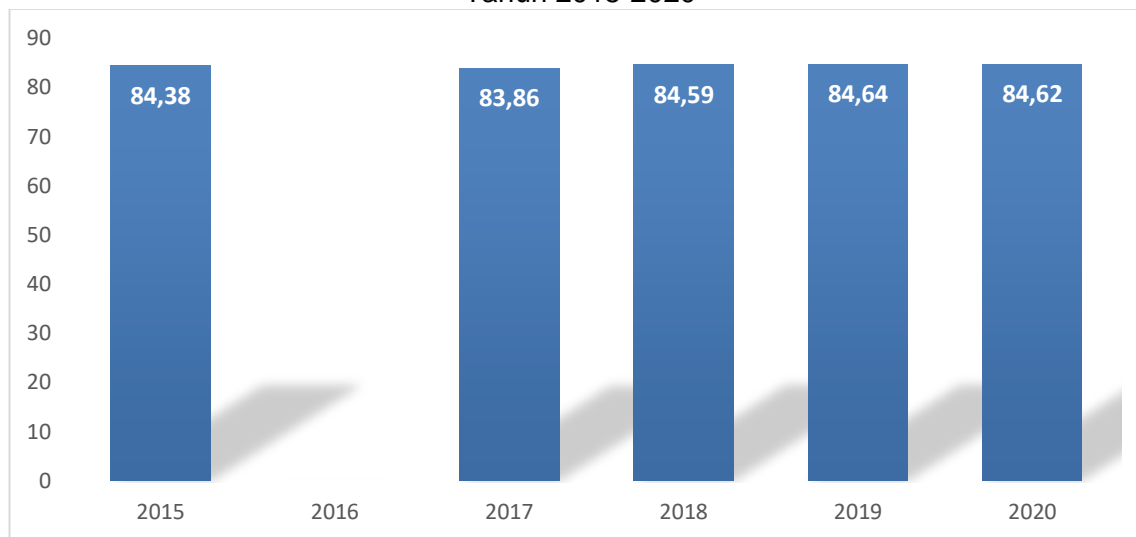
Sejak tahun 1995 UNDP telah mengangkat tema tentang gender dalam pembangunan manusia dimana pengabaian terhadap aspek gender akan menghambat proses pembangunan di suatu wilayah. Indikator yang menunjukkan capaian pembangunan berbasis gender akan memberikan gambaran tentang pengarusutamaan gender di Indonesia. Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). IPG dan IPM biasanya digunakan dalam analisis capaian pembangunan.

IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan



dasar. IPG hampir sama dengan IPM, tetapi dilakukan pemilahan jenis kelamin pada masing-masing komponennya. Berikut adalah grafik capaian IPG di Kabupaten Rote Ndao.

Gambar 2.34  
Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Rote Ndao  
Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) RI, 2021

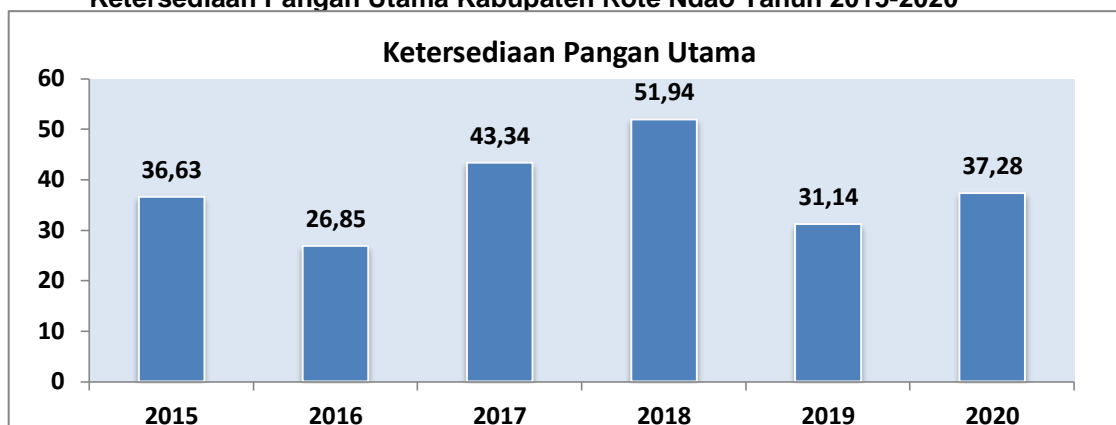
Pada gambar di atas tampak bahwa Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan tren perbaikan, walaupun capaian IPG di Kabupaten Rote Ndao belum mencapai 100. IPG semakin ideal apabila mendekati 100. Artinya, semakin deka tangka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Nilai IPG di bawah 100 mengindikasikan bahwa capaian pembangunan perempuan di bawah laki-laki. Sementara itu, IPG di atas 100 mengindikasikan bahwa capaian pembangunan perempuan di atas laki-laki.

Dari gambar di atas IPG di Kabupaten Rote Ndao berkisar dari 84,38 pada tahun 2015 menjadi 84,62 pada tahun 2020. Ini menunjukkan tren positif peningkatan IPG. Ini berarti kualitas pembangunan perempuan di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir sekalipun belum menyamai kualitas pembangunan laki-laki.

### C. Urusan Pangan

Kinerja penyelenggaraan urusan bidang pangan dapat dilihat dari indikator ketersediaan pangan utama. Rata-rata ketersediaan pangan utama di kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020 mengalami fluktuatif. Tahun 2015 ketersediaan pangan utama sebesar 36.63 Ton, menurun pada tahun 2016 sebesar 9.78 Ton sehingga menjadi 26.85 ton, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 25.09 ton sehingga menjadi 51.94 ton. Tahun 2019 menurun menjadi 31.14 ton dan meningkat kembali di tahun 2020 sebesar 37,28 ton. Ketersediaan Pangan Utama dapat dilihat pada tabel di bawah:

Gambar 2.35  
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020



Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

#### D. Urusan Pertanahan

Kinerja Penyelenggaraan urusan bidang pertanahan dapat diukur dengan indikator luas lahan yang bersertifikat. Dari data yang disampaikan Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 menunjukkan bahwa dari luas wilayah Kabupaten Rote Ndao sebesar 1.280,10 Km<sup>2</sup> terdapat 427 Km<sup>2</sup> yang bersertifikat atau sekitar 0,33 %.

#### E. Urusan Lingkungan Hidup

##### 1. Indeks Kualitas Air Kabupaten pada tahun

Indeks Pencemaran Air di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2019 berada pada angka 0,68. Tahun 2020 melalui analisa sampel air di beberapa mata air yaitu Mata Air Tilonisi, Mata Air Oemau, Mata Air Siokoen dan Mata Air Tanggaloi diperoleh Indeks Kualitas Air sebesar 50 Poin. Dalam proses pengukuran indeks kualitas air, ada beberapa kendala yang dihadapi. Terbatasnya tenaga yang kompeten merupakan salah satu dari beberapa kendala yang dimaksud. Situasi ini menjadi pemicu sehingga perangkat daerah harus mendatangkan tenaga ahli dari luar kabupaten untuk terlibat dalam proses pengukuran. Disamping itu, keterbatasan peralatan dan fasilitas pendukung juga menjadi kendala sehingga sampel air yang ada harus dibawa ke Kupang untuk diperiksa.

##### 2. Persampahan

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan saat ini masih difokuskan pada penanganan di Perkotaan Ba'a yang meliputi Kelurahan Mokdale, Desa Sanggaoen, Desa Holoama, Desa Ba'adale Kelurahan Namodale dan Kelurahan Metina yang diangkut dan dibuang di TPA Oelunggu dengan sistem "Open dumping" dan belum menerapkan teknik 3R (*reduce, reuse, recycle*), artinya sampah hanya dibuang di tempat pembuangan akhir tanpa pengelolaan lebih lanjut. Cara ini banyak menimbulkan persoalan mulai dari kontaminasi air tanah oleh air lindi, bau, ceceran sampah hingga asap. Oleh karena itu pengelolaan sampah harus dimulai dari tempat pembuangan sementara yang telah dipilah, menerapkan teknik 3R dan penerapan sanitary landfill di tempat pembuangan akhir sehingga kualitas lingkungan sekitar tetap terjaga.

Kinerja pengelolaan persampahan sampai saat ini masih pada tahap pengangkutan sampah dari sumber sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Total produksi sampah Perkotaan Baa adalah sebesar 37,80 M<sup>3</sup> per hari atau 13.798 M<sup>3</sup> per tahun sedangkan kapasitas angkut saat ini kurang lebih sebesar 24 M<sup>3</sup> per hari atau sekitar 8.765 M<sup>3</sup> per tahun. Kondisi ini diketahui masih terdapat sekitar 36,51% sampah belum terangkut ke TPA. Hal ini dipengaruhi pada ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai.

**Tabel 2.28**  
**Pengelolaan Sampah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016-2020**

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya Pengelolaan Sampah (M <sup>3</sup> /Tahun)	14.439	13.947	12.892	12.899	13.789

Sumber : Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao, Tahun 2016-2020

#### F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pembangunan Kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan untuk memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat dengan menerbitkan akte-akte kependudukan sebagai pendataan dan kejelasan status seseorang.

Capaian indikator kinerja dapat dilihat pada semua penduduk telah terdaftar dalam catatan sipil, penduduk wajib KTP sudah memiliki KTP, dan seluruh akte-akte telah diterbitkan sesuai kebutuhan. Perkembangan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.29**  
**Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

No.	INDIKATOR	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Penduduk ber KTP	70,25	74,27	82,22	88,70	90,80	91,28
2	Rasio Bayi ber Akte kelahiran (%)	10,38	21,01	35,26	53,42	56,38	82,33
3	Rasio pasangan berakte nikah	12,19	20,41	23,12	27,23	28,91	30,40
4	Cakupan penerbitan KTP	70,25	74,27	82,22	88,70	100	91,28
5	Cakupan penerbitan akte kelahiran	7,03	13,96	21,30	25,93	100	100

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

Dari data di atas terlihat bahwa capaian indikator kependudukan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan semakin meningkat, disamping itu pelayanan kependudukan kepada masyarakat yang semakin baik. Capaian rasio bayi ber akte kelahiran mencapai 82,33% mendekati target nasional sebesar 85%. Kedepan

akan dilakukan peningkatan pelayanan Adminduk dengan mendekati pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas aparat pengelola administrasi kependudukan, sosialisasi akan pentingnya memiliki identitas kependudukan dan penambahan sarana prasarananya. Diharapkan seluruh masyarakat Rote Ndao lebih memahami pentingnya memiliki identitas diri dan masyarakat dapat terlayani secara cepat dan tepat.

#### G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa selama kurun waktu tahun 2015-2020 di Kabupaten Rote Ndao disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.30**  
**Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Posyandu Aktif (%)	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Desa Siaga Aktif (%)	50	50	50	50	44,64	46,43
4.	Realisasi APBDes (%)	-	-	-	-	96,92	98,99
5.	Persentase Bumdes Aktif (%)	-	-	-	-	66,00	66,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

#### H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah laju pertumbuhan penduduk, perkembangan angka kelahiran total, perkembangan rasio akseptor KB, dan angka pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Rote Ndao. Oleh sebab itu dalam rangka menekan jumlah penduduk, perlu dilakukan pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana (KB) yang didukung dengan regulasi dan fasilitasi dari pemerintah daerah baik pada tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten.

Capaian masing-masing indikator kinerja pada urusan ini menunjukkan trend meningkat namun lambat. Hal tersebut terlihat dari Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 sebesar 3,99% berfluktuasi dan pada tahun 2020 sebesar 1,16%. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rote Ndao tidak hanya dipengaruhi dari tingkat kelahiran saja, namun dipengaruhi juga jumlah migrasi masuk yang cukup tinggi. Hal ini karena sebagai Kabupaten pemekaran banyak pendatang yang menetap karena pekerjaan ataupun melakukan usaha.

Disamping itu angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2015 sebesar 42,49% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 46,09%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.31**  
**Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB**  
**Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

No.	INDIKATOR	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju pertumbuhan penduduk (%)	3.99	4.07	3.79	3.88	1.50	1.16
2	Angka kelahiran Total (TFR) (%)	4.20	3.10	3.80	3.60	3.60	3.60
3	% PD yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk penduduk	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Perda atau Perkada tentang pengendalian penduduk	1	1	1	1	0	1
5	Rasio Akseptor KB (%)	53.15	51.44	55.57	69.95	55.60	55.65
6	Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah (%)	42.49	42.29	47.58	44.63	46.09	46.09

Sumber : Dinas P3AP2KB Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

## I. Perhubungan

Urusan perhubungan meliputi perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara. Pembangunan perhubungan diarahkan untuk mewujudkan pembangunan transportasi terpadu, meningkatkan keselamatan transportasi secara terpadu, dan membuka akses dari pulau-pulau yang berpenduduk ke pelabuhan pengumpul. Disamping itu mendorong jasa transportasi yang bersifat komersial dengan melibatkan peran swasta dan masyarakat. Capaian Indikator urusan perhubungan dapat dilihat dari perkembangan sarana dan prasarana perhubungan, yaitu jumlah angkutan serta jumlah orang/barang jasa yang dapat terangkut baik angkutan darat, laut maupun udara.

### 1. Perhubungan Darat

Pelayanan angkutan darat di Kabupaten Rote Ndao mengalami peningkatan selama 6 (enam) tahun terakhir, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah sarana angkutan umum serta jumlah orang/barang yang terangkut kendaraan umum. Indikator ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya kendaraan yang melakukan wajib uji dan banyaknya rasio ijin trayek yang dikeluarkan. Wajib uji dan ijin trayek diwajibkan dalam rangka memudahkan penataan, pengaturan dan pengendalian trayek serta untuk menjamin keselamatan penumpang umum dan menjaga ekosistem lingkungan. Perkembangan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.32**  
**Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Perhubungan**  
**Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 – 2020**

No.	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah angkutan umum yg memiliki KIR	157	177	181	190	190	190
2.	Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan pada ruas jalan kabupaten (%)	23,64	25.24	26.44	28.44	32.44	36,44

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR tahun 2015 sebanyak 157 kendaraan, meningkat sebanyak 33 di tahun 2018, kondisi ini tidak mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 dengan jumlah 190 kendaraan. Sedangkan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan pada ruas jalan kabupaten pada tahun 2015 sebesar 23,64 % meningkat menjadi 36,44 % pada tahun 2020.

## 2. Perhubungan Laut

Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu Kabupaten Kepulauan di Provinsi NTT di dukung oleh 5 (lima) pelabuhan laut termasuk pelabuhan utama Ba'a yang telah dilengkapi dengan fasilitas Ruang tunggu penumpang, gudang/lapangan penumpuk peti kemas seluas 54,555 m<sup>2</sup>. Kapal yang melayani pelayaran rutin adalah Kapal Cepat KMP Ekspres Bahari yang melayani rute Kupang-Rote (Ba'a) PP setiap hari, kapal Roro KMP Labalekan, KMP Lakaan dan KMP Garda Maritim yang melayani rute Pantai Baru-Kupang PP dan Kupang-Pantai Baru-Ndao PP. Disamping untuk kelancaran transportasi antar pulau, telah dibangun 14 unit tambatan perahu dengan rata-rata kedalaman < 7 m yang digunakan untuk nelayan dan pelayaran rakyat dengan rute Papela (Rote Timur)-Namosain (Kupang) dan Ndao-Namosain (Kupang) serta antar pulau dalam kabupaten.

## 3. Perhubungan Udara

Transportasi udara di Kabupaten Rote Ndao didukung oleh tersedianya Bandara DC Saudale. Pesawat terbang yang melayani adalah Wings Air yang melayani Rute Rote-Kupang PP 2 (dua) kali dalam sehari pagi dan sore. Dengan adanya penerbangan Wings Air, kesulitan transportasi pada musim-musim angin yang berakibat transportasi laut berhenti, masih dapat diatasi dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat masih dapat terpenuhi.

Perkembangan pelayanan perhubungan di Kabupaten Rote Ndao dapat diketahui dengan jumlah penumpang yang terdata setiap tahunnya sesuai data pada tabel berikut:

**Tabel 2.33**  
**Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara**  
**Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

No.	INDIKATOR	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah orang melalui Dermaga/Bandara	166.257	289.965	270.002	369.673	335.852	228.142
2.	Jumlah Dermaga	6	6	6	6	6	6
3.	Jumlah Bandar Udara	1	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

## J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Capaian indikator urusan komunikasi dan informasi dapat dilihat dari meningkatnya jumlah Kampung Informasi Masyarakat (KIM) di tiap kecamatan, cakupan layanan telekomunikasi, serta proporsi/banyaknya penduduk yang menggunakan HP dan internet. Dengan adanya pusat informasi di kecamatan diharapkan informasi dari tingkat kabupaten baik itu informasi pembangunan maupun informasi lainnya dapat diserap sampai di tingkat bawah, dan sebaliknya komunikasi dan informasi dari tingkat desa bisa diakses langsung



pada tingkat kabupaten sehingga lebih cepat ditindaklanjuti apabila ada persoalan-persoalan yang memerlukan penyelesaian.

Disamping itu dengan dalam rangka mendukung program desa berdering maka dibangun banyak BTS yang menjangkau sampai ke pelosok desa. Dengan adanya BTS ini maka komunikasi menjadi lebih mudah dan murah. Sampai dengan saat ini BTS yang ada di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 42 BTS yang tersebar di 9 kecamatan kecuali kecamatan Ndao Nuse yang merupakan kecamatan kepulauan dan 29 desa masih merupakan daerah *blank spot*. Capaian indikator kinerja urusan telekomunikasi dan informasi dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 2.34**  
**Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Telekomunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 – 2019**

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Cakupan KIM di Kecamatan (%)	10	10	10	10	10
2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	56,02	68,96	85,34	89,45	91,20
3.	Jumlah Penduduk yang menggunakan HP (%)	65,66	65,28	65,46	65,40	65,45
4.	Proporsi RT berakses internet (%)	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65
5.	Proporsi RT yang memiliki Komputer (%)	0,456	0,456	0,456	0,657	0,657

Sumber : Dinas KISP Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2019

Capaian cakupan layanan telekomunikasi sampai dengan tahun 2019 mencapai 91,20% penduduk telah terlayani telekomunikasi. Dengan semakin banyak BTS yang dibangun, maka akan semakin luas cakupannya. Di era teknologi, komunikasi dipermudah dengan adanya perangkat Hand Phone (HP) dan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 65,45% penduduk telah memiliki dan menggunakan alat telekomunikasi HP. Masyarakat menggunakan kemajuan teknologi ini baru untuk melakukan komunikasi, namun untuk melakukan akses terhadap informasi global melalui internet masih rendah, yaitu 0,657%. Masyarakat yang memanfaatkan akses internet terbanyak adalah masyarakat di perkotaan, sedangkan masyarakat di desa belum memanfaatkan akses internet untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka karena kurangnya pengetahuan tentang hal tersebut dan masih rendahnya kepemilikan komputer di masyarakat dimana hanya 7,92% penduduk memiliki computer.

#### **K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Koperasi merupakan salah satu usaha penguatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan usaha. Capaian indikator kerjanya dapat dilihat pada persentase koperasi yang aktif dan berkembangnya jumlah usaha mikro dan kecil. Semakin banyak koperasi aktif dan semakin banyaknya usaha mikro kecil, diharapkan ekonomi kerakyatan semakin meningkat yang pada gilirannya mampu menurunkan angka kemiskinan serta mengurangi angka pengangguran. Secara rinci perkembangan capaian indikator kinerja urusan koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.35**  
**Perkembangan Indikator Kinerja Koperasi & UKM**  
**di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	persentase Koperasi Aktif (%)	87.32	86.84	89.60	98.90	85.15	85.15
2.	Peningkatan Jumlah UMKM (%)	25.97	30.01	33.64	32.88	76.79	76.79
3.	Peningkatan Produksi Oleh-Oleh dari Rote (OODARO) (rupiah)	-	-	-	-	63.660.355.000	63.660.355.000

*Sumber : Dinas Koperindag Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020*

Jumlah koperasi yang aktif dari tahun 2015-2020 berfluktuatif. Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Rote Ndao sampai tahun 2020 tercatat sebanyak 202 koperasi, yang terdiri dari koperasi aktif sebanyak 172 (85,15%) dan koperasi tidak aktif sebanyak 30 (14,85%). Sebagian besar koperasi aktif masih dalam tahap baru dibentuk dan sementara dilakukan pembinaan serta pendampingan. Sedangkan yang telah beroperasi perkembangannya lambat dan belum berkembang akibat pengelolaan manajemen koperasi yang kurang optimal sehingga belum mampu berperan dalam sistem perekonomian di Kabupaten Rote Ndao dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Usaha Mikro Kecil Menengah sangat berperan mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Masyarakat secara perorangan maupun yang tergabung dalam badan usaha dapat melakukan usaha ini dalam rangka meningkatkan pendapatan mereka. Dukungan pemerintah dari pusat ke daerah baik permodalan, pendampingan maupun peningkatan keterampilan SDM, diperlukan untuk mengembangkan usaha UKM. Jumlah UKM di Kabupaten Rote Ndao dari tahun ke tahun makin meningkat dan berkembang dengan adanya bantuan permodalan dari perbankan berupa dana KUR serta dari pemerintah daerah berupa bantuan dana pemberdayaan/dana bergulir. Jumlah UKM pada tahun 2020 berjumlah 952 meningkat dari tahun 2018 berjumlah 660 UKM.

#### **L. Urusan Penanaman Modal**

Laju Perekonomian daerah mengalami perkembangan yang cepat apabila didukung oleh penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menjaring investor maka kondisi daerah yang kondusif, regulasi yang jelas dan pengurusan ijin yang tidak berbelit-belit serta pelayanan yang prima sangat diperlukan. Disamping itu database potensi sumberdaya baik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang jelas dan akurat dan kejelasan status tanah harus dipersiapkan secara baik oleh daerah sehingga investor tertarik untuk melakukan investasi di daerah. Indikator kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat pada perkembangan jumlah investor dan besarnya nilai investasi swasta.

Jumlah investor yang menanamkan investasi di Kabupaten Rote Ndao di tahun 2020 terdapat 54 PMA/PMDN, nilai Investasi Penanaman Modal tersebut Rp.154.056.800.000

dan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 203 orang. Capaian Indikator urusan penanaman modal dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 2.36**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal**  
**Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

No.	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	33	24	30	11	17	54
2.	Jumlah Nilai investasi berskala nasional (000.000) Rupiah	106,533	154,531	246,658	105,000	149,156	154,056,800
3.	Realisasi Investasi PMDN/PMA (000) Rupiah	-	-	-	-	20,246,194	62.590,685
4.	persentase Bangunan/Usaha Berijin (%)	-	-	-	-	50	50

Sumber: Dinas PMPTSP Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

#### M. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga diprioritaskan pada program pembinaan, pengembangan pemuda dan olahraga, peningkatan peranserta kepemudaan dalam pembangunan daerah, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan program pembinaan olahraga berprestasi.

Organisasi pemuda yang melakukan pembinaan dan pengkaderan di Kabupaten Rote Ndao adalah KNPI, GMKI, GMNI serta organisasi pemuda lokal seperti Karang Taruna dan KAMU Rote Ndao sedangkan organisasi keolahragaan ditangani langsung dengan partisipasi masyarakat. Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga selama kurun waktu 2015-2020 di Kabupaten Rote Ndao disajikan pada tabel berikut

**Tabel 2.37**  
**Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga**  
**di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 – 2020**

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif (%)	100	100	100	100	100	100
2.	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	36,44	36,45	35,65	50,94	50,99	36,64

Sumber : Dinas PKO Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

#### N. Urusan Statistik

Urusan statistik dilaksanakan untuk penyediaan data dan informasi pembangunan yang akurat, digunakan sebagai salah satu alat analisis dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan serta untuk menentukan kebijakan pembangunan

selanjutnya. Indikator kinerja urusan statistik dapat dilihat pada kegiatan utama penyediaan data meliputi: Kabupaten Dalam Angka, Kecamatan dalam Angka, PDRB Kabupaten, PDRB Kecamatan dan data statistik lainnya sesuai tema yang dipublikasikan setiap tahun.

Dalam Rangka penyediaan data sektoral Pemerintah Daerah membuat basis data dalam Rote Ndao Satu Data melalui website Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang bertujuan menyediakan data untuk kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao. Rincian kualitas layanan urusan statistik pada tabel berikut:

**Tabel 2.38**  
**Kualitas Layanan Urusan Statistik**

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia
Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

#### **O. Urusan Persandian**

Urusan persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi antar perangkat daerah. Kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Sampai dengan saat ini, belum ada perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam berkomunikasi.

#### **P. Urusan Kebudayaan**

Kebijakan urusan kebudayaan ditekankan pada upaya untuk mewujudkan perlindungan dan pelestarian budaya lokal mengingat semakin pesatnya arus globalisasi dan terjadinya ekspansi seni budaya global melalui pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keanekaragaman budaya serta pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. Kebudayaan lokal yang perlu terus dikembangkan adalah Hus Ndeo, prosesi nikah adat Ti'i di desa Oehandi serta budaya kesenian seperti Foti dan Kebalai. Situs-situs cagar budaya terus dilestarikan merupakan peninggalan yang paling luhur untuk warisan daerah dan bangsa karena mengandung makna nilai dari budaya nenek moyang untuk kenangan sepanjang masa, oleh karena itu pelestarian cagar budaya terus dilakukan setiap tahun. Penyelenggaraan festival budaya juga menjadi even rutin tahunan, pada tahun 2019 diselenggarakan festival mulut seribu yang mendorong promosi wisata dan budaya Rote Ndao, sedangkan pada tahun ini even besar yang dilaksanakan hanya melalui virtual karena terkendala Covid-19 yang melanda Kabupaten

Rote Ndao. Adapun kinerja urusan kebudayaan selama kurun waktu tahun 2015-2020 di Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel berikut:

**Tabel 2.39**  
**Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan**  
**di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penyelenggaraan festival budaya dan pariwisata	6	3	2	2	1	1
2.	Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	3	3	-	6	6	6
3.	Jumlah cagar budaya yang diinventarisasi	-	-	-	14	23	23

Sumber : Disbudpar Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

#### Q. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Salah satu indikator atas minat baca masyarakat adalah kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Kebijakan urusan perpustakaan diarahkan pada peningkatan minat baca masyarakat lewat layanan informasi perpustakaan dengan mengoptimalkan fungsi perpustakaan sekolah, peningkatan pemberdayaan mobil unit perpustakaan keliling (MUPK) dan perpustakaan berbasis teknologi informasi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan. Kinerja layanan urusan Perpustakaan Kab. Rote Ndao tahun 2015-2020 seperti tabel berikut:

**Tabel 2.40**  
**Kualitas Layanan Urusan Perpustakaan Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun 2015-2020**

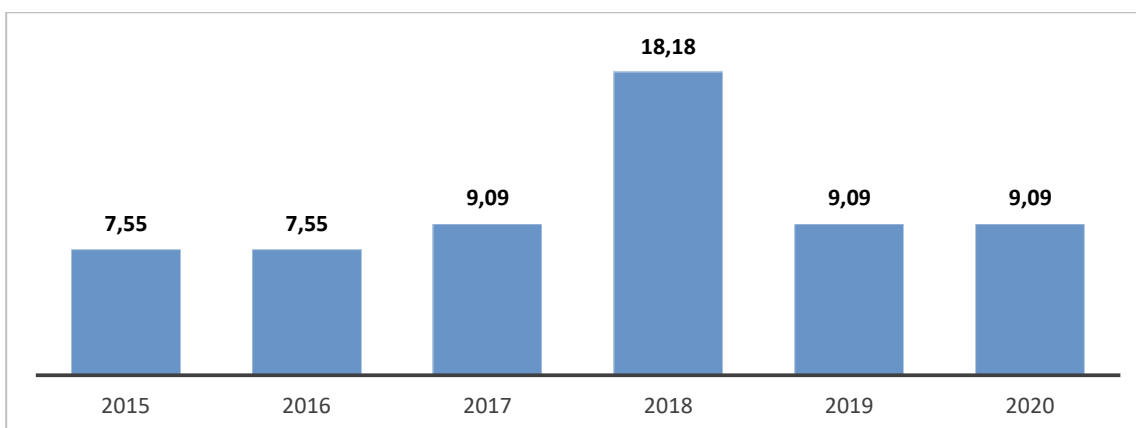
Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.283	78	466	1,301	2,089	969
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	628	508	400	420	354	500
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	200	200	200	210	200	400

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

#### R. Urusan Kearsipan

Pengelolaan kearsipan dalam suatu organisasi berfungsi sebagai inti kegiatan dan berguna untuk membantu pimpinan menentukan suatu kebijakan. Oleh sebab itu arsip harus dikelola secara baik dan mudah ditemukan pada saat diperlukan. Capaian perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2020 sebesar 9,09%. Sampai dengan tahun 2020 pengelolaan arsip di Kabupaten Rote Ndao masih dilakukan secara manual sehingga banyak surat dan dokumen yang belum tertata secara baik. Perangkat daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.36**  
**Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku**  
**Tahun 2015-2020**



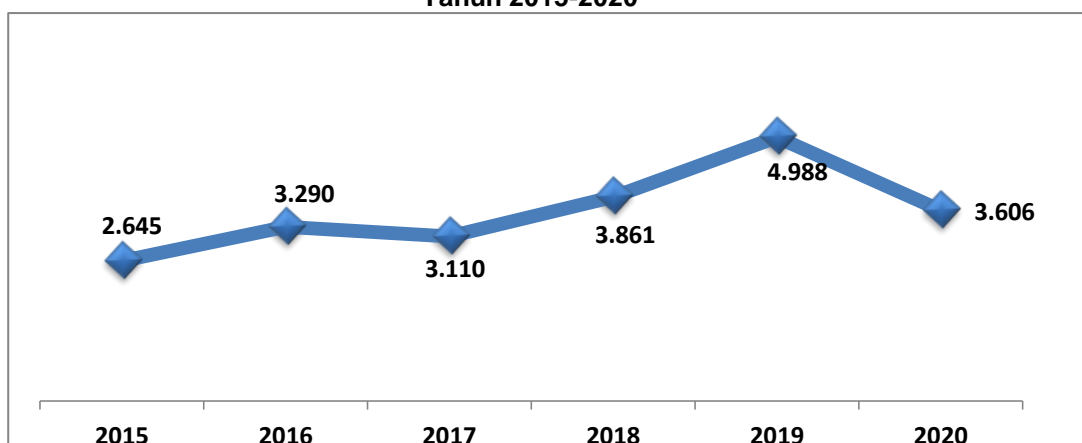
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

### 2.3.3 Layanan Urusan Pilihan

#### A. Urusan Pariwisata

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Pariwisata dapat dilihat dari Jumlah Kunjungan Wisata dan Lama Tinggal di Kabupaten Rote Ndao sehingga dapat berkontribusi pada sektor perekonomian khususnya peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata. Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2015 sebanyak 2.645 orang wisatawan baik domestik maupun mancanegara, meningkat sampai tahun 2019 sebanyak 4.988 orang dan pada tahun 2020 menurun kembali menjadi 3.606 orang karena dampak Covid-19 yang melanda Kabupaten Rote Ndao. Secara rinci jumlah kunjungan dijabarkan pada tabel berikut:

**Gambar 2.37**  
**Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun 2015-2020**



Sumber: Disbudpar Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

Secara Keseluruhan jumlah kunjungan Wisata di Provinsi NTT baik Domestik dan mancanegara adalah 130.000 Orang pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena implikasi virus korona yang melanda dunia dan NTT secara khusus.

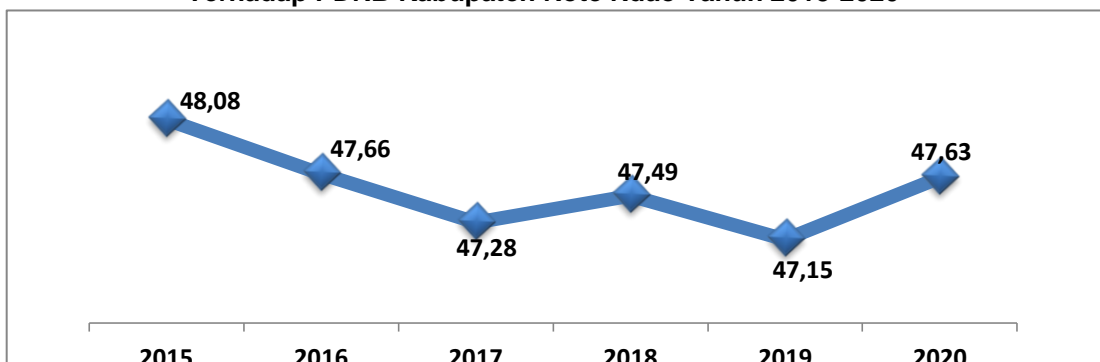


**B. Urusan Pertanian**

**1. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutan dan Perikanan Terhadap PDRB**

Struktur PDRB Kabupaten Rote Ndao terdiri dari 17 sektor salah satunya Pertanian. Pada tahun 2020, kontribusi sektor pertanian sebesar 47,63% dan merupakan sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Rote Ndao. Kontribusi sektor Sektor Pertanian, Kehutan dan Perikanan setiap tahun dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 2.38**  
**Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**



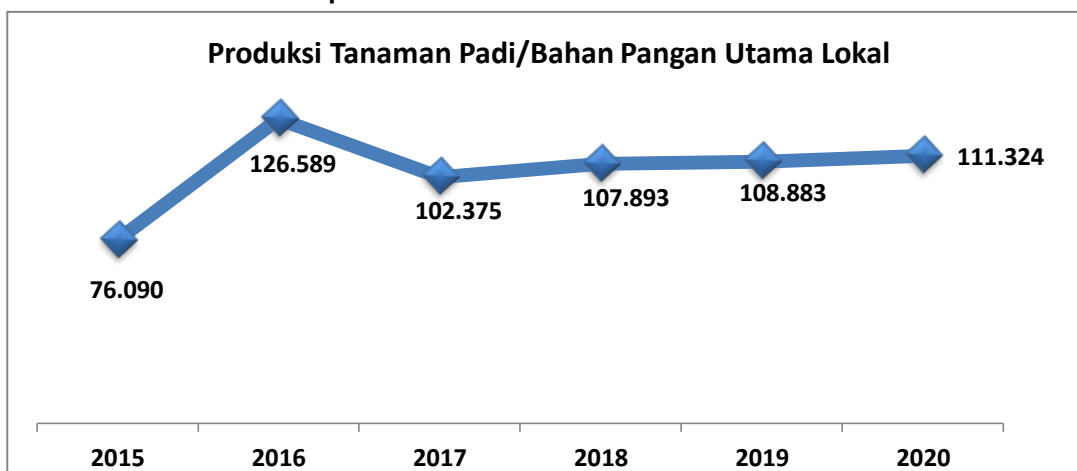
Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

Pada level Provinsi NTT, Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terus menurun dari 29,89 % tahun 2015 menurun menjadi 28,51 % pada tahun 2020.

**2. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya**

Padi merupakan komoditi pangan utama di Kabupaten Rote Ndao, oleh karena itu peningkatan produksi padi sangat menunjang ketersediaan pangan penduduk yang juga terus meningkat setiap tahun. Peningkatan Produksi padi sangat dipengaruhi oleh gerakan Lakamola Anan Sio yang digerakan di Kabupaten Rote Ndao sejak Tahun 2010. Secara lengkap, Produksi Padi dari tahun 2015-2020 dilihat pada grafik berikut:

**Gambar 2.39**  
**Produksi Tanaman Padi (Ton) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

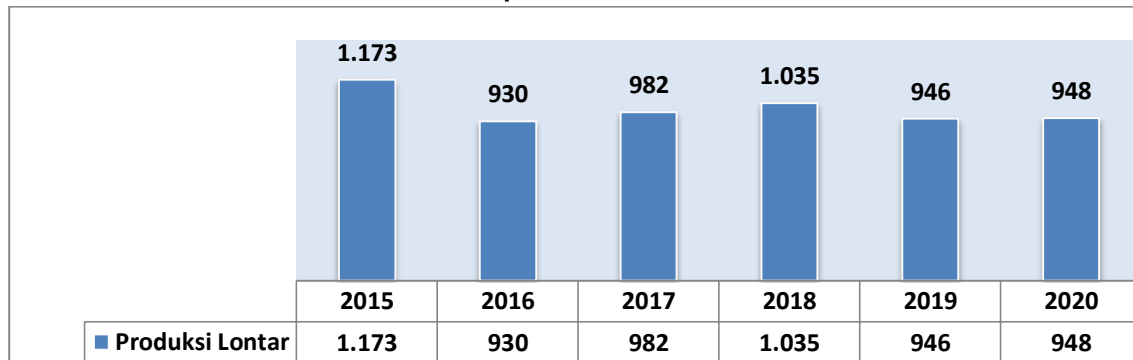


Sumber: BPS Kab. Rote Ndao dan Dinas Pertanian, Tahun 2015-2020

### 3. Produksi Produk Unggulan Daerah Bidang Pertanian

Pertanian masih memegang peranan penting dalam struktur ekonomi Kabupaten Rote Ndao dengan kontribusi di atas 47% oleh karena itu produk unggulan daerah Kabupaten Rote Ndao berbasis pertanian yaitu bidang Pertanian tanaman pangan adalah Padi sedangkan Bidang Perkebunan adalah Lontar. Dengan adanya Pembentukan Masyarakat Ekonomi Nusa Tenggara Timur yang mendorong pengembangan Produk Unggulan Daerah, maka lontar akan menjadi salah satu fokus pengembangan. Secara keseluruhan produksi Lontar dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

**Gambar 2.40**  
**Produksi Lontar Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**



Sumber: Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

Dari gambar di atas dapat dilihat produksi lontar cenderung meningkat setiap tahun meskipun tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat terutama generasi muda untuk menyadap lontar. Dengan fokus pemerintah untuk mengembangkan produksi lontar, maka diharapkan akan menambah nilai ekonomis hasil lontar sehingga dapat mendorong minat generasi muda untuk menyadap lontar. Fokus pengembangan lontar untuk meningkatkan produksi dan nilai jual gula merah dan gula kristal.

#### C. Urusan Perdagangan

Kontribusi urusan perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao sangat signifikan. Oleh karena itu perlu difasilitasi dengan kebijakan publik yang menyederhanakan regulasi yang dapat menimbulkan minat investor untuk mengembangkan dan memperluas usaha perdagangannya.

Capaian indikator kinerja urusan perdagangan dapat dilihat dari jumlah kelompok pedagang/usaha informal, jumlah perdagangan antar pulau dan sarana pasar yang tersedia. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.41**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Perdagangan**  
**Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

No.	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pedagang yang mendapat bantuan	-	-	-	-	5	6
2.	Jumlah pedagang/usaha informal	414	474	424	704	704	704
3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	-	-	-	-	0,71	0,85
4.	Jumlah Pasar Tradisional (unit)	23	26	26	28	30	30
5.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	7,36	7,29	7,06	6,89	6,96	6,67

Sumber : BPS Kab. Rote Ndao dan Dinas Koperindag Kab. Rote Ndao 2015-2020

Jenis usaha perdagangan di Kabupaten Rote Ndao sebagian besar perdagangan menengah dan kecil serta hanya terdapat 4 perdagangan besar. Komoditas utama adalah sembako dan bahan bangunan, sedangkan komoditas perdagangan antar pulau adalah ternak besar dan kecil, beras lokal, Lobster, Cumi, Ikan kering serta rumput laut.

#### **D. Urusan Perindustrian**

Pembangunan urusan perindustrian yang dilaksanakan meliputi Fasilitasi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, Kerjasama Kemitraan Industri mikro, kecil menengah dengan swasta dan penyediaan sarana prasarana klaster industri. Capaian indikator kinerjanya dapat dilihat dari semakin berkembangnya jumlah produk industri, jumlah perajin industri dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap kelompok perajin.

Industri yang berkembang di Kabupaten Rote Ndao adalah industri kecil dan menengah berupa produk kerajinan tangan dan diversifikasi produk olahan makanan dari sumberdaya alam yang tersedia. Dalam rangka pengembangan usaha industri, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pendampingan dan bantuan modal usaha kepada kelompok perajin baik kelompok maupun perorangan. Perkembangan indikator kinerja urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.42**  
**Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

No.	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan Bina kelompok Pengrajin	-	0,59	0,38	0,14	0,12	0,12

Sumber : BPS Kab. Rote Ndao dan Dinas Koperindag Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

#### **E. Urusan Transmigrasi**

Transmigrasi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan kepemilikan aset di tempat mereka tinggal. Pada kurun waktu tahun 2015 - 2019, persentase transmigrasi lokal sebesar 100%

dengan jumlah KK sebanyak 50 pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 70 KK pada tahun 2016. Dalam 4 (empat) tahun terakhir yakni 2017,2018,2019 dan 2020, jumlah KK transmigran lokal menurun menjadi 25 KK, 18 KK ,10 KK dan 8 KK.

**Tabel 2.43**  
**Persentase Transmigran di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 – 2020**

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2020
1.	Persentase Transmigran Lokal	100	100	100	100	100

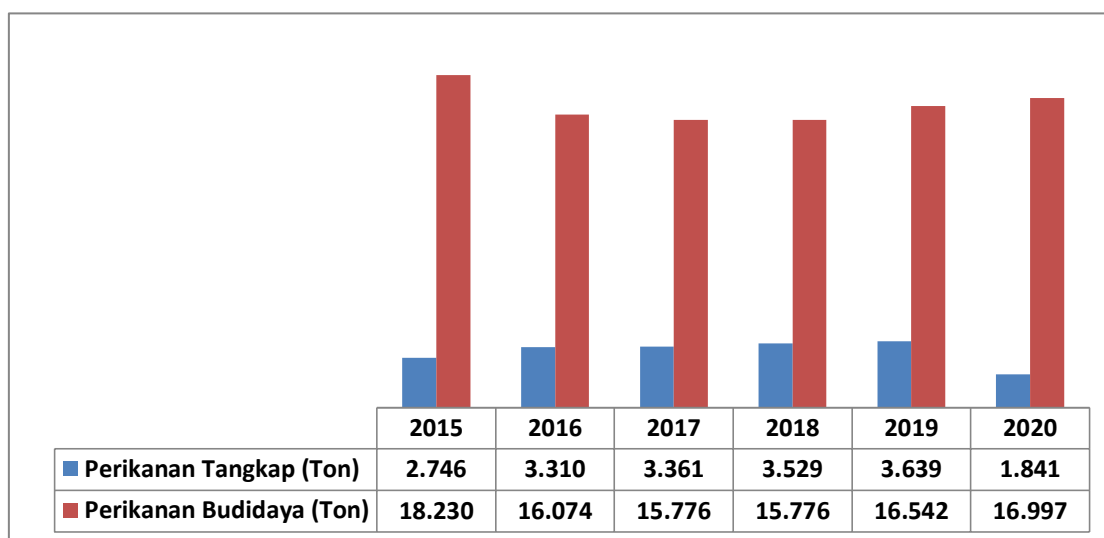
Sumber : Dinas Transnaker Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

## F. Urusan Kelautan dan Perikanan

### 1. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

Rata-rata produksi perikanan tangkap tahun 2015-2020 adalah 3.071 Ton per Tahun. Produksi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebanyak 3.693 Ton. Jumlah Produksi perikanan budidaya pada tahun 2015 sebesar 18.230 ton mengalami penurunan hingga tahun 2020 sebesar 16.997 ton, hal ini disebabkan belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana perikanan. Perkembangan produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2015-2020 seperti pada gambar berikut:

**Gambar 2.41**  
**Jumlah Produksi Ikan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

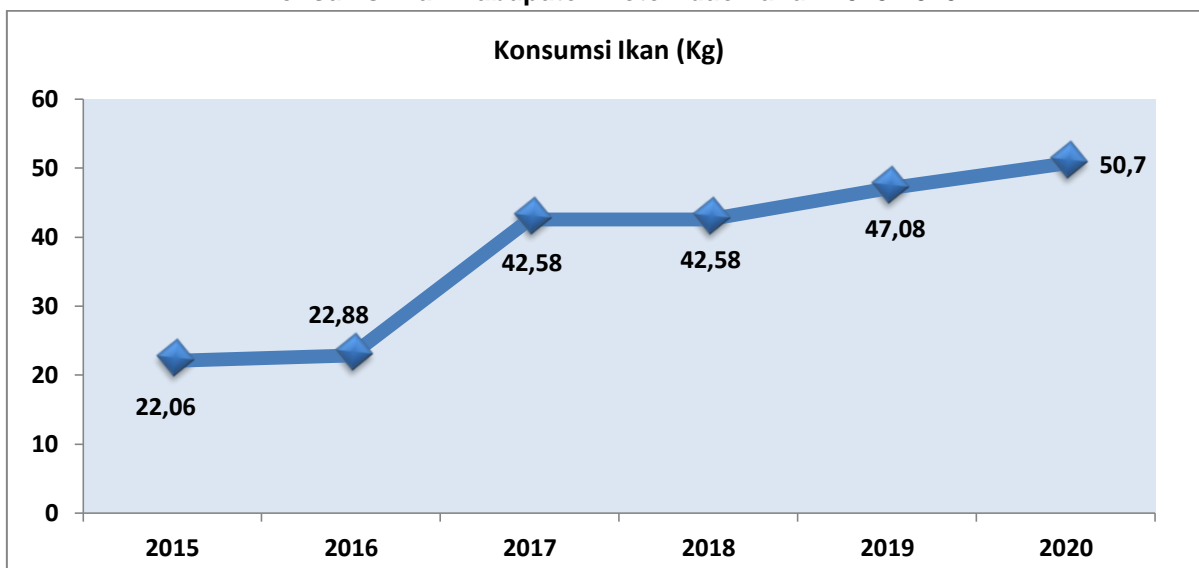


Sumber: DKP Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

### 2. Konsumsi Ikan

Jumlah konsumsi ikan terus mengalami peningkatan setiap tahun seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya daya beli masyarakat.

**Gambar 2.42**  
**Konsumsi Ikan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**



Sumber : DKP Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

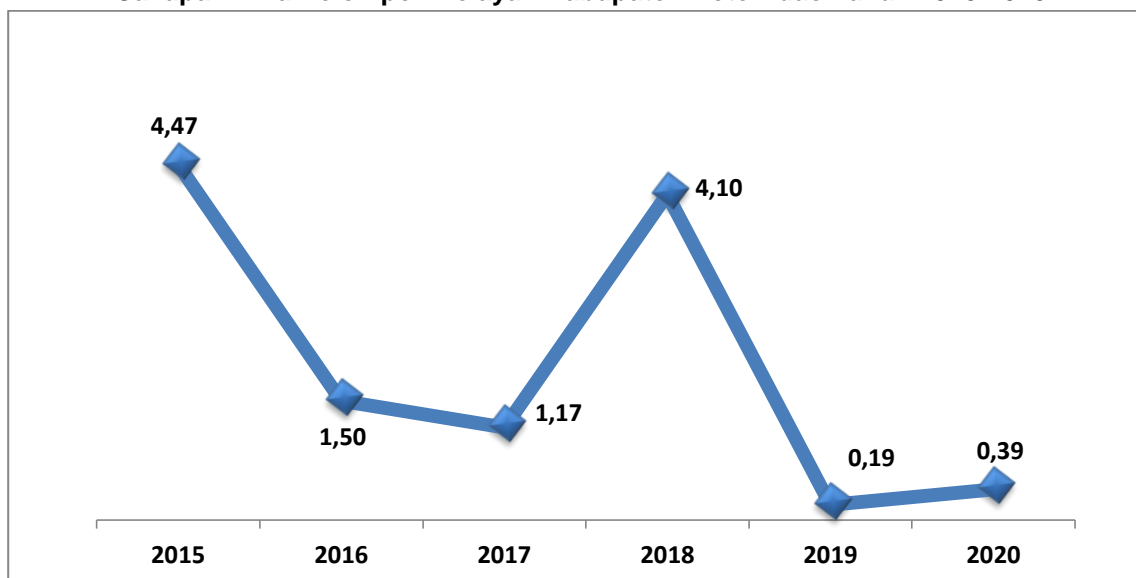
Berdasarkan grafik diatas, di ketahui Konsumsi Ikan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 mencapai 50,7 Kg/kapita/tahun meningkat sejumlah 3,62% dari Tahun 2019. Peningkatan konsumsi ikan diharapkan bisa menekan kasus gizi buruk, gizi kurang, *stunting*, dan beberapa kasus yang erat kaitannya dengan masalah pangan dan gizi.

Meningkatnya konsumsi ikan di Kabupaten Rote Ndao dipengaruhi oleh jumlah produksi ikan yang terus meningkat setiap tahunnya sebagai akibat dari program pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana perikanan seperti kapal, pukat, dan alat penangkap ikan lainnya. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya konsumsi ikan juga telah menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan.

### **3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan**

Cakupan nelayan yang dibina cenderung mengalami fluktuatif, pada tahun 2015 sebesar 4,47 % mengalami peningkatan sebesar 0,39 % pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,19 %. Hal ini disebabkan anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan kelompok nelayan masih berada pada posisi yang minimal sehingga berimplikasi pada kelompok-kelompok nelayan tersebut.

**Gambar 2.43**  
**Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**



Sumber: DKP Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

#### **4. Pemanfaatan Potensi Kelautan dan Perikanan untuk Pariwisata**

Kabupaten Rote Ndao sebagai daerah dengan potensi laut yang sangat luas dengan keunikannya sendiri seperti pasir putih di sepanjang pantai, gelombang yang cocok untuk surfing, ekosistem laut yang cocok untuk diving. Potensi laut ini dimanfaatkan sebagai obyek wisata bahari dengan menggelar berbagai event seperti lomba dayung yang pernah dilaksanakan pada tahun 2009, lomba selancar yang dilaksanakan setiap tahun dan lomba mancing pada tahun 2015. Untuk diving belum dilaksanakan secara luas karena membutuhkan keahlian khusus sedangkan di Kabupaten Rote Ndao belum memiliki SDM dengan keahlian tersebut.

#### **2.3.4 Urusan Penunjang**

##### **A. Urusan Perencanaan Pembangunan**

##### **1. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2004 terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD kemudian dijabarkan kedalam RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD dijabarkan ke dalam RENJA Perangkat Daerah.

RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009, RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2014 dan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019, sedangkan RKPD Induk dan RKPD Perubahan Kabupaten Rote Ndao ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Bupati Rote Ndao.



**Tabel 2.44**  
**Penetapan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2021**

<b>No.</b>	<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Nomor dan Tanggal Penetapan Peraturan Bupati RKPD Induk</b>	<b>Nomor dan Tanggal Penetapan Peraturan Bupati RKPD Perubahan</b>
1.	2015	No. 26 Tahun 2014, Tgl 11 Mei 2014	No. 45 Tahun 2015, Tgl 17 Agustus 2015
2.	2016	No. 34 Tahun 2015, Tgl 20 Mei 2015	No. 33 Tahun 2016, Tgl 24 Sept 2016
3.	2017	No. 38 Tahun 2016, Tgl 27 Oktober 2016	No. 47 Tahun 2017, Tgl 3 Okt 2017
4.	2018	No.20 Tahun 2017, Tgl 31 Mei Tahun 2017	No. 20 Tahun 2018 Tgl 28 September 2018
5.	2019	No. 11 Tahun 2018, Tgl 13 Agustus 2018	No. 10 Tahun 2019 Tgl 18 September 2019
6.	2020	No. 20 Tahun 2019, Tgl 2 Juli 2019	No. 27 Tahun 2020 Tgl 13 Agustus 2020
7.	2021	No. 22 Tahun 2020, Tgl 9 Juli 2020	-

*Sumber: Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Tahun 2020*

## **2. Konsistensi Program**

Program yang dilaksanakan dalam RKPD Tahun 2015-2019 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 namun terdapat beberapa program yang harus dilaksanakan di luar RPJMD akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Program yang dilaksanakan dalam RKPD Tahun 2020 dan 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024

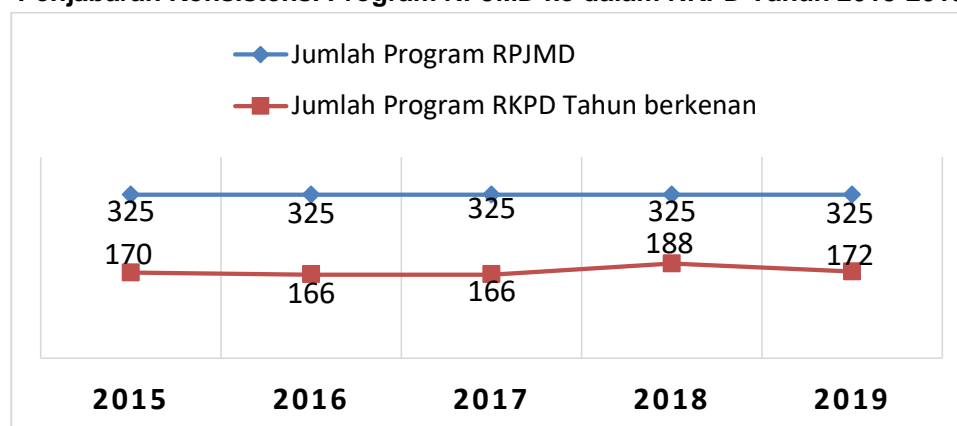
**Tabel 2.45**  
**Program Inkonsisten Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019**

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM INKONSISTEN RKPD	TARGET (OUTCOME/ INDIKATOR)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP2AP2KB)	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA FISIK PELAYANAN KB SERTA PEMERATAAN AKSES PELAYANAN KB YANG BERKUALITAS	MENINGKATNYA PELAYANAN AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA 100%	MERUPAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT MELALUI DAK

Sumber: Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Tahun 2020

Sesuai RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 terdapat 325 Program yang dapat dilaksanakan setiap tahun, namun karena keterbatasan anggaran maka ditetapkan program tertentu yang dilaksanakan dalam RKPD setiap tahun sesuai dengan prioritas pembangunan tahun berkenan. Rasionalisasi program dilakukan untuk memberikan daya ungkit lebih bagi program pembangunan yang benar-benar berkontribusi langsung pada pencapaian visi dan misi daerah serta sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Perbandingan Jumlah Program RPJMD dan jumlah Program RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 seperti gambar dibawah ini.

**Gambar 2.44**  
**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2015-2019**



Sumber: Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Tahun 2020

## B. Urusan Keuangan

### 1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.46**  
**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**  
**Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber : BKA Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

## 2. Persentase SiLPA

SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Dengan demikian SiLPA dapat menggambarkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin besar SiLPA menunjukkan semakin tidak efektifnya pelaksanaan APBD karena banyak anggaran yang belum dikelola untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, persentase SiLPA secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.47**  
**Persentase SiLPA Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Total SiLPA	68.148.167.142	59.231.917.831	50.738.522.155	67.374.499.479	68.281.320.006	66.316.989.338
2	Total APBD	595.074.466.261	708.870.066.413	739.924.285.730	779.660.723.569	812.561.038.862	830.100.421.741
3	Persentase	11,45	8,36	6,86	8,64	8,40	8,0

Sumber : BKA Kab. Rote Ndao , Tahun 2015-2020

## 3. Persentase Belanja Pendidikan

Amanat Undang-Undang tentang besaran anggaran pendidikan 20 % dari postur APBD dan APBN tertuang di UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 Ayat (1) Tentang Sistem Pendidikan Nasional, persentase Belanja Pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.48**  
**Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	171.099.970.184	174.346.281.985	177.250.518.980	195.793.034.554	197.602.180.345	197.602.180.345
Total APBD	595.074.466.261	708.870.066.414	739.924.285.730	779.660.723.569	812.561.038.862	830.100.421.741
Persentase	28,75	24,59	23,96	25,11	24,85	23,80

Sumber: BKA Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

## 4. Persentase Belanja Kesehatan

Pemerintah daerah harus menganggarkan minimal 10 % dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembiayaan kesehatan masyarakat yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Persentase Belanja Kesehatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.49**  
**Persentase Belanja Kesehatan**  
**Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	88.735.206.993	93.035.410.726	110.128.128.670	124.131.228.819	110.336.921.600,03	110.336.921.600,03
Total APBD	595.074.466.261	708.870.066.414	739.924.285.730	779.660.723.569	812.561,038,862	830.100.421.741
Persentase	14,91	13,12	14,88	15,92	13,87	13,29

Sumber : BKA Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

### 5. Perbandingan Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

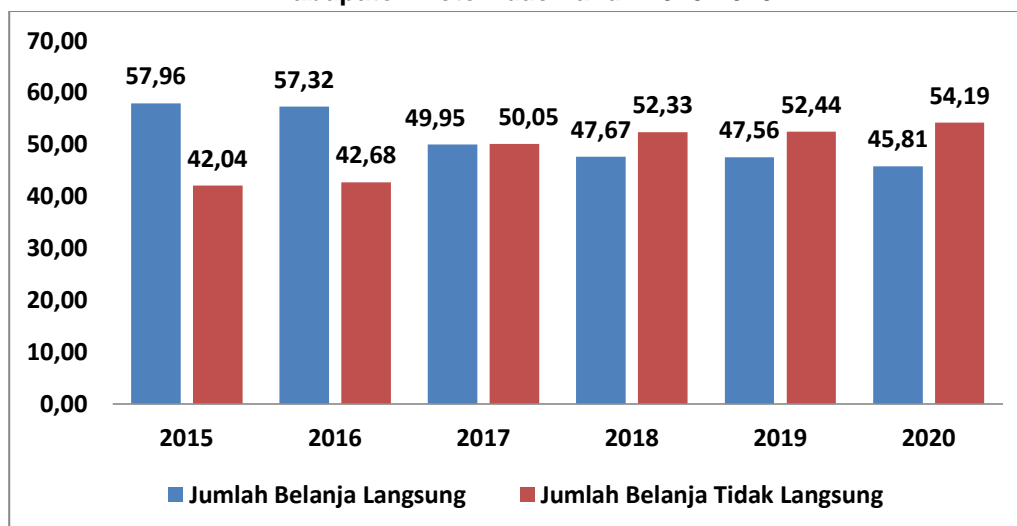
Pada Struktur APBD terdapat 2 (dua) jenis belanja, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program yang merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : Belanja Pegawai; Bunga; Subsidi; Hibah; Bantuan Sosial; Belanja Bagi Hasil; Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga. Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.50**  
**Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung**  
**APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Belanja Langsung	348,257,448,874	408,900,139,303	358,301,496,079	371,002,296,870	386,762,021,538	387.848.398.916
Jumlah Belanja Tidak Langsung	252,588,504,728	304,429,302,174	359,007,913,245	407,249,736,171	426,389,739,957	458.752.022.825
Total APBD	600,845,953,602	713,329,441,477	717,309,409,324	778,252,033,041	813,151,761,495	846.600.421.741

Sumber : BKA Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

**Gambar 2.45**  
**Persentase Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung**  
**Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**



Sumber: BKA Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

#### 6. Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Kabupaten diwajibkan mengalokasikan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak kepada Desa minimal 10%. Dengan demikian secara bertahap berusaha memenuhi ketentuan tersebut dan sejak tahun 2017 Pemerintah daerah mengalokasikan dana tersebut 16,33% kepada Desa. Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota didiliha pada tabel berikut:

**Tabel 2.51**  
**Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa**  
**Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	50.838.498.934	75.345.953.590	116.811.089.320	142.024.857.518	155.225.785.000	149.372.264.400
Total APBD	595.074.466.261	708.870.066.414	739.924.285.730	779.660.723.569	812.561.038.862	830.100.421.741
Persentase	8,54	10,63	15,79	18,22	19,10	17,99

Sumber: BKA Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

#### 7. Penetapan APBD

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 312 Ayat (1) bahwa “Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun”. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penetapan APBD Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.52**  
**Penetapan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

No	Tahun	Nomor dan Tanggal Penetapan Perda APBD Induk	Nomor dan Tanggal Penetapan Perda APBD Perubahan	Keterangan
1	2015	Nomor 12 Tahun 2014 Tanggal 23 Desember 2014	Nomor 4 Tahun 2015 Tanggal 13 November 2015	Tidak Tepat Waktu
2	2016	Nomor 05 Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015	Nomor 5 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016	Tidak Tepat Waktu
3	2017	Nomor 6 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016	-	Tidak Tepat Waktu
4	2018	Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 1 Februari 2018	No 4 Tahun 2018 Tanggal 29 Oktober 2018	Tidak Tepat Waktu
5	2019	Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 29 Januari 2019	No 7 Tahun 2019 Tanggal 7 September 2019	Tidak Tepat Waktu
6	2020	Perbup Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 23 Januari 2020	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 6 Oktober 2020	Tidak Tepat Waktu

Sumber: BKA Kab. Rote Ndao, Tahun 2020

### C. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan selama kurun waktu tahun 2015-2019 terlihat pada beberapa indikator berikut ini:

**Tabel 2.53**  
**Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1,40	16,57	16,57	16,00	16,00	16
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	2,51	2,79	1,57	1,57	1,57	1,57
Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah	644	613	602	608	606	606
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah	32	31	32	32	32	27
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2.530	2.538	2.538	2.608	2.678	2.748
Persentase pelanggaran pegawai	0,08	0,56	0,69	0,29	0,26	0,60

Sumber: BKPP Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

### D. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Sesuai dengan Pasal 219 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ditambahkan menjadi salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Permendagri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kelitbangan terdiri dari Kelitbangan Utama dan Kelitbangan Pendukung.



Kelitbangan Utama terdiri dari:

- 1) penelitian;
- 2) pengkajian;
- 3) pengembangan;
- 4) perekayasaan;
- 5) penerapan;
- 6) pengoperasian; dan
- 7) evaluasi kebijakan.

Kelitbangan Pendukung terdiri dari:

- 1) peningkatan kapasitas kelembagaan;
- 2) penguatan ketatalaksanaan;
- 3) peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- 4) peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- 5) fasilitasi inovasi daerah;
- 6) pengembangan basis data kelitbangan;
- 7) penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- 8) pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

Mengingat Penelitian dan Pengembangan merupakan urusan baru di pemerintahan daerah, maka indikator kinerjanya belum secara spesifik dijabarkan di dalam RPJMD 2014-2019 namun kegiatan kelitbangan tetap dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan Tahun 2016. Kegiatan yang dilakukan hanya bersifat kelitbangan pendukung berupa penguatan kerjasama kelitbangan. Pada tahun 2017 dilakukan sebuah kajian pengembangan pertanian, perikanan dan kelautan di kawasan perbatasan Kabupaten Rote Ndao bekerjasama dengan Badan Litbang Provinsi NTT.

Dari sisi inovasi daerah, terdapat 3 inovasi yang telah dilaksanakan yaitu Gerakan *Lakamola Anan Sio*, *Mai Ita Esa Tafafoa Nusa Lote* dan *Hoholok/Papadak*, Inovasi Daerah Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.54**  
**Inovasi Daerah Kabupaten Rote Ndao**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Tahun Mulai Pelaksanaan</b>	<b>Bidang Inovasi</b>
1	Lakamola Anan Sio	2010	Pertanian, Perikanan dan Kelautan
2	Mai Ita Esa Tafafoa Nusa Lote	2015	Perikanan Kelautan dan Lingkungan Hidup
3	Hoholok/Papadak	2017	Pembangunan Daerah
4	ROTE CERDAS	2019	Kesehatan
5	Kakak Angkat Adik Asuh	2020	Kesehatan

Sumber: Bapelitbang Kab. Rote Ndao, Tahun 2020

## E. Urusan Pengawasan

Capain kinerja pengawasan selama kurun waktu tahun 2015-2020 terlihat pada beberapa indikator berikut ini. Capaian Kinerja Pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.55**  
**Capaian Kinerja Pengawasan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	84,09	79,90	61,14	56,74	83,33	88,24
2.	Jumlah Temuan BPK	21	14	16	13	13	10

Sumber: Inspektorat Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

## F. Urusan Sekretariat Dewan

Capain kinerja sekretariat dewan selama kurun waktu tahun 2015-2020 terlihat pada beberapa indikator berikut ini:

**Tabel 2.56**  
**Capaian Kinerja Sekretariat Dewan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Secara umum struktur ekonomi di Kabupaten Rote Ndao di dominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Peran sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap seluruh kegiatan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao tahun 2016 mencapai 48,50%, yakni hampir sebagian dari kegiatan ekonomi bergerak di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Sektor pariwisata di Kabupaten Rote Ndao juga merupakan sektor yang sangat mendukung kemampuan perekonomian daerah dengan potensi Wisata Bahari, Wisata Alam, Wisata Religius, Wisata Sejarah dan Wisata Budaya. Perkembangan pariwisata mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pariwisata menciptakan permintaan, baik permintaan konsumsi maupun permintaan investasi, yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa, baik barang konsumsi maupun barang modal. Wilayah Kabupaten Rote Ndao yang terdiri dari 107 pulau, dimana terdapat delapan pulau yang berpenghuni dan 99 pulau tidak berpenghuni, dengan luas daratan 1.278,05 Km<sup>2</sup> dan Luas Laut 2.376 Km<sup>2</sup>. Dari luas lautan tersebut sebagian merupakan daerah pantai atau pesisir berpasir putih yang sangat indah dan eksotis dipandang mata.

Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang ada di Kabupate Rote Ndao berjumlah 114 destinasi, dengan keunikan dan keunggulan masing-masing, baik yang telah dikelola maupun yang belum. Sebagai daerah yang berada pada Kawasan Strategis Nasional Pariwisata, Kabupaten Rote Ndao telah menjadi daerah tujuan wisata yang diminati wisatawan mancanegara dan domestik. Salah satu yang menjadi tujuannya adalah pantai Nemberala dan Boá yang terkenal dengan gelombangnya yang sangat bagus untuk berselancar. Sekarang ini sedang dikembangkan Destinasi Mulut Seribu di Kecamatan Landu Leko sebagai Pariwisata Estate in *The Ring of Beauty*. Sebagai salah satu target pengembangan destinasi pariwisata Provinsi, maka pemerintah daerah mendukung sepenuhnya pengembangan destinasi pariwisata Mulut Seribu untuk 5 (lima) tahun kedepan selain destinasi wisata potensial lainnya yang telah berkembang di Kabupaten Rote Ndao. Secara rinci Potensi Pariwisata Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 2.57**  
**Potensi Destinasi Wisata Kabupaten Rote Ndao**

NO	NAMA OBJEK WISATA	LOKASI OBJEK WISATA	LUAS OBJEK WISATA	JARAK DARI KOTA KAB.	JENIS DAYA TARIK OBYEK WISATA	FASILITAS YANG ADA	KERAGAMAN DAYA TARIK WISATA
<b>I. Kec Landu Leko</b>							
1	Laut Mati	Desa Daiama		55 km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam, Keunikan ODTW (Ikan Air Tawar Yang Hidup di Danau Air Asin), Olahraga Air

2	Danau Oendui	Desa Daurendale		49 Km	Wisata Alam	-	Panorama Alam, Lokasi Pemancingan Ikan Air Tawar, Habitat Hidup Hewan Langka (Rusa Timor), Olahraga Air
3	Mulut Seribu	Desa Daiama		46 Km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam Gugusan Pulau - pulau Kecil, Lokasi Pemancingan, Olahraga Air, Ekowisata (Lokasi Budidaya Rumput Laut)
4	Pantai Kainadi	Desa Sotimori		55 Km	Wisata Bahari dan Sejarah	-	Panorama Alam, Lokasi Peninggalan jangkar kapal Magelhaens
5	Pantai Mae'oe	Desa Pukuafu		67 Km	Wisata Bahari	-	Panorama Pantai, Olahraga Air, Lokasi Pemancingan
6	Tanjung Pukuafu	Desa Pukuafu		65 Km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam, Lokasi Pemancingan, Habitat Hidup Hewan Langka (Rusa Timor), Olahraga Air
7	Nisita	Desa Daiama		46 Km	Wisata Sejarah	-	Peninggalan benda bersejarah/ jangkar
8	Pulau Usu	Desa Daiama		46 Km	Wisata Bahari	-	Keunikan ODTW (Danau Air Asin)
9	Gua Sarang Burung	Desa Daurendale		49 Km	Wisata Alam	-	Keunikan ODTW (Gua Sarang Burung Walet)
10	Danau Ledulu	Desa Daiama		46 Km	Wisata Alam	-	Habitat Hidup Hewan Endemik Rote (Kura - kura leher ular)
11	Rumah Raja Johanis	Desa Deurandale		68 Km	Wisata Sejarah	-	Peninggalan Sejarah/ Tempat Tinggal Raja
12	Gua Supalea	Desa Bolatena		67 km	Wisata Alam	-	Panorama Alam
13	Makam Raja Landu	Desa Sotimori		55 km	Wisata Sejarah	-	Makam Bersejarah
14	Jangkar Tua	Desa Daiama		46 km	Wisata Sejarah	-	Peninggalan Benda Bersejarah
15	Meriam	Desa Sotimori		55 km	Wisata Sejarah	-	Peninggalan Benda Bersejarah
<b>II. Kec. Rote Timur</b>							
16	Pantai Oesosole	Desa Faifua		67 km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam, Pantai Berpasir Putih Yang Memanjang Sejauh ±3 km, Ekowisata (Lokasi Budidaya Rumput Laut Masyarakat Sekitar)
17	Teluk Fei	Desa Mukekuku		60 km	Wisata Bahari	-	Panorama Pantai, Olahraga Air
18	Pantai Bajo	Kel. Londalusi		53 km	Wisata Bahari	-	Pantai, Keunikan Kehidupan Masyarakat Kampung Bajo

19	Pantai Solokaelutu	Desa Mukekuku		60 km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai, Olahraga Air
20	Gunung Lakamola	Desa Lakamola		62 km	Wisata Alam dan Wisata Minat Khusus	-	Panorama Alam, Hiking dan Tracking
21	Rumah Raja Lenggu	Desa lalao		50 km	Wisata Sejarah		Peninggalan Bersejarah
22	Rumah Raja Sjoen	Desa Faifua		67 km	Wisata Sejarah	-	Peninggalan Bersejarah
23	Benteng Kerajaan Oepao	Desa Faifua		67 km	Wisata Sejarah	-	Peninggalan Bersejarah
24	Rumah Raja Bilba	Desa Lalao		50 km	Wisata Sejarah	-	Peninggalan Bersejarah
25	Situs bangkai Pesawat Terbang Teluk Fei	Desa Mukekuku		60 km	Wisata Sejarah	-	Peninggalan Bersejarah
<b>III. Kec. Pantai Baru</b>							
26	Pantai Batu Ndao	Desa Tesabela		38 km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai
27	Benteng Raja Lelenuk	Desa Sonimanu		43 km	Wisata Alam dan Sejarah	-	Peninggalan Bersejarah
28	Gua Niak	Pantai Baru		32 km	Wisata Alam	-	Panorama Alam
29	Letediu	Desa Oeledo		42 km	Wisata Alam dan Wisata Minat Khusus	-	Panorama Alam dan Lokasi Hiking
30	Pantai Nusakdale	Desa Nusakdale		48 Km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Olahraga Air
31	Pantai Oeledo	Desa Oeledo		42 km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai
32	Pantai Namohodale	Desa Tunganamo		36 km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Yang Tepat Untuk View Matahari Terbenam, Olahraga Air
33	Oeo	Desa Keoen		42 km	Wisata Bahari	-	Olahraga Air
34	Nita	Desa Oeledo		42 Km	Wisata Alam	-	Panorama Alam
35	Benteng Pertahanan	Desa Eda Lode		34 Km	Wisata Alam dan Sejarah	-	Situs Peninggalan Sejarah
36	Gua Niak (Niak Lean)	Desa Sonimanu		43 km	Wisata Alam dan Sejarah	-	Panorama Alam
37	Lea Bauk	Desa Sonimanu		43 km	Wisata Alam dan Sejarah	-	Situs Peninggalan Sejarah
38	Gua Ngalamon	Desa Lenupetu		48 km	Wisata Alam dan Sejarah	-	Panorama Alam
39	Batu Ofak	Desa Sonimanu		43 km	Wisata Alam dan Sejarah	-	Panorama Alam
40	Meriam Tumbuk	Kelurahan Olafulihaa		38 km	Wisata sejarah	-	Situs Peninggalan Sejarah
41	Lapan lu Laten (Makam Lapan lu)	Kelurahan Olafulihaa		38 km	Wisata sejarah	-	Situs Peninggalan Sejarah
42	Rumah Raja Diu	Desa Keoen		42 km	Wisata sejarah	-	Situs Peninggalan Sejarah
<b>IV. Kec. Rote Tengah</b>							
43	Batu Termanu	Desa Onatali	10 Ha	10 Km	Wisata Alam, Wisata Minat Khusus, Budaya dan Sejarah	Hotel, Lopo	Panorama alam, Lokasi Hiking, Tracking, Panjat Tebing, Sejarah dan Mitos Batu Termanu, View Sunset

44	Pantai Sosadale	Sosadale-Desa Nggodimedda		16 km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam, Olahraga Air, Lokasi Memancing, View Sunset
45	Batu Ofak	Kola		16 km	Wisata Alam dan Sejarah	-	Panorama Alam (Batu Berbentuk Perahu)
46	Danau Peto	Peto		12 km	Wisata Alam	-	Lokasi Pemancingan Air Tawar, Habitat Hidup Hewan Endemik Rote (Kura - kura Leher Ular)
47	Oeleak	Hala		10 km	Wisata Alam	-	Keunikan Gua Yang Menghadap Ke Laut
48	Sanilai	Oenitas		19 Km	Wisata Alam	-	Keunikan Gua (terdapat Kuburan di dalam Gua)
49	Pantai Leli	Leli		9 km	Wisata Bahari	-	Panorama alam dan pantai berpasir putih, Lokasi Memancing, Olahraga Air, View Sunset
50	Mata Air Kaden	Desa Suebela		14 km	Wisata Alam dan Wisata Tirta	-	Panorama Alam dan Air Terjun, Lokasi Pemandian Alam
51	Pantai Fopo	Fopo		11 km	Wisata Bahari	-	Panorama alam dan pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air, View Sunset
52	Rumah Raja Termanu	Kelurahan Onatali		11 km	Wisata Sejarah	-	Situs Peninggalan Sejarah
53	Makam Raja Termanu	Kelurahan Onatali		11 km	Wisata Sejarah	-	Situs Peninggalan Sejarah
54	Kota Musu ( Benteng Pertahanan Raja Termanu)	Kelurahan Onatali		11 km	Wisata Sejarah	-	Situs Peninggalan Sejarah
55	Hu Ndao (Markas Palani/Panglima Ndao)	Kelurahan Onatali		11 km	Wisata Sejarah	-	Situs Peninggalan Sejarah
56	Namoho Aisele Moledame (Tapal Batas Termanu dengan Korbafo)	Desa Nggodimedda		16 km	Wisata Sejarah	-	Situs Peninggalan Sejarah
57	Rumah Adat Pouhuk	Desa Nggodimedda		16 km	Wisata Budaya	-	Situs Peninggalan Sejarah
<b>V. Kecamatan Lobalain</b>							
58	Tiang Bendera	Desa Baadale	9.735 m2	3,5 km	Wisata Bahari dan Sejarah	Lopo 7 buah, Aula	Panorama Alam dan Pantai, Peninggalan Sejarah Jepang, View Sunset, View Kota Ba'a, View Batu Termanu, Olahraga Air
59	Tangga Tiga Ratus	Desa Kuli	30.000 m <sup>2</sup>	8 km	Wisata Alam, Wisata Minat Khusus, Sejarah	Lopo, Tangga, WC	Panorama Alam, Hiking, View Sunrise dan Sunset



60	Gereja Tua Menggelama	Kel. Namodale		2.5 km	Wisata Sejarah dan Religi	-	Situs Peninggalan Sejarah
61	Masjid An – Nur	Kel. Metina			Wisata Sejarah dan Religi	-	Situs Peninggalan Sejarah
62	Rumah Raja Rote	Kel. Namodale			Wisata Sejarah	-	Situs Peninggalan Sejarah
63	Pusat Kerajinan Namu Ndao	Kel. Namodale	1 Km	1 Km	Wisata Budaya dan Minat Khusus	-	Pusat Pembuatan Kerajinan Tenun Ikat, Emas dan Perak
64	Gua Jepang	Desa Bebalain	2 ha	15 km	Wisata Alam	-	Situs Peninggalan Sejarah
65	Pemandian Oemau	Mokdale		1 km	Wisata Alam dan Wisata Tirta	-	Rekreasi dan tempat pemandian
66	Pantai Dombo	Dombo, Desa Kuli		9 km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai, Olahraga Air, Lokasi Memancing
67	Situs Makam Mokdale	Kelurahan Mokdale		1 km	Wisata Sejarah	-	Situs Peninggalan sejarah
68	Situs Gedung Peninggalan Bersejarah Residen Onder Ovdelling	Kelurahan Namodale		1 km	Wisata Sejarah	-	Situs Peninggalan sejarah
<b>VI. Kec. Rote Selatan</b>							
69	Exparasi Para Layang	Desa Tebole	23 km	18 Km	Wisata Minat Khusus	-	Panorama Alam
70	Gua Batu Intan	Desa Ina Oe	23 km	15 km	Wisata Alam	-	Panorama Alam
71	Gua Saina	Desa Dodaek	3 km	25 km	Wisata Alam	-	Panorama Alam
72	Gunung Ingulai	Desa Tebole	1 km	18 km	Wisata Alam	-	Panorama Alam
73	Pantai Masi Dae	Desa Inaoe	1 km	15 km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air
74	Tanjung Nggolo	Desa Dodaek	3 km	25 km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air
75	Pantai Nasedale	Desa Dodaek		28 km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air
76	Sailulik	Desa Dodaek		28 km	Wisata Bahari	-	Coral bermotif Selimut rote
77	Kursi Jaman Batu	Desa Inaoe		15 km	Wisata Sejarah	-	Situs Peninggalan Sejarah
78	Danau Seda	Desa Tebole		18 Km	Wisata Alam	-	Lokasi Pemancingan Ikan Air Tawar
79	Danau Bisak	Desa Inaoe		16 Km	Wisata Alam	-	Lokasi Pemancingan Ikan Air Tawar
80	Kota Nituk	Desa Inaoe		16 Km	Wisata Sejarah	-	Situs Pagar Batu Jaman VOC
<b>VII. Kec. Rote Barat Laut</b>							
81	Rumah Raja Dengka	Desa Oelua		28 Km	Wisata Sejarah	-	Situs Peninggalan Sejarah
82	Makam Raja Dengka	Desa Oelua		28 km	Wisata Sejarah	-	Situs Peninggalan Sejarah

83	Budaya HUS	Desa Boni, Nggenio en, Oebela, Oebole, Nafioen		30 Km	Wisata Budaya	-	Keunikan Upacara Adat dan Hus
84	Pantai Oeseda	Desa Manumolo		12 Km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air, View Sunset
85	Pantai Pulau Dengka	Desa Neteaen		16 km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air, View Sunset
86	Pantai Sai	Desa Tolama		19 Km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air, View Sunset
<b>VIII. Kec. Rote Barat Daya</b>							
87	Rumah Raja Thie	Desa Oebafok		15 Km	Situs	-	Peninggalan Rumah Raja
88	Fiulain	Desa Oebou		26 Km	Wisata Religi dan Sejarah	-	Sejarah Masuknya Kekristenan di Pulau Rote
89	Pantai Oeseli	Desa Oeseli	2 Ha	31 km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing Olahraga Air
90	Pantai Oebou	Desa Oebou	1 Ha	26 km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air
91	Pantai Ndana	Desa Oebou		40 Km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air
92	Pantai Sanama	Desa Oelasin	1,5 Ha	32 km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air
93	Danau Tua	Desa Oebou		27 km	Wisata Alam	-	Panorama Alam, Lokasi Pemancingan Air Tawar
94	Pantai Nusa Manuk	Desa Oebou		31 Km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air
95	Pulau Utak	Desa Landu		27 Km	Wisata Bahari	-	Pulau ditengah laut, Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing,
<b>IX. Kec. Rote Barat</b>							
96	Pantai Bo'a	Desa Bo'a		45 km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air
97	Pantai Nemberala	Desa Nemberala		38 km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air
98	Danau Oehela	Desa Sedeoen		35 km	Wisata Alam	-	Panorama Alam, Lokasi Pemancingan Air Tawar
99	Pantai Tongga	Desa Mboeain		42 km	Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air
100	Gua Rua Bafa Rua	Desa Oenggaut		41 km	Wisata Alam	-	Panorama Alam dan Keunikan Gua
101	Gua Tara	Desa Bo'a		45 km	Wisata Alam	-	Panorama Alam

	Ndola						dan Keunikan Gua
102	Gua Tene Oen	Desa Oenggaut		41 km	Wisata Alam dan Tirta	-	Tempat Pemandian Alam
103	Makam Raja Oenale Ajoeb Giri	Desa Mbueain		35 km	Wisata Sejarah	-	Peninggalan Sejarah
104	Makam Raja Oenale Simon Mesak Giri	Desa Oenitas		27 km	Wisata Sejarah	-	Peninggalan Sejarah
105	Makam Raja Delha J.D.Ndoen	Desa Nemberala		38 km	Wisata Sejarah	-	Peninggalan Sejarah
106	Makam Raja Delha Abner Ndoen	Desa Nemberala		38 km	Wisata Sejarah	-	Peninggalan Sejarah
<b>X. Kec. Ndao Nuse</b>							
107	Pantai Pulau Do'o	Desa Olifatula			Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air
108	Pantai Pulau Ndao	Desa Olifatula			Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air
109	Pantai Pulau Nuse	Desa Nuse			Wisata Bahari	-	Panorama Alam dan Pantai, Lokasi Memancing, Olahraga Air
110	Gua Duyung	Desa Anarai			Wisata Alam	-	Panorama Alam dan Keunikan Gua
111	Meriam VOC	Desa Anarai			Wisata Sejarah	-	Situs Peninggalan Sejarah
112	Taman Laut Ndao Nuse	Kawasan Perairan Ndao Nuse			Wisata Bahari	-	Panorama Alam Bawah Laut
113	Maskam raja Ndao	Desa Lendeiki			Wisata Sejarah	-	Peninggalan Sejarah
114	Benteng Jepang	Desa Analou			Wisata Sejarah	-	Peninggalan Sejarah

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Rote Ndao, Tahun 2020

Potensi destinasi wisata di Kabupaten Rote Ndao yang demikian banyak dan beragam menjadi sumber daya yang harus menjadi perhatian pengembangannya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan ekonomi masyarakat.

#### a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran rata-rata perkapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Rumah tangga sebagai pemakai barang dan jasa atau konsumen dalam menggunakan penerimaan atau pendapatannya selalu dibelanjakan untuk barang-barang konsumsi dan tidak dibelanjakan atau ditabung. Pengeluaran konsumsi yang dilakukan setiap rumah tangga adalah untuk mempertahankan taraf hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, dan konsumsi makanan karena makanan merupakan jenis barang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Semakin tingginya pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya semakin

meningkat (Hukum Engel/*Engel Law*). Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.58**  
**Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita**  
**Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 – 2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Total Pengeluaran RT (Rp)	469.073	537.038,98	677.533	752.078	828.622
2	Jumlah RT	33.050	35.170	35.493	37.462	41.452
3	Rasio	14,19	15,27	19,12	20,08	19,99

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

Tabel 2.58 menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi perkapita penduduk Kabupaten Rote Ndao terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, Pengeluaran penduduk Rote Ndao masih didominasi oleh pengeluaran untuk konsumsi makanan yaitu mencapai 52,79% pada tahun 2019.

#### **b. Nilai Tukar Petani**

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator nilai tukar (*term of trade*) dari produk pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani maupun biaya produksi pembentukan barang modal. NTP yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam Persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Data NTP Kabupaten Rote Ndao tidak tersedia. Pada Tabel 2.59 menunjukkan bahwa NTP Provinsi NTT pada tahun 2019 turun 9,89% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini disebabkan karena daya beli petani di pedesaan menurun karena biaya produksi pertanian dan kebutuhan sehari-hari rumah tangga petani naik tetapi penerimaan petani menurun. Secara Nasional pada desember 2019, NTP mengalami peningkatan 1,3% dibandingkan dengan Desember 2018. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan Indeks harga yang diterima petani (5,4%) lebih tinggi dari kenaikan Indeks harga yang dibayar petani (3,5%). Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi NTT dan Nasional di disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.59**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018 - 2019**

No	Uraian	PROVINSI NTT		NASIONAL	
		Des 2018	Des 2019	Des 2018	Des 2019
1	Indeks yang diterima petani (It)	139,47	101,40	138,16	143,56
2	Indeks yang dibayar petani (Ib)	130,32	104,40	133,93	137,42
3	Rasio	107,02	97,13	103,16	104,46

Sumber: - BPS Statistik Indonesia, Tahun 2020  
- BPS Provinsi NTT, Tahun 2020

**c. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)**

Persentase Pengeluaran konsumsi Non Pangan Per kapita Penduduk Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2018 - 2019 berada pada kisaran 0,43% dan 0,46%. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi non pangan di Kabupaten Rote Ndao menjadi prioritas bagi masyarakat yang berpendapatan rendah akan mengeluarkan sebagian besar pendapatannya untuk mengkonsumsi kebutuhan pokok (makanan). Sedangkan rumah tangga yang berpendapatan tinggi hanya akan membelanjakan sebahagian kecil saja untuk kebutuhan pokok (makanan) dan sisanya mereka gunakan untuk keperluan lainnya diluar dari makanan dan ditabung.

**Tabel 2.60**  
**Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Tahun 2016 – 2018 Kabupaten Rote Ndao**

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Total Pengeluaran RT Non Pangan	244.935	292.694	289.818
2	Total Pengeluaran Non Pangan	427.935	677.533	627.958
3	Rasio	0,57	0,43	0,46

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2016 - 2019

**2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Fasilitas wilayah/infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan infrastruktur dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah diberbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

**a. Indikator Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan**

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan indikator yang sangat penting aksesibilitas daerah untuk melihat sejauh mana ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas disemua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Panjang jalan Kabupaten di Kabupaten Rote Ndao adalah 844,46 km, yang terdiri dari Jalan Nasional 56,70 Km, Jalan Provinsi 28,01 Km, Jalan Kabupaten 459,83 Km dan Jalan Desa Strategis 299,92 Km, sedangkan jumlah kendaraan 15.552 unit terdiri dari kendaraan jenis sedan, jeep dan bus 516 unit, jenis pick up dan truk 728 uni dan sepeda motor 14.308 unit. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Rote Ndao pada tahun pada 2020 adalah 0,05. Nilai rasio panjang jalan tersebut mengandung pengertian untuk 1 kilometer jalan terdapat 0,05 kendaraan. Kondisi ini menunjukkan belum terdapat kemacetan di Kabupaten Rote Ndao sehingga sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao.

**Tabel 2.61**  
**Panjang Jalan Kabupaten Dirinci Menurut Kondisi di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015–2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2018	2020
1	Panjang Jalan (Km)	844,46	844,46	844,46	844,46	844,46
2	Jumlah Kendaraan (Unit)	9.708	10.636	11.839	13.375	15.552
3	Rasio	0,087	0,540	0,071	0,063	0,054

Sumber: Dinas PUPR Kab. Rote Ndao, Tahun 2020

**b. Indikator Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum**

Kondisi infrastruktur suatu daerah dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut, terutama infrastruktur transportasi. Transportasi merupakan elemen yang sangat penting dalam menunjang aktivitas masyarakat di suatu wilayah, dimana berperan sebagai fasilitas bagi sistem produksi dan investasi yang berdampak positif bagi ekonomi. Baik itu transportasi darat, laut maupun udara.

Untuk transportasi darat di Kabupaten Rote Ndao, khususnya angkutan umum orang/barang, belum berkembang secara signifikan. Hal ini dikarenakan jumlah moda angkutan umum sangat sedikit di Kabupaten Rote Ndao. Ditunjukkan dengan angkutan umum per tahun, tahun 2015 sebanyak 30 unit, tahun 2016 sebanyak 31 unit sampai dengan tahun 2020.

**c. Indikator Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun**

Untuk transportasi Laut di Kabupaten Rote Ndao sebagai Kabupaten Kepulauan terlayani dengan berbagai armada penyeberangan, baik itu Kapal Cepat, kapal Fery ASDP, Kapal Perintis maupun kapal-kapal kayu berukuran kecil milik masyarakat, yang memperlancar arus orang maupun barang. Sedangkan untuk transportasi udara, kabupaten Rote Ndao telah terlayani dengan penerbangan pesawat Jenis ATR 72-500/600 lewat Maskapai Wings Air dengan melayani rute penerbangan Kupang-Ba'a-Kupang setiap hari pagi dan sore hari.

Indikator Jumlah orang/barang yang terangkut melalui dermaga/bandara per tahun 2015 sebanyak 166.257 orang, tahun 2016 sebanyak 289.965 orang, 2017 sebanyak 270.002 orang, tahun 2018 sebanyak 369.673 orang, tahun 2019 sebanyak 335.852 orang dan tahun 2020 turun sebesar 228.142 orang atau sebanyak 32,07% disebabkan dampak Pandemi Covid-19.

**d. Indikator Ketaatan Terhadap RTRW**

Pada indikator ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Rote Ndao sesuai hasil Peninjauan Kembali (PK) Tahun 2019, dari aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang memperoleh nilai 96,0% dengan kata lain memiliki kinerja yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah 96% sesuai dengan arahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033.



**Tabel 2.62**  
**Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 – 2020**

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi RTRW (%)	96	96	96	96	96	96
2	Rencana Peruntukan RTRW (%)	100	100	100	100	100	100
3	Rasio (1/2) / (%)	96	96	96	96	96	96

Sumber : Laporan Akhir PK RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013-2033, 2020

**e. Indikator Luas Wilayah Produktif**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033, wilayah produktif adalah Kawasan Budidaya yaitu Hutan Produksi Tetap, Pertanian Lahan Basah, Pertanian Lahan Kering, Perkebunan/Buah-Buahan, LP2B, Padang Pengembalaan dan Kawasan Permukiman ditetapkan sebesar 79.924 Km<sup>2</sup>.

**f. Indikator Luas Wilayah Industri**

Industri di Kabupaten Rote Ndao didominasi oleh industri kecil berupa industri rumah tangga yang tersebar di semua kecamatan. Tipe industri berupa produk pertanian, perikanan dan peternakan yang diolah menjadi produk makanan, minuman dan sandang. Pengembangan sector industri dikembangkan berdasarkan komoditas unggulan di wilayah tersebut yaitu produk pertanian dan perkebunan di Kecamatan Rote Barat Daya, Kawasan Mamaluk di Kecamatan Rote Timur, produk perikanan di Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Lobalain dan Kecamatan Rote Timur. Produk peternakan di Kecamatan Rote Tengah. Produk kerajinan dan percetakan di Kecamatan Lobalain. Jumlah industri di Kabupaten Rote Ndao Pada tahun 2016 mencapai 1.357 industri dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2.221 unit.

**g. Indikator Luas Wilayah Kebanjiran**

Wilayah Kabupaten Rote Ndao memiliki musim hujan yang berlangsung singkat, namun di wilayah bagian Barat dan Selatan wilayah Kabupaten Rote Ndao (Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Lobalain dan Rote Selatan) mempunyai iklim tropis dengan curah hujan rata-rata yang cukup tinggi sehingga rentan terhadap bahaya banjir dan erosi, lebih banyak terkait dengan *La Nina*.

**h. Indikator Luas Wilayah Kekeringan**

Kondisi wilayah Kabupaten Rote Ndao dengan musim kemarau yang berlangsung kurang lebih delapan bulan, memiliki karakteristik yang rentan terhadap bahaya cuaca ekstrim, kekeringan yang dapat mengakibatkan gagal panen/produksi tanaman pangan lebih banyak terkait dengan kejadian *El Nino/Shouthern Oscillation (ENSO)*.

**i. Indikator Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang**

Dibidang lembaga keuangan belum tumbuh secara signifikan. Ketersediaan Bank sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah dan pembiayaan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Pada indikator jenis dan jumlah Bank dan Cabang di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 sebagai berikut:

- Bank NTT : 7 Unit
- Bank BRI : 3 Unit
- Bank BNI : 1 Unit

**j. Indikator Jenis Dan Jumlah Perusahaan Asuransi Dan Cabang**

Sama halnya dengan ketersediaan Bank, ketersediaan Non Bank dalam hal ini Perusahaan asuransi juga sangat penting dalam upaya menunjang aspek daya saing dan pembiayaan aktivitas ekonomi suatu daerah. Untuk indikator jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan Tahun 2017 belum ada.

**k. Indikator Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran**

Ketersediaan restoran dan rumah makan disuatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Perkembangan restoran dan rumah makan adalah indikator pertumbuhan pariwisata daerah. Tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi diikuti pula dengan ketersediaan restoran dan rumah makan yang representatif. Untuk indikator Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2017 berjumlah 37 unit.

**l. Indikator Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel**

Indikator Jenis, Kelas dan Jumlah penginapan/hotel juga merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat pertumbuhan pariwisata di daerah. Tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi tentunya diikuti juga dengan perkembangan hotel/penginapan yang representatif. Sampai dengan tahun 2017, jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 27 unit.

**m. Indikator Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih.**

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Rote Ndao cukup baik. Perkembangannya pada tahun 2015 sebesar 64,85%, tahun 2020 sebesar 759,79%. Cakupan air bersih yang dikelola PAMSIMAS mencapai 322 Rumah Tangga Cakupan air bersih perkotaan yang dikelola PDAM mencapai 3.263 Rumah tangga, atau 10,68% dengan konsumen terbanyak dari rumah tangga biasa yaitu sebanyak 2.856 Rumah Tangga. Jumlah Rumah tangga yang menggunakan sumur yang terlindung sebanyak 8.103 Rumah Tangga, sedangkan yang menggunakan sumur tidak terlindung sebanyak 9.043 rumah tangga. Merujuk pada data ini maka kedepannya cakupan layanan air bersih perdesaan dan perkotaan perlu ditingkatkan, dan pemanfaatan sumber air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih perlu pengelolaan yang baik dan terpadu.

**n. Pengembangan Sistem Kelistrikan**

Pengelolaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan oleh PT. PLN Rayon Rote Ndao bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Data daya listrik yang tersedia di Kabupaten Rote Ndao tahun 2015 sebesar 16.484.348 KWh, tahun 2016 sebesar 19.306.324 KWh, tahun 2017 sebesar 20.177.275

KWh, tahun 2018 sebesar 21.144.684 Kwh dan tahun 2019 sebesar 24.594.043. Ini menunjukkan bahwa daya listrik tersedia bertambah setiap tahunnya. Dari daya listrik yang tersedia, yang tersalurkan pada tahun 2015 tercatat sebesar 14.434.768 KWh dan pada tahun 2016 mencapai 17.961.130 KWh, tahun 2017 sebesar 18.792.809 Kwh dan tahun 2019 sebesar 22.547.478 Kwh artinya bahwa belum seluruh daya listrik tersedia yang terpakai.

Capaian kinerja rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Rote Ndao tahun 2015 sebanyak 19.364 rumah, tahun 2016 sebanyak 20.259 rumah, dan 2017 sebanyak 22.702 rumah tahun 2018 sebanyak 23.221 rumah dan tahun 2019 sebanyak 28.120 rumah. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 69,15% rumah tangga di Kabupaten Rote Ndao sudah berlistrik PLN, 17,16% rumah tangga dengan penerangan listrik non-PLN dan 13,69% rumah tangga yang belum teraliri listrik. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao perlu mendorong akselerasi pembangunan jaringan listrik ke wilayah yang belum tersentuh oleh listrik. Dalam rangka percepatan capaian elektrifikasi di Kabupaten Rote Ndao, lima tahun kedepan ditargetkan akan dituntaskan dengan program Rote Ndao Bersinar.

Sampai dengan tahun 2018 Kinerja sektor ketenagalistrikan di Kabupaten Rote Ndao cukup baik, ini dapat dilihat dari capaian indikator Rasio Desa Berlistrik sebesar 73,98% atau terdapat 88 desa yang sudah berlistrik dari total 119 desa/kelurahan masih di atas realisasi capaian Rasio Desa Berlistrik Provinsi NTT sebesar 72,98% dari target 100%. Rasio Elektrifikasi (RE) sebesar 71,43% juga masih di atas RE Provinsi NTT sebesar 61,00% dari target 70,00% .

Kewenangan pengembangan kelistrikan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan Provinsi, namun Kabupaten Rote Ndao sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu mencermati Pengembangan Sistem Kelistrikan Nusa Tenggara Timur sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Provinsi NTT Tahun 2019-2028 sebagai pedoman pengembangan listrik daerah, realisasi pengelolaan listrik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.63**  
**Realisasi Pengelolaan Listrik di Provinsi NTT**

No.	Uraian	Provinsi NTT			
		2015	2016	2017	2018
1.	Rasio Desa Berlistrik (%)	60,70	63,30	65,10	72,98
2.	Rasio Elektrifikasi (%)	58,70	59,00	59,80	61,01

Sumber : RUPL Provinsi NTT, 2019

#### **o. Indikator Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon**

Dalam era digital saat ini, kebutuhan komunikasi sangat memegang peran penting. Penggunaan telepon selular (HP) sudah menjadi kebutuhan yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Di Kabupaten Rote Ndao, Persentase penduduk yang menggunakan HP belum terdata namun secara kasat mata penggunaan HP di Kabupaten Rote Ndao sudah sangat luas. Hal ini karena telah tersedia menara BTS di hampir seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao.

Selain telepon selular terdapat juga pengguna telepon. Jumlah pengguna telepon jika dibandingkan dengan jumlah penduduk maka hanya mencapai 0,41% pada tahun 2015 menjadi 0,36%, pada tahun 2016 menjadi 0,35% dan pada tahun 2017 menjadi 0,34%, tahun 2018 sebesar 0,33 dan tahun 2020 menjadi 0,80% secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.64**  
**Jumlah Pengguna Telepon Menurut Pengguna**  
**di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

Pengguna	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pemerintah	380	383	391	392	520	610
Swasta	148	149	151	162	220	539
Jumlah	528	532	542	553	740	1.149
Jumlah Penduduk	147.778	153.792	159.614	165.807	172.104	143.764
Persentase	0,36	0,35	0,34	0,33	0,43	0,80

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2020

### 2.4.3 Fokus Iklim Investasi

Salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Iklim investasi merupakan kondisi yang multi dimensi, dan menjadi bahan pertimbangan para investor untuk berinvestasi di suatu daerah, diantaranya iklim usaha yang baik, jaminan keamanan dan proses perijinan.

Untuk menciptakan kondisi investasi yang baik, peran pemerintah sangat penting dalam setiap proses penanaman modal, bahkan rekomendasi pemerintah daerah merupakan syarat mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak. Salah satu indikator yang berpengaruh adalah masalah keamanan suatu daerah dapat dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi setiap tahun.

#### a. Angka kriminalitas

Angka Kriminalitas di Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2015-2019 terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.65**  
**Angka Kriminalitas Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 - 2019**

No	Jenis Kriminal	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kasus narkoba	-	-	-	-	-
2	Jumlah kasus pembunuhan	1	1	1	6	3
3	Jumlah kasus kejahatan seksual	9	10	13	6	11
4	Jumlah kasus penganiayaan	25	18	11	39	55
5	Jumlah kasus pencurian	8	10	17	22	37
6	Jumlah kasus penipuan	11	6	4	23	11
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8	Jumlah tindak Kriminal selama 1 tahun	56	43	36	96	177
9	Jumlah penduduk	147.778	153.792	153.792	165.807	172.104
10	Angka kriminalitas (8)/(9)	0,00038	0,00028	0,00023	0,057	0,102

Sumber: Reserse Kriminal Polres Rote Ndao, Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Rote Ndao secara keseluruhan sangat kecil artinya Kabupaten Rote Ndao sangat aman dan sangat kondusif untuk investasi.

## b. Jumlah Demonstrasi

Salah satu kondisi yang mempengaruhi minat investor dalam berinvestasi adalah intensitas demonstrasi yang terjadi di suatu daerah. Demonstrasi yang dilakukan masyarakat selain sebagai cerminan demokrasi di daerah, namun seringkali demonstrasi mengarah pada aksi anarkis, brutal, maupun rasisme, yang berpotensi kerusuhan massa, maka perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan di Kabupaten Rote Ndao. Jumlah demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao tidak terdata. Namun selama 5 (lima) tahun terakhir jarang sekali terjadi demonstrasi di Kabupaten Rote Ndao.

Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan salah satu tujuan yang harus dicapai adalah perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Dengan demikian diharapkan tindak kejahatan dalam bentuk apapun sudah bisa diminimalisir atau tidak ada sama sekali, sehingga dapat terwujud kedamaian, keadilan dan lembaga yang tangguh, berimplikasi pada terciptanya iklim berinvestasi yang baik, dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan.

## c. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Salah satu cerminan dari iklim investasi yang baik dapat dilihat dari angka pendapatan daerah melalui pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah. Ada 8 (delapan) jenis pajak daerah dan 15 (lima belas) jenis retribusi daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah. Realisasi pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Rote Ndao sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 tercantum sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.66**  
**Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2020**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak Daerah (Rp)	4.516.755.880	5.590.924.904	6.936.635.493	9.029.702.704	9.484.214.075,95	7.866.751.680
2	Retribusi Daerah (Rp)	6.672.358.102	6.453.048.537	5.111.293.857	4.393.370.494	4.894.896.494	9.823.578.660
3	Jumlah	11.189.113.982	12.043.973.441	12.047.929.350	13.423.173.198	14.379.110.569,95	17.690.330.346

Sumber : BKA Kab. Rote Ndao, Tahun 2015-2020

Data pajak daerah di atas menunjukkan tren positif, namun kenaikannya belum cukup signifikan, sedangkan retribusi daerah mengalami penurunan setiap tahun dari tahun 2015 s.d 2018, namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan, hal ini menggambarkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Rote Ndao masih rendah atau belum berkembang dengan baik. Untuk itu harus didukung dengan memperkuat peraturan daerah yang terkait dengan jaminan investasi.

## d. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Investasi

Dalam berinvestasi perlu didukung dengan regulasi yang mendukung. Sejauh ini Peraturan Daerah yang mendukung iklim investasi di Kabupaten Rote Ndao ada 4 Peraturan Daerah yaitu

- Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan
- Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2004 tentang Retribusi Retribusi Penggantian Biaya Administrasi
- Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Retribusi Izin Usaha Sarana Kesehatan Hewan
- Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Retribusi Perijinan tertentu.

**e. Persentase Desa yang Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa**

Kabupaten Rote Ndao adalah daerah yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, sangat berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Pada tahun 2015 jumlah desa berstatus swasembada terhadap total desa adalah 71,91%, pada tahun 2016 turun menjadi 16,85% hal ini dikarenakan adanya kemarau panjang yang menyebabkan gagal tanam dan gagal panen. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 kondisi berubah, Persentase desa swasembada naik lagi menjadi 67,23% pada tahun 2017 dan tahun 2018 menjadi 72,66%, Kondisi ini karena curah hujan sangat baik dan juga karena telah dibangunnya embung-embung pertanian, tahun 2019 dan 2020 turun menjadi 57,98% dan 49,58%.

**f. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola Pemerintah Kabupaten Rote Ndao adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PDAM Kabupaten Rote Ndao didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.

Berdasarkan profil PDAM tahun 2019 Rote Ndao menghadapi beberapa tantangan dan kendala yang mempengaruhi perusahaan yakni:

- a) PDAM Kabupaten Rote Ndao dengan segala keterbatasan yang ada dituntut kemampuannya untuk dapat mendukung sektor penyediaan air bersih sesuai perkembangan pembangunan.
- b) Dengan perkembangan penduduk yang cukup tinggi terutama di daerah perkotaan serta kebutuhan perkembangan pengembangan wilayah membutuhkan ketersediaan air bersih yang cukup. Saat ini cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat masih sangat rendah yakni sebesar 13%.
- c) Ketersediaan air baku dari sumber-sumber air masih didominasi air permukaan dengan sumber mata air yang semakin berkurang debitnya karena kondisi daerah dengan iklim tropis, diperlukan alternatif penyediaan air baku dalam skala besar melalui pembangunan bendungan untuk menyuplai air baku dan eksplorasi air tanah melalui pengeboran tanah pada daerah rawan air yang.
- d) Masih tingginya middle capacity yakni sebesar 118,7 liter/detik, tingkat kehilangan air dari kebocoran pipa dan pencurian air masih sangat tinggi yakni sebesar 40%

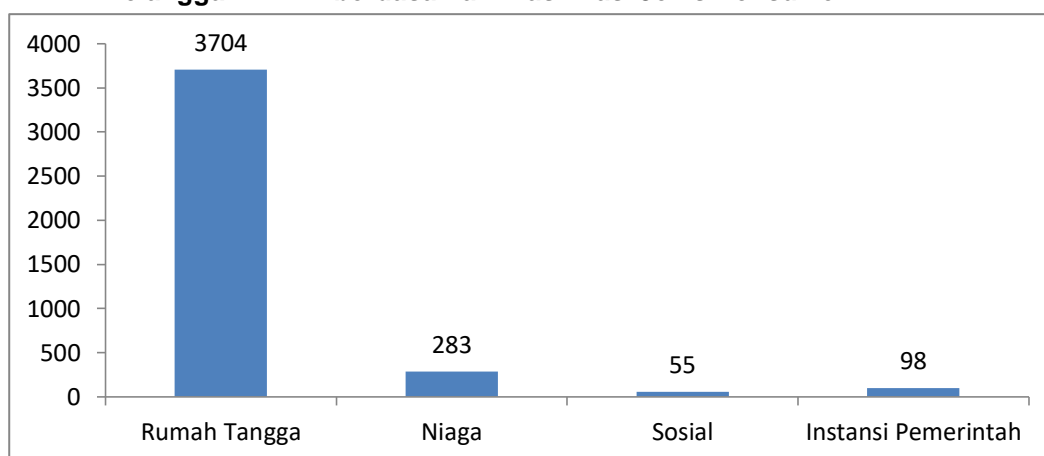


memerlukan tata kelola yang baik sehingga PDAM dapat berkontribusi dalam meningkatkan PAD.

- e) Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, pihak swasta serta masyarakat guna meningkatkan layanan dan pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Rote Ndao.

Pelayanan PDAM Kabupaten Rote Ndao dilakukan melalui program pelayanan air bersih, program pengembangan jaringan transmisi dan distribusi serta memanfaatkan dan memaksimalkan potensi sumber air. Sampai dengan tahun 2018 jumlah pelanggan sebanyak 4140 pelanggan terdiri dari klasifikasi social umum sebanyak 12 unit Sambungan Rumah (SR), Sosial khusus 43 unit SR, Rumah tangga 3704 unit SR, Instansi Pemerintah 98 unit SR dan Niaga 283 unit SR, seperti yang ditunjukkan dalam grafik dibawah ini:

**Gambar 2.46**  
**Pelanggan PDAM berdasarkan Klasifikasi Jenis Konsumen**



Sumber : PDAM Kab. Rote Ndao, 2020

Tantangan dan kendala yang mempengaruhi kinerja PDAM yakni :

- a) PDAM Kabupaten Rote Ndao dengan segala keterbatasan yang ada dituntut kemampuannya untuk dapat mendukung sektor penyediaan air bersih sesuai perkembangan pembangunan.
- b) Dengan perkembangan penduduk yang cukup tinggi terutama di daerah perkotaan serta kebutuhan perkembangan pengembangan wilayah membutuhkan ketersediaan air bersih yang cukup. Saat ini cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat masih sangat rendah yakni sebesar 13%.
- c) Ketersediaan air baku dari sumber-sumber air masih didominasi air permukaan dengan sumber mata air yang semakin berkurang debitnya karena kondisi daerah dengan iklim tropis, diperlukan alternatif penyediaan air baku dalam skala besar melalui pembangunan bendungan untuk menyuplai air baku dan eksplorasi air tanah melalui pengeboran tanah pada daerah rawan air yang.
- d) Masih tingginya idle capacity yakni sebesar 118,7 liter/detik, tingkat kehilangan air dari kebocoran pipa dan pencurian air masih sangat tinggi yakni sebesar 40% memerlukan tata kelola yang baik sehingga PDAM dapat berkontribusi dalam meningkatkan PAD.

- e) Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, pihak swasta serta masyarakat guna meningkatkan layanan dan pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Rote Ndao.

**Tabel 2.67**  
**Kapasitas Layanan PDAM Kabupaten Rote Ndao**

No.	SPAM	Kapasitas Terpasang (l/dtk)	Volume Produksi (l/det)	Idle Capacity (L/det)	Kapasitas Tersedia (L/det)	Sistem Pengaliran		Daerah Layanan
						Transmisi	Distribusi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I UNIT LOBALAIN</b>								
1	SPAM Siokoan	17.50	10.80	6.70	48.00	Gravitasi	Gravitasi	Kec. Lobalain
2	SPAM Oemau	10.00	0.20	9.80	30.00	Pompa	Gravitasi	Kec. Lobalain
3	SB. Ktr Camat Lobalain	5.00	0.20	4.80	5.00	Pompa	Gravitasi	Kec. Lobalain
4	SPAM Tilonisi	15.00	0.10	14.90	30.00	Pompa	Gravitasi	Kec. Lobalain
<b>II UNIT ROTE BARAT</b>								
1	SPAM Lualemba	15.00	0.10	14.90	43.00	Pompa	Gravitasi	Kec. Rote Barat
<b>III UNIT ROTE TIMUR</b>								
1	SPAM Nioen	15.00	1.30	13.70	85.00	Gravitasi dan Pompa	Gravitasi	Kec. Rote Timur

<b>IV UNIT PANTAI BARU</b>								
1	SB. Pantai Baru	5.00	0.20	4.80	5.00	Gravitasi	Gravitasi	Kec. Pantai Baru
2	SPAM Lelebe	10.00	0.10	9.90	4.00	Gravitasi	Gravitasi	Kec. Pantai Baru
3	SPAM Koadanan	15.00	0.10	14.90	10.00	Gravitasi	Gravitasi	Kec. Pantai Baru
<b>V UNIT BARAT LAUT</b>								
1	SPAM Tilonisi	15.00	0.10	14.90	30.00	Gravitasi	Gravitasi	Kec. Lobalain
<b>VI WILAYAH LIDABESI</b>								
1	SPAM Lidabesi	10.00	0.50	9.50	26.00	Gravitasi	Gravitasi	Kec. Rote Tengah
<b>Total</b>		132.50	13.70	118.80	316.00			

Sumber : PDAM Kabupaten Rote Ndao, Tahun 2020

#### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci terciptanya daya saing tinggi daerah, dan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi.

##### a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Rote Ndao sebagian besar berpendidikan tamat SD sederajat berjumlah 43.895 dan paling sedikit tamat Diploma berjumlah 1.433 pada Tahun 2019. Penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat S1, S2 dan S3 yang diakumulasi dari jumlah PNS, Anggota DPRD dan Pencari Kerja yang berpendidikan S1/S2/S3 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.68**  
**Jumlah PNS, Anggota DPRD dan Pencari Kerja yang**  
**Berpendidikan S1, S2 dan S3**

<b>Aspek</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pencari kerja yang berpendidikan S1/S2/S3	4.256	6.078	6.225	7.891
Jumlah Penduduk	153.792	159.614	165.807	172.104
Rasio	2,77	3,81	3,75	4,58

Sumber : Dinas Transnaker Kab. Rote Ndao, Tahun 2020.

**b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan/Dependency Ratio)**

Berdasarkan data BPS jumlah penduduk usia produktif (15– 64 tahun) di Kabupaten Rote Ndao tahun 2017 adalah sebanyak 95.483 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk usia non produktif adalah 64.131 jiwa. Berdasarkan data tersebut rasio ketergantungan di Kabupaten Rote Ndao sebesar 0,67%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap 100 orang usia produktif di Kabupaten Rote Ndao menanggung 67 orang usia non produktif. Dan untuk Tahun 2017 dan 2018 konstan. Rasio ketergantungan ini menunjukkan bahwa beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi masih cukup tinggi. Memperhatikan ratio ketergantungan setiap tahunnya maka Kabupaten Rote Ndao tidak mengalami bonus demografi, karena bonus demografi terjadi pada keadaan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah usia non produktif atau rasio ketergantungan dibawah 50. Rasio ketergantungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 - 2018 sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.69**  
**Rasio Ketergantungan**  
**Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2018**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1	Jumlah penduduk Usia < 15 tahun	50.465	52.518	54.507	56.623
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	8.910	9.273	9.624	9.922
3	Jumlah Penduduk tidak produktif	59.375	61.791	64.131	66.545
4	Jumlah Penduduk Usia 15 – 64	88.403	92.000	95.483	99.262
5	Rasio ketergantungan (3)/(4)	67	67	67	67

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2016-2020

Analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Rote Ndao disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.70  
 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah  
 Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  
 Kabupaten Rote Ndao

No.	Aspek/Focus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Capaian (%)	interpretasi belum tercapai (< sesuai (=) melampaui (>)
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
<b>A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>										
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
1.1	Pertumbuhan PDRB (Konstan)	%	4,85	5,05	5,13	5,48	5,65	6,00	91,33	Belum tercapai
1.2	Laju Inflasi	%	8,36	7,06	5,74	5,41	0,54			
1.3	PDRB per Kapita ADHB	Ribu Rupiah	13.302.039	14.628.109	15.979.736	17.183.484	17.623.737	10.999.171	156,23	Melampaui
1.4	Persentase Penduduk diatas Garis kemiskinan	%	73,15	69,51	70,40	71,45	71,92	76,91	82,23	Belum tercapai
1.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Poin	6,10	6,93	8,09	6,40	4,73			
1.6	Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	2,05	2,13	2,72	1,97	1,13			
1.7	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	57,82	58,32	59,28	60,51	61,03			
<b>B. Kesejahteraan Sosial</b>										
<b>1 Pendidikan</b>										
1.1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,16	6,45	6,67	6,98	6,98	7,58	91,03	Belum tercapai
1.2	Harapan Lama sekolah	Tahun	12,20	12,22	12,51	12,91	13,21			
<b>2. Kesehatan</b>										
2.1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	62,86	62,86	63,13	63,41	63,59	68,50	63,78	Belum tercapai
2.2	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,15	1,56	0,65	0,21	0,20	0,50	250,00	Melampaui
2.3	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	4,93	3,58	4,28	4,32	5,71	5,60	98,07	Belum tercapai
2.4	Prevalensi Balita Stunting	%	46,7	46,7	46,7	46,7	43,30			
2.5	Cakupan Desa Siaga Aktif	Desa	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
<b>3. Ketenagakerjaan</b>										
3.1	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja	%	75,55	70,81	74,21	77,00	72,98	60,00	121,63	Melampaui
3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,89	2,37	2,84	2,52	2,11	2,83	142,18	Melampaui
3.3	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	95,11	82,21	97,63	97,48	97,89			
<b>4 Kinerja Pelayanan Publik</b>										
4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin								
<b>5 Kinerja Pendapatan</b>										
5.1	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	4,80	4,55	4,07	6,63	3,57			
<b>6 Pengelolaan Keuangan Daerah</b>										
6.1	Opini BPK	Opini	Disclaimer	Disclaimer	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	Belum tercapai
<b>7 Pangan</b>										
7.1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	%			tidak ada data	90	70			
7.2	Penanganan Daerah Rawan pangan	Desa	2	2	2	1	1			
<b>8 Pertanian</b>										
8.1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	48,19	48,08	48,76	48,97	47,18			
8.2	Produksi Sektor Pertanian	Ton	68.862,03	69.466,64	125.919,00	123.407,80	128.800,70			
8.3	Nilai Tukar Petani	Poin								
8.4	Produksi Peternakan	Ekor								
8.5	Produksi Kelautan dan Perikanan	Ton								
<b>9 Pariwisata</b>										
9.1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	4.084	2.645	3.290	3.110	3.861	5.281,00	73,11	Belum tercapai
9.2	Rata-rata lama tinggal	Hari	2	2	2	2	2	7,00	28,56	Belum tercapai
<b>10 Perdagangan</b>										
10.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	7,42	7,36	7,13	6,78	7,01	7,27	93,26	Belum tercapai
<b>11 Industri</b>										
11.1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	1,32	1,29	1,24	1,19	1,24	1,85	64,32	Belum tercapai
<b>III. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>										
<b>1. PENDIDIKAN</b>										
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	107,42	109,51	110,90	100,64	106,05	77,20	137,37	Melampaui
1.2	Angka Partisipasi Kasar	%	107,42	109,41	110,91	100,64	106,05	110,00	96,41	Belum tercapai
1.3	Angka pendidikan yang ditamatkan	%	94,84	93,62	91,14	91,00	90,31	100,00	90,31	Belum tercapai
1.4	Angka partisipasi murni	%	81,82	79,75	81,71	82,51	83,68	88,49	94,56	Belum tercapai
1.4.1	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ Paket A	%	97,70	93,56	96,97	94,57	92,90	94,78	98,02	Belum tercapai
1.4.2	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	%	65,94	65,94	66,45	70,45	74,45	82,20	90,57	Belum tercapai
1.4.3	Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/ paket C	%								
1.5	Angka partisipasi sekolah	%	99	96	98	96	90	100	90	Belum tercapai
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/paket A	%	98,82	96,80	98,36	98,66	95,42	100,00	95,42	Belum tercapai
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MTs/ Paket B	%	98,98	95,72	97,33	93,11	84,58	100,00	84,58	Belum tercapai
1.6	Angka putus sekolah	Orang	42	73	47	51	56	0	0	Belum tercapai
1.6.1	Angka putus sekolah (APS) SD/ MI	Orang	36	42	29	37	45	0	0	Belum tercapai
1.6.2	Angka putus sekolah (APS) SMP/ MTs	Orang	6	31	18	14	11	0	0	Belum tercapai
1.7	Angka Kelulusan	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	Tercapai
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	Tercapai
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	Tercapai
<b>1.8 Fasilitasi Pendidikan :</b>										
1.8.1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	7,59	12,41	15,17	23,45	27,59	-		
1.8.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	13,89	19,44	22,22	32,50	34,15	-		
1.9	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	60,75	58,33	60,50	60,52	61,25			
1.10	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (/10.000)	%	45	50	48	47	45	15	33,33	Belum tercapai
1.11	Rasio guru/murid perkelas rata-rata sekolah dasar	%	40,61	47,52	46,96	46,72	39	-		
1.12	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	%	95,24	95,88	96,69	95,51	-	100,00		

No.	Aspek/Focus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Capaian (%)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			
1.13	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	69,32	70,51	71,25	72,79	75,15	96,10	78,20	Belum tercapai
1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	75,83	77,90	72,80	62,99	81,57	100,00	81,57	Belum tercapai
<b>2</b>	<b>KESEHATAN</b>									
2.1	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Kelahiran Hidup	19/1000 KH	20/1000 KH	20.5/1000 KH	19/1000 KH	21.2/1000 KH	24/1000 KH	88,33	Belum tercapai
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi (tahun)	Tahun	0,98	0,98	0,97	0,98	0,97			
2.3	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Kelahiran Hidup	32/1000 KH	28/1000 KH	31/1000 KH	28/1000 KH	28/1000 KH			
2.4	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	Kelahiran Hidup	11/1000 KH	12/1000 KH	13/1000 KH	11/1000 KH	15/1000 KH			
2.5	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Kelahiran Hidup	206/100.000 KH	299/100.000 KH	376/100.000 KH	126/100.000 KH	189/100.000 KH	306/100.000 KH	61,76	Belum tercapai
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	%	19,46	19,10	18,40	17,77	29,65			
2.7	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	%	0.6/1000	0.6/1000	0.6/1000	0.6/1000	0.6/1000	-		
2.8	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-		
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	%	0.1/1000 penduduk	0.1/1000 penduduk	0.1/1000 penduduk	0.1/1000 penduduk	0.1/1000 penduduk	1/3.657 penduduk	53,07	Belum tercapai
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%	1.4/1000 penduduk	1.5/1000 penduduk	1.3/1000 penduduk	1.3/1000 penduduk	1.3/1000 penduduk	1/575 penduduk	57,50	Belum tercapai
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	53,61	47,39	55,50	86	52,10			
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	69,12	58,29	51,64	84,43	87,70	95,00	92,32	Belum tercapai
2.13	Cakupan desa/kelurahan <i>universal child immunization (UCI)</i>	%	15,73	34,83	21,35	38,20	23,50			
2.14	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2.15	Presentase anak usia 1 tahun yang imunisasi campak	%	59,48	85,79	72,92	75,06	90,00	95,00	94,74	Belum tercapai
2.16	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	4,48	4,35	Tidak ada kasus	Tidak ada kasus	Tidak ada kasus	-		
2.17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	1,25	1,75	1,69	10,30	98,86	-		
2.18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	0,01	0,02	0,02	0,02	8,46	-		
2.19	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	43.34/100.000	89.84/100.000	73.76/100.000	65.02/100.000	49.12/100.000	245/100.000	20,05	Belum tercapai
2.20	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	4,69	2,28	3,38	2,60	2,50	-		
2.21	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	9,09	12,50	16,67	17,89	11	-		
2.22	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	69,70	72,50	68,18	90,15	94,82	-		
2.23	Penderita diare yang ditangani	%	153,14	112,95	114,85	91,49	61,37	-		
2.24	Angka kejadian malaria	%	2,16	1,13	1,06	0,70	0,38	-		
2.25	Proporsi anak balita yang diatur dengan kelambu berinsektisida	%	35,92	28,31	20,70	12,62	13,81	-		
2.26	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Kasus	3 kasus	1 kasus	tidak ada kasus	1 kasus	tidak ada kasus	-		
2.27	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0.01 (12)	0.01 (15)	0.01 (18)	0.01 (20)	0.01 (22)	< 0.05	400,00	Melampaui
2.28	Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	%	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	-		
2.29	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	-		
2.30	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2.31	Cakupan kunjungan bayi	%	55,13	69,62	80,81	70,31	83,70			
2.32	Cakupan puskesmas	%	120	120	120	120	120	10,00	120,00	Melampaui
2.33	Cakupan pembantu puskesmas	%	95,51	97,75	97,75	97,75	95,51	-		
2.34	Cakupan kunjungan ibu hamil	%	75,92	6,60	44,64	67,62	48,12	-		
2.35	Cakupan pelayanan nifas	%	76,92	70,71	61,14	89,25	87,70	-		
2.36	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	21,03	16,50	27,02	56,39	34,20	-		
2.37	Cakupan pelayanan anak balita	%	100,00	100,00	100,00	98,90	76,63	100,00	76,63	Belum tercapai
2.38	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	93,35	95,91	99,05	96,99	96,08			
2.39	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	-		
2.40	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100			
2.41	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	%	100	Tidak ada kasus	Tidak ada kasus	Tidak ada kasus	Tidak ada kasus			
<b>3</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									
<b>3.1</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>									
3.1.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	29,93	32,32	34,06	35,15	36,78	90,00	37,77	Belum tercapai
3.1.2	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	%	0,59	0,50	0,48	0,47	0,45			
3.1.3	Presentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	2,44	2,44	10,92	10,08	9,24			
3.1.4	Jalan kabupaten dalam kondisi baik	KM	137,61	146,40	151,47	156,54	161,61			

No.	Aspek/Focus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Capaian (%)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			
3.1.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33			
3.1.6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	6,53	6,55	6,57	6,59	6,59			
3.1.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	15,37	14,31	13,86	13,42	54,56	72,00	94,69	Belum tercapai
3.1.8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	3,63	3,69	3,76	3,82	3,88			
3.1.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	65,00	61,75	55,58	50,02	45,02			
3.1.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	26,54	26,45	26,35	26,26	26,17			
3.1.11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	4,49	4,49	4,49	4,49	5,62			
3.1.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	23,34	46,34	54,34	60,44	65,41			
3.1.13	Rasio Jaringan Irigasi	%	29,13	34,93	39,34	40,68	50,49			
3.1.14	Persentase penduduk berakses air minum	%	64,07	64,85	66,42	68,37	66,50	100,00	66,50	Belum tercapai
3.1.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	64,07	64,85	66,42	68,37	66,50	100,00	66,50	Belum tercapai
3.1.16	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			
3.1.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Fasilitas	0	0	0	0	0	-		
3.1.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	-		
3.1.19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	3,21	3,52	3,47	3,23	4,46	-		
<b>3.2</b>	<b>Penataan Ruang</b>									
3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	0,00003	0,00004	0,00004	0,0004	0,00687	-		
3.2.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah/kawasan perkotaan	%	18,75	18,77	18,83	18,86	19,01			
3.2.3	Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan	%	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	-		
3.2.4	Ruang Publik yang berubah peruntukannya	%	0	0	0	0	0	0		
3.2.5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	%	6,295	6,302	6,322	6,332	6,382	-		
3.2.6	Ketaatan terhadap RTRW	%	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	100,00	96,00	Belum tercapai
<b>4</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>									
4.1	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,1380	0,1480	0,1580	0,1690	0,1810			
4.2	Rasio Permukiman layak huni	%	0,0320	0,0350	0,0390	0,0440	0,0480			
4.3	Cakupan Ketersediaan rumah layak huni	%	69,58	69,93	70,59	71,50	72,06	100,00	72,06	Melampaui
4.4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau	%	69,58	69,93	70,59	71,50	72,06	-		
4.5	Persentase Pemukiman yang tertata	%	0,040	0,243	0,271	0,283	0,295	-		
4.6	Lingkungan permukiman kumuh	%	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0		
4.7	Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0		
4.8	Rumah tangga kumuh perkotaan	%	10,39	9,35	8,41	7,57	6,82	0		
<b>5</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>									
5.1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	%	1:1	1:1	1:1	1:1	0,80	-		
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%		60	100	67	80	-		
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kab/kota	%	100	100	100	100	100	-		
5.4	Persentase penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100			
<b>6</b>	<b>SOSIAL</b>									
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	%	65,38	69,27	65,38	65,38	65,38			
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	65,38	69,27	65,38	65,38	65,38			
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	40,91	45,45	45,45	36,36	36,36			
6.4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	6,62	8,48	13,75	14,37	14,91			
6.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	39,41	96,10	96,10	94,94	89,02			
6.6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	39,41	96,10	96,10	94,94	89,02			
6.7	Persentase korban bencana dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	42,00	23,00	24,00	19,00	17,00			
<b>B.</b>	<b>URUSAN WAJIB NON DASAR</b>									
<b>1</b>	<b>TENAGA KERJA</b>									
1.1	Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun	Kasus	14	4	8	12	22			
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	100	100	100	100			



No.	Aspek/Focus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Capaian (%)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	99	87	67	40	56			
1.4	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	100	100	100	100	100			
1.5	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	15	38	43	51	46			
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100			
1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%					13,89			
1.8	Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%					0,10			
1.9	Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100			
1.10	Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%								
<b>2</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	3	3	3	3	3	16,39	20,66	Belum tercapai
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	16,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	25,00	Belum tercapai
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	94,98	95,14	94,36	95,14	95,14			
2.4	Rasio KDRT	%	0,16	0,16	0,10	0,08	0,08			
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	62,02	60,10	60,10	60,10	60,10			
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	94,64	100	97,29	95	95			
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KIP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	%	100	100	100	100	100			
2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100			
2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100			
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100			
2.11	Cakupan layanan pemulangan bagi anak perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100			
2.12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100			
2.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	93,62	93,62	94,57	94,57	94,57			
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%	69,57	69,57	70,45	94,45	94,45			
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan tinggi	%	1,94	1,95	1,96	1,97	1,98			
2.16	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	100	100	100	100	100			
2.17	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	%	55,68	43,60	43,60	49,88	45			
<b>3</b>	<b>PANGAN</b>									
3.1	Ketersediaan pangan utama	Ton	29,86	36,63	26,85	43,34	51,94			
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	%			tidak ada data	4637/192,9	4757/105			
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Sampel Komoditi			tidak ada data	5	15			
<b>4</b>	<b>PERTANAHAN</b>									
4.1	Persentasi Luas Lahan Bersertifikat	Ha					9.582,78			
<b>5</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>									
5.1	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Poin	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68			
5.2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Poin								
5.3	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Poin								
5.4	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	%	100	100	100	100	100			
5.4.1	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/di bina	Orang	2,00	2,00	3,00	3,00	10,00			
5.5	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Kegiatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
5.6	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Kegiatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			

No.	Aspek/Focus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Capaian (%)	interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			
5.7	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Kegiatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
5.8	Penetapan hak MHA	Kegiatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
5.9	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Kegiatan	100	100	100	100	100			
5.10	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	%								
5.11	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten	%	100	100	100	100	100			
5.12	Timbulan sampah yang ditangani	%	0	0	0	0	0			
5.13	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	0	0	0	0	0			
5.14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%			39,559	38,210				
5.15	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten	%								
<b>6</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>									
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satu penduduk	%	63,67	67,26	74,28	82,22	88,70			
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	4,59	5,38	11,26	35,26	53,42			
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	%	11,48	12,28	21,01	23,12	27,23			
6.4	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	%	100	100	100	100	100			
6.5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	63,67	67,26	74,28	82,22	88,70			
6.6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	9.979	9.989	19.985	32.751	41.389			
<b>7</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>									
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	%	100	100	100	73	80			
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	61	76	143	136	161			
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data			
7.4	Persentase LPM aktif	%	100	100	100	100	100			
7.5	Persentase LPM Berprestasi	%	100	100	100	100	100			
7.6	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100			
7.7	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100			
7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	20	20	20	20	20			
<b>8</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	3,59	3,99	4,07	3,79	3,88	1,97	51,84	Belum tercapai
8.2	Total fertility rate (TFR)	%	4,40	4,20	3,10	3,80	3,60	2,28	57,89	Belum tercapai
8.3	Presentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	100	100	100	100	100			
8.4	Presentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/Perkada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00			
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	Tercapai
8.9	Ratio akseptor KB	%	48,30	53,15	51,44	55,57	69,95			
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49	%	39,11	42,49	42,29	47,58	44,63	61,90	72,10	Belum tercapai
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19)	%					17,00	38,00	44,74	Belum tercapai
8.12	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	1,21	1,17	0,99	0,97	0,97			
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	34,53	36,00	25,30	18,01	22,11	9,91	44,82	Belum tercapai
8.14	Presentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	46,53	54,73	43,23	45,76	44,53	23,50	189,49	Melampaui
8.15	Presentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	%	26	26	26	25	25	-		
8.16	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB	%	21,96	26,06	55,24	15,90	37,66	-		
8.17	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB	%	21,42	30,20	31,25	31,25	27,77	-		
8.18	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	42,40	44,90	47,50	49,50	51,50	-		
8.19	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	%	7,50	6,00	9,00	7,50	7,50	-		

No.	Aspek/Focus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Capaian (%)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			
8.20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-		
8.21	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	14,66	18,66	20,00	16,00	21,33	-		
8.22	Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-		
8.23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100,44	472,41	232,39	63,36	141,43	-		
8.24	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-		
8.25	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-		
<b>9</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>									
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Penumpang	1.354.803	1.505.336	1.672.596	1.858.440	2.069.372	-		
9.2	Rasio ijin trayek	%	0,00032	0,00024	0,00020	0,00019	0,00019	-		
9.3	Jumlah uji KIR angkutan umum	%	150,00	157,00	177,00	181,00	190,00	-		
9.4	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus	Unit	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00	-		
9.5	Persentase layanan angkutan darat	%	0,347	0,347	0,347	3,159	3,159	-		
9.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	1,157	1,558	1,983	2,027	2,128	-		
9.7	Pemasangan rambu-rambu	%	21,28	23,64	25,24	26,44	28,44	-		
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,31	0,30	0,29	0,07	0,06	-		
9.9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang/ barang	282.247	307.308	324.045	334.232	348.642	-		
9.10	Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang/ barang	43.523	68.584	84.321	95.508	109.919	-		
<b>10</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-		
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	90,30	90,30	90,30	90,30	90,30	100,00	90,30	Belum tercapai
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	49,28	65,66	65,28	65,46	65,40	-		
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	49,00	66,00	65,00	65,00	65,00	100,00	65,00	Belum tercapai
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	45,60	45,60	45,60	45,60	65,70	-		
<b>11</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>									
11.1	Persentase koperasi aktif	Koperasi	89,13	87,32	86,84	89,60	98,90	100,00	98,90	Belum tercapai
11.2	Persentase Usaha Mikro Kecil Menengah	%	20,83	25,97	30,01	33,64	32,88	-		
<b>12</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>									
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	17	33	24	30	11	-		
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (x1.000.000)	Juta Rupiah	111.594	106.533	154.531	246.658	105.000	-		
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	%	7,82	10,39	13,42	13,97	6,27	-		
12.4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Milyar Rupiah	11,59	(4,54)	45,05	59,62	(57,43)	-		
<b>13</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>									
13.1	Presentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100	100	100	-		
13.2	Cakupan pembinaan olahraga	%	50,00	60,00	66,67	73,33	94,12	-		
13.3	Cakupan pelatih yang bersertifikat	%	120,00	108,33	100,00	94,74	95,45	-		
13.4	Cakupan pembinaan atlet muda	%	36,52	36,44	36,45	36,65	50,94	-		
<b>14</b>	<b>STATISTIK</b>									
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tersedia/ Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	-		
14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-		
14.3	Buku "PDRB"	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-		
<b>15</b>	<b>PERSANDIAN</b>									
15.1	Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	-		
<b>16</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>									
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	5	6	3	3	2	-		
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Benda/situs	3	3	3	3	-			
16.3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar	-	-	-	-	5	-		
<b>17</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>									
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	138	1.283	78	466	1.301	-		
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	1.321	628	508	400	412	-		
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0,0006834	0,00068	0,00070	0,00069	0,00069	-		
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	122	99	68	451	1.301	-		
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	1.319	620	200	200	210	-		
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	1	1	2	1	2	-		

No.	Aspek/Focus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Capaian (%)	interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			
<b>18</b>	<b>KEARSIPAN</b>									
18.1	Presentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	7,55	7,55	7,55	9,09	18,18	-		
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang			1					
<b>C.</b>	<b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>									
<b>1</b>	<b>PARIWISATA</b>									
1.1	Destinasi wisata yang dikembangkan	Destinasi				1	1			
1.2	Cakupan Desa Wisata	Desa	2							
<b>2</b>	<b>PERTANIAN</b>									
2.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ha	392	436	307	477	487	-		
2.2	Cakupan bina kelompok petani	%	100	100	100	100	100	-		
2.3	Produksi lontar	Ton	956,81	1.173,82	929,83	981,50	1.035,29	-		
<b>3</b>	<b>KEHUTANAN</b>									
3.1	Rehabilitasi lahan kritis	%								
<b>5</b>	<b>PERDAGANGAN</b>									
5.1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%						tidak ada data		
<b>6</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>									
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%		tidak ada data	0,59	0,38	0,14			
<b>7</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>									
7.1	Persentase transmigran lokal	%	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
<b>8</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
8.1	Produksi perikanan Tangkap	Ton	2.632	2.746	3.259	3.310	3.366	-		
8.2	Produksi budidaya rumput laut	Ton	18.230	18.230	16.074	15.776	15.776	-		
8.3	Konsumsi ikan	Kg/Kapita	22,60	22,06	22,88	42,58	42,58	54,50	78,13	Belum tercapai
8.4	Cakupan bina kelompok nelayan	%	1,09	4,47	1,50	1,17	4,10	-		
<b>D.</b>	<b>URUSAN PENUNJANG</b>									
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>									
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	Tercapai
1.2	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	Tercapai
1.3	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	Tercapai
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	Tercapai
1.5	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPd	%	98,46	86,17	90,42	83,51	78,72			
1.6	Penjabaran konsistensi program RKPd kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
<b>2</b>	<b>KEUANGAN</b>									
2.1	Persentase SILPA terhadap APBD	%	6,23	11,34	8,30	6,88	8,76			
2.2	Penetapan APBD	TEPAT WAKTU/ TIDAK TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU: 9 DESEMBER 2013	TEPAT WAKTU: 23 DESEMBER 2014	TEPAT WAKTU: 17 DESEMBER 2015	TEPAT WAKTU: 30 DESEMBER 2016	TIDAK TEPAT WAKTU: 1 FEBRUARI 2018			
<b>3</b>	<b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>									
3.1	Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1,40	1,40	16,57	16,57	16,00			
3.2	Presentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	0,29	2,51	2,79	1,57	1,57			
3.3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	32	32	31	32	32			
3.4	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	656	644	613	602	608			
3.5	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2.530	2.530	2.538	2.538	2.608			
<b>4</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>									
4.1	Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan	Jenis			1					
<b>5</b>	<b>PENGAWASAN</b>									
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	71,43	84,09	79,90	61,14	56,74			
5.2	Jumlah Temuan BPK	Temuan	23	21,00	14,00	16,00	13,00			
<b>6</b>	<b>SEKRETARIAT DEWAN</b>									
6.1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kab.Rote Ndao	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
6.2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
<b>III. ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>										
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	Rupiah	414.723,00	469.073,00	537.038,98	677.533,00	752.078,00	218.085,80		
2	Nilai Tukar Petani	Poin								
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi non pangan per	%	43,79	44,19	45,83	57,23	61,71			
4	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	61,80	71,91	16,85	67,23	72,66			

## 2.5 Evaluasi RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 Dan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019

### 2.5.1 Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 Periode RPJMD II, 2015-2020

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2019 merupakan tahapan dari Periode Pemantapan dalam RPJPD yaitu tahun 2015-2020. Oleh karena itu evaluasi ini melihat hasil yang dicapai dari setiap sasaran dan indikator yang ditetapkan dalam RPJPD khusus periode berkenaan. Untuk Tahap Pemantapan ini, prioritas pembangunan Rote Ndao diletakan untuk **lebih** meningkatkan mutu SDM, **lebih** meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian daerah dengan dukungan pembangunan **kualitas** infrastruktur dan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, **aparatur pemerintahan** yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel, menjamin perlindungan kesejahteraan sosial, serta penegakkan hukum dan HAM. Bidang-bidang prioritas untuk tahap ini adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pembangunan SDM, melalui Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan KB, serta Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Kepemudaan dan Olah Raga
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Infrastruktur
4. Bidang Kesejahteraan Sosial
5. Bidang Politik dan Pemerintahan
6. Bidang SDA, LH dan Tata Ruang
7. Bidang Hukum dan HAM

Capaian setiap bidang prioritas dapat diukur dari indikator di bawah ini:

**Tabel 2.71**  
**Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2020**  
**Periode Tahun 2015-2020**

NO	Indikator	Target 2015-2020		Capaian s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian		Ket.
1	Tingkat pertumbuhan penduduk tetap terjaga pada level < 1,25% per tahun	1,25	%	3,88	%	32,21	%	Belum mencapai target
2	Jumlah penduduk buta huruf turun menjadi maksimal 1%	1	%	9,40	%	8,9	%	Belum mencapai target
3	Angka gizi kurang menurun	5,6	%	5,71	%	98,07	%	Akan mencapai target
4	Angka gizi buruk berkurang	0,5	%	0,2	%	250	%	Melampaui target
5	Angka kematian bayi maksimal 10 kasus	10	Kasus	46	Kasus	41,67	%	Belum mencapai target
6	APM pendidikan dasar (SD maupun SMTP) terjaga pada level 100%	100	%	89,75	%	83,68	%	Belum mencapai target
7	Tingkat kelulusan pendidikan dasar: SD 100%;	100	%	100	%	100	%	Sesuai Target
8	Tingkat Kelulusan SMTP minimal 96%	96	%	100	%	104,17	%	Melampaui target
9	Laju pertumbuhan ekonomi tetap dijaga pada level di atas 5,48%.	5,48	%	5,48	%	100	%	Sesuai Target
10	Pendapatan per kapita tetap dijaga pada level minimal Rp.4,04 juta/kapita.	4.040.000	Rp	18.014.000	Rp	274,14	%	Melampaui target
11	Tingkat pengangguran terbuka tetap dijaga pada level dibawah 2% yang diikuti dengan terus berkurangnya pengangguran tersembunyi	2	%	2,73%	%	94,78	%	Akan mencapai target
12	Persentase penduduk miskin terus menurun	23,09	%	28,08	%	17,77	%	Belum mencapai target

Dari Tabel di atas dapat dilihat tiga kategori capaian yaitu melampaui target, sesuai target dan belum memenuhi terget. Khusus untuk indikator yang belum mencapai target yaitu:

- Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk belum dapat dikendalikan dengan baik akibat masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang Keluarga Berencana. Selain itu juga dipengaruhi oleh banyaknya mutasi penduduk masuk ke wilayah Kabupaten Rote Ndao akibat berbagai daya tarik ekonomi Kabupaten Rote Ndao sebagai daerah otonomi baru yang sedang berkembang.



- Angka Buta Huruf  
Sebagian besar penduduk yang buta huruf adalah penduduk diatas usia produktif sehingga sulit untuk dientaskan melalui program pendidikan non formal. Untuk kelompok seperti ini lebih ditekankan pendekatan pemberdayaan dan penyediaan jaminan sosial.
- Gizi Kurang dan Gizi Buruk  
Angka gizi kurang yang masih tinggi disebabkan oleh kurangnya pemahaman ibu terhadap pola asuh anak termasuk pemberian makan bergizi dengan pemanfaatan pangan lokal seperti ubi-ubian, kelor, gula merah, telur, susu, sayur, buah buahan lokal dan sebagainya.
- APM SD/SMP  
APM SD/SMP belum mencapai target karena adanya penduduk pada usia 7-13 tahun masih bersekolah tidak pada jenjang pendidikan seharusnya karena tahan kelas dan atau ada yang putus sekolah.
- Tingkat Pengangguran Terbuka  
Meningkat sebagian besar pekerja di Kabupaten Rote Ndao berasal dari sektor pertanian maka tingkat partisipasi angkatan kerja juga sangat dipengaruhi oleh curah hujan. Apabila curah hujan baik maka semua petani akan memiliki kesempatan untuk menggarap sawah dan ladang sedangkan apabila curah hujan rendah maka sebagian petani akan kehilangan pekerjaan di bidang pertanian dan mencoba pekerjaan lainnya seperti pertukangan, penjualan jasa lainnya yang pekerjaannya tidak bersifat tetap sehingga cenderung disebut sebagai setengah menganggur bahkan pengangguran terselubung
- Persentase Penduduk Miskin  
Tantangan terberat adalah sulitnya menurunkan jumlah penduduk miskin yang kontradiktif dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan nilai tambah ekonomi belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di bawah garis kemiskinan. Oleh karen itu, belanja pemerintah perlu difokuskan lagi untuk membidik masyarakat miskin sebagai sasaran utama.

Untuk indikator yang sudah mencapai target atau melampaui target seperti gizi buruk, tingkat kelulusan SD/SMP, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan perkapita agar terus dijaga agar tidak menurun pada masa akan datang melainkan dapat terus meningkat untuk mendorong daya saing daerah baik secara regional maupun nasional.

## **2.5.2 Evaluasi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019**

Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 merupakan gambaran pelaksanaan pembangunan sekaligus informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disajikan dengan indikator kinerja sasaran RPJMD. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 ditetapkan 116 indikator kinerja sasaran yang selanjutnya di sebut indikator kinerja daerah. Tingkat capaian indikator pembangunan merupakan perbandingan antara realisasi dan target yang direncanakan. Berdasarkan data tersebut, capaian indikator sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan terdapat 46 indikator melampaui, 17 indikator tercapai, 32

Indikator akan tercapai, 13 indikator perlu usaha, dan 21 Indikator perlu usaha keras. Capaian indikator tersebut disajikan pada tabel 2.72 dibawah ini.

**Tabel 2.72**  
**Pencapaian Kinerja RPJMD Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun 2015-2019**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja Akhir RPJMD	(%)	Tingkat Capaian
		2018/2019	2018/2019	2019	
1	2	9			
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
A	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
1)	PDRB Harga Konstan Tahun 2010 (Rp.)	562,738,052.00	1,836,378,260.00	326.33	Melampaui
2)	PDRB Harga Berlaku (Rp. Juta)	1,600,467,370.00	3,162,398,581.00	197.59	Melampaui
3)	PDRB Per Kapita Harga Konstan 2010 (Rp)	3,867,403.00	11,085,400.00	286.64	Melampaui
5)	PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Rp. Juta)	10,999,171.00	19,090,100.00	173.56	Melampaui
6)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.00	5.48	91.33	Akan tercapai
7)	Indeks Williamson (%)	0.2 - 0.256			
	Percepatan Penurunan Penduduk Miskin				
B	Penurunan penduduk miskin (%)	23.09	28.08	17,77	Peru Usaha Keras
2	Kesejahteraan Sosial				
A	Pendidikan				
1)	Angka Melek Huruf (%)	95.21	90.60	95.16	Akan tercapai
2)	Rata-rata lama sekolah	7.58	6.90	91.03	Akan tercapai
3)	APM (%)				
	· SD	100.00	92.90	92.90	Akan tercapai
	· SMP	100.00	74.45	74.45	Perlu usaha
4)	APK (%)				
	· SD	100.00	99.59	99.59	Akan Tercapai
	· SMP	100.00	98.01	98.01	Akan Tercapai
B	Kesehatan				
1)	Angka harapan hidup	68.50	63.59	63.78	Perlu usaha
2)	Jumlah Kelahiran				
	· Persentase Bayi Lahir Hidup	2.799 (99,64%)	98,49	98,49	Akan tercapai
	· Persentase Bayi Lahir Mati	10 (0,36%)	1,51	23.84	Perlu usaha lebih keras
3)	· AKI (kasus)	-	189	-189	Perlu usaha sangat keras
4)	Kasus balita gizi				
	· Kurang (%)	5.60	5.71	98.07	Akan tercapai
	· Buruk (%)	0.50	0.20	250.00	Melampaui
C	Ketenagakerjaan				
1)	Penduduk bekerja dari angkatan kerja (%)	97.17	72.98	75.11	Akan tercapai

2)	Penurunan jumlah pengangguran (%)	2.83	2.11	74.56	Akan tercapai
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
A.	Pelayanan Urusan Wajib				
1	Pendidikan				
1)	Proporsi penduduk yang menamatkan sekolah				
	Tidak berjasah (%)				
	· SD (%)	22.97	0.41	5.602	Melampaui
	· SMP (%)	20.00	1.99	1.005	Melampaui
2)	Rasio Sekolah-Siswa				
	· SD/MI/SLB	1:120	1:141	85.11	Akan tercapai
	· SMP/MTs	1:175	1:198	88.38	Akan tercapai
3)	Rasio Kelas-Siswa				
	· SD/MI/SLB	0.06	0.036	166	Melampaui
	· SMP/MTs	0.06	0.031	193	Melampaui
	Meningkatkan mutu pendidikan				
1)	Tingkat Kelulusan				
	· SD (%)	100.00	100.00	100.00	Tercapai
	· SMP (%)	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2)	Rasio guru: siswa				
	· SD	0.05	0.047	106.38	Melampaui
	· SMP	0.05	0.04	125	Melampaui
3)	Jumlah guru berpendidikan S1	100.00	81.57	81.57	Akan tercapai
4)	Sertifikasi guru (%)	100.00	95.85	95.85	Akan tercapai
	Penguatan Manajemen Pendidikan				
1)	Penerapan manajemen berbasis Sekolah (MBS)	100.00	100	100	Tercapai
2)	Penerapan kurikulum 2013 (%)				
	· SD	100.00	94.52	94.52	Akan tercapai
	· SMP	100.00	100	100	Tercapai
3)	Penerapan SPM Pendidikan	100.00	100	100	Tercapai
2	KESEHATAN				
	Akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat:				
1)	Jumlah Prasarana kesehatan				
	· Rumah sakit	1.00	1.00	100.00	Tercapai
	· Puskesmas	12.00	12.00	100.00	Tercapai
	· Pustu	87.00	87.00	100.00	Tercapai
	· Posyandu	366.00	366.00	100.00	Tercapai
2)	Tenaga Kesehatan				
	· Jumlah Dokter	35.00	21.00	60.00	Perlu usaha
	Rasio per satuan penduduk	1:3,567	1:7,601	53,07	Perlu usaha
	· Jumlah Tenaga Paramedis (Perawat/Bidan)	217.00	214.00	98.62	Akan tercapai
	Rasio per satuan penduduk	1:575	1:746	57.50	Perlu usaha
	Partisipasi masyarakat terhadap kesehatan				
1)	Keluarga Berencana (KB):				
	· Jumlah Akseptor KB	14,403	15,895.00	110.36	Melampaui
	· Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	17,790	28,605.00	160.79	Melampaui

2)	Peserta KB Aktif (%)	87.00	70.39	80.91	Akan tercapai
	Ketersediaan Jamban untuk peningkatan Sanitasi dan Penurunan BABS pada Desa/kelurahan (%)				
1)	Sendiri	99.32	63.49	63.49	Perlu usaha
2)	Bersama	0.59	6.58	6.58	Perlu usaha keras
3)	Bukan jamban	0.09	29.93	29.93	Perlu usaha keras
	Penurunan kasus penyakit di desa/kelurahan(%)				
1)	Diare (kasus)	-	2.728		Perlu usaha keras
2)	Demam Berdarah (kasus)	-	21		Perlu usaha
3)	Campak (kasus)	33	9	27.27	Perlu usaha keras
4)	ISPA (kasus)	516	4.724	10.92	Perlu usaha keras
5)	Malaria (angka kesakitan)	0/1000	3.6/1000	0.36	Perlu usaha keras
6)	TBC (kasus)	3	118	2.54	Perlu usaha keras
7)	Kusta (prevalensi/10.000)	0.14	0.3	46.67	Perlu usaha keras
8)	Filariasis (kasus)	80	152	52.63	Perlu usaha
3	Pekerjaan Umum				
1)	Jalan Kabupaten (Km)	432.90	456.65	105.49	Melampaui
	Kondisi Mantap (%)	90.00	35.15	37.77	Perlu usaha keras
2)	Jalan Non Status (Km)	345.00	628.60	182.20	Melampaui
3)	Panjang Jembatan (m)	652.00	182.00	27.91	Perlu usaha keras
4)	Panjang Saluran Irigasi Teknis (m)	883.00	1,657.00	187.65	Perlu usaha keras
5)	Kondisi Baik (%)	90.00	64.41	71.57	Perlu usaha
6)	Saluran Non Teknis (m)	1,000.00	279,365.78	27,936.58	Melampaui
7)	Pembangunan Embung (unit)	125.00	52.00	41.60	Perlu usaha keras
8)	Panjang drainase (M)	1,500.00	800.00	53.33	Perlu usaha
9)	Rumah dengan jamban (%)	72.00	68.18	94.69	Akan tercapai
10)	Cakupan layanan air bersih perkotaan (%)	100.00	75.87	75.87	Akan tercapai
11)	Cakupan layanan air bersih perdesaan (%)	73.00	75.87	103.93	Melampaui
4	Perumahan				
1)	Rumah Layak huni (%)	18.71	72.06	385.14	Melampaui
5	Penataan Ruang				
1)	Perda RTRWK (%)	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2)	Review RTRWK (%)	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3)	RDTR Kawasan Strategis	4.00	1.00	25.00	Perlu usaha keras
4)	Rencana Zonasi	10	3	30.00	Perlu usaha keras
6	Perencanaan Pembangunan Daerah				
1)	Ketaatan Penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, KUA PPAS	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2)	Evaluasi RPJMD, Renstra, RKPD, Renja SKPD	100.00	100.00	100.00	Tercapai

7	Perhubungan				
1)	Jumlah Ijin trayek yang dikeluarkan (ijin)	5.00	30.00	600.00	Melampaui
2)	Jumlah pelabuhan/ Bandara/Terminal				
	- Pelabuhan Penyeberangan	15.00	6.00	40.00	Perlu usaha keras
	- Pelabuhan Rakyat	22.00	19.00	86.36	Akan tercapai
	- Bandar Udara	1.00	1.00	100.00	Tercapai
	- Tambatan perahu	7.00	18.00	257.14	Melampaui
3)	Pemasangan Rambu Darat dan Laut (titik)	250.00	801.00	320.40	Melampaui
4)	Cakupan layanan jaringan informasi dan telekomunikasi (%)	90.00	39.65	44.06	Perlu usaha keras
8	Lingkungan Hidup				
1)	Pelayanan Persampahan (m3)	4.50	361.25	8,027.78	Melampaui
2)	Pendaurulangan sampah (%)	70.00	-	-	
3)	Prosentase TPS terhadap penduduk	0.1	0.00013	0.13	Perlu usaha keras
4)	Penurunan pencemaran lingkungan (Air, Udara, dan tanah) (%)	45.00	-	-	
5)	Rekomendasi dokumen lingkungan hidup (dok)	25	197	788	Melampaui
6)	Penurunan kerusakan sumberdaya alam				
	- Tembok penahan erosi sungai (M)	200.00	150.00	75.00	Akan tercapai
	- Tembok penahan abrasi pantai (M)	500.00	750.00	150.00	Melampaui
	- Perlindungan mata air (unit)	10.00	8.00	80.00	Akan Tercapai
	- Pembangunan Turap (M)	1,950.00	2,528.00	129.64	Melampaui
9	Ketenagakerjaan				
1)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	60.00	72.98	121.63	Melampaui
10	Pemuda dan Olahraga				
1)	Organisasi Kepemudaan yang aktif terbina	12.00	9.00	75.00	Akan tercapai
2)	Cabang Olah Raga Prestasi Lokal, Nasional. (Cabang)	15.00	9.00	60.00	Perlu usaha
3)	Gelanggang Olah Raga/Lapangan Olah Raga (unit)	26.00	69.00	265.38	Melampaui
11	Pemberdayaan Perempuan dan Anak				
1)	Lembaga PUG yang aktif	20.00	15.00	75.00	Akan tercapai
2)	Keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan (%)	50.00	30.00	60.00	Perlu usaha
3)	Keterwakilan Perempuan di Parlemen (orang)				
	- Eksekutif (%)	4.00	2.00	50.00	Perlu usaha
	- DPRD Kab. (%)	4 (16%)	4.00	25.00	Perlu usaha keras
	Peningkatan perlindungan dan jaminan kesejahteraan anak				
1)	Lembaga perlindungan anak yang aktif	12.00	2.00	16.67	Perlu usaha keras
2)	Perda akta kelahiran Gratis (%)	100.00	100.00	100.00	Tercapai
12	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
1)	Persentase Koperasi Aktif	100.00	90.58	90.58	Akan tercapai
2)	Peningkatan Jumlah Koperasi :				

	· Jumlah Koperasi (Unit)	217.00	191.00	88.02	Akan tercapai
	· Jumlah Anggota (Org)	12,697.00	15,565.00	122.59	Melampaui
	· Modal Sendiri (Rp.000)	24.949.442	43,329,702	173.67	Melampaui
13	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
1)	Opini BPK terhadap Pengelolaan keuangan Daerah	WTP	WDP	WDP	Perlu usaha
2)	Penerapan E-Proc dalam Pengadaan Barang dan Jasa (%)	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3)	Penataan arsip seluruh SKPD berbasis IT (%)	40.00	-	-	-
B.	Fokus Layanan Urusan Pilihan				
1	Pertanian				
1)	Pertumbuhan Sub Sektor bahan makanan terhadap PDRB	3.33	-	-	-
2)	Pertumbuhan Sub Sektor perkebunan terhadap PDRB	3.21	-	-	-
3)	Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	3.87	-	-	-
4	Pariwisata				
1)	Pertumbuhan Sub Sektor Hotel dan Restoran terhadap PDRB (%)	5.31	-	-	-
5	Kelautan dan Perikanan				
1)	Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	3.74	10.07	269.25	Melampaui
6	Perdagangan				
1)	Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	7.27	6.78	93.26	Akan tercapai
7	Perindustrian				
1)	Pertumbuhan Sub Sektor Industri terhadap PDRB (%)	1.85	1.19	64.32	Perlu usaha
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Kemampuan Ekonomi				
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
1)	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp)	218,085.80	828,622.00	379.95	Melampaui
2)	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Rp)	178,949.80	548,547.76	306.54	Melampaui
2	Ketenagakerjaan				
1)	Angka Ketergantungan	69.20	74.00	93.51	Akan tercapai
2)	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.97	3.80	51,84.00	Perlu Usaha
3)	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.83	2.11	142.18	Melampaui
3	Pertanian				
1)	Peningkatan produksi tanaman pangan				

	- Produksi Padi/gabah (ton)	65,363.00	107,892.00	165.07	Melampaui
	- Produksi Jagung (ton)	895.00	14,124.80	1,578.19	Melampaui
	- Produksi Bawang Merah (ton)	291.42	4,816.00	1,652.60	Melampaui
	- Produksi Sorghum (ton)	5.29	17.80	336.48	Melampaui
	- Produksi Kacang Tanah (ton)	114.68	115.00	100.28	Melampaui
	- Gula air (ton)	149.67	150.50	100.55	Melampaui
2)	Peningkatan produksi Perkebunan				
	· Kelapa (ton)	3,785.70	3,445.00	91.00	Akan Tercapai
	· Jambu Mete (ton)	78.00	45.00	57.69	Perlu usaha
	· Lontar	5,316.00	913.00	17.17	Perlu usaha keras
3)	Peningkatan alat mesin pertanian (Unit)	835.00	928.00	111,14	Melampaui
4	Perikanan dan Kelautan				
1)	Produksi Tangkap (ton)	3,276.00	3,529.00	107.72	Melampaui
2)	RTP tangkap (KK)	5,468.00	2,214.00	40.49	Perlu usaha keras
4)	Produksi Budidaya (ton)	828.00	14,000.00	1,690.82	Melampaui
5)	Jumlah RTP Budidaya	11,344.000	10,524.00	92.77	Akan Tercapai
6)	Pemanfaatan Lahan Budidaya (ha)	10,575.00	2,991.00	28.28	Perlu usaha keras
5	Pariwisata				
1)	Jumlah kunjungan wisatawan	5,281.00	3,861.00	73,11.00	Perlu usaha
	· Wisatawan Manca Negara	2,581.00	2,060.00	79.81	Akan Tercapai
	· Wisatawan Nusantara	2,700.00	1,801.00	66,70.00	Perlu usaha
	· Rata-rata lama menginap	7.00	2.00	28.56	Perlu usaha keras
2)	Jumlah Akomodasi Pariwisata				
	· Hotel/Losmen (Unit)	12.00	30.00	250.00	Melampaui
	· Kamar (buah)	150.00	219.00	146.00	Melampaui
	· Tempat Tidur (Buah)	287.00	346.00	120.56	Melampaui
6	Pengembangan daerah ekonomi baru				
1)	Kota Terpadu Mandiri	1.00	1.00	100.00	Tercapai
2)	Lokasi translok (unit)	4.00	4.00	100.00	Tercapai
3)	Pusat pengembangan Perikanan dan Kelautan (lokasi)	2.00	4.00	200.00	Melampaui



### 2.5.3 Rekapian Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020

Tabel 2.73 Rekapian Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020

NO	NAMA SKPD	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2020 (%)			
		KINERJA		KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	23	SR	19	SR
2	Dinas Kesehatan	22	SR	18	SR
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20	SR	16	SR
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kingkungan Hidup	22	SR	21	SR
5	Pol PP dan Linmas	19	SR	22	SR
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	19	SR	21	SR
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22	SR	18	SR
8	Dinas Sosial	20	SR	12	SR
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	21	SR	12	SR
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	13	SR	9	SR
11	Dinas Pangan	23	SR	15	SR
12	Dinas Kependudukan dan Capil	22	SR	16	SR
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36	SR	18	SR
14	Dinas Perhubungan	18	SR	10	SR
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	28	SR	33	SR
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	24	SR	11	SR
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18	SR	16	SR
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	21	SR	19	SR
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	22	SR	13	SR
20	Dinas Pertanian	46	SR	15	SR
21	Dinas Peternakan	23	SR	9	SR
22	Bag. Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	20	SR	32	SR
23	Bag. Adm. Pemerintahan Umum dan Kesra	24	SR	15	SR
24	Bag. Hukum dan Perundang-undangan	28	SR	22	SR
25	Bag. Organisasi dan Tata Laksana	24	SR	30	SR
26	Bag. Ekonomi dan Pembangunan	24	SR	16	SR
27	Bag. Perpustakaan	22	SR	17	SR
28	Sekretariat DPRD	27	SR	18	SR
29	Sekretariat Korpri	16	SR	13	SR
30	Bag. Adm. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	18	SR	12	SR
31	Kec. Lobalain	19	SR	16	SR
32	Kec. Rote Barat Laut	19	SR	18	SR
33	Kec. Rote Barat Daya	20	SR	22	SR
34	Kec. Rote Barat	32	SR	19	SR
35	Kec. Rote Selatan	18	SR	13	SR
36	Kec. Rote Tengah	20	SR	16	SR
37	Kec. Pantai Baru	29	SR	16	SR
38	Kec. Rote Timur	17	SR	11	SR
39	Kec. Ndao Nuse	53	R	13	SR
40	Kec. Landuleko	16	SR	14	SR
41	Inspektorat Daerah	18	SR	13	SR
42	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	23	SR	16	SR
43	Badan Keuangan dan Aset	22	SR	22	SR
44	Badan Pendapatan Daerah	39	SR	19	SR
45	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	20	SR	13	SR
<b>RATA - RATA</b>		<b>23,32</b>	<b>SR</b>	<b>16,85</b>	<b>SR</b>

2.5.4 Rekapian Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Bulan Juni Tahun 2021

Tabel 2.74 Rekapian Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Bulan Juni Tahun 2021

NO	NAMA SKPD	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2021 (%)			
		KINERJA		KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,09	SR	3,37	SR
2	Dinas Kesehatan	9,63	SR	7,01	SR
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,16	SR	2,80	SR
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1,12	SR	3,97	SR
5	Satuan Polisi Pamong Praja	25,17	SR	10,32	SR
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8,24	SR	3,90	SR
7	Dinas Sosial	12,54	SR	8,30	SR
8	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	7,97	SR	4,14	SR
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	6,71	SR	1,82	SR
10	Dinas Ketahanan Pangan	6,02	SR	7,19	SR
11	Dinas Kependudukan dan Capil	3,13	SR	11,67	SR
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,93	SR	4,80	SR
13	Dinas Perhubungan	10,75	SR	5,47	SR
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,18	SR	7,09	SR
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	5,05	SR	3,80	SR
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14,90	SR	8,66	SR
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13,95	SR	12,56	SR
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23,03	SR	8,46	SR
19	Dinas Perikanan	7,87	SR	4,69	SR
20	Dinas Pertanian	22,30	SR	12,47	SR
21	Dinas Peternakan	14,11	SR	5,93	SR
22	Bagian Umum	2,29	SR	4,10	SR
23	Bag. Adm. Pemerintahan Umum dan Kesra	1,97	SR	16,18	SR
24	Bagian Hukum	0,07	SR	6,20	SR
25	Bagian Organisasi	2,00	SR	2,12	SR
26	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	12,46	SR	8,33	SR
27	Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	10,33	SR	4,68	SR
28	Sekretariat DPRD	12,07	SR	10,72	SR
29	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	7,84	SR	6,42	SR
30	Badan Keuangan dan Aset	10,00	SR	6,34	SR
31	Badan Pendapatan Daerah	10,63	SR	26,35	SR
32	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	8,44	SR	7,36	SR
33	Sekretariat Korpri	20,50	SR	7,04	SR
34	Inspektorat Daerah	5,41	SR	3,66	SR
35	Kec. Lobalain	4,30	SR	11,88	SR
36	Kec. Rote Barat Laut	4,05	SR	3,90	SR
37	Kec. Rote Barat Daya	2,81	SR	5,77	SR
38	Kec. Rote Barat	0,28	SR	7,03	SR
39	Kec. Rote Selatan	9,95	SR	10,78	SR
40	Kec. Rote Tengah	2,84	SR	4,24	SR
41	Kec. Pantai Baru	19,49	SR	16,86	SR
42	Kec. Rote Timur	6,25	SR	25,32	SR
43	Kec. Ndao Nuse	101,80	ST	4,23	SR
44	Kec. Landuleko	7,83	SR	35,07	SR
45	Kec. Loaholu	7,81	SR	48,26	SR
46	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	6,53	SR	50,21	SR
<b>RATA - RATA</b>		<b>10,39</b>	<b>SR</b>	<b>10,25</b>	<b>SR</b>

## 2.6 Evaluasi Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga Negara secara minimal. Capaian penerapan SPM dalam pembangunan di Kabupaten Rote Ndao s/d Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.75  
Pencapaian SPM Kabupaten Rote Ndao s.d Tahun 2020

NO	INDIKATOR SPM	PENCAPAIAN SPM (%)	
		Target	Realisasi (2020)
<b>I.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>		
1	Pendidikan anak usia dini (5-6 tahun)	100	75,06
2	Pendidikan dasar (7-15 tahun)	100	99,93
3	Pendidikan kesetaraan (7-18 tahun)	100	100
<b>II.</b>	<b>KESEHATAN</b>		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	70,47
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	55,67
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	58,28
4	Pelayanan kesehatan balita	100	62,64
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	24,42
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	31,70
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	34,30
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	14,13
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	100	20,98
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	88,11
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	100	30,72
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV,yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	100	64,79
<b>III.</b>	<b>SOSIAL</b>		
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	19,64
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100	4,70
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100	10,86
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100	-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100	100
<b>IV.</b>	<b>PEKERJAAN UMUM</b>		
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	16,16
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	100	14,08
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	-
4	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	100	-
<b>V.</b>	<b>KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN</b>		
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100	84,09
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100
<b>VI.</b>	<b>BENCANA</b>		
1	Pelayanan informasi rawan bencana	100	100
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di desa	100	100
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100

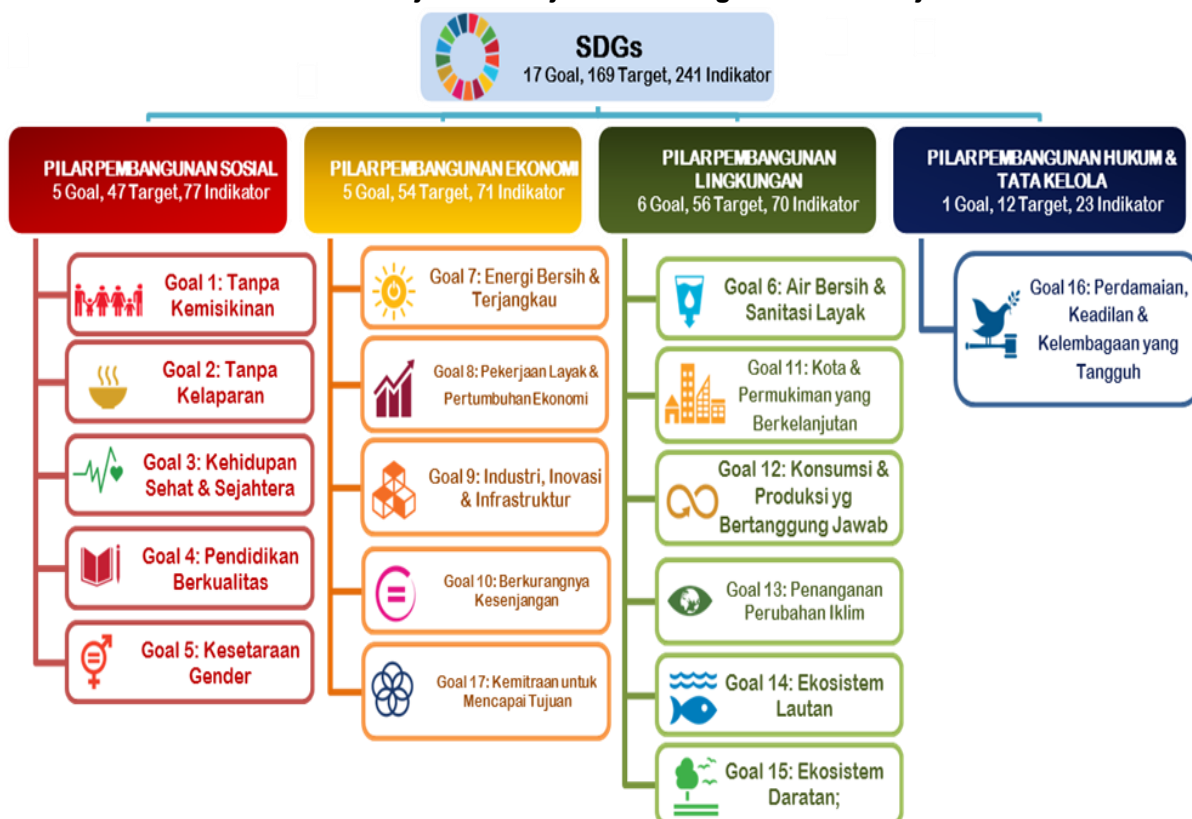
## 2.7 Gambaran Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goal's* (SDG's) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan dengan prinsip universal, integrasi dan inklusif.

Integrasi TPB kedalam RPJMD merupakan bentuk komitmen daerah dalam merealisasikan agenda SDG's sehingga pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik yang mendorong pertumbuhan ekonomi, tatanan sosial yang inklusif dan perlindungan terhadap lingkungan. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, pada hakekatnya adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB merupakan Komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu (1) Mengakhiri Kemiskinan; (2) Menghilangkan Kelaparan; (3) Hidup Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi; (7) Energi Terjangkau dan Terbarukan; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Mengurangi Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman Berkelanjutan; (12) Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan; (13) Mengatasi Perubahan Iklim; (14) Sumber Daya Maritim Berkelanjutan; (15) Pengelolaan Ekosistem Terrestrial Berkelanjutan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Sesuai kewenangan dan kondisi yang relevan dengan Kabupaten Rote Ndao serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 juga hasil penelaahan terhadap Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diperoleh data bahwa Indikator TPB yang menjadi urusan dan kewenangan Kabupaten Rote Ndao adalah sebanyak 173 indikator. Indikator-indikator TPB tersebut terbagi atas 4 (empat) pilar, yaitu:

1. Pilar Sosial, mencakup 5 tujuan (goal), yaitu tujuan 1 (tanpa kemiskinan), 2 (tanpa kelaparan), 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), 4 (pendidikan berkualitas) dan 5 (kesetaraan gender);
2. Pilar Lingkungan, mencakup 6 tujuan, yaitu tujuan 6 (air bersih dan sanitasi layak), 11 (kota dan permukiman yang berkelanjutan), 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab), 13 (penanganan perubahan iklim), 14 (ekosistem lautan) dan 15 (ekosistem daratan);
3. Pilar Ekonomi, terdiri atas 5 tujuan, yaitu tujuan 7 (energi bersih dan terjangkau), 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), 9 (industri, inovasi dan infrastruktur), 10 (berkurangnya kesenjangan), dan 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan); dan
4. Pilar Hukum dan Tata Kelola (Hutakel), terdiri atas 1 tujuan, yaitu tujuan 16 (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh).

**Gambar 2.47**  
**Gambaran Penjabaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

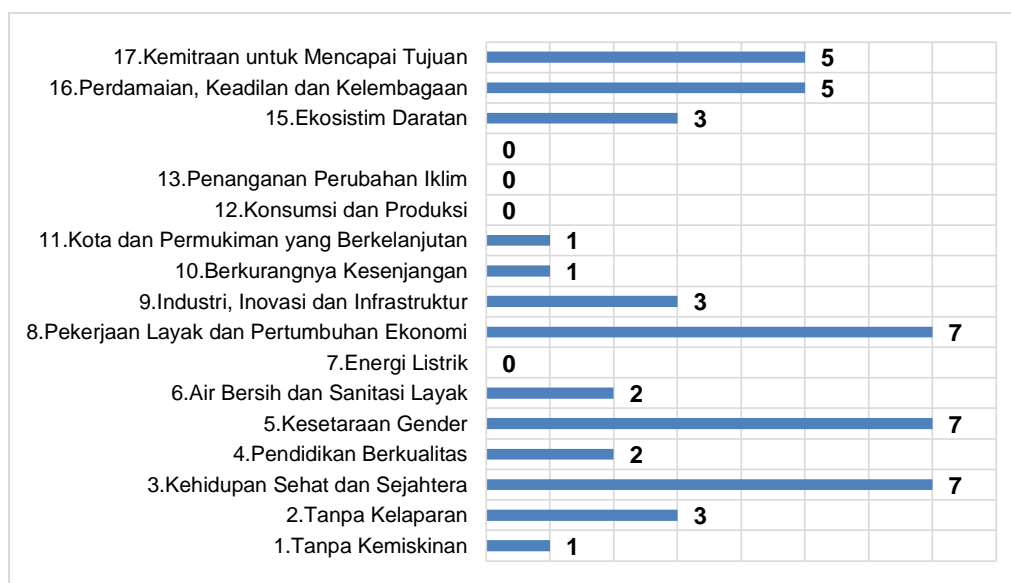


Dari 173 indikator, Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan sebanyak 125 indikator (72,25%). Indikator yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional sebanyak 47 indikator (27,17%), sedangkan 78 Indikator (45,09%) telah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, selanjutnya ada 8 indikator (4,62%) yang belum dilaksanakan dan 40 Indikator (23,12%) yang tidak memiliki data.

### 2.7.1 Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional Tahun 2020

Dalam pelaksanaan pencapaian TPB Kabupaten Rote Ndao telah mencapai 47 indikator yang sudah mencapai target nasional atau sebesar 27,17% dari 173 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Rote Ndao.

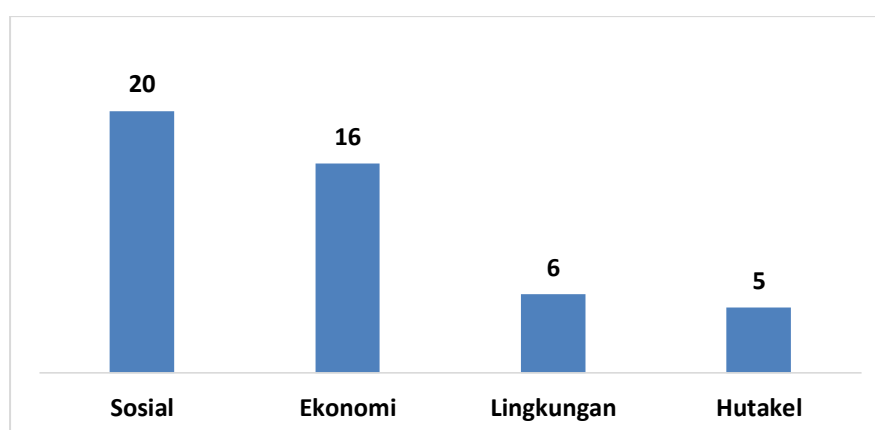
**Gambar 2.48**  
**Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional**



Berdasarkan Gambar 2.48 di atas, dapat dilihat bahwa tujuan dengan jumlah indikator TPB paling banyak yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional adalah tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 5 (Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan) dan Tujuan 8 (Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua) masing-masing sebanyak 7 indikator.

Indikator terbanyak yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional adalah pilar sosial sebanyak 20 indikator, Pilar ekonomi sebanyak 16 indikator, Pilar lingkungan sebanyak 6 indikator dan pilar hukum dan tata kelola (hutakel) sebanyak 5 indikator. Jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional ditunjukkan pada Gambar 2.49 berikut:

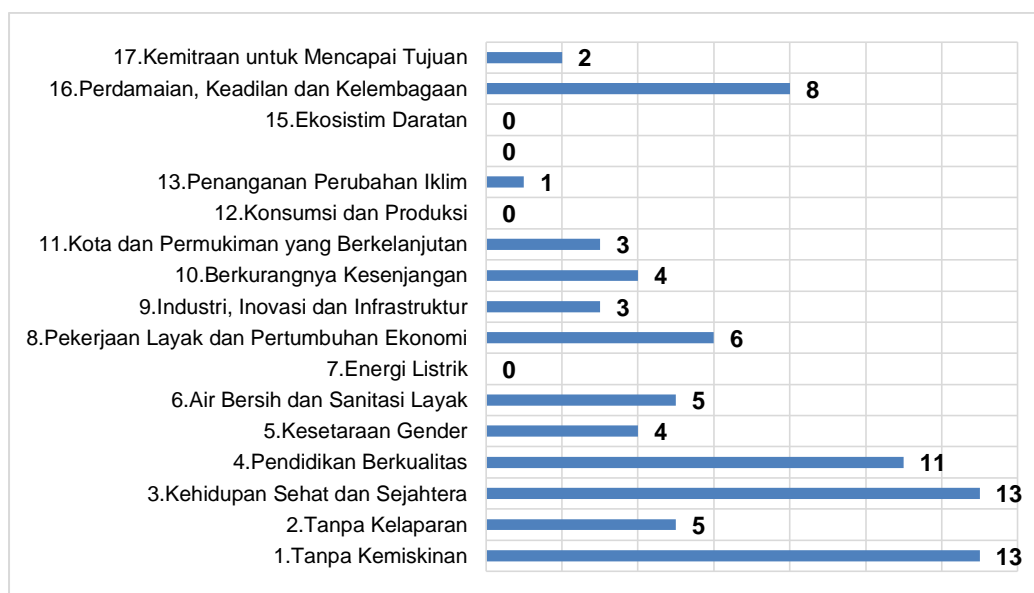
**Gambar 2.49**  
**Jumlah Indikator Pada Setiap Pilar yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional**



### 2.7.2 Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional Tahun 2020

Kategori indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional mencapai 78 indikator dari 173 indikator. Indikator pada kategori ini terdapat pada 13 tujuan dari 17 tujuan yang tercakup dalam TPB. Jumlah tujuan dan target TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional disajikan pada Gambar 2.50 berikut.

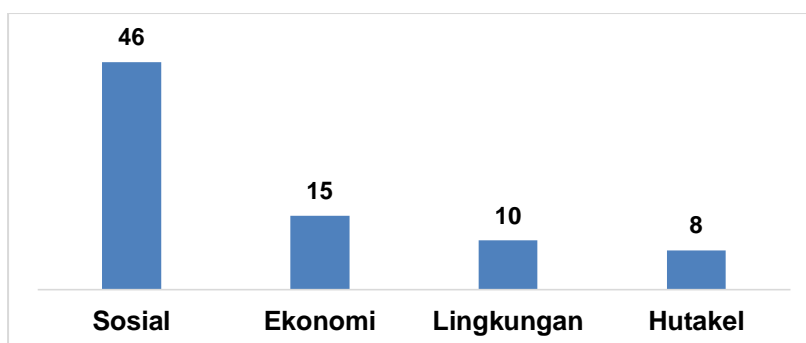
**Gambar 2.50**  
**Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional**



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa tujuan dengan jumlah indikator TPB paling banyak yang sudah dilaksanakan dan namun belum mencapai target nasional adalah Tujuan 1 (Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun) dan Tujuan 3 (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, masing-masing sebanyak 13 indikator. Selanjutnya diikuti Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) dengan 11 indikator dan Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh) sebanyak 8 indikator serta Tujuan 8 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) sebanyak 6 indikator.

Indikator TPB terbanyak yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional terdiri dari pilar sosial sebesar 46 indikator. Sedangkan indikator paling rendah adalah pilar hukum dan tata kelola sebesar 8 indikator. Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional pada setiap tujuan dan pilar dapat dilihat pada Gambar 2.51 di bawah ini:

**Gambar 2.51**  
**Jumlah Indikator Pada Setiap Pilar yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional**





### 2.7.3 Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional

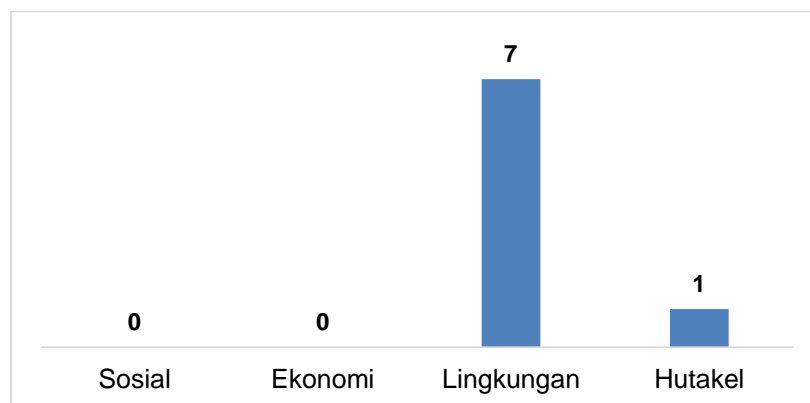
Kategori indikator TPB yang belum dilaksanakan sebanyak 8 indikator yang terdiri atas Tujuan 6 (air bersih dan sanitasi layak) 4 indikator, Tujuan 7 (Energi Terjangkau dan Terbarukan), Tujuan 11 (Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan), Tujuan 15 (Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayat) dan Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh) masing-masing 1 indikator. Jumlah indikator pada setiap tujuan yang masuk dalam kategori indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target ditunjukkan pada Gambar 2.52.

**Gambar 2.52**  
**Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional**



Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional terdiri dari pilar lingkungan sebesar 7 indikator, sedangkan indikator pada pilar hukum dan tata kelola sebanyak 1 indikator.

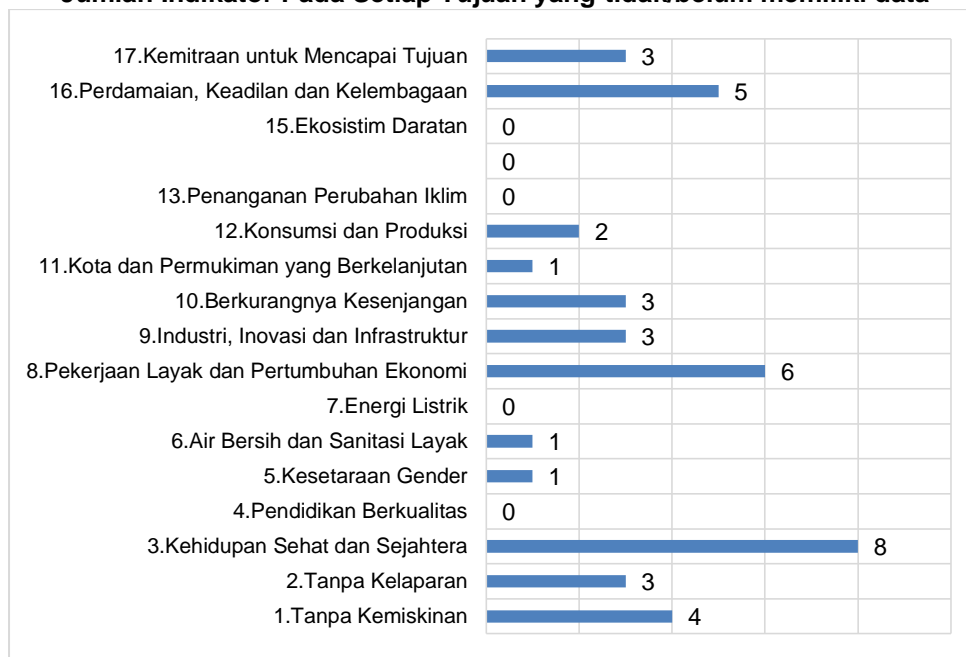
**Gambar 2.53**  
**Jumlah Indikator Pada Setiap Pilar yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional**



### 2.7.4 Indikator TPB yang tidak/belum ada data

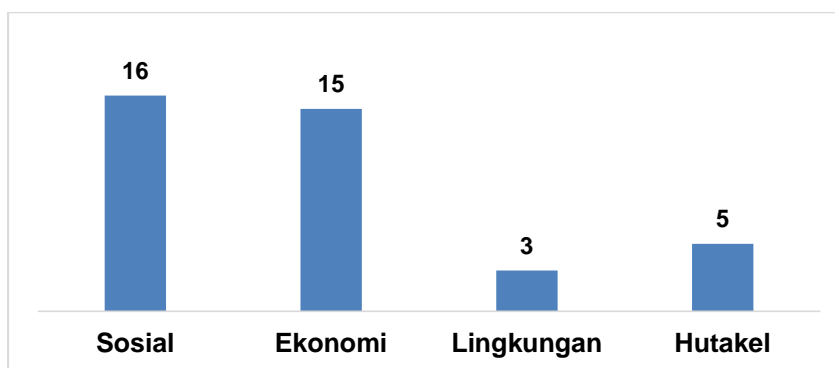
Kategori indikator TPB yang tidak/belum memiliki data Kabupaten Rote Ndao mencapai 40 indikator. Indikator-indikator ini harus menjadi salah satu prioritas dalam menentukan skenario dalam pencapaian target nasional dalam kurun waktu perencanaan RPJMD lima tahun ke depan. Jumlah indikator pada setiap tujuan yang masuk dalam kategori indikator TPB yang belum memiliki data ditunjukkan pada Gambar 2.54.

**Gambar 2.54**  
**Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang tidak/belum memiliki data**



Indikator pada setiap pilar yang tidak/belum memiliki data yaitu jumlah pilar sosial sebanyak 16 indikator, pilar ekonomi sebanyak 15 indikator, pilar hukum dan tata kelola sebanyak 5 indikator, serta pilar lingkungan sebanyak 3 indikator.

**Gambar 2.55**  
**Jumlah Indikator Pada Setiap Pilar yang tidak/belum memiliki data**



Gambaran capaian dan rincian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2020 dapat dilihat dalam Tabel 2.76 dan Tabel 2.77 berikut:

**Tabel 2.76**  
**Capaian Indikator TPB di Kabupaten Rote Ndao**

<b>No. TPB</b>	<b>Tujuan TPB</b>	<b>Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target Nasional</b>	<b>Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target Nasional</b>	<b>Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target Nasional</b>	<b>Indikator yang belum/ tidak memiliki data</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun	1	13	0	4	<b>18</b>
2.	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	3	5	0	3	<b>11</b>
3.	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	7	13	0	8	<b>28</b>
4.	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	2	11	0	0	<b>13</b>
5.	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	7	4	0	1	<b>12</b>
6.	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	2	5	4	1	<b>12</b>
7.	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua	0	0	1	0	<b>1</b>
8.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	7	6	0	6	<b>19</b>
9.	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	3	3	0	3	<b>9</b>
10.	Mengurangi kesenjangan intradan antarnegara	1	4	0	3	<b>8</b>
11.	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	1	3	1	1	<b>6</b>
12.	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	0	0	0	2	<b>2</b>
13.	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	0	1	0	0	<b>1</b>

14.	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	0	0	0	0	0
15.	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	3	0	1	0	4
16.	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	5	8	1	5	19
17.	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	5	2	0	3	10
Jumlah <b>Persen</b>		<b>47</b> <b>27,17</b>	<b>78</b> <b>45,09</b>	<b>8</b> <b>4,62</b>	<b>40</b> <b>23,12</b>	<b>173</b> <b>100</b>

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024

**Tabel 2.77**  
**Rincian Indikator TPB di Kabupaten Rote Ndao**

NO. INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian
<b>Target Pencapaian Indikator tujuan 1 :</b> Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun			
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%). Target RPJMN 2024: 6-7%	27,54%
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	NA
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	540 orang
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Meningkatnya persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%)	749 Jiwa 100 Jiwa 13,35%

1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta padatahun 2019 (2015: 3 juta).	21.365KK 11.710KK 54,81%
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%. Target RPJMN 2024: 90%	64,1%
1.4.1.(d)	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	80,26%
1.4.1.(e)	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	89,3%
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	81,56%
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/ MTs/sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	63,34%
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%. Target RPJMN 2024: 100%	63,15%
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019.	39,01%
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).	0
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	NA
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5ribu).	NA
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	0
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017). Target RPJMN 2019 : Meningkatnya alokasi secara langsung sumberdaya untuk program pengentasan kemiskinan sehingga angka kemiskinan turun menjadi 7-8% pada tahun 2019	NA

1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	38,47%
<b>Target Pencapaian Indikator tujuan 2 :</b> Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan			
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 5	8,34%
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).	NA
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 4 (turun dari 5,8)	5,12%
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1400 kkal/ kapita/hari.	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%). Target RPJMN 2024: 8,5	NA
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 14%	25,83%
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/balita.	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/balita pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%). Target RPJMN 2024: 14%	19,17%
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	11,03%
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).	7,7%
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%). Target RPJMN 2024: 60%	73,19
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun). Target RPJMN 2024: 95,2 dan 62	65,2 dan 73,2
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sector pertanian (rupiah per tenaga kerja).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 59,9 juta/tenaga kerja (naik dari 46,9 juta)	NA
<b>Target Pencapaian Indikator tujuan 3 :</b> Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia			

3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346). Target RPJMN 2024: 183	170,71 Per 100.000 KH
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	70,2%
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	70,2%
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 16	26,29 per 1000 Kelahiran Hidup
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 10	14,68 per 1000 Kelahiran Hidup
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32). Target RPJMN 2024: 16	19,46 per 1000 Kelahiran Hidup
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%). Target RPJMN 2024: 0,18%	0,28
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297). Target RPJMN 2024: 190	36%
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024:	0,014
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Filariasis : 0 Kusta : 8
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%). Target RPJMN 2024: 34,1%	17,4%
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%). Target RPJMN 2024: 21,8%	34,95%
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%). Target RPJMN 2024: 8,7%	NA
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	NA
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Terkendalnya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).	NA
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,74%



3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%). Target RPJMN 2024: 63,4%	86,41%
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	86,41%
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).	37,87%
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR) atau kelahiran hidup per 1000 perempuan)	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48). Target RPJMN: 18	NA
3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate (TFR).</i>	Menurunnya <i>Total Fertility Rate (TFR)</i> pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6). Target RPJMN 2024: 2,10%	3,6%
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurunnya unmeet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%). Target RPJMN 2024: 7,4%	NA
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau system kesehatan masyarakat per 1000penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 98%	11,53%
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN).	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	80,2%
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	NA
3.a.1*	Persentase merokok pada pendudukumur ≥15 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 8,7%	NA
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 96%	100%
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	NA
<b>Target Pencapaian Indikator tujuan 4 :</b> Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua			
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: Membaca = 61,2% Matematika =30,1%	32,14% 34,32% 32,61%

4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%). Target RPJMN 2024: 84,48%	67%
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%). Target RPJMN 2024: 81,33%	25%
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	NA
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/MTs/ sederajat	Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015:100,7%).	NA
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun). Target RPJMN 2024: 9,18 tahun	7,30%
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar(APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	64,76%
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	NA
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2)SMP/MTs/sederajat.	4.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki- laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019.  Target RPJMN 2019: Meningkatkan Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 sebesar 100%	81,56%  63,34%
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia diatas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	97,00%
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.	99,23%

4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran,(c)computer untuk tujuan pengajaran,(d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	76,67% 73,33%
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 81,8%	50,83%
<b>Target Pencapaian Indikator tujuan 5 :</b> Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan			
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).	18
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,06
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019(2013: 20,48 %).	0,06%
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,03
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).	91%
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 8,74 (turun dari 11,21)	0,98%
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).	55,65
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	NA

5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	1,43%
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	86,41%
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurunnya unmet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %). Target RPJMN 2024: 7,4%	18,53%
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %). Target RPJMN 2024: 63,4%	55,65%
<b>Target Pencapaian Indikator tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua</b>			
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	79,26%
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m <sup>3</sup> /detik (2015: 51,44 m <sup>3</sup> /detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	184,20
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	79,26%
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2019: Meningkatkan proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	NA
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	76,76%
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000). Target RPJMN 2024: 90%	119
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan(SBS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 90%	30 desa/kel

6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Belum dilakukan
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 409	Belum dilakukan
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II.	66,67
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in agriculture).	Belum dilakukan
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.	Belum dilakukan
<b>Target Pencapaian Indikator tujuan 7 :</b> Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua			
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019. Target RPJMN 2024: 23%	Belum dilakukan
<b>Target Pencapaian Indikator tujuan 8 :</b> Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua			
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 5,5-6,5%	-3,46%
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	60.482.080
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja pertahun.	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019. Target RPJMN 2024: 3,7 –4,5%	NA
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	NA

8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%). Target RPJMN 2024: 51%	0,62%
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektorpertanian.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	NA
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) kelayakan keuangan.	Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%). Target RPJMN 2024: 30,8%	NA
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	12.187/jam
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,03%
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 3,6 – 4,3%	0,05%
8.6.1*	Persentase usia muda (15- 24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan(NEET).	Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.	0,02
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019(2014: 4,2%). Target RPJMN 2024: 5,5%	NA
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun2019 (2014: 9 juta).	96 orang
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1.424 orang
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: Meningkatkan menjadi USD 30,0 Miliar	NA
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industry pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017). Target RPJMN 2019: Meningkatkan jumlah pekerja pada industry pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja Target RPJMN 2024: 15 juta (naik dari 13 juta)	0,76
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: Bank= 15 unit, ATM= 58 unit	NA
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	NA
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019. Target RPJMN 2024: 30,8 (naik dari 24,7)	21,26
<b>Target Pencapaian Indikator tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi</b>			



9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 7,0%	NA
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).	2,75%
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 15,7 juta (naik dari 14,9 juta)	0,059
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 20% (naik dari 18,5%)	14,95%
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 5% (naik dari 2,4%)	NA
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	NA
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	8,9
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	98,77
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	98,77
<b>Target Pencapaian Indikator tujuan 10 :</b> Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara			
10.1.1*	Koefisien Gini.	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	NA
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan sebanyak 80 kabupaten pada tahun 2019.	7
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurangnya Desa Tertinggal sebanyak 5.000 desa.	48
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	Meningkatnya Desa Mandiri paling sedikit sebanyak 2.000 desa Target RPJMN 2024: 8.559 (naik 3.000)	0
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	NA
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14% pada tahun 2019 (2014: 16,64%).	39.157KK 21.365KK 54,56%
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 9%	NA
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,3).	90,59
<b>Target Pencapaian Indikator tujuan 11 :</b> Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan			



11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses Terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2019: Meningkatkan jumlah rumah tanggayangmemiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (baseline 2014: 60,9%)	83,30%
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.	142,30
11.5.1.(c)	Jumlah system peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	NA
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	2.529.071.000
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	46,62%
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Belum dilakukan
<b>Target Pencapaian Indikator tujuan 12 :</b> Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan			
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	NA
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit). Target RPJMN 2024: 26.880 ton/ tahun	NA
<b>Target Pencapaian Indikator tujuan 13 :</b> Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya			
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	4
<b>Target Pencapaian Indikator tujuan 15 :</b> Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayat			
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai(DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).	3,43
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Belum dilakukan

15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019.	1
<b>Target Pencapaian Indikator tujuan 16 :</b>			
Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan			
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	NA
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban Kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	NA
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkuliahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas.	100%
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	NA
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).	0,09%
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,32%
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6). Target RPJMN 2024: 4,14	NA
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	92,64
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten : 60%, Kota : 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	WTP

16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Target RPJMN 2024: B ke atas 100%	CC (Nilai: 50,04)
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanjapengadaan	Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).	66,39%
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	0%
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	6,25%
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 99,99%	82,29%
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.	NA
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%). Target RPJMN 2024: 100%	62,83%
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID	0 (Belum Terlaksana)
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0
<b>Target Pencapaian Indikator tujuan 17 :</b> Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan			
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015 : 10,7%). Target RPJMN 2024: 10,7- 12,3%	37,78
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5.148.664 .437
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	91,45%

17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPSD sebagai rujukan utama.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	90,32%
17.18.1.(c)	Jumlah meta data kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	6
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	NA
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 20	NA
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	7054
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	93,26%

## **BAB III**

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan yang dapat mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Pengukuran kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan. Wujud pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam APBD. Oleh karena itu analisis dilakukan terhadap pelaksanaan APBD yang menghasilkan sejauh mana kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah secara efektif, efisien, ekonomis, adil, bermanfaat, wajar, tertib, taat peraturan perundang undangan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keuangan daerah merupakan salah satu faktor strategis yang ikut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disamping itu Untuk meningkatkan capaian pembangunan yang berkualitas juga perlu didukung fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang komprehensif. Potret kinerja keuangan pada waktu lalu menjadi dasar dalam penentuan kerangka pendanaan kedepan. Oleh karena itu menjadi penting untuk melihat kemampuan keuangan masa lalu sehingga perkiraan yang akan datang menjadi lebih realistis.

#### **3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Kinerja keuangan daerah masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kapasitas fiskal yang dimiliki, tingkat ketergantungan fiskal, dan realisasi belanja, keterkaitan antara aspek perencanaan dan penganggaran serta bagaimana penyelenggaraan pengelolaan kas yang telah dilakukan, dimana menampilkan gambaran bagaimana keuangan daerah yang tersedia dapat menjamin likuiditas dan pemanfaatan unsur pembiayaan secara efektif dan efisien.

##### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Dalam sub bab ini akan dibahas kinerja APBD yang mencakup 3 (tiga) aspek keuangan daerah yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sejumlah rasio pendapatan, belanja dan pembiayaan ditampilkan untuk mendapatkan bagaimana wujud pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rote Ndao kurun waktu 2016-2020. Perkembangan APBD tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Rata - rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016-2020**  
**Kabupaten Rote Ndao**

NO. REK	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	9
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>708,870,066,413.57</b>	<b>739,924,285,730.34</b>	<b>779,660,723,569.00</b>	<b>812,561,038,862.12</b>	<b>753,647,401,075.86</b>	<b>3.45</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>28,842,548,098.57</b>	<b>49,093,660,595.24</b>	<b>27,916,947,902.00</b>	<b>31,479,192,075.12</b>	<b>32,683,328,390.45</b>	<b>(6.57)</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5,590,924,904.50	6,936,635,492.82	9,029,702,704.00	9,484,214,075.95	7,866,751,680.50	7.38
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,453,048,537.00	5,111,293,857.00	4,393,370,494.00	4,894,896,494.00	9,823,578,666.00	16.67
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,014,516,533.00	5,343,251,384.00	5,505,647,812.00	6,059,453,988.00	6,283,847,348.35	0.59
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10,784,058,124.07	31,702,479,861.42	8,988,226,892.00	11,040,627,517.17	8,709,150,695.60	(16.20)
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>612,526,648,394.00</b>	<b>609,383,777,281.00</b>	<b>622,779,079,732.00</b>	<b>628,610,869,733.00</b>	<b>552,319,930,617.00</b>	<b>2.57</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13,157,000,472.00	9,482,830,792.00	7,437,139,309.00	6,537,826,650.00	7,461,942,300.00	3.97
1.2.2	Dana Alokasi Umum	441,682,656,000.00	438,816,702,000.00	445,782,708,000.00	461,383,019,000.00	422,697,359,000.00	1.64
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	157,686,991,922.00	161,084,244,489.00	169,559,232,423.00	160,690,024,083.00	122,160,629,317.00	6.46
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>67,500,869,921.00</b>	<b>81,446,847,854.10</b>	<b>128,964,695,935.00</b>	<b>152,470,977,054.00</b>	<b>168,644,142,068.41</b>	<b>13.33</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	4,000,000,000.00	-	23,355,160,000.00	30,812,440,000.00	30,912,200,000.00	0.06
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	10,782,327,921.00	14,681,511,854.10	13,272,642,298.00	17,264,139,054.00	13,994,501,783.41	(4.28)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	52,124,542,000.00	66,765,336,000.00	91,824,992,000.00	104,394,398,000.00	108,362,083,000.00	6.19
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	594,000,000.00	0.00	511,901,637.00	0.00	15,375,357,285.00	0.00

NO. REK	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	9
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>713,329,441,477.00</b>	<b>717,309,409,324.00</b>	<b>778,252,033,041.00</b>	<b>813,151,761,495.60</b>	<b>744,031,613,310.35</b>	<b>3.74</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>304,429,302,174.00</b>	<b>359,007,913,245.00</b>	<b>407,249,736,171.00</b>	<b>426,389,739,957.00</b>	<b>426,181,943,051.00</b>	<b>6.78</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	218,615,384,271.00	225,892,192,989.00	240,509,040,381.00	259,629,007,120.00	257,684,992,301.00	4.07
2.1.3	Belanja Subsidi		5,089,080,000.00	0.00	0.00	0.00	(20.00)
2.1.4	Belanja Hibah	8,345,471,500.00	10,017,345,000.00	23,218,103,193.00	7,409,300,000.00	4,550,508,000.00	25.89
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	500,000,000.00	1,615,000,000.00	1,645,000,000.00	4,315,000,000.00	500,000,000.00	(35.08)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0.00	0.00	0.00	1,239,152,800.00	1,120,631,000.00	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	75,343,193,524.00	115,473,880,756.00	139,981,996,834.00	153,086,058,734.00	149,272,264,400.00	13.89
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,625,252,879.00	920,414,500.00	1,895,595,763.00	711,221,303.00	13,053,547,350.00	374.54
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>408,900,139,303.00</b>	<b>358,301,496,079.00</b>	<b>371,002,296,870.00</b>	<b>386,762,021,538.60</b>	<b>317,849,670,259.35</b>	<b>0.63</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	32,847,542,000.00	39,233,634,100.00	41,657,433,921.00	37,025,540,208.00	44,288,726,455.00	6.15
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164,848,271,485.00	142,197,342,820.00	162,878,888,404.77	176,225,888,128.83	145,862,357,295.99	1.81
2.2.3	Belanja Modal	211,204,325,818.00	176,870,519,159.00	166,465,974,544.23	173,510,593,201.77	127,698,586,508.36	(1.53)
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>59,301,789,714.96</b>	<b>50,738,522,155.53</b>	<b>67,374,499,477.87</b>	<b>68,281,820,006.01</b>	<b>62,201,201,572.53</b>	<b>2.09</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	59,231,917,831.96	50,738,522,155.53	67,374,499,477.87	68,281,320,006.01	62,200,157,372.53	2.16
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	69,871,883.00	0.00	0.00	500,000.00	1,044,200.00	0.00
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>5,500,000,000.00</b>	<b>6,000,000,000.00</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>5,500,000,000.00</b>	<b>5,500,000,000.00</b>	<b>(6.90)</b>
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,500,000,000.00	6,000,000,000.00	500,000,000.00	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	(6.90)
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : BKA Kab. Rote Ndao tahun berkenan

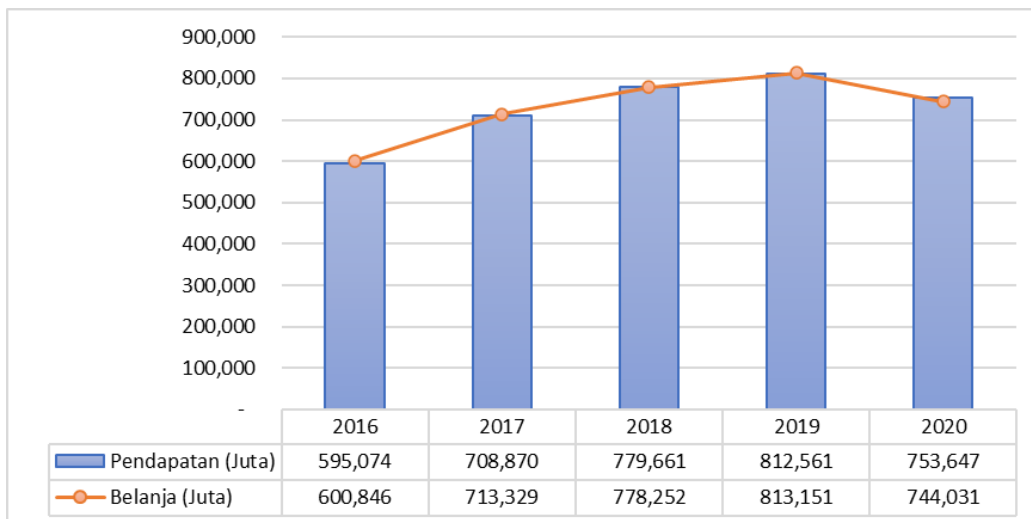


Pendapatan daerah adalah merupakan total penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan yang Sah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pendapatan merupakan faktor penting dan mutlak diperlukan, pendapatan daerah juga menggambarkan tentang kapasitas fiskal dan derajat otonomi fiskal suatu daerah. Selama lima tahun terakhir pendapatan daerah mengalami peningkatan, dimana tahun 2016 sebesar Rp. 708.870.066.413,57 menjadi sebesar Rp. 753.647.401.075,86 pada tahun 2020. Dana perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah, yaitu masih sekitar 80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan daerah masih cukup tinggi terhadap Pemerintah Pusat.

Belanja Daerah secara umum terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,74%. Realisasi anggaran belanja kurun waktu 2016-2020 juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar Rp. 713.329.441.477,00 meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 744.031.613.310,35. Peningkatan realisasi belanja ini seiring dengan kebijakan pendanaan dalam pemenuhan kebutuhan belanja daerah. Capaian kinerja serapan APBD setiap tahun berfluktuasi namun masih diatas 90%, dan Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu Kabupaten terbaik dalam penyerapan tertinggi belanja langsung. Meskipun begitu terdapat beberapa kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak mencapai 100%, diantaranya adalah perubahan peraturan dan Juknis serta Juklak dari pusat terkait dengan pelaksanaan penyerapan DAU, DAK dan DBHCHT, serta perubahan OPD baru yang menyebabkan banyaknya peralihan kewenangan dari daerah ke pusat.

Realisasi Pendapatan dan Perkembangan capaian kinerja realisasi belanja dapat digambarkan pada grafik berikut.

**Gambar 3.1**  
**Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016-2020**



Sumber : BKA Kab. Rote Ndao tahun berkenan

### 3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai kondisi aset, kewajiban dan ekuitas suatu daerah pada waktu tertentu. Posisi neraca daerah menjadi salah satu faktor penentuan asumsi-asumsi dalam perumusan kebijakan daerah. Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai oleh daerah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Manfaat ekonomi dan sosial di masa depan

dapat diperoleh oleh Pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban merupakan utang yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi Pemerintah. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Rote Ndao dan rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Rote Ndao**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1.</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>60,920,647,281</b>	<b>81,492,983,196</b>	<b>79,625,420,979.67</b>	<b>75,460,598,521.08</b>	<b>80,626,696,557.70</b>	<b>(2.94)</b>
1.1.1.	Kas	51,905,473,569	69,755,896,250	69,551,702,331.08	63,197,874,134.13	67,982,357,962.86	(2.23)
1.1.3.	Persediaan	9,015,173,712	11,737,086,946	10,073,718,648.59	12,262,724,386.95	12,644,338,594.84	(6.98)
<b>1.2.</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>39,885,538,298</b>	<b>39,820,851,745</b>	<b>42,159,001,153</b>	<b>46,749,428,416.00</b>	<b>60,356,448,079.00</b>	<b>7.00</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>Investasi Jangka panjang non permanen</b>	<b>349,648,932</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
1.2.1.1	Dana Bergulir	5,699,750,377	5,686,664,012	5,685,614,012	5,685,114,012.00	5,684,054,012.00	(0.01)
1.2.1.2	Penyisihan Dana bergulir tidak tertagih	(5,350,101,446)	(5,686,664,012)	(5,685,614,012)	(5,685,114,012.00)	(5,684,054,012.00)	(0.01)
<b>1.2.2.</b>	<b>Investasi Jangka panjang Permanen</b>	<b>39,535,889,366</b>	<b>39,820,851,745</b>	<b>42,159,001,153</b>	<b>46,749,428,416.00</b>	<b>60,356,448,079.00</b>	<b>7.00</b>
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemda	39,535,889,366	39,820,851,745	42,159,001,153	46,749,428,416.00	60,356,448,079.00	7.00
<b>1.3.</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>935,217,954,95</b>	<b>1,029,658,200,95</b>	<b>1,057,999,086,24</b>	<b>1,187,883,822,806.61</b>	<b>1,359,679,384,479.75</b>	<b>5.71</b>
1.3.1.	Tanah	49,452,516,859	57,938,871,896	54,411,121,896	154,509,675,163.12	159,313,409,426.12	0.22
1.3.2.	Peralatan dan mesin	207,205,620,673	233,807,941,470	244,401,042,549	261,834,998,284.48	311,678,353,049.71	7.29
1.3.3.	Gedung dan bangunan	382,648,130,628	468,629,359,428	486,459,626,525	514,465,679,300.75	536,739,817,816.13	3.76
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	808,460,488,981	899,730,719,831	981,949,048,961	1,087,966,397,035.05	1,068,373,001,640.31	5.92
1.3.5.	Aset tetap lainnya	26,341,632,943	33,166,644,096	36,063,862,996	34,329,411,822.00	31,121,837,326.00	0.88
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	42,545,825,925	1,802,926,800	-	109,560,000.00	627,887,546.00	92.31
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	(581,436,261,064)	(665,418,262,572)	(745,285,616,692)	(865,331,898,799.00)	(712,174,922,325.00)	4.83

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4.</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>40,946,941,613</b>	<b>49,338,554,232</b>	<b>49,663,363,168</b>	<b>41,749,892,491.10</b>	<b>74,758,504,672.77</b>	<b>19.81</b>
1.4.1.	Tagihan jangka panjang				4,658,350,704.76	3,697,423,124.18	(4.13)
1.4.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah			4,362,308,531	-	-	0.00
1.4.3.	Kemitraan dengan pihak kedua/ketiga	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
1.4.4.	Aset tak berwujud	965,670,000	985,670,000	965,670,000	640,770,000.00	800,770,000.00	5.41
1.4.5.	Akumulasi Amortisasi	-	-	-	-	(640,770,000.00)	0.00
1.4.6.	Aset Lain-lain	48,262,884,232	48,852,376,265	44,245,384,637	36,360,771,786.34	79,190,789,670.39	25.87
	<b>JUMLAH ASET DAERAH</b>	<b>1,085,362,694,755</b>	<b>1,200,880,082,154</b>	<b>1,229,446,871,536</b>	<b>1,351,843,742,234.79</b>	<b>1,611,421,033,789.22</b>	<b>6.47</b>
<b>2.</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5,000,138,396</b>	<b>7,503,431,225</b>	<b>9,016,867,566</b>	<b>8,028,796,051.79</b>	<b>1,371,052,227.67</b>	<b>(26..63)</b>
<b>3.</b>	<b>EKUITAS DANA</b>	<b>1,080,342,556,359</b>	<b>1,193,376,650,930</b>	<b>1,220,430,003,970</b>	<b>1,343,814,946,183.00</b>	<b>1,610,049,981,561.00</b>	<b>5.98</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1,018,820,836,306</b>	<b>1,085,342,694,755</b>	<b>1,200,880,082,155</b>	<b>1,229,446,871,536</b>	<b>1,611,421,033,789.22</b>	<b>5.62</b>

Sumber : BKA Kab. Rote Ndao tahun berkenan

Untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar hutang dan melihat kesiapan aset untuk menutup kewajiban yang harus dipenuhi, maka dilakukan Analisis Rasio Keuangan/Neraca daerah melalui perhitungan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang, dan Rasio Aktivitas bermanfaat untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Analisis ketiga rasio ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019**

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	<b>RASIO LIKUIDITAS</b>					
	- Rasio Lancar	4.47	11.91	10.86	8.83	9.40
	- Quick Rasio	3.77	10.11	9.30	7.71	7.87
2.	<b>RASIO SOLVABILITAS</b>					
	- Rasio Hutang terhadap Aset	0,02	0,00	0,01	0,01	0,01
	- Rasio Hutang terhadap modal/equitas	0,02	0,00	0,01	0,01	0,01
3.	<b>RASIO AKTIVITAS</b>					
	- Tingkat Perputaran Piutang (hari)	3,64	1,29	0,22	0,29	1,29
	- Tingkat Perputaran Persediaan (hari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber ; BKA Kab. Rote Ndao tahun yang sesuai, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat rasio likuiditas masih dalam posisi yang sehat dalam artian bahwa setiap hutang lancar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao masih dapat dijamin dengan baik oleh aset lancar sedangkan untuk rasio solvabilitas menunjukkan cenderung seimbang dimana pengadaan aset dan rasio hutang terhadap modal sama sepanjang tahun, yang berarti setiap tahun kemampuan dari ekuitas atau modal sendiri dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk membayar kewajiban atau hutang stabil. Untuk Rasio aktivitas menunjukkan bahwa rata-rata umur piutang pada tahun 2015 s.d 2019 berkisar pada angka 0,02–3,64, ini berarti bahwa piutang berputar selama 3 hari. Sedangkan tingkat efektifitas manajemen dalam pengelolaan persediaan stabil dengan tingkat perputaran persediaan 0, artinya umur persediaan makin kecil maka tingkat penggunaan persediaan semakin besar, sehingga semakin besar aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

### 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam pengambilan keputusan baik terkait pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran dengan menggunakan basis atau pendekatan kinerja, dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan pencapaian tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang ditetapkan Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD harus memiliki tujuan, sasaran yang jelas, mampu memberikan manfaat yang besar dan dampak yang terukur pada kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu berkaitan dengan alokasi rencana belanja langsung dan belanja tidak langsung selama periode 2016-2020. APBD

Kabupaten Rote Ndao periode 2016-2020 penyusunannya telah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Secara berkesinambungan, sistem evaluasi dan pelaporan juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Pasal 71 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran merupakan perbandingan secara rasional terhadap pemanfaatan anggaran dan belanja, sehingga anggaran tersebut dapat meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Secara terinci proporsi belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.4**  
**Proporsi Realisasi Belanja terhadap Total Anggaran**  
**Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 – 2020**

URAIAN	PROPORSI REALISASI BELANJA THD TOTAL ANGGARAN DAERAH (%)					PROPORSI RATA-RATA (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
<b>BELANJA</b>	<b>100.63</b>	<b>96.94</b>	<b>99.82</b>	<b>92.57</b>	<b>93.59</b>	<b>94.73</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>42.95</b>	<b>48.52</b>	<b>52.25</b>	<b>48.54</b>	<b>53.61</b>	<b>47.17</b>
Belanja Pegawai	30.84	30.53	30.85	25.96	32.41	30.84
Belanja Subsidi	-	0.69	0.00	0.00	0.00	0.14
Belanja Hibah	1.18	1.35	2.98	0.84	0.57	1.39
Belanja Bantuan Sosial	0.07	0.22	0.21	0.49	0.06	0.21
Belanja Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.06
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	10.63	5.61	17.97	17.43	18.78	14.08
Belanja Tidak Terduga	0.23	0.12	0.24	0.08	1.64	0.46
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>57.68</b>	<b>48.42</b>	<b>47.67</b>	<b>44.03</b>	<b>39.98</b>	<b>47.56</b>
Belanja Pegawai	4.63	4.69	5.35	4.21	5.57	4,89
Belanja Barang dan Jasa	23.26	20.36	20.92	20.06	18.35	20.59
Belanja Modal	29.79	23.38	21.40	19.75	16.06	22.08

Sumber : BKA Kabupaten Rote Ndao tahun yang sesuai, diolah

Dilihat dari proporsi belanja, pada tahun anggaran 2016 - 2020 belanja langsung mendominasi terhadap total belanja daerah yaitu rata-rata 47,56%. Hal tersebut menunjukkan tingginya anggaran pemerintah untuk investasi. Dari total belanja langsung tersebut proporsi belanja modal paling tinggi yaitu 22,08%, sedangkan untuk belanja pegawai 4,89% serta barang dan jasa 20,59%. Realitas kemampuan pengelolaan belanja terlihat lebih stabil yang menandakan kualitas perencanaan baik dalam penganggaran maupun perencanaan pembangunan telah sejalan sesuai dengan harapan.

Adapun analisis belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.5**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 - 2020**

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp.)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2018	282,166,474,302.00	779,660,723,569.14	36.19
2	Tahun Anggaran 2019	296,654,547,328.00	818,651,761,495.60	36.24
3	Tahun Anggaran 2020	296,654,547,328.00	818,651,761,495.60	36.24

Sumber : BKA Kabupaten Rote Ndao tahun yang sesuai, diolah

Pengeluaran belanja untuk aparatur di Kabupaten Rote Ndao rata-rata selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan angka kisaran 37%. Artinya bahwa APBD Kabupaten Rote Ndao relatif baik dari sisi belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk belanja aparatur tidak mendominasi pengeluaran APBD.

### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman, obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan dapat dilihat pada defisit riil anggaran, anggaran penutup defisit riil dan realisasi SiLPA Kabupaten Rote Ndao. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 3.6**  
**Defisit Riil Anggaran**  
**Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2020**

NO	Uraian	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	779,660,723,569.14	812,561,038,862.12	753,647,401,075.86
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah	778,252,033,041.00	813,151,761,495.60	744,031,613,310.35
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	500,000,000.00	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
<b>A</b>	<b>Defisit riil</b>	<b>908,690,528</b>	<b>(6.090.722.633,48)</b>	<b>4.115.787.765,51)</b>



Sumber : BKA Kabupaten Rote Ndao tahun yang sesuai, diolah

Pada tahun 2019 terjadi defisit anggaran, oleh karena itu digunakan dana SiLPA untuk menutup defisit tersebut, sehingga penerimaan pembiayaan berkurang sesuai defisit pada tahun yang berkenaan. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2020 terjadi surplus karena adanya SiLPA tahun sebelumnya yang tidak dimanfaatkan untuk membiayai komponen belanja dalam APBD tahun 2018 dan 2020. Komposisi untuk menutup defisit tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran**  
**Kabupaten Rote Ndao tahun 2018-2020**

NO	Uraian	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	67,374,499,477.87	68,281,320,006.01	62,200,157,372.53
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1,050,000.00	500,000.00	1,044,200.00
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
<b>B</b>	<b>Jumlah</b>	<b>67,375,549,477.87</b>	<b>68,281,820,006.01</b>	<b>62,201,201,572.53</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (A-B)</b>		<b>67,368,739,971.87</b>	<b>62,191,097,372.53</b>	<b>66,316,989,338.04</b>

Sumber : BKA Kabupaten Rote Ndao tahun yang sesuai, diolah

Untuk mengetahui nilai dan komposisi nilai sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**  
**Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2020**

No.	Uraian	2018		2019		2020	
		Rp.	% dr SiLPA	Rp.	% dr SiLPA	Rp.	% dr SiLPA
1	Jumlah SiLPA	67,374,499,477.87	100	68,281,320,006.01	100	62,200,157,372.53	100
2	Pelampauan penerimaan PAD	0	0	0	0	0	0
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	0	0	0	0	0	0
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0	0	0	0	0	0
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	0	0	0	0	0	0
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0	0
7	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0	0

Sumber : BKA Kabupaten Rote Ndao tahun yang sesuai, diolah

SiLPA Kabupaten Rote Ndao cenderung semakin meningkat dengan rasio terhadap pendapatan mencapai 8%. Semakin besar SiLPA menunjukkan kurang optimalnya penyerapan

anggaran dan ketidakcermatan dalam penganggaran. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya penyerapan antara lain: (a) Terjadi efisiensi dalam belanja, dimana kegiatan/proyek dalam belanja dapat diselesaikan dengan biaya lebih rendah dari pagu anggarannya; (b) Terdapat masalah pembebasan lahan dalam kegiatan pembangunan proyek infrastruktur pemerintah; (c) Terdapat masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa; (d) Sisa waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk menyelesaikan program/kegiatan belanja modal daerah; dan (e) Petunjuk teknis pelaksanaan DAK yang berubah-ubah dan terlambat diterima daerah.

### **3.3 Kerangka Pendanaan**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara umum diarahkan untuk kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Analisis meliputi proyeksi pendapatan, belanja dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan serta kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan. Analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

#### **3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui pungutan pajak, retribusi daerah termasuk di dalamnya optimalisasi aset daerah serta pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat dengan prinsip keadilan dan kewajaran. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan data realisasi penerimaan pendapatan selama kurun waktu lima tahun sebelumnya terlihat bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat. Proporsi Dana Perimbangan dalam kurun waktu 2016-2020 secara rata-rata mencapai 80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan keuangan daerah salah satunya bersumber dari rendahnya kemampuan PAD, adanya alokasi jenis belanja yang kurang produktif, pemanfaatan alokasi belanja yang tidak efisien dan efektif, serta pengelolaan administrasi yang belum optimal.

Analisis proyeksi pendapatan dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah kurun waktu 5 tahun kedepan dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara optimal. Proyeksi ini dirumuskan dengan mempertimbangkan data realisasi penerimaan pendapatan tahun-tahun sebelumnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah baik dari pusat maupun dari provinsi. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pendapatan kurun waktu tahun 2016-2020 sebesar 3,45%, dengan rincian pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -6,57%
- b. Dana Perimbangan sebesar 2,57%
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 13,33%.

Dapat dilihat bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan minus dalam kurun waktu tersebut di atas. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh terjadinya pandemi

Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya realisasi pendapatan khususnya pendapatan pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh karena itu, pendapatan tahun 2021 – 2024 diproyeksikan dengan tetap mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 namun pemerintah juga terus berupaya dan berinovasi untuk memetakan potensi-potensi pendapatan yang dapat dikembangkan kedepannya.

Dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat yang melemah akibat pandemic Covid-19 yang tidak dapat dibiayai oleh APBD Kab. Rote Ndao Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao akan melakukan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah sebesar Rp.170.000.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 5 (lima) tahun. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah difokuskan untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat dengan titik berat pada:

1. Kebijakan infrastruktur sosial dalam hal ini untuk peningkatan SDM, infrastruktur pelayanan dasar bidang kesehatan.
2. Kebijakan infrastruktur ekonomi bidang transportasi jalan
3. Kebijakan infrastruktur strategis daerah pada sektor pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan).

Analisis proyeksi belanja daerah perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kabupaten Rote Ndao dalam kurun waktu 5 tahun guna membiayai belanja langsung dan tidak langsung, program-program dalam RPJMD serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan dalam program prioritas. Program prioritas dimaksud harus memiliki hubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat strategis, lintas sektor, berskala besar, dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Dengan demikian, besarnya alokasi belanja daerah untuk setiap program prioritas harus lebih diutamakan dibandingkan dengan pemenuhan alokasi belanja yang lain. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Oleh karena itu, proyeksi belanja ini dirumuskan berdasarkan trend pertumbuhan historis realisasi belanja tahun 2016-2020 serta skala prioritas pembangunan dan kebutuhan. Secara rinci, proyeksi Pendapatan dan Belanja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disajikan dalam tabel di bawah ini. Proyeksi tahun 2021 didasarkan pada KUA PPAS Perubahan Tahun 2021 dan tahun 2022 didasarkan pada KUA PPAS Induk Tahun 2022.

**Tabel 3.9**  
**Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024**

NO. REK	URAIAN	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>775,278,327,537</b>	<b>833,713,250,000</b>	<b>880,026,221,092</b>	<b>929,026,525,804</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>32,994,859,556</b>	<b>33,993,975,000</b>	<b>34,919,726,784</b>	<b>35,891,276,024</b>
4.1.01	Pajak Daerah	8,621,871,038	9,509,606,500	10,140,093,411	10,812,381,604
4.1.02	Retribusi Daerah	8,340,226,772	9,171,324,800	9,328,154,454	9,487,665,895
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,347,141,404	6,500,000,000	6,574,100,000	6,649,044,740
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9,685,620,342	8,813,043,700	8,877,378,919	8,942,183,785
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>723,268,381,548</b>	<b>799,719,275,000</b>	<b>845,106,494,308</b>	<b>893,135,249,779</b>
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	690,196,799,000	779,849,129,000	825,236,348,308	873,265,103,779
4.2.02	Transfer Antar Daerah	19,870,148,046	19,870,146,000	19,870,146,000	19,870,146,000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>32,216,520,935</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	32,216,520,935	-	-	-
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>830,595,316,875</b>	<b>1.015,713,250,000</b>	<b>825,404,221,092</b>	<b>874,404,525,804</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>533,013,930,423</b>	<b>537,843,364,703</b>	<b>570,102,821,587</b>	<b>588,793,601,244</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	303,028,948,266	319,720,627,023	325,955,179,250	332,311,305,245
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221,491,968,957	210,996,729,680	221,546,566,164	248,373,894,472
5.1.05	Belanja Hibah	5,649,508,000	5,498,508,000	20,892,201,173	6,314,082,777
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2,843,505,200	1,627,500,000	1,708,875,000	1,794,318,750
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>121,824,266,829</b>	<b>324,712,138,167</b>	<b>95,474,683,061</b>	<b>124,733,550,633</b>
5.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23,939,562,711	82,267,168,167		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29,973,074,508	91,354,422,200		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	65,676,949,500	129,525,587,000		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,234,682,110	1,564,960,800		
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>24,132,769,623</b>	<b>21,400,000,000</b>	<b>7,470,000,000</b>	<b>7,843,500,000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24,132,769,623	21,400,000,000	7,470,000,000	7,843,500,000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>151,624,348,000</b>	<b>151,757,747,130</b>	<b>152,356,716,445</b>	<b>153,033,873,927</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1,734,694,000	1,868,093,130	2,257,216,929	2,724,235,112
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	149,889,654,000	149,889,654,000	150,099,499,516	150,309,638,815
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(55,316,989,338)</b>	<b>(182,000,000,000)</b>	<b>54,622,000,000</b>	<b>54,622,000,000</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>66,316,989,338</b>	<b>193,000,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	66,316,989,338	23,000,000,000	-	-
6.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	170,000,000,000	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>11,000,000,000</b>	<b>11,000,000,000</b>	<b>42,250,000,000</b>	<b>42,250,000,000</b>
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			42,622,000,000	42,622,000,000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>55,316,989,338</b>	<b>182,000,000,000</b>	<b>(54,622,000,000)</b>	<b>(54,622,000,000)</b>

NO. REK	URAIAN	2021	2022	2023	2024
	SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	0	0	0

Sumber : BKA Kab. Rote Ndao tahun 2021, diolah

### 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Untuk menghitung kerangka pendanaan maka analisis proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan merupakan data awal yang harus diidentifikasi, terutama mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana saja sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan dan identifikasi belanja tidak langsung. Penghitungan kerangka pendanaan dilakukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan untuk mendanai pembangunan daerah. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Secara rinci kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai**  
**Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao**

NO.	URAIAN	PROYEKSI		
		2022	2023	2024
1	Pendapatan	833,713,250,000	880,026,221,092	929,026,525,804
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	170,000,000,000	0,00	0,00
	<b>Total penerimaan</b>	<b>1,003,713,250,000</b>	<b>880,026,221,092</b>	<b>929,026,525,804</b>
	<b>Dikurangi:</b>			
4	Belanja	500,004,382,153	508,382,971,867	501,297,080,699
	Belanja Pegawai	319,720,627,023	325,955,179,250	332,311,305,245
	Belanja Hibah	5,498,508,000	20,892,201,173	6,314,082,777
	Belanja Bantuan Sosial	1,627,500,000	1,708,875,000	1,794,318,750
	Belanja Tidak Terduga	21,400,000,000	7,470,000,000	7,843,500,000
	Belanja Transfer	151,757,747,130	152,356,716,445	153,033,873,927
5	Pengeluaran Pembiayaan	11,000,000,000	54,622,000,000	54,622,000,000
	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	<b>492,708,867,847</b>	<b>317,021,249,225</b>	<b>373,107,445,105</b>

Sumber : BKA Kab. Rote Ndao Tahun 2021, diolah

Tabel tersebut menggambarkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja baik belanja operasi maupun belanja modal dalam pendanaan program pembangunan selama kurun waktu lima tahun kedepan berdasarkan skala prioritas, yaitu :

Prioritas I merupakan pemenuhan belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu SPM, program prioritas Pendidikan 20 %, Kesehatan 10 %, Alokasi Dana Kelurahan dan

kebijakan mandatori lainnya.

Prioritas II merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu pengembangan pariwisata yang didukung oleh perikanan dan pertanian secara berkelanjutan serta mencakup program yang langsung berhubungan dengan kepentingan publik dan memberikan dampak luas kepada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao di luar prioritas I.

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk membiayai program penunjang urusan perangkat daerah dan program penyelenggaraan urusan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan pencapaian visi dan misi.

Secara rinci Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Rote Ndao**

NO.	URAIAN	PROYEKSI		
		2022	2023	2024
	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan:</b>	<b>492,708,867,847</b>	<b>317,021,249,225</b>	<b>373,107,445,105</b>
1	Prioritas I	246,354,433,924	158,510,624,612	186,553,722,552
2	Prioritas II	192,156,458,460	123,638,287,198	145,511,903,591
3	Prioritas III	54,197,975,463	34,872,337,415	41,041,818,962

Sumber : BKA Kab. Rote Ndao tahun 2021, diolah

## BAB IV

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Tahap awal dari suatu perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Kondisi yang diinginkan pada 5 (lima) tahun mendatang yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu serta melihat permasalahan-permasalahan pembangunan maupun isu-isu strategis apa saja yang menghambat terhadap capaian kinerja pembangunan baik regional maupun nasional. Permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis di Kabupaten Rote Ndao akan diuraikan dalam uraian berikut.

#### 4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan melalui pendekatan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang menggambarkan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya serta aspek daya saing. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.



#### **4.1.1 Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Berdasarkan evaluasi selama 5 tahun terakhir maka permasalahan pokok pembangunan adalah

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, antara lain: IPM : 62,39; Rata-rata lama sekolah 7,15 tahun; Prevalensi Stunting 25,83%; Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak 91 orang.
2. Tingginya angka kemiskinan, antara lain: Penduduk miskin 27,54%; Tingkat pengangguran 4,90%
3. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan kontribusi pariwisata, antara lain: Pertumbuhan ekonomi 0,30%; Jumlah kunjungan wisata 3.606 orang
4. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur, antara lain: Panjang Jalan Kabupaten kondisi baik 43,48%; Rasio jaringan irigasi 60,19%; Rumah tangga berakses air minum layak 79,79%; Rumah tinggal bersanitasi layak 75,76%.
5. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi terhadap bencana, antara lain: Pengelolaan sampah 17,56%; dampak covid 19 dan siklon tropis seroja.
6. Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik, yaitu Nilai SAKIP CC.

#### **4.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

##### **4.1.2.1 Aspek Geografi dan Demografi**

Permasalahan pembangunan pada aspek geografi dan demografi yaitu:

1. Luas dan batas wilayah administrasi desa/kelurahan belum tersedia secara definitif
2. Tingginya angka ketergantungan penduduk diatas 70%

##### **4.1.2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

###### **A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

1. Kurang optimalnya kontribusi produk/jasa kategori unggulan terhadap pertumbuhan PDRB
2. Masih rendahnya daya beli masyarakat
3. Tingginya angka kemiskinan
4. Masih tingginya kontribusi bahan makanan terhadap laju inflasi

###### **B. Kesejahteraan Sosial**

1. Masih tingginya pengangguran terbuka
2. Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja
3. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah
4. Masih ditemukannya kasus balita gizi buruk dan gizi kurang
5. Tingginya prevalensi *stunting*
6. Belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

### **C. Seni Budaya dan Olahraga**

1. Masih rendahnya pembinaan terhadap kesenian dan olahraga
2. Masih kurangnya event seni budaya dan olah raga

#### **4.1.2.3 Aspek Pelayanan Umum**

##### **A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

1. Pendidikan
  - a. Masih adanya ketimpangan sebaran dan kualitas sekolah
  - b. Masih tingginya jumlah penduduk usia sekolah tidak bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya
  - c. Belum optimalnya akses penduduk usia sekolah terhadap sekolah
  - d. Masih tingginya angka putus sekolah
  - e. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan
  - f. Rasio kelas dan murid belum sesuai standar
  - g. Masih rendahnya angka pendidikan yang ditamatkan
  - h. Rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan
2. Kesehatan
  - a. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka kematian balita (AKABA)
  - b. Sarana dan prasarana kesehatan masih kurang
  - c. Masih kurangnya Tenaga kesehatan dengan kompetensi tertentu
  - d. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
  - e. Belum optimalnya pelayanan kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - a. Masih rendahnya proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
  - b. Belum optimalnya layanan jaringan irigasi kabupaten
  - c. Kurangnya saluran drainase dan atau trotoar pada sebagian jaringan jalan di Kota Baa
  - d. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - a. Masih rendahnya cakupan rumah layak huni
  - b. Masih adanya permukiman kumuh
  - c. Rendahnya penanganan sampah perkotaan
  - d. Rendahnya cakupan rumah tinggal bersanitasi
  - e. Masih rendahnya cakupan rumah tangga dengan akses air minum layak dan akses terhadap sarana pengelolaan air limbah domestik
  - f. Masih terbatasnya penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik
  - g. Masih luasnya lahan kritis
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
  - a. Rendahnya cakupan layanan petugas linmas/satpol PP (%)
  - b. Rendahnya cakupan penanganan pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan (K3) (%)

- c. Upaya mempertahankan optimalisasi cakupan pelayanan bencana yakni : informasi rawan bencana (%), pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di desa (%) dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%).
  - d. Belum optimalnya cakupan pelaksanaan penegakan perda (%)
6. Sosial
- a. Masih lemahnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
  - b. Masih rendahnya penanganan dan rehabilitasi korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

## **B. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**

1. Tenaga Kerja
  - a. Masih kurangnya media informasi ketenagakerjaan.
  - b. Masih rendahnya perlindungan tenaga kerja.
  - c. Belum optimalnya peran lembaga ketenagakerjaan.
  - d. Masih rendahnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. Masih adanya kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.
  - b. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
3. Pangan
  - a. Masih rendahnya ketersediaan pangan utama.
  - b. Kurangnya pengawasan keamanan pangan.
  - c. Belum optimalnya pengelolaan pangan dan gizi.
4. Pertanahan
  - a. Masih rendahnya luas lahan bersertifikat.
5. Lingkungan Hidup
  - a. Belum Tersusunya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  - b. Belum optimalnya TPA/TPST/SPA;
  - c. Belum optimalnya pengendalian, pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan;
  - d. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan;
6. Kependudukan dan Catatan Sipil
  - a. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
  - b. Masih kurangnya sarana dan prasarana kependudukan dan catatan sipil.
7. Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Belum optimalnya sarana dan prasarana kantor desa
  - b. Masih banyak masyarakat yang perlu diberdayakan baik secara kapasitas, ekonomi dan sosial.
  - c. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan secara langsung.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengendalian kependudukan dan keluarga berencana (KB).
  - b. Rendahnya cakupan KB aktif.
  - c. Masih kurangnya wawasan reproduksi bagi remaja.
9. Perhubungan
  - a. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum;
  - b. Masih terbatasnya sarana prasarana penerbangan;
  - c. Belum terpenuhinya standar keselamatan transportasi;
10. Komunikasi dan Informatika
  - a. Belum semua kecamatan memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
  - b. Masih adanya desa yang belum terjangkau jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. Belum terintegrasinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
11. Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
  - a. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat.
  - b. Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro Kecil (UMK) baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk;
12. Penanaman Modal
  - a. Belum adanya regulasi yang mengatur investor yg tidak/belum melakukan aktivitas;
  - b. Masih rendahnya daya serap terhadap tenaga kerja lokal.
  - c. Belum berperannya investasi dalam sistem perekonomian dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13. Kepemudaan dan Olahraga
  - a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
  - b. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
14. Statistik
  - a. Belum optimalnya sistem data statistik yang terintegrasi.
15. Persandian
  - a. Belum optimalnya pengamanan data dan informasi daerah.
16. Kebudayaan
  - a. Belum optimalnya pembinaan seni dan budaya tradisional.
  - b. Belum optimalnya pelestarian terhadap seni dan budaya daerah seperti pelestarian terhadap benda, situs dan cagar budaya.
17. Perpustakaan
  - a. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah;
18. Kearsipan
  - a. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan;

### **C. Urusan Pemerintahan Pilihan**

1. Pariwisata.
  - a. Rendahnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan.
  - b. Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata.
  - c. Rendahnya promosi wisata.
2. Pertanian.
  - a. Kurangnya sarana prasarana pendukung pertanian.
  - b. Belum adanya regulasi daerah tentang lahan pertanian berkelanjutan.
  - c. Penggunaan teknologi budidaya pertanian dan penganeekaragaman produk pengolahan hasil pertanian yang belum memadai.
  - d. Kurangnya pengembangn produk unggulan.
3. Kelautan dan Perikanan.
  - a. Belum optimalnya hasil produksi dan pengolahan perikanan;
  - b. Belum berfungsinya kawasan minapolitan;
  - c. Belum optimalnya penggunaan teknologi perikanan.
4. Kehutanan
  - a. Rendahnya upaya rehabilitasi lahan kritis.
5. Perdagangan.
  - a. Belum optimalnya pembinaan kelompok pedagang/usaha informal.
6. Perindustrian
  - a. Belum optimalnya pembinaan kelompok pengrajin.
  - b. Belum optimalnya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) produk unggulan daerah.
7. Transmigrasi.
  - a. Rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi lokal;
  - b. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana transmigrasi lokal;
8. Kelautan dan Perikanan.
  - a. Belum berkembangnya perikanan budidaya.
  - b. Rendahnya Cakupan Bina Kelompok Nelayan.

### **D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**

1. Perencanaan
  - a. Kurangnya konsistensi Perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan;
  - b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data;
  - c. Belum optimalnya sinergitas dan keselarasan perencanaan pembangunan;
  - d. Belum optimalnya penerapan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah (*e-planning*);
2. Keuangan
  - a. Belum efektifnya pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - b. Belum optimalnya penerapan *e-budgeting*.
  - c. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah.

- d. Masih tingginya rasio belanja aparatur dibandingkan dengan belanja publik.
  - e. Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset.
3. Kepegawaian
    - a. Kurangnya jumlah sumber daya manusia ASN pada semua perangkat daerah.
    - b. Kurangnya kualitas dan kompetensi ASN.
    - c. Belum optimalnya pengembangan Sumber Daya Manusia ASN.
    - d. Belum optimalnya pengembangan karier ASN pada jabatan fungsional.
    - e. Belum optimalnya disiplin dan kinerja ASN.
  4. Penelitian dan Pengembangan
    - a. Rendahnya jumlah kelitbangan yang dilaksanakan.
  5. Pengawasan
    - a. Belum optimalnya fungsi pengawasan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
    - b. Belum optimalnya tindaklanjut temuan BPK dan pengaduan masyarakat.
  6. Sekretariat Dewan
    - a. Belum terintegrasinya program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

#### **4.1.2.4 Aspek Daya Saing Daerah**

- A. Kemampuan Ekonomi Daerah
  1. Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi.
  2. Pengeluaran masyarakat cukup tinggi dibelanjakan untuk makanan.
  3. Tingginya angka ketergantungan
  4. Masih rendahnya daya beli masyarakat.
  5. Pola konsumsi non pangan lebih dominan.
  6. Gagal tanam, gagal panen.
- B. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
  1. Belum optimalnya pengendalian ketaatan terhadap RTRW.
  2. Masih terdapat rumah tangga yang belum terlayani air bersih.
  3. Masih adanya rumah tangga yang belum terlayani listrik.
- C. Iklim Investasi
  1. Sosial kemasyarakatan.
  2. Belum optimalnya implementasi regulasi yang mendukung iklim usaha.
  3. Belum optimalnya proses pelayanan perijinan.
  4. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi antara pemerintah, investor dan masyarakat.
- D. Sumber Daya Manusia
  1. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan maupun keahlian;
  2. Masih tingginya angka beban ketergantungan (*dependency ratio*);
  3. Rendahnya rasio kewirausahaan (*entrepreneurship*).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pada masing-masing urusan, maka dilakukan analisa pohon masalah untuk memetakan akibat, masalah utama dan sebab. Pentingnya analisa pohon masalah sehingga dapat diketahui akar-akar masalah sebagai penyebab dari masalah utama yang ada di Kabupaten Rote Ndao. Selain itu, kelompok-kelompok dari akar masalah nantinya dapat diangkat menjadi isu strategis daerah. Masalah utama yang dihadapi Kabupaten Rote Ndao yaitu belum optimalnya pembangunan dan pelayanan dasar di Kabupaten Rote Ndao. Masalah utama ini mengakibatkan angka kemiskinan masih tinggi yaitu 27,54%.

#### **4.2 Permasalahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2020**

- a. Kemiskinan
- b. Kelaparan
- c. Kehidupan sehat dan sejahtera
- d. Gender
- e. Air bersih dan Sanitasi layak
- f. Energi bersih dan terjangkau
- g. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
- h. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- i. Kesenjangan
- j. Kota dan Permukiman berkelanjutan
- k. Konsumsi dan Produksi
- l. Perubahan Iklim
- m. Keanekaragaman Hayati
- n. Masyarakat yang damai dan inklusif
- o. Kemitraan global dan pembangunan

#### **4.3 Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Kondisi dari luar sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan ditempuh serta kondisi pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah. Kondisi ini tidak dapat dikontrol sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dan dimanfaatkan peluang yang ditimbulkan. Kondisi dari luar pada umumnya berlaku Regional, Nasional, bahkan Internasional dan berdimensi waktu panjang. Beberapa kondisi dari luar yang diperkirakan berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:



## 4.2.1 Isu Strategis Global

### 4.2.1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan hidup, hukum dan tata kelola. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *"No-one Left Behind"*. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 220 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 lalu.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian SDGs, perlu adanya penyelerasan dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD.

Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

#### **4.2.1.2 Tantangan Ekonomi Global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perdagangan Bebas AFTA**

Tantangan utama dari ekonomi global bersumber dari pertumbuhan ekonomi global yang masih belum cukup kuat dan berlanjutnya penurunan harga komoditas dunia. Sementara itu, meski ketidakpastian pasar keuangan dunia membaik sejalan dengan menyempitnya divergensi kebijakan moneter antar negara maju, dampak risiko perekonomian Tiongkok perlu diwaspadai. Meskipun pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik, namun masih terdapat risiko pertumbuhan tersebut menjadi lebih rendah sejalan dengan perekonomian AS yang belum cukup solid dan perlambatan ekonomi Tiongkok.

Tantangan global lainnya yaitu mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang memberikan peluang sekaligus tantangan ke depan. Para pemimpin negara-negara ASEAN telah sepakat untuk mentransformasi wilayah ASEAN menjadi kawasan bebas aliran barang, jasa, investasi, permodalan, dan tenaga kerja. MEA menggambarkan adanya perekonomian yang mengglobal di antara negara-negara ASEAN dan MEA dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mewujudkan kawasan ekonomi ASEAN tahun 2020.

Sedangkan AFTA, sejatinya merupakan kesepakatan diantara negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan. Tujuan utamanya untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan bisnis ASEAN di kancah dunia. Harapannya, jika AFTA sukses, negara-negara ASEAN bisa menjadi basis produksi dunia, seperti Cina. Dengan adanya kebijakan perdagangan bebas AFTA ini, nantinya tidak akan ada hambatan tarif, ataupun hambatan non-tarif untuk negara anggota ASEAN. Skema *Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya.

Perkembangan terakhir terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi negara-negara ASEAN. Dengan adanya kebijakan-kebijakan terkait AFTA, tentu akan menyusul tantangan serta peluang yang akan dihadapi negara Indonesia, khususnya di sisi bisnis dan ekonomi.

Dalam kaitan ini, peluang Indonesia dan Kabupaten Rote Ndao khususnya untuk menjadi pemasok dalam rantai nilai ASEAN dan global cukup besar. Namun demikian, bila produk domestik tidak mampu bersaing, maka Indonesia dan Kabupaten Rote Ndao hanya akan menjadi pasar bagi produk negara MEA lainnya. Di sisi domestik, perekonomian Indonesia ke

depan juga masih dihadapkan dengan berbagai tantangan permasalahan struktural domestik yang belum terselesaikan secara menyeluruh.

#### **4.2.2 Isu Strategis Nasional**

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan  
Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
  - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
  - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan  
Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
  - a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
  - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
  - c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
  - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
  - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing  
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
  - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - f. Pengentasan kemiskinan; dan
  - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan  
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
  - a. Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila;
  - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
  - c. Moderasi beragama; dan
  - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar  
Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:
  - a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
  - b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
  - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
  - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
  - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim  
Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
  - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
  - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
  - c. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:
  - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
  - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; •  
Perbaiki system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
  - c. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
  - d. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
  - e. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

#### **4.3.3. Isu Strategis Provinsi**

Isu strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain :

1. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
2. Produktivitas dan daya saing ekonomi petani, peternak dan nelayan yang berkelanjutan;
3. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial;
4. Penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat NTT;
6. Reformasi birokrasi.
7. Dampak Covid-19

#### **4.3.4. Isu Strategis Kabupaten**

Isu strategis daerah didapatkan dari pemetaan permasalahan-permasalahan yang ada dan sinkronisasi dengan isu-isu strategis global, nasional dan provinsi sehingga isu strategis Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mutu dan tata kelola pendidikan dasar (Kualitas guru dan tenaga pendidik).
2. Kualitas dan aksesibilitas upaya kesehatan serta percepatan penurunan dan penanganan *stunting* terintegrasi (Stunting).
3. Peningkatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan (Bansos tepat sasaran/guna dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani, pekerja terampil bersertifikat).
4. Penataan dan pengelolaan pariwisata (Paket wisata ber-CHSE).
5. Nilai tambah dan daya saing produk pertanian, peternakan dan perikanan (OODARO: Abon ikan dan agar-agar, gula semut dan sopi, sei, produk susu kerbau dan telur, beras).
6. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis, perumahan, tata ruang dan lingkungan hidup (Jalan dan irigasi, rumah (ALADIN), air bersih dan sanitasi, bencana, keselamatan transportasi).

7. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Data, SPBE, WTP, SAKIP, PAD, bangunan/usaha berizin dan liar, kualitas layanan kependudukan, buku yang ditulis tentang Rote).
8. Bencana  
Dampak Covid-19 beberapa tahun kedepan masih akan mewarnai berbagai lini kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Kabupaten Rote Ndao. Selain itu ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim dan kerusakan infrastruktur dan lingkungan hidup pasca siklon tropis seroja.

## BAB V

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### 5.1. Visi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao. Sesuai tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao 2005-2025, RPJMD periode ini dalam tahapan **Kemandirian dan Daya Saing (Periode RPJMD III, 2021-2025)**. Tahap ini mengandung arti kemampuan untuk terus maju dengan bertumpu pada kekuatan dan daya inovasi masyarakat dan daerah dalam memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada serta memiliki kemampuan untuk berkompetisi dan mempunyai keunggulan lebih dibandingkan dengan wilayah lain baik di tingkat regional maupun nasional. Untuk itu kemajuan yang dicapai pada tahap sebelumnya harus terus ditingkatkan dan dimantapkan. Dengan mengacu pada beberapa hal tersebut, sebagai arah pembangunan selama 5 (lima) tahun mendatang maka Visi Kabupaten Rote Ndao adalah :

**“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”.**

Pernyataan visi Kabupaten Rote Ndao tersebut mengandung makna sebagai berikut : **BERMARTABAT** terdiri dari kata **BER**tumbuh, **MA**kmur, **TA**at dan Bersaha**BAT**, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna :

➤ **ROTE NDAO BERTUMBUH :**

- Maju : meningkatnya kualitas sumber daya manusia, daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- Mandiri : masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.

➤ **ROTE NDAO MAKMUR / SEJAHTERA :**

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- Meningkatnya daya beli masyarakat.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru di berbagai sektor.

➤ **ROTE NDAO TAAT :**

- Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/ perundang-undangan, nasionalis.
- Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.

➤ **ROTE NDAO BERSAHABAT :**

- Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga dan penuh kegotong-royongan.
- Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, dan indah.
- Terbuka terhadap perubahan sosial dan IPTEK yang bermanfaat bagi kemajuan daerah.

➤ **BERKELANJUTAN :**

- Pembangunan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).
- Pembangunan berkelanjutan meliputi aspek BERTUMBUH, MAKMUR/SEJAHTERA, TAAT, dan BERSAHABAT (BERMARTABAT).

## 5.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Perwujudan Visi tersebut ditempuh melalui misi-misi yang mempunyai tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao. Dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi yang dijalankan secara kemitraan dan berkelanjutan meliputi:

### 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Sumber daya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral. Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter adiluhung yang nilai-nilainya terkandung di dalam ajaran agama yang



mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang mandiri dalam berkehidupan. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Untuk mewujudkan masyarakat Rote Ndao yang memiliki daya saing dalam tantangan global dan menjadikan masyarakat yang maju dan mandiri, maka peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik aparatur dan masyarakat harus selalu menjadi perhatian utama. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila SDM yang ada, memiliki kemampuan dan keterampilan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga menghasilkan produk-produk yang kompetitif dan berdaya saing di era globalisasi.

Pembangunan kesehatan difokuskan pada penyediaan layanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta peningkatan cakupan layanan kesehatan dan penyuluhan pola hidup sehat, sehingga melahirkan sumber daya manusia yang sehat dan unggul.

## **2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan**

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan sektor pariwisata didukung oleh pertanian dan perikanan. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai kabupaten kepulauan yang terdiri dari 107 Pulau, 8 Pulau diantaranya berpenghuni dan 99 pulau tidak berpenghuni, dan sekitar 50% merupakan Desa/Kelurahan pesisir yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang dapat menjadi andalan sumber ekonomi yang besar bagi daerah. Pengelolaan sumberdaya tersebut harus tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek ekologis, dan kepentingan masyarakat. Potensi terbesar dalam pengelolaan daerah pesisir dan laut adalah pengembangan pariwisata antara lain wisata bahari berupa kegiatan *surfing*, *diving*, *snorkeling* dan wisata budaya yang sangat cocok dan sangat digemari oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Pembangunan pariwisata yang dimaksud mencakup seluruh aspek pembangunan baik tempat wisata maupun lingkungan sumber daya manusia sarana dan prasarana penunjang serta promosi wisata. Untuk mendukung percepatan pembangunan pariwisata daerah maka, orientasi seluruh kebijakan pembangunan yang terkait terutama sektor pertanian, perikanan dan kehutanan diorientasikan pada pengembangan agrowisata, ekowisata dan wanawisata.

Beberapa komoditas andalan yang dapat dikembangkan adalah budidaya tanaman pangan, usaha perikanan, sadap dan pengolahan nira lontar, serta beternak. Diversifikasi produk dan turunannya dari komoditi andalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menjawab kebutuhan pasar luar. Potensi sektor ini apabila dikelola dengan baik diharapkan mampu memberikan daya ungkit dan daya dorong dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Percepatan pengentasan kemiskinan dan penanggulangan masalah pengangguran perlu dipacu dengan penyediaan dan penciptaan lapangan kerja, kemudahan akses permodalan, serta peningkatan keterampilan masyarakat. Dalam rangka penciptaan lapangan kerja, penekanan pada pemberdayaan dan keberpihakan terhadap keluarga dan kelompok marginal berdasarkan prinsip-prinsip adil dan merata sehingga melahirkan pengusaha mikro, kecil, menengah serta pengusaha besar yang kuat dan bermoral yang dapat berkompetisi pada level regional maupun level nasional.

### **3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan**

Salah satu faktor kunci dalam mendorong pengembangan potensi ekonomi geografis adalah aksesibilitas wilayah yang melahirkan ekonomi mudah, murah dan cepat. Konektivitas wilayah sebagai urat nadi pembangunan ekonomi daerah makin meningkat apabila di dukung dengan lancarnya akses masuk dan keluar ke Kabupaten Rote Ndao. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan dukungan sarana prasarana infrastruktur yang menghubungkan antar pulau serta didukung moda transportasi darat, laut, dan udara yang meningkat jumlah dan kualitasnya, penyediaan rumah sehat dan layak huni, pelayanan listrik, air bersih dan sanitasi layak serta telekomunikasi sangat dibutuhkan.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Rote Ndao harus selalu mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao 2013-2033, sehingga pemanfaatan ruang dapat dikendalikan sesuai kaidah-kaidah tata ruang. Sejalan dengan itu, Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah juga memperhatikan Tujuan Pembangunan berkelanjutan guna menjaga pembangunan yang tetap mempertimbangkan keseimbangan ekologis baik di daratan maupun di lautan.

### **4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima**

Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen

patuh dari seluruh *stakeholder* pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*) serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mampu memfasilitasi operasional dan evaluasi di lapangan maka dibutuhkan aparatur yang profesional. Pengembangan pelayanan publik perlu di dukung dengan sistem informasi terpadu yang menyediakan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan terkini untuk kepentingan pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang tepat dan dapat diakses oleh masyarakat.

Pemerintahan yang baik merupakan cermin dari kualitas hubungan berbagai *stakeholder* yang ada yaitu pemerintah, dunia swasta dan masyarakat sipil. Kualitas hubungan yang baik tercermin dari adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan supremasi hukum dan adanya *check and balanced* di antara ketiganya dalam pembuatan kebijakan publik dan pengelolaan organisasi publik.

Sinergi ini akan melahirkan pelayanan publik yang prima dan menempatkan penerima pelayanan publik bukan sekedar sebagai konsumen tetapi sebagai warga negara yang memiliki berbagai hak dan kewajiban yang telah diatur dengan konstitusi. Fokusnya adalah pada terwujudnya anggaran publik yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, pengembalian peran pemerintah sebagai pelayan publik yang efektif dan efisien bagi masyarakat dan terwujudnya hukum yang berbudaya, berkemanusiaan, adil dan tidak diskriminatif.

#### **5.2.1. Keselarasan Visi Misi RPJMD dengan Visi Misi RPJPD**

RPJMD selain merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah juga disusun dengan berpedoman pada RPJPD. Perumusan Visi misi RPJMD telah memperhatikan hasil penelaahan terhadap visi misi jangka panjang daerah dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Keselarasan Visi Misi tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1

Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dengan Visi Misi RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025

	RPJPD 2005-2025		RPJMD 2019-2024
Visi	Terwujudnya Kabupaten Rote Ndao yang Bersatu dan Maju Menuju Kemandirian yang Berdaya Saing dan BERMARTABAT		Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”.
Misi	1. Mewujudkan sumber-daya manusia Rote Ndao yang bermutu, berdaya saing dan bermartabat dengan asas keadilan dan pemerataan	↔	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
	2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing yang berbasis kerakyatan, sehingga menjamin pencapaian hasil pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan	↔	2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan
	3. Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel dan didukung dengan sistem politik yang demokratis		3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
	4. Mewujudkan supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan ketertiban umum yang didukung oleh sistem hukum yang mantap serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat untuk mendukung kehidupan masyarakat yang maju dan bermartabat		4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima
	5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dalam mendukung pembangunan wilayah di segala bidang		
	6. Mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan dan berkesimbangan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat		
	7. Mewujudkan peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara lebih baik dalam mengatasi persoalan kesejahteraan sosial		
	8. Mewujudkan peran Kabupaten Rote Ndao sebagai wilayah perbatasan dalam menjaga keutuhan NKRI		

Sumber: Bapeliitbang Kab. Rote Ndao, Tahun 2021

### 5.2.2. Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Perencanaan Pembangunan sebagai suatu sistem yang sinergis dari pusat sampai daerah. Oleh karena itu visi misi daerah harus selaras dengan visi misi Presiden dalam RPJMN agar pembangunan daerah berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Keselarasan visi misi RPJMD dan RPJMN dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.2**  
**Keselarasn Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024**

	RPJMN 2020-2024		RPJMD 2019-2024
Visi	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong		Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”.
Misi: 1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	↔	1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	↔	2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	↔	3 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	↔	4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa		
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya		
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga		
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya		
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		

Sumber: BAPPENAS RI, Tahun 2020

### 5.2.3. Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rote Ndao berkontribusi pada pencapaian target pembangunan provinsi NTT. Hal ini dapat dilihat dari keselarasan Visi misi daerah dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.3**  
**Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024**  
**dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023**

	RPJMD Prov. NTT 2018-2023		RPJMD Kab. Rote Ndao 2019-2024
Visi	NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	↔	Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”.
Misi: 1	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	↔	1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
2	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional ( <i>Ring of Beauty</i> )	↔	2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan
3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	↔	3 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	↔	4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima
5	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik		

Sumber: *Bapelitbangda Prov. NTT, Tahun 2021*

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, sinergitas misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024 sudah selaras dengan misi RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD-P Provinsi NTT Tahun 2018-2023, secara khusus dengan mempertimbangkan Kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda secara global dan Kabupaten Rote Ndao secara khusus saat ini, adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan *health security*; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak COVID-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi COVID-19.
2. Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya di antaranya melalui peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan melalui penguatan sektor pertanian dan perikanan; pemulihan sektor pariwisata dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.

3. Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar untuk pemulihan pascapandemi COVID-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi embung multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.
4. Kebijakan transformasi pelayanan publik diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19 Kebijakan ini dilaksanakan melalui penguatan integrasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik; serta pemulihan kinerja pelayanan publik.

### **5.3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.



**Tabel 5.4**  
**Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Kabupaten Rote Ndao**

**Visi : “Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan”**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						2020	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	64,16	62,39	65,62	67,08	68,54	70,00	70,00	
			Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,15	7,15	7,30	7,60	7,80	9,00	9,00	
				Harapan Lama sekolah	Tahun	13,81	13,18	14,11	14,41	14,71	15,00	15,00	
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	63,97	63,97	64,98	65,99	67,00	70,00	70,00	
				Balita Gizi Buruk	%	1,32	1,27	1,22	1,17	1,12	1,10	1,10	
				Kasus Kematian Ibu	Kasus		5	10	0	0	0	0	
				Kasus Kematian Bayi	Kasus		57	56	0	0	0	0	
				Prevalensi Stunting	%	40,00	25,83	23,48	20,00	18,00	16,00	16,00	
			Meningkatnya Pengarus-utamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	91,53	84,64	92,03	92,53	93,03	93,53	94	
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	65,80	65,80	66,85	67,90	68,95	70,00	70,00	
				Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Orang		91	77	<35	<35	<35	<35	
			Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Laju pertumbuhan Penduduk	%	3,60	0,16	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
				Total fertility rate (TFR)	%	3,24	3,60	3,50	3,50	3,40	3,40	3,40	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						2020	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kontribusi Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berdaya saing		Persentase Penduduk Miskin	%	24,65	27,54	27,13	26,72	26,31	23,5-24	23,5-24
				Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Poin	3,89	5,36	3,32	2,75	2,18	1,63	1,63
				Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Poin	0,84	1,35	0,73	0,62	0,51	0,40	0,40
				Pertumbuhan PDRB	%	6,35	0,30	5,64	5,84	6,04	6,70	6,70
				Laju Inflasi	%	2,50	-1,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
				PDRB Per Kapita ADHB	Ribu Rupiah	18.544	22.062	23.405	24.705	25.959	27.172	27.172
		Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta kesejahteraan sosial masyarakat		Kemiskinan Ekstrem	%		16,14	15,00	10,41	5,41	0	0
				Tingkat pengangguran terbuka	%	1,76	4,90	3,47	0,94	0,83	0,80	0,8
				Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	7,79	6,67	8,19	8,59	8,99	9,39	9,39
		Meningkatnya peran koperasi UMKM, industri dan perdagangan		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	1,35	1,35	1,41	1,47	1,53	1,59	1,59
				Meningkatnya kontribusi pariwisata, pertanian dan perikanan		PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Miliar Rupiah		1.510	1.697	1.806	1.916
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Juta Rupiah				5.968	6.542	7.117	7.691	8.266	8.266

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						2020	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan perikanan	Produksi Sektor Pertanian	Ton	147.592,3	152.058	153.364	154.682	156.013	157.356	157.356
				Produksi Peternakan	Ekor	90.993	320.594	330.928	341.652	352.782	364.336	364.336
				Nilai Tukar Petani	Poin	105,80	101,41	101,61	101,92	102,33	102,84	102,84
				Produksi Kelautan dan Perikanan	Ton	19.667	18.838	21.186	21.799	22.663	23.441	23.441
			Meningkatnya peran pariwisata dalam perekonomian daerah	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	5.000	3.606	9.000	15.000	21.000	30.000	30.000
				Rata-rata lama tinggal	Hari	3	3	4	4	4	4	4
			Meningkatnya ketahanan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	70,00	56,40	67,30	78,20	89,10	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan</b>	Meningkatnya konektivitas, ketersediaan sumber daya air dan permukiman yang layak		Cakupan kualitas infrastruktur	%	65,49	66,89	69,78	80,14	82,40	84,59	84,59
			Meningkatnya konektivitas	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	44,29	43,48	47,42	51,77	56,12	60,46	60,46
				Jalan Strategis Desa Terbangun	KM		85,42	98,62	113,62	128,62	143,62	143,62
				Meningkatnya Prasarana/Fasilitas Layanan Perhubungan Darat	%	44,44	40,44	40,44	44,44	48,44	52,44	52,44

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN					
						2020	2020	2021	2022	2023	2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan Sumber Daya Air	Rasio Jaringan Irigasi	%	59,12	60,19	62,97	65,24	67,50	69,76	69,76	
				Pembangunan dan Rehabilitasi Embung, Bendung/Bangunan Air lainnya	Unit	244	246	247	250	253	256	256	
			Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	4.205	4.262	5.589	7.539	9.414	11.264	11.264	
				Persentase rumah tangga berakses air minum layak	%	78,02	76,99	79,29	100	100	100	100	
				Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	71,56	75,76	79,36	100	100	100	100	
		Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	-	-	70,58	70,98	71,39	71,80	71,80	
				Emisi Gas Rumah Kaca	tCO2eq	460.662	460.662	460.662	460.662	460.662	460.662	460.662	
				Meningkatnya Pengelolaan Sampah	%	17,56	17,56	24,00	26,00	27,00	30,00	30,00	
				Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	96,80	96,80	97,02	97,05	97,05	97,05	97,05
				Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	Desa Tangguh Bencana	Desa		10	10	15	20	30	30

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN				
						2020	2020	2021	2022	2023	2024	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan tanggung jawab pelayanan publik		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	Predikat	CC	CC	CC	CC	B	A	A
				Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	N/A	N/A	65	69	71	71	71
			Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	3,81	4,43	4,13	4,16	4,20	4,25	4,25
			Meningkatnya transparansi dan tanggung jawab pelayanan publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Poin	50	78,74	79	80	85	90	90
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor		1,18	1,34	1,50	1,66	1,82	1,82
				Jumlah Desa Maju	Desa	7	7	17	27	37	47	47

**Tabel 5.5**  
**Indikator Makro Target Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2020	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	62,39	65,62	67,08	68,54	70,00	70,00	
2	Prevalensi Stunting	%	25,83	23,48	20,00	18,00	16,00	16,00	
3	Indeks Pembangunan Gender	Poin	84,64	92,03	92,53	93,03	93,53	93,53	
4	Persentase Penduduk Miskin	%	27,54	27,13	26,72	26,31	23,5-24	23,5-24	
5	Pertumbuhan PDRB	%	0,30	5,64	5,84	6,04	6,70	6,70	
6	Laju Inflasi	%	-1,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
7	PDRB Per Kapita ADHB	Ribu Rupiah	22.062	23.405	24.705	25.959	27.172	27.172	
8	Indeks Gini	Poin	0,40	0,40 - 0,39	0,39 - 0,38	0,38 - 0,36	0,36 - 0,34	0,36 - 0,34	
9	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,90	3,47	0,94	0,83	0,80	0,80	
10	Emisi Gas Rumah Kaca	tCO2eq	460.662	460.662	460.662	460.662	460.662	460.662	
11	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	4,43	4,13	4,16	4,20	4,25	4,25	
12	Kebutuhan Investasi	Miliar Rupiah	281,75	279,10	280,79	289,03	299,40	299,40	
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	N/A	65	69	71	71	71	

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran secara efektif, efisien, dan produktif. Strategi merupakan tindakan atau cara yang dipilih untuk mewujudkan Visi dan Misi sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki dan mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang. Rumusan strategi menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai yang diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis serta solusi yang dirumuskan dan diuraikan dalam bab sebelumnya, maka rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

#### 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan pembangunan periode 2019-2024 merupakan periode RPJMD III dalam pentahapan RPJPD Kabupaten Rote Ndao 2005-2025, dimana temanya adalah "*kemandirian dan daya saing*" dan prioritas pembangunan Rote Ndao diletakkan untuk memantapkan mutu SDM, menjaga dan terus meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian daerah dengan dukungan yang berkualitas dari pembangunan infrastruktur dan perencanaan tata ruang dan LH, penegakkan hukum, stabilitas politik, profesionalisme aparatur, serta ketertiban dan keamanan yang kondusif dan terjaga lewat partisipasi aktif semua unsur pembangunan. Tema ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024. RPJMD akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD.

Strategi dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Rote Ndao adalah dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan, yaitu dengan analisis SWOT. Dengan analisis SWOT diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan eksternal, sehingga kekuatan dan peluang dapat dimaksimalkan sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman yang pada akhirnya dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal.

Pilihan Strategi yang diambil Kabupaten Rote Ndao periode 5 (lima) tahun kedepan untuk masing-masing Misi seperti tabel berikut :



**Tabel 6.1**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**RPJMD Kabupaten Rote Ndao 2019-2024**

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan</b>			
<b>MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	1. Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan dapat dijangkau	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana, tenaga kependidikan dan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah
			2. Penduduk usia sekolah bersekolah pada semua jenjang pendidikan sesuai usianya
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Percepatan Pencegahan dan penanganan <i>Stunting</i> Terintegrasi	1. Meningkatkan kesehatan ibu hamil serta status gizi bayi dan balita secara berkesinambungan
			2. Kerja sama lintas sektor dalam penanganan dan penanggulangan <i>stunting</i>
			3. Meningkatkan cakupan imunisasi, asi eksklusif dan kawasan tanpa rokok
		2. Meningkatkan Pencegahan dan penanggulangan penyakit	1. Meningkatkan pencegahan penularan penyakit kepada kelompok rentan
			2. Penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat
			3. Meningkatkan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
	2. Penguatan kapasitas institusi kesehatan dengan peningkatan akreditasi rumah sakit dan puskesmas		
	4. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat	4. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif
1. Meningkatkan ketahanan dan peran keluarga, serta perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak			
3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1. Penguatan peran keluarga dan pengarusutamaan gender	1. Meningkatkan ketahanan dan peran keluarga, serta perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	
4. Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	1. Pengendalian Fertilitas dan Mortalitas	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian penduduk dan KB	
		2. Menjaga pertumbuhan penduduk dibawah 1,50%	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
<b>MISI 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan</b>				
1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berdaya saing	1. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta kesejahteraan sosial masyarakat	1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja	1. Meningkatkan kapasitas dan ketrampilan tenaga kerja berbasis teknologi	
		2. Pengentasan kemiskinan ekstrem	1. Menurunkan beban pengeluaran	
			2. Meningkatkan pendapatan	
	2. Meningkatnya peran Koperasi UMKM, industri dan perdagangan	1. Meningkatkan daya saing koperasi UMKM, industri dan perdagangan		3. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan
				1. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi
				2. Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan industri rumah tangga
				3. Memperkuat infrastruktur dasar dan ekonomi kawasan perdesaan
				4. Pemberdayaan BUMDes
			5. Kemudahan akses permodalan	
	2. Meningkatnya kontribusi pariwisata, pertanian dan perikanan	1. Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan perikanan	1. Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan	1. Optimalisasi lahan pertanian dan dukungan infrastruktur, sarana prasarana pertanian yang memadai
2. Pemanfaatan IPTEK				
3. Meningkatkan pembibitan dan pengembangan serta pakan ternak				
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan				
2. Meningkatnya peran pariwisata dalam perekonomian daerah		1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata dan lama tinggal	2. Meningkatkan Paket Wisata yang ber-CHSE	1. Optimalisasi obyek-obyek wisata alam, bahari, religius, budaya dan kuliner
				1. Meningkatkan promosi dan penyelenggaraan event-event wisata
3. Meningkatnya ketahanan pangan		1. Perbaiki kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat		2. Optimalisasi Pokdarwis
				1. Memperkuat cadangan pangan masyarakat dengan membangun lumbung pangan di pedesaan
				2. Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan dan gizi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan</b>			
1. Meningkatnya konektivitas, ketersediaan sumber daya air dan permukiman yang layak	1. Meningkatnya konektivitas	1. Meningkatkan kualitas sistem jaringan transportasi	1. Pembangunan prasarana penghubung antar wilayah potensial 2. Peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan fasilitas keselamatan jalan
	2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan Sumber Daya Air	1. Pengembangan SDA, jaringan irigasi dan ketersediaan air baku secara berkelanjutan	1. Pembangunan dan pemeliharaan embung dan jaringan irigasi
	3. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	1. Meningkatkan sarana dan prasarana perumahan, air bersih dan sanitasi	1. Penyediaan sarana dan prasarana perumahan, air bersih dan sanitasi layak
2. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan	1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1. Peningkatan pengelolaan sampah 2. Peningkatan Rehabilitasi Lahan Kritis
		2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	1. Penyusunan Perda RDTR, RTR
	3. Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah	1. Meningkatkan upaya pencegahan bencana daerah	1. Meningkatkan Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
		2. Meningkatkan kesiapsiagaan, peringatan dini dan Mitigasi Bencana Daerah	1. Integrasi perencanaan penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan
		3. Meningkatkan kemampuan tanggap darurat bencana dan pemulihan pasca bencana	1. Meningkatkan SDM dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima</b>			
1. Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik	1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis <i>e-budgeting</i>
			2. Optimalisasi obyek-obyek sumber pendapatan daerah
			3. Mencapai predikat opini WTP
		2. Penguatan pengawasan	1. Penerapan SPIP
			2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
	2. Meningkatnya transparansi dan responsibilitas pelayanan publik	1. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan	
			2. Meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik			1. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
			2. Penataan kelembagaan desa

Strategi yang dipilih Kabupaten Rote Ndao memiliki nilai strategis karena menjadi prioritas pelaksanaan pembangunan setiap tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Oleh sebab itu prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penanganan *stunting*.
2. Percepatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang inklusif dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.
3. Peningkatan ekonomi inklusif yang berdaya saing.
4. Peningkatan akses infrastruktur yang berkualitas.
5. Reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan peningkatan pelayanan publik.

Mengacu pada strategi dan prioritas tahunan tersebut, ditetapkan Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rote Ndao setiap tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.2.**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Rote Ndao**

No	Arah Kebijakan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Ekonomi Dan Kualitas Infrastruktur Menuju Kemandirian Desa/Kelurahan					
2	Percepatan Pembangunan SDM, Penguatan Sistem Kesehatan Daerah dan Pemulihan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menuju kemandirian dan daya saing daerah					
3	Peningkatan kemandirian dan daya saing daerah					

## 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis

Pembangunan di Kabupaten Rote Ndao periode 2019-2024 diarahkan dengan pendekatan kawasan, sehingga dapat memperkecil dampak penyebaran pembangunan yang tidak memberikan daya ungkit yang tinggi. Kebijakan pembangunan berbasis kawasan juga untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan sekaligus meningkatkan percepatan pertumbuhan kawasan.

Pembentukan kawasan diselaraskan dengan karakteristik lokus, potensi sumberdaya lokal yang tersedia, potensi pengembangan (kebijakan nasional infrastruktur), kerentanan terhadap resiko bencana dan daya dukung lingkungan untuk mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Disamping itu harus pula memperhatikan indikasi program pemanfaatan ruang yang merupakan perwujudan rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang untuk mencapai tujuan penataan ruang. Oleh karena itu, kebijakan ~~kawasan~~ dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao meliputi:

1. Pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pengembangan pertanian, kelautan, perikanan dan pariwisata yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan wilayah disertai pemerataan yang seimbang.
2. Penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif sektor pertanian, kelautan perikanan dan pariwisata melalui pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumberdaya air dan prasarana lingkungan.
3. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang pariwisata, penelitian dan edukasi.
4. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan serta minapolitan berbasis perikanan dan ekowisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Pengembangan zona kawasan pesisir dan laut yang potensial sebagai kawasan perikanan, kawasan wisata dan kawasan suaka margasatwa.
6. Mempertahankan fungsi dan peran kawasan pertahanan dan keamanan di Kecamatan Rote Barat Daya, Ndao Nuse, Rote Timur dan pulau-pulau kecil terluar Pulau Ndana dan Ndao.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kabupaten Rote Ndao menetapkan kawasan strategis khusus sesuai fungsi yang telah ditetapkan meliputi:

**a. Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten**

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial budaya atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Rote Ndao ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional bidang pertahanan dan keamanan, yaitu kawasan perbatasan Laut RI dengan Negara Australia namun sesuai dengan RENSTRA BNPP Tahun 2020-2024 baru ditetapkan tujuh kecamatan sebagai lokasi prioritas, yaitu Kecamatan Rote Barat Daya, Rote Selatan, Lobalain, Kecamatan Rote Barat, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Timur dan Kecamatan Landu Leko sedangkan kecamatan lainnya sebagai kawasan penunjang.

Peruntukan kawasan strategis ini sesuai Pola Ruang diarahkan untuk pembangunan Koramil 1604-2 di Kecamatan Lobalain, KODIM 1627 Rote Ndao di Lobalain, Pangkalan TNI-AL Pulau Rote di Desa Dolasi Kecamatan Rote Barat Daya, Pos TNI – AL di Pulau Ndana Kecamatan Rote Barat Daya dan Papela Kecamatan Rote Timur, pelabuhan untuk kegiatan perikanan di PPI Tulandale Kecamatan Lobalain dan PPI Papela Kecamatan Rote Timur, Bandar udara dengan skala pelayanan tersier dan Bandar udara pengumpan DC Saudale di Baa Kecamatan Lobalain, Depo minyak dan gas bumi di Lobalain, Pembangkit Tenaga Listrik PLTU di Kecamatan Rote Tengah, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), PLTS, PLTB, Hybrid di seluruh lokasi berpenghuni. Untuk mendorong pengembangan kawasan

perbatasan Negara, maka pusat kegiatan kawasan berada di Perkotaan Baa Kecamatan Lobalain sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

#### **b. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten**

Kawasan strategis ini meliputi Kawasan Satuan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Laut Sawu III yang merupakan kawasan untuk fungsi dan daya dukung lingkungan hidup serta kawasan strategis lainnya berupa kawasan pendukung strategis perbatasan sebagai penunjang Kawasan Strategis Nasional perbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan Australia di Pulau Ndana. Kawasan ini merupakan kawasan lindung dan konservasi serta Taman Buru (P. Ndana). Penggunaan kawasan ini terbatas dan apabila akan mengalih fungsikan kawasan tersebut dalam luasan yang terbatas dan selektif hanya untuk kepentingan publik, sebagai kawasan edukasi dan menunjang pariwisata daerah.

Kawasan Mulut Seribu merupakan surga tersembunyi di Indonesia telah menarik minat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendorong sebagai Kawasan Ekonomi Khusus demi meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya yaitu Ikan Kerapu dan Kakap Putih. Selain itu Kawasan Mulut Seribu juga dikembangkan sebagai salah satu lokasi pariwisata estate Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **c. Kawasan Strategis Kabupaten**

Berdasarkan potensi sumberdaya yang dimiliki, kerentanan terhadap resiko bencana dan kemampuan daya dukung lingkungan, Kabupaten Rote Ndao membentuk 4 (empat) kawasan strategis untuk pengembangan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan, meliputi :

##### **• Kebijakan Kawasan Timur**

Kawasan Timur merupakan kawasan yang berbasis pada pengembangan perikanan dan kelautan. Hal tersebut didasarkan pada potensi sumberdaya yang dimiliki antara lain sumberdaya manusia dan sumberdaya alam serta minat para penduduk untuk berusaha disektor ini. Lokasi pengembangan sektor ini difokuskan pada Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Landu Leko dan Kecamatan Rote Timur.

Kebijakan pembangunan kawasan timur diarahkan untuk :

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan untuk budidaya maupun tangkap.
2. Pengembangan industri perikanan skala kecil dan rumah tangga.
3. Pendampingan usaha untuk peningkatan diversifikasi produksi, kuantitas dan kualitas serta perluasan jaringan pemasaran.
4. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya berupa benih/bibit, peralatan tangkap, dan pengolahan hasil perikanan.
5. Dukungan pariwisata berbasis agrobisnis produk perikanan dan kelautan.

##### **• Kebijakan Kawasan Tengah**

Kawasan Tengah merupakan kawasan yang berbasis pada pengembangan agrobisnis peternakan dan pertanian, hal tersebut didasarkan dengan potensi sumberdaya yang dimiliki antara lain sumberdaya lahan untuk penggembalaan dan usaha budidaya pertanian serta sumberdaya manusia. Lokasi pengembangan agrobisnis sektor pertanian dan



peternakan ini meliputi Kecamatan Rote Selatan, Rote Tengah dan Lobalain serta kecamatan lainnya sebagai penunjang pengembangan komoditi andalan.

Kebijakan pembangunan kawasan tengah diarahkan untuk :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas agrobisnis pertanian dan peternakan dengan pengembangan kawasan pertanian terpadu dipusatkan di kawasan persawahan Tuanatuk dan sekitarnya.
2. Pusat Pengembangan agroindustri pertanian, peternakan dan usaha industri rumah tangga.
3. Pendampingan usaha dalam rangka peningkatan kualitas dan diversifikasi produksi serta perluasan jaringan pemasaran.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan berupa benih/bibit, alat dan mesin pertanian, peralatan panen dan pasca panen.
5. Dukungan pariwisata berbasis agrobisnis produk pertanian dan peternakan organik.

- **Kebijakan Kawasan Ekoport**

Kawasan Ekoport merupakan kawasan khusus pada pengembangan ekonomi berbasis usaha jasa transportasi laut untuk barang maupun orang, baik antar pulau maupun antar provinsi dengan memanfaatkan pelabuhan Baa sebagai pelabuhan pengumpan. Lokasi pengembangan wilayah Ekoport adalah Kecamatan Lobalain sebagai inti yang didukung dengan pelabuhan rakyat yang berada di Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Timur dan Kecamatan Ndao Nuse serta Pelabuhan ASDP di Pantai Baru,

Kebijakan pembangunan Kawasan Ekoport diarahkan untuk :

1. Pengembangan dan pemanfaatan pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam rangka meningkatkan jasa angkutan produksi lokal untuk perdagangan antar pulau.
2. Meningkatkan arus penumpang orang masuk dan keluar Kabupaten Rote Ndao
3. Meningkatkan kelancaran arus barang kebutuhan pokok masyarakat dari luar masuk ke Kabupaten Rote Ndao.

- **Kebijakan Kawasan Barat**

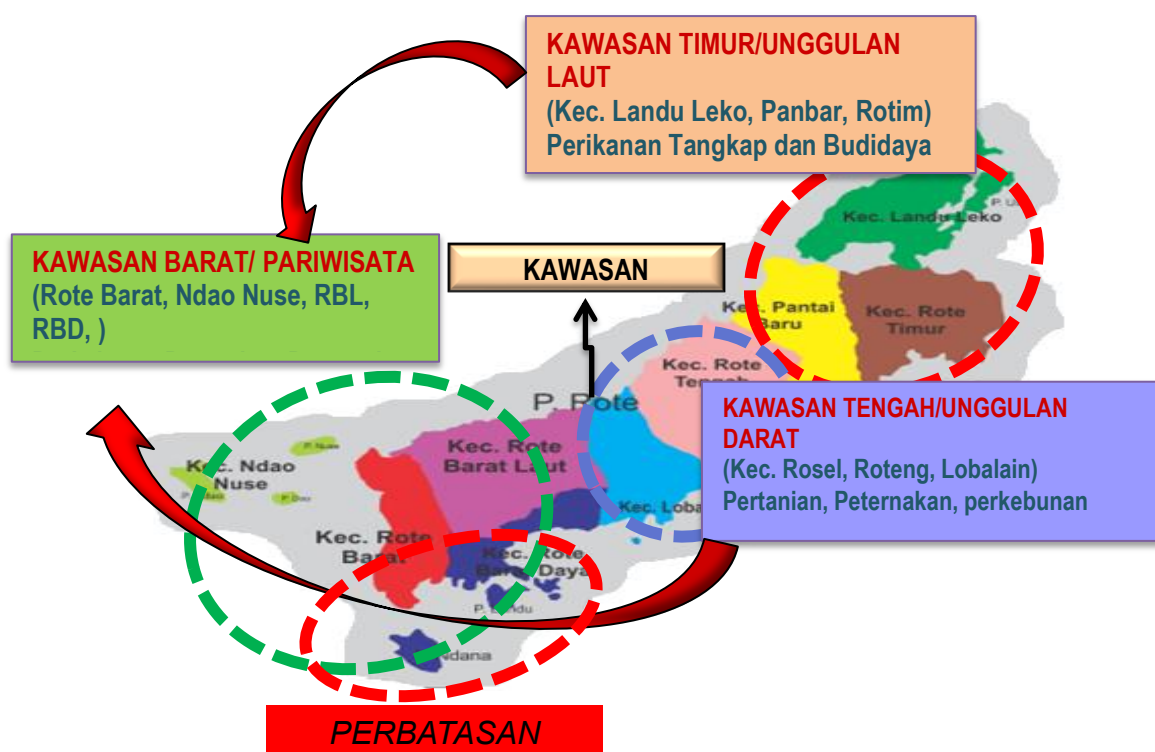
Kawasan Barat merupakan kawasan yang berbasis pada pengembangan Pariwisata Bahari, Alam, Budaya, dan Religi. Potensi Pariwisata yang begitu banyak dan eksotis di Kabupaten Rote Ndao mendorong pemerintah daerah mengembangkan potensi pariwisata menjadi salah satu tumpuan daya ungkit ekonomi daerah. Lokasi pengembangan mencakup Kecamatan Rote Barat, Rote Barat Daya, Ndao Nuse dan Kecamatan Rote Barat Laut, dan seluruh wilayah yang memiliki obyek-obyek wisata sebagai penunjang pariwisata di kawasan barat. Potensi pertanian dan peternakan di kawasan ini dikembangkan hanya di wilayah yang memiliki potensi tersebut secara terintegrasi untuk mendukung pengembangan pariwisata.

Kebijakan pembangunan Kawasan Barat diarahkan untuk :

1. Meningkatkan kemampuan Sumberdaya pariwisata.
2. Meningkatkan penataan kelembagaan kawasan wisata dan daya tarik wisata.
3. Sebagai pusat promosi pariwisata
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur sarana prasarana kawasan wisata.

Kawasan Timur, Kawasan Tengah dan Kawasan Ekoport secara simultan mendukung untuk pengembangan Kawasan Barat sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata dimana merupakan tumpuan percepatan pengembangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif Kabupaten Rote Ndao kedepan. Konsep Pengembangan 4 kawasan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar. 6.1**  
**Pengembangan Kawasan Ekonomi di Kabupaten Rote Ndao**



### 6.3. Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Oleh sebab itu program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi.

Penentuan program pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2019-2024. Seluruh sumberdaya diarahkan dan difokuskan pada program-program tersebut sehingga dapat memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini diuraikan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024:

#### 1. Penurunan Angka Kemiskinan

Percepatan penurunan angka kemiskinan menjadi krusial karena target penurunan kemiskinan sampai dengan tahun 2024 diharapkan menjadi kisaran angka 23,5-24%. Perlu kerja keras seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat secara bersama-sama dan bersinergi dalam pembangunan. Pemerintah Daerah mengarahkan penurunan angka kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja pada bidang pariwisata, pertanian dan perikanan, penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan

memberikan kemudahan investor melakukan investasi, mengembangkan industri kecil menengah dengan bantuan permodalan/kredit bunga 0% dan pendampingan, serta pengembangan ekonomi digital untuk memperluas pemasaran produk andalan dan unggulan. Disamping itu pemberdayaan BUMDES dan BUMDES bersama melalui pengelolaan produk/komoditi andalan satu desa satu produk dan kapasitas manajemen bumdes diharapkan menjadi kekuatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.

Disamping itu pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis guna percepatan penurunan angka kemiskinan. Perencanaan pembangunan secara terpadu diharapkan dapat membantu menurunkan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao. Strategi rencana pembangunan meliputi seluruh aspek, yaitu :

- a. Penyediaan rumah layak huni yang akan dituntaskan dalam 5 tahun kedepan dengan kegiatan bantuan ALADIN (Atap Lantai dan Dinding), berupa bantuan untuk memperbaiki rumah penduduk miskin.
- b. Penyediaan Air bersih Layak dan Sanitasi Layak sekaligus dalam rangka penanganan stunting
- c. Bebas Biaya Pendidikan bagi siswa kurang beruntung
- d. Bebas biaya kesehatan
- e. Pembangunan Balai Latihan Kerja
- f. Pengembangan listrik bersubsidi dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- g. Meningkatkan akses informasi dan telekomunikasi

## **2. Penurunan, Pencegahan dan Penanganan *Stunting***

Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu dari 10 kabupaten di Indonesia yang memiliki angka stunting tinggi. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menurunkan prevalensinya lima tahun ke depan hingga mencapai kisaran 16%. Strategi untuk menurunkan dan mencegah terjadinya stunting dilakukan dengan Gerakan Rote CERDAS yang dilakukan secara terpadu dan simultan oleh perangkat daerah terkait yang terkoordinir dalam *stunting center*.

## **3. Pengembangan Pariwisata Daerah**

Potensi pariwisata di Kabupaten Rote Ndao salah satunya sudah dikenal dunia, yaitu Pantai Nemberala dan Boá. Potensi tersebut menjadi modal dasar yang kuat dalam pengembangan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Disamping itu Kabupaten Rote Ndao juga merupakan salah satu tujuan wisata di Nusa Tenggara Timur. Fokus utama rencana pengembangan pariwisata daerah adalah pengembangan tujuan wisata yang sudah ada dan membangun destinasi wisata baru yang potensial yang diterjemahkan dalam rencana :

1. Pembenahan destinasi wisata dengan penyediaan infastruktur dan sarana prasarana yang memadai, pengembangan amenities dan atraksi budaya tanpa merubah kekhas-an destinasi wisata.

2. Pengembangan SDM pariwisata.
3. Penyelenggaraan event pariwisata yang digelar secara kontinyu.
4. Pengajuan kedalam jaringan Geopark kawasan Laut Mati di Kecamatan Landuleko pada tingkat Nasional maupun Internasional.
5. Pengembangan produk ekonomi kreatif setempat.
6. Promosi pariwisata dengan memanfaatkan teknologi digital.

#### **4. Pengembangan Pertanian berkelanjutan**

Kedaulatan pangan merupakan kebijakan yang diarahkan pada ketersediaan dan ketahanan pangan masyarakat dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi masa-masa sulit/paceklik. Untuk mencapai kedaulatan pangan daerah maka dilaksanakan pembangunan terpadu antar kawasan strategis yang memiliki potensi pertanian dan perikanan dengan melakukan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi komoditas. Dilain pihak penyediaan sarana prasarana alsintan yang memadai, pendampingan, pemberdayaan kemampuan masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya.

Pertanian dalam arti luas termasuk pertanian, peternakan, dan perikanan merupakan potensi yang ditekuni oleh sebagian besar penduduk Kabupaten Rote Ndao. Fokus utama pengembangan pertanian adalah mengembangkan gerakan Lakamola Anansio dengan produk unggulan darat pertanian organik dan gula lontar, unggulan laut rumput laut tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan lokal saja, namun mampu pula diantar-pulaukan yang diterjemahkan dalam rencana :

- a. Menyediakan logistik bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara dalam rangka mendukung pariwisata daerah.
- b. Sebagai sumber Ketahanan pangan daerah.
- c. Menyediakan pangan sehat yang berkelanjutan dengan adanya produk-produk pertanian organik.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai.

Dengan mempertimbangkan pencapaian program unggulan Bupati dan Wakil Bupati sebagai janji kepada masyarakat dan diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis daerah, maka ditetapkan program pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao 2019-2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel. 6.3**  
**Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun 2020-2024 Sebelum Perubahan**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Misi 1</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing</b>																
Tujuan	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia																
Sasaran	Meningkatnya kualitas pendidikan																
	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal	Meningkatnya pendidikan anak usia dini (5-6) tahun	%	100	100	2.331.760	100	3.378.395,20	100	3.425.963,10	100	3.474.482,37	100	3.523.972,01	100	16.134.573	DINAS PKO
		Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (Usia 7-18 Tahun)	%	100	100		100		100		100		100		100		DINAS PKO
	Program Peningkatan pendidikan dan pengajaran	Meningkatnya partisipasi sekolah usia 7-15 Tahun	%	100	100	25.034.000	100	26.534.680,00	100	28.045.373,60	100	28.566.281,07	100	29.097.606,69	100	137.277.941	DINAS PKO
	Program Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	63,55	64,87	20.280.120	66,41	22.185.722,40	67,43	30.599.436,85	68,77	28.021.425,58	69,53	37.451.854,10	69,53	138.538.559	DINAS PKO
	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya kualitas guru	%	81,57	83,19	2.855.000	84,86	3.412.100,00	86,55	3.470.342,00	88,28	8.029.748,84	90	3.590.343,82	90	21.357.535	DINAS PKO
	Program Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	94	94,12	1.120.000	100	2.142.400,00	100	3.165.248,00	100	11.188.552,96	100	2.212.324,02	100	19.828.525	DINAS PKO
Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat																
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	%	100	100	19.535.441	100	20.926.149,82	100	21.324.672,82	100	23.731.166,27	100	24.145.789,60	100	109.663.220	DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit	%	90	90	1.653.897	92	2.686.974,94	94	2.720.714,44	96	3.755.128,73	100	3.790.231,30		14.606.946	DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	100	100	50.710.138	100	54.724.340,76	100	65.758.827,58	100	68.814.004,13	100	69.890.284,21	100	309.897.595	DINAS KESEHATAN
Sasaran	Meningkatnya Perlindungan dan pelayanan sosial dasar																
	Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	KPM/KK	12.220 KPM/10.090 KK	100	1.054.800	100	1.075.896,00	100	1.097.413,92	100	1.119.362,20	100	1.141.749,44	100	5.489.222	DINAS SOSIAL
	Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Orang	1.180 Orang	100	1.085.000	100	1.106.700,00	100	1.128.834,00	100	1.151.410,68	100	1.174.438,89	100	5.646.384	DINAS SOSIAL
	Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial dan peran serta kepemudaan	Orang	680 Orang	100	75.000	100	76.500,00	100	78.030,00	100	79.590,60	100	81.182,41	100	390.303	DINAS SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Penanganan Fakir Miskin	Meningkatnya Pelayanan dan penanganan fakir miskin	KK/KPM/Desa/Kel	2.605 KK/14.291 KPM/19 Desa/Kel	100	511.194	100	521.417,88	100	531.846,24	100	542.483,16	100	553.332,83	100	2.660.274	DINAS SOSIAL
Sasaran	Meningkatnya Pengarus-utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan anak																
	Program Pemberdayaan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	%	0,05	0,045	352.299	0,04	359.344,98	0,035	366.531,88	0,03	373.862,52	0,025	381.339,77	0,025	1.833.378	DINAS P3AP2KB
	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Menurunnya kekerasan terhadap anak (0-15 Tahun)	%	0,020	0,019	204.115	0,018	208.197,30	0,017	212.361,25	0,016	216.608,47	0,015	220.940,64	0,015	1.062.223	DINAS P3AP2KB
Sasaran	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk																
	Program Pengendalian Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	3,80	3,60	3.087.468	3,07	3.149.217,36	2,54	3.212.201,71	2,01	3.276.445,74	1,50	3.341.974,66	1,50	16.067.307	DP3AP2KB
	Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rasio akseptor KB	%	55,60	55,65	2.024.745	55,70	2.065.239,90	56,00	2.106.544,70	56,00	2.148.675,59	56,00	2.191.649,10	56,00	10.536.854	DP3AP2KB
Misi 2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Melalui Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan																
Tujuan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berdaya saing																
Sasaran	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja																
	Program Peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja	Meningkatnya Mutu / Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	%	55	60	510.000	70	520.200,00	80	2.530.604,00	90	4.541.216,08	100	2.052.040,40	100	10.154.060	DINAS TRANSNAKER
	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja	%	100	100	150.000	100	153.000,00	100	156.060,00	100	659.181,20	100	662.364,82	100	1.780.606	DINAS TRANSNAKER
Sasaran	Meningkatnya ketahanan pangan																
	Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan pangan	%	65.917:16.840	67.894:17.008	160.000	69.931:17.178	163.200,00	72.029:17.350	166.464,00	74.029:17.523	169.793,28	76.415:17.698	173.189,15	76.415:17.698	832.646	DINAS PANGAN
	Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan	Keterjangkauan pangan dan stabilnya harga	Komoditi	45	50	130.000	50,5	132.600,00	60	135.252,00	60,5	137.957,04	70	140.716,18	70	676.525	DINAS PANGAN
	Program Pengembangan Konsumsi dan penganekaragaman pangan	Tingkat konsumsi energi dan protein terhadap standar konsumsi energi dan protein	%	69,90	71,00	150.000	70,50	153.000,00	80	156.060,00	80,30	159.181,20	80,50	162.364,82	80,50	780.606	DINAS PANGAN
	Program Pengembangan Keamanan Pangan	Jumlah kasus pangan segar asal tumbuhan yang membahayakan	Kasus	10	8	250.000	6	255.000,00	4	260.100,00	2	265.302,00	1	270.608,04	1	1.301.010	DINAS PANGAN
Tujuan	Meningkatnya kontribusi pariwisata, pertanian dan perikanan																
Sasaran	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Peningkatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pertanian	Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Unit	9	15	4.237.459	11	5.822.208,18	12	7.408.652,34	13	10.996.825,39	14	11.086.761,90	65	39.551.907	DINAS PERTANIAN
	Program Pengembangan Tanaman Pangan	Meningkatnya Produktifitas Tanaman Pangan	Ton/Ha	4,2	4,36	800.000	4,41	1.316.000,00	4,49	1.832.320,00	4,57	2.348.966,40	4,66	2.365.945,73	4,66	8.663.232	DINAS PERTANIAN
	Program Pengembangan Tanaman Perkebunan	Meningkatnya Produktifitas Tanaman Perkebunan	Ton/Ha	5,23	5,71	450.000	4,99	959.000,00	4,15	1.468.180,00	4,70	1.477.543,60	4,56	1.487.094,47	4,56	5.841.818	DINAS PERTANIAN
	Program Pengembangan Tanaman Hortikultura	Produktivitas Tanaman Hortikultura	Ton/Ha	15	15	750.000	16	1.265.000,00	19	1.780.300,00	23	1.795.906,00	27	1.811.824,12	27	7.403.030	DINAS PERTANIAN
	Program Peningkatan Pembibitan dan Produksi Ternak	Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak	Ekor	500	510	428.000	620	436.560,00	730	820.578,00	840	850.000,00	950	1.398.170,00	4.150	3.933.308	DINAS PETERNAKAN
	Program Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Pengendalian terhadap penyakit menular ternak	Ekor	16	16	486.000	16	495.720,00	32	1.005.634,40	32	1.015.747,09	32	1.026.062,03	32	4.029.164	DINAS PETERNAKAN
	Program peningkatan prasarana dan sarana peternakan	Cakupan peningkatan prasarana dan Sarana Peternakan	Ekor	50	46	1.180.000	48	1.203.600,00	90	2.227.672,00	90	2.252.225,44	100	5.277.269,95	100	12.140.767	DINAS PETERNAKAN
	Program peningkatan agribisnis dan penyuluhan peternakan	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Ekor	3.100	3.246	180.000	3.246	183.600,00	6.492	687.272,00	6.492	691.017,44	6.492	694.837,79	29.068	2.436.727	DINAS PETERNAKAN
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	0,36	0,38	1.388.211	0,42	1.415.975,22	0,45	2.244.294,72	0,47	2.273.180,62	0,49	3.502.644,23	0,49	10.824.306	DKP
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Ton	3.529	3.667		3.738		3.820		4.124		4.292		23.170		DKP
	Program Pembinaan Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan	Meningkatnya Jumlah Konsumsi Ikan	%	43,88	44,88	349.000	46,88	355.980,00	47,88	763.099,60	48,88	770.361,59	49,88	1.377.768,82	49,88	3.616.210	DKP
	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	%	15,751	16,036	1.031.629	16,507	1.052.261,58	17,008	1.873.306,81	17,509	1.894.772,95	18,010	3.116.668,41	100,821	8.968.639	DKP
Sasaran	Meningkatnya peran pariwisata dalam perekonomian daerah																
	Program Pengembangan, Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Meningkatnya kelestarian kekayaan dan Keragaman Budaya Daerah	Dokumen Kegiatan	2	7	320.000	7	1.326.400,00	7	1.332.928,00	7	1.339.586,56	7	1.346.378,29	35	5.665.293	DISBUDPAR
	Program Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Daerah	Kunjungan Wisatawan	Orang	4247	5000	385.000	20000	2.392.700,00	40000	2.400.554,00	50000	2.908.565,08	70000	2.916.736,38	70000	11.003.555	DISBUDPAR
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Destinasi Pariwisata	Lokasi	1	1	2.320.015	1	3.366.415,30	1	4.413.743,61	1	12.462.018,48	1	12.511.258,85	6	35.073.451	DISBUDPAR
	Program Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan	Cakupan Desa Wisata	Desa	1	1	836.125	2	1.852.847,50	2	1.869.904,45	2	2.387.302,54	2	2.405.048,59	10	9.351.228	DISBUDPAR
Sasaran	Meningkatnya peran Koperasi UMKM, industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian																
	Program Pengembangan dan pembinaan koperasi dan UMKM	Meningkatnya Modal Koperasi Aktif	Juta Ru	84.857	88.285	382.500	90.051	390.150,00	91852	397.953,00	93.689	405.912,06	95.563	414.030,30	95.563	1.990.545	Dinas Koperasi, UKM, Perindag



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pengembangan dan pembinaan perdagangan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	%	0,8	0,8	3.776.310	1,29	3.851.836,20	1,25	4.428.872,92	1,21	6.007.450,38	1,18	6.087.599,39	1,18	24.152.069	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
	Program Pengembangan dan pembinaan industri kecil dan menengah	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	0,08	0,08	480.000	0,08	489.600,00	0,16	1.999.492,00	0,3	3.509.379,84	0,3	3.519.567,44	0,92	9.998.039	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
<b>Misi 3</b>	<b>Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan</b>																
Tujuan	Meningkatnya konektivitas, ketersediaan sumber daya air dan permukiman yang layak																
Sasaran	Meningkatnya konektivitas																
	Program Pengembangan, Pengelolaan Jalan dan jembatan, sarana prasarana Kebinamargaan dan Jasa Konstruksi	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	37,77	6,52	60.014.711	6,52	63.715.005	57,33	88.439.305	78,67	117.188.091	100	210.961.853	100	540.318.966	DINAS PUPR
	Program Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana dan fasilitas layanan perhubungan laut dan udara	Meningkatnya prasarana pelabuhan laut	Unit	24	2	2.000.000	2	2.040.000,00	2	2.080.800,00	2	2.122.416,00	2	2.164.864,32	34	10.408.080	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana dan fasilitas layanan perhubungan darat	Meningkatnya Prasarana/Fasilitas Layanan Perhubungan Darat	%	32,44	44,44	209.000	56,44	213.180,00	68,44	217.443,60	80,44	221.792,47	92,44	226.228,32	92,44	1.087.644	DINAS PERHUBUNGAN
Sasaran	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan sumber daya air																
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air, Irigasi dan Bangunan Air Lainnya	Meningkatnya jaringan irigasi kondisi baik	%	55,94	61,55	7.457.785	67,32	10.106.940,70	73,25	9.759.079,51	79,35	17.914.261,10	85,6	8.072.546,33	85,6	53.310.613	DINAS PUPR
	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan Lingkungan Permukiman Layak	%	73,95	75,23	16.344.180	78,4	32.157.714,60	82,72	32.739.624,26	88,39	29.979.361,95	95,82	31.086.849,42	95,82	142.307.730	DINAS PKPLH
	Program Penataan dan Pengendalian Bangunan	Meningkatnya penataan dan pengendalian bangunan	%	70,53	70,59	312.870	70,63	319.127,40	71,14	325.509,95	73,05	332.020,15	75,41	338.660,55	75,41	1.628.188	DINAS PKPLH
Tujuan	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan																
Sasaran	Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan																
	Program Pengendalian dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengelolaan sampah	%	11,93	17,56	2.723.045	29,43	2.777.505,90	41,06	2.833.056,02	52,45	2.889.717,14	63,85	2.947.511,48	63,85	14.170.836	DINAS PKPLH
	Program Analisis dan informasi lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	%	65,49	65,63	837.600,0	65,78	854.352,00	65,93	871.439,04	66,07	888.867,82	66,21	906.645,18	66,21	4.358.904	DINAS PKPLH
Sasaran	Meningkatnya Pengendalian pemanfaatan ruang																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	96,5	96,8	1.250.000	97,02	1.275.000,00	97,05	1.300.500,00	97,05	1.326.510,00	97,5	1.353.040,20	97,5	6.505.050	DINAS PUPR
<b>Misi 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima</b>																	
<b>Tujuan Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik</b>																	
<b>Sasaran Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah</b>																	
	Program Peningkatan Pengelolaan perbendaharaan dan Kas daerah	Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	% SILPA	8	7	942.200	6	961.044,00	5	980.264,88	4	999.870,18	3	1.019.867,58	3	4.903.247	BKAD
	Program Peningkatan Pengelolaan Akutansi	Meningkatnya Pengelolaan Akutansi (Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Perda Pertanggung jawaban)	%	100	95	713.000	95	727.260,00	100	741.805,20	100	756.641,30	100	771.774,13	100	3.710.481	BKAD
	Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran	Meningkatnya pengelolaan Anggaran	%	95	95	1.879.290	95	1.916.875,80	95	1.955.213,32	100	1.994.317,58	100	2.034.203,93	100	9.779.901	BKAD
	Program Peningkatan Manajemen Aset Daerah	Cakupan Manajemen Aset Daerah	%	60	65	372.400	70	379.848,00	75	387.444,96	80	395.193,86	80	403.097,74	80	1.937.985	BKAD
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Menurunnya Jumlah temuan hasil pemeriksaan	Temuan	13 Temuan BPK	0 Temuan BPK	2.296.000	0 Temuan BPK	2.341.920,00	0 Temuan BPK	2.388.758,40	0 Temuan BPK	2.436.533,57	0 Temuan BPK	2.485.264,24	0 Temuan BPK	11.948.476	INSPEKTORAT
	Program peningkatan retribusi dan pendapatan daerah lain-lain	Meningkatnya retribusi dan pendapatan daerah lain-lain	%	3,47	3,81	200.000	4,47	204.000,00	5,22	208.080,00	6,11	212.241,60	7,15	216.486,43	7,15	1.040.808	BAPENDA
	Program peningkatan pajak daerah	Meningkatnya pajak daerah	%	3,47	23,81	525.000	4,47	535.500,00	5,22	546.210,00	6,11	557.134,20	7,15	568.276,88	7,15	2.732.121	BAPENDA
	Program peningkatan pajak bumi dan bangunan	Meningkatnya pajak bumi dan bangunan	%	3,47	64.000 OP	500.000	4,47	510.000,00	5,22	520.200,00	6,11	530.604,00	7,15	541.216,08	7,15	2.602.020	BAPENDA
	Program pembukuan, pelaporan dan penyuluhan PAD	Tertatanya pembukuan, pelaporan dan terlaksananya penyuluhan PAD	OPD	13 OPD	13 OPD	340.000	13 OPD	346.800,00	13 OPD	353.736,00	13 OPD	360.810,72	13 OPD	368.026,93	13 OPD	1.769.374	BAPENDA
<b>Sasaran Meningkatkan transparansi dan responsibilitas pelayanan publik</b>																	
	Peningkatan Pembinaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	%	100	100	765.000	100	780.300,00	100	795.906,00	100	811.824,12	100	828.060,60	100	3.981.091	Bag. Organisasi dan Tatalaksana
	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Transparansi Pelayanan Perizinan	Izin	1.500	1.550	345.000	1.550	351.900,00	1550	358.938,00	1.600	366.116,76	1.650	373.439,10	1.650	1.795.394	DPMPSTP
	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	100	100	597.050	100	608.991,00	100	621.170,82	100	633.594,24	100	646.266,12	100	3.107.072	DINAS DUKCAPIL
	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	%	100	100	371.137	100	378.559,74	100	386.130,93	100	393.853,55	100	401.730,62	100	1.931.412	DINAS DUKCAPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data	%	100	100	307.600	100	313.752,00	100	320.027,04	100	326.427,58	100	332.956,13	100	1.600.763	DINAS DUKCAPIL
	Program Pengembangan Informatika Daerah	Meningkatnya layanan informatika daerah	%	13,5	38,46	1.230.000	46,83	1.254.600,00	59,27	1.279.692,00	84,27	1.305.285,84	100	1.331.391,56	100	6.400.969	DISKOMINFO
	Program Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, Pengembangan kelembagaan kemasyarakatan dan pelayanan sosial dasar	Meningkatnya Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Mandiri	Kelompok	10	10	2.405.000	10	2.453.100,00	10	2.502.162,00	10	2.552.205,24	10	2.603.249,34	50	12.515.717	DINAS PMD
		Meningkatnya PKK dan Posyandu Aktif	%	10	10		10		10		10		10		50		DINAS PMD
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan	Meningkatnya kelompok binaan usaha masyarakat perdesaan	%	50	50	260.000	60	265.200,00	70	270.504,00	80	275.914,08	90	281.432,36	350	1.353.050	DINAS PMD
	Program Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Desa/Kelurahan	%	10	10	1.084.663	10	1.106.356,26	10	1.128.483,39	10	1.151.053,05	10	1.174.074,11	50	5.644.630	DINAS PMD
		Persentase Penyaluran Dana Desa/ Kelurahan dan ADD	%	100	100		100		100		100		100		100		DINAS PMD
	Program Pendayagunaan SDA dan TTG	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan dalam berinovasi	%	10	10	380.000	10	387.600,00	10	395.352,00	10	403.259,04	10	411.324,22	50	1.977.535	DINAS PMD
	Pengembangan dan Mutasi Aparatur	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	%	77	79	19.040.237	80	19.421.041,74	81	19.809.462,57	82	20.205.651,83	83	20.609.764,86	83	99.086.158	BKPP
	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	Cakupan Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur	%	15	16	1.896.307	16	1.934.233,14	16	1.972.917,80	16	2.012.376,16	16	2.052.623,68	96	9.868.458	BKPP
	Program Data, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan	%	100	100	1.831.000	100	1.867.620,00	100	1.904.972,40	100	1.943.071,85	100	1.981.933,28	100	9.528.598	BAPELITBANG
		Konsistensi RPJMD dan RKPD	%	100	100		100		100		100		100		100		BAPELITBANG
	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi	%	100	100	420.000	100	428.400,00	100	436.968,00	100	445.707,36	100	454.621,51	100	2.185.697	BAPELITBANG
	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya	Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemsosbud	%	100	100	425.000	100	433.500,00	100	442.170,00	100	451.013,40	100	460.033,67	100	2.211.717	BAPELITBANG
	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang IPW	%	100	100	443.000	100	451.860,00	100	460.897,20	100	470.115,14	100	479.517,45	100	2.305.390	BAPELITBANG
	Program Peningkatan Layanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya layanan administrasi pengadaan barang dan jasa	%	100	100	933.609	100	952.281,18	100	971.326,80	100	990.753,34	100	1.010.568,41	100	4.858.539	Bag. Adm Layanan PBJ
	<b>JUMLAH</b>					<b>284.696.910</b>		<b>328.877.499</b>		<b>390.309.191</b>		<b>461.653.229</b>		<b>550.495.364</b>		<b>2.016.032.193</b>	

**Tabel. 6.4**  
**Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun 2021-2024 Sesudah Perubahan**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Realisasi	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Misi 1</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing</b>															
Tujuan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia															
Sasaran	Meningkatnya kualitas pendidikan															
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase partisipasi anak usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini	%	60,05	60,34	47.903.522	63,07	54.761.943	63,54	54.761.943	63,99	55.000.000	63,99	212.427.408	DINAS PKO	
		Persentase partisipasi anak usia 7-18 tahun dalam Pendidikan Kesetaraan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS PKO	
		Persentase partisipasi anak usia 7-15 dalam Pendidikan Dasar	%	99,93	99,93		99,93		99,93		99,93		99,93		DINAS PKO	
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Progres Pelaksanaan Sinkronisasi Dapodik	%	78,24	84,57	189.650	89,53	175.000	94,49	177.000	99,45	179.000	99,45	720.650	DINAS PKO	
Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat															
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	%	25,83	23,48	88.097.827	20	109.810.654	18	72.500.000	16	79.810.654	16	350.219.135	DINAS KESEHATAN	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	70,47	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	55,67	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)	%	58,28	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	%	62,64	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (7-15 Tahun)	%	24,42	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15-59 Tahun)	%	31,70	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (60 Tahun ke atas )	%	34,30	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	14,13	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	20,98	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Realisasi	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	88,11	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	%	30,72	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	64,79	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Persentase Rumah Tangga ber PHBS	%	62,00	60		65		70		75		75		DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Desa UCI ( <i>Universal Child Immunization</i> )	%	24,40	29		33		34		38		38		DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Jumlah Desa Stop BABS	Desa	30,00	50		60		70		90		90		DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Sertifikat Kompetensi	%	17,00	8,58	7.040.395	8,66	4.367.920	8,83	4.368.000	9,00	4.370.000	9	20.146.315,00	DINAS KESEHATAN
		Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk	per 100.000 Penduduk	27	35		40		45		50		50		DINAS KESEHATAN
		Rasio Tenaga Paramedis per 100.000 Penduduk	per 100.000 Penduduk	182,00	352,66		349,07		350,56		351,93		352		DINAS KESEHATAN
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Persentase Posbindu Aktif	%	100,00	100,00	92.400	100,00	316.848	100,00	318.000	100,00	320.000	100	1.047.248	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Persentase Pelayanan Posyandu	%	100,00	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
Sasaran	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak														
	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	%	48,49	67	141.851	67	172.108	67	174.000	67	175.000	67	662.959	DINAS P3AP2KB
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	%	0,10	0,09	60.801	0,08	60.801	0,07	65.000	0,06	68.000	0,06	254.602	DINAS P3AP2KB
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga	%	22,00	22	45.000	24	81.000	27	83.000	29	84.000	29	293.000	DINAS P3AP2KB
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Fasilitas Forum Anak	%	3,70	3,57	56.692	3,64	57.343	3,71	59.000	3,79	60.000	3,79	233.035	DINAS P3AP2KB
		Cakupan Desa Layak Anak	%	30,25	100		100		100		100		100		DINAS P3AP2KB
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak (0-15 Tahun)	%	0,09	100	65.651	100,00	101.000	100,00	103.000	100,00	105.000	100,00	374.651	DINAS P3AP2KB
Sasaran	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk														
	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Pengendalian Penduduk	%	100	100,0	638.004	100,0	50.000	100,0	51.000	100,0	52.020	100,00	791.024	DINAS P3AP2KB
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio akseptor KB	%	55,65	86,44	3.859.562	86,44	3.599.302	86,30	3.599.302	86,30	4.109.000	86,30	15.167.166	DINAS P3AP2KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Realisasi	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target		Rp (x000)
				25	22	1.152.640	24	1.358.233	27	1.237.000	29	1.500.000	29	5.247.873	DINAS P3AP2KB
<b>Misi 2</b>	<b>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan</b>														
Tujuan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berdaya saing														
Sasaran	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta kesejahteraan sosial masyarakat														
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	%	36,00	38	121.129	56,25	660.000	74,11	660.000	100,00	700.000	100,00	2.141.129	DINAS TRANSAKER
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	41,00	-	-	100	30.000	100	31.000	100	32.000	100	93.000	DINAS TRANSAKER
	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja	%	36,00	2	40.911	2	50.000	3	51.000	3	52.000	3	193.911	DINAS TRANSAKER
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi	Dokumen	-	-	-	-	1	450.000	1	475.000	2	925.000,00	DINAS TRANSAKER	
		Perencanaan Pembangunan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata	Dokumen	-	-	-	-	1	235.000	1	240.000,00	2	475.000,00		
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya pembangunan permukiman transmigrasi (Rumah dan Sarana Prasarana Pendukung)	Paket	1	249.256	5	245.000	5	246.000	5	247.000	16	987.256,00	DINAS TRANSAKER	
		Pembangunan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata	Rumah	-	-	5	5	5	16						
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Meningkatkan Taraf hidup dan Perekonomian Transmigran	%	64	223.805	68	245.000	71	246.000	72	247.000	72	961.805,00	TRANSAKER	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Pelayanan dan Penanganan Fakir Miskin	%	98,3	536.168	98,3	566.400	98,3	783.874	98,3	886.550	98,3	2.772.992	DINAS SOSIAL	
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase kebutuhan dasar disabilitas Luar Panti yang terpenuhi	%	33,0	351.450	49,12	535.324	68,76	351.450	78,59	351.450	78,59	1.589.674	DINAS SOSIAL	
		Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi	%	80,0	-	100	100	100	100	100	100	100,0	DINAS SOSIAL		
		Persentase Lansia terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	2,17	-	10,90	19,56	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	DINAS SOSIAL		
	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial dan peran serta kepemudaan	%	100	40.000	100	60.000	100	62.000	100	64.000	100	226.000	DINAS SOSIAL	
Sasaran	Meningkatnya peran koperasi UMKM, industri dan perdagangan														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Realisasi	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target		Rp (x000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Koperasi Yang Melaksanakan RAT	Rp	-	90.051	30.000			93.689	31.000	95.563	32.000	95.563	93.000	DINAS KOPERASI, UKM,
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Jumlah KSP/USP Koperasi yang sehat	%	-	-	-	22	60.922	25	63.000	27	65.000	27	188.922	DINAS KOPERASI, UKM,
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	13	13	120.000	15	1.000.000	18	1.000.000	20	2.000.000	20	4.120.000	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG
		Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Unit	910	910		910	910	910	910	910	910	910		
		Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah yang produksi OODARO	Unit	120	120		140	160	180	180	180	180	180	180	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Unit	-	-	-	2	75.000	2	76.000	2	77.000	6	228.000	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG
		Terfasilitasinya pemasaran komoditi dan produk pertanian	Komoditi	-	-		1		1		1		3		
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terkontrolnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dok	2	2,00	30.000	2	90.000	2	91.000	2,00	92.000	2,00	303.000	DINAS KOPERASI, UKM,
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase usaha yang melakukan pengujian	%	-	55,60	120.000	56,00	70.000	58,00	71.000	60,00	72.000	60,00	333.000	DINAS KOPERASI, UKM,
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	0,12	0,69	7.968.396	1,08	5.778.724	1,81	5.957.076	3,62	8.100.000	3,62	27.804.196	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG
		Meningkatnya industri rumah tangga yang mendukung pariwisata	%		2		4		6		8		8		
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya Produk Olahan IKM yang memiliki label dan kemasan berstandar	%	1,78	1,78	150.000	2,23	99.999	2,36	102.000	2,55	105.000	2,55	456.999	DINAS KOPERASI, UKM,
Tujuan	Meningkatnya kontribusi pariwisata, pertanian dan perikanan														
Sasaran	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan perikanan														
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan Peningkatan Sarana Pertanian	%	54,04	13,04	3.059.248	17,86	17.701.090	17,86	3.000.000	17,86	3.100.000	65,11	26.860.338	DINAS
		Meningkatnya Produktifitas Tanaman Padi	%	3,50	3,85		4,24		4,66		5,12		5,12		
		Meningkatnya Produktifitas Tanaman jagung (%)	%	2,82	2,80		2,81		2,83		2,84		2,84		
		Meningkatnya Produksi gula lontar	Ton	947,85	948,79		949,74		950,69		951,64		951,64		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Realisasi	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target		Rp (x000)
		Meningkatnya luas areal Tanaman kelor	Ha	-	18,00		-		20		21		21		PERTANIAN
		Produktivitas Tanaman semangka	%	14,35	16,82		17,67		18,55		19,48		19,48		
		Produktivitas Tanaman bawang merah	%	7,33	7,33		7,70		8,08		8,48		15,79		
		Produktivitas Tanaman cabai rawit (%)	%	5,11	5,09		5,35		5,61		5,90		5,90		
		Meningkatnya luas areal pertanian sehat / organik (Ha)	Ha	-	-		-		5		5		10		
		Peningkatan sarana peternakan	Unit	11	11	2.278.000	12	2.222.730	13	2.225.000	14	2.230.000	50	8.955.730	
		Meningkatnya produksi sapi	Ekor	67.416,90	68.765		70.141		71.543		72.974		283.423	-	
		Meningkatnya produksi kerbau	Ekor	18.964,35	19.059		19.154		19.250		19.346		76.809		
		Meningkatnya produksi kuda	Ekor	8.401,74	8.570		8.741		8.916		9.094		35.321		
		Meningkatnya produksi babi	Ekor	50.842,86	52.368		53.939		55.557		57.224		219.088	-	
		Meningkatnya produksi domba	Ekor	25.517,22	26.283		27.071		27.883		28.720		109.957		
		Meningkatnya produksi kambing	Ekor	52.019,12	53.580		55.187		56.843		58.548		224.158		
		Meningkatnya produksi ayam pedaging	Ekor	200,00	200		210		221		232		863	-	
		Produksi peternakan IB (Inseminasi Buatan)	Ekor	100,00	100		105		110		116		431	-	
		Meningkatnya produksi telur	Butir	584.000,00	27.540		30.600		32.130		33.737		124.007	-	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya prasarana pertanian	Unit	4,00	2	1.201.800	6	17.148.913	6	2.500.000	6	2.550.000	20	23.400.713	
		Meningkatnya luas lahan dengan dua musim tanam	Ha	20.262,00	24.804		26.044		27.346		28.714		28.714		DINAS PERTANIAN
		Menurunnya luas lahan gagal panen karena kekeringan	Ha	1.624,00	1.463		1.390		1.320		1.254		1.254		
		Meningkatnya prasarana Peternakan	Unit	8,00	8	70.000	8		8		8		32		DINAS PETERNAKAN
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan hama penyakit	%	50,00	50	85.966	50	50.000	50	51.000	50	52.000	50	238.966	DINAS PERTANIAN
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pengendalian terhadap penyakit menular ternak	%	6,00	6	752.000	9	852.000	12	853.000	15	855.000	15	3.312.000	DINAS PETERNAKAN
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya usaha peternakan berizin	Ekor	6.250,00	6.250	200.000	6.563	170.805	6.891	175.000	7.236	180.000	26.940	725.805	DINAS PETERNAKAN
		Meningkatnya pengiriman ternak ke luar daerah	Ekor	3.070,00	3.000		3.150		3.308		3.473		12.931		
	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya penyuluhan dan pembinaan kelompok tani	%	100,00	100	363.600	100	300.000	100	305.000	100	310.000	100	1.278.600	DINAS PERTANIAN
		Meningkatnya status kelompok tani	Kelompok	131,00	134		140		142		145		145		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Realisasi	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target		Rp (x000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan	%	4,00	4	40.000	6	40.000	8	42.000	10	44.940	10	166.940	DINAS PETERNAKAN
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Bina Kelompok Nelayan	%	0,39	0,42	615.000	0,45	2.186.801	0,47	2.186.801	0,49	3.000.000	0,49	7.988.602	DINAS PERIKANAN
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Ton	1.841,00	3.738		3.820		4.124		4.292		15.974	-	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	50,70	51.19	615.120	53.50	285.000	55.64	290.000	57.78	295.000	57.78	1.485.120	DINAS PERIKANAN
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi Perikanan Budidaya	Ton	8,20	17.448	3.346.642	17.979	1.274.948	18.539	1.500.000	19.149	1.600.000	73.115	7.721.590	DINAS PERIKANAN
Sasaran	Meningkatnya peran pariwisata dalam perekonomian daerah														
	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Orang	3.606	9.000	419.232	15.000	1.472.887	21.000	750.000	30.000	1.000.000	30.000	3.642.119	DISBUDPAR
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Destinasi Pariwisata	Destinasi	5	6	84.543	11	10.242.538	16	3.000.000	21	5.000.000	21	18.327.081	DISBUDPAR
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya pelaku jasa usaha pariwisata yang ber CHSE	%	0	28,41	220.075	56,82	268.622	68,18	270.000	90,91	272.000	90,91	1.030.697	DISBUDPAR
		Meningkatnya SDM Kepariwisataan	%	4,55	4,55		4,55		4,55		4,55		4,55		
Sasaran	Meningkatnya ketahanan pangan														
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Informasi harga pangan pokok dan cadangan pangan	Dokumen	2	2	383.213	2	372.500	2	373.000	2	375.000	8	1.503.713	DINAS PANGAN
		Tingkat konsumsi energi dan protein terhadap standar konsumsi energi dan protein	%	56,4	61,10		67,90		74,70		81,60		82		
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase ketersediaan terhadap konsumsi pangan	%	178,62	176	70.000	177	70.000	172	71.000	170	72.000	170	283.000	DINAS PANGAN
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman di konsumsi	Sampel Komoditi	55	45	67.699	55	82.699	65	84.000	75	85.000	75	319.398	DINAS PANGAN
Misi 3	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan														
Tujuan	Meningkatnya konektivitas, ketersediaan sumber daya air dan permukiman yang layak														
Sasaran	Meningkatnya konektivitas														
	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	43,48	47,42	44.240.562	51,77	112.337.549	56,12	32.800.000	60,46	46.574.311	60,46	235.952.422	DINAS PUPR
		Meningkatnya Panjang Jalan pariwisata terbangun	KM	N/A		15		30		45		45			
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Prasarana/Fasilitas Layanan Perhubungan Darat	%		40,44	25.000	44,44	162.607	48,44	163.000,00	52,44	164.000,00	52,44	514.607,00	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Realisasi	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sasaran	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan sumber daya air														
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya jaringan irigasi kondisi baik	%	61,31	63,32	19.154.422	64,80	4.428.137	66,17	4.500.000	67,44	4.550.000	67,44	32.632.559	DINAS PUPR
		Meningkatnya Pembangunan /Rehabilitasi Embung/Bangunan Air lainnya	Unit	246,00	247		250		253		256		256		
Sasaran	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman														
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	75,76	79,36	1.453.294	100	6.395.030	100	1.400.000	100	2.000.000	100	11.248.324	DINAS PUPR
	Program Pengembangan Permukiman	Meningkatnya Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	%	19	20,54	350.000	26,14	100.000	31,74	105.000	37,34	110.000	37,34	665.000	DINAS PUPR
	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya penataan dan pengendalian bangunan	%	0,0084	0,0084	270.000	0,0094	196.441	0,0103	198.000	0,0115	200.000	0,01	864.441	DINAS PUPR
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungannya	%	100	100	100.000	100	50.000	100	51.000	100	52.020	100	253.020	DINAS PUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak	%	76,99	79,29	4.810.336	100	9.650.000	100	3.250.000	100	3.300.000	100	21.010.336	DINAS PUPR
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pelaksana konstruksi yang memiliki sertifikat ketrampilan	%	-	15,45	75.000	18,85	75.000	22,25	76.000	25,65	77.000	25,65	303.000	DINAS PUPR
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	%	-	100	195.200	100	95.200	100	96.000	100	97.000	100	483.400	DINAS PKPLH
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	83,30	82,87	11.637.871	88,76	20.544.381	94,42	7.900.000	100,00	20.000.000	100,00	60.082.252	DINAS PKPLH
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Utilitas Umum	Unit	-	-	89.487	20	7.680.000	30	182.000	40	184.000	40	8.135.487	DINAS PKPLH
Tujuan	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan														
Sasaran	Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan														
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan	Unit	-	3	1.818.628	6	745.149	9,00	745.149	12	750.000	12,00	4.058.926	DINAS PUPR
	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengelolaan sampah	%	17,56	24,00	679.496	26,00	670.000	27	673.000	30	675.000	30	2.697.496	DINAS PKPLH
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Perencanaan Pengendalian Lingkungan Hidup	Dokumer	2,00	2,00	320.000	4	461.104	6	462.000	8	464.000	8	1.707.104	DINAS PKPLH
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	%	-	19,07	75.000	19,10	75.000	19,2	76.000	19,4	77.000	19,4	303.000	DINAS PKPLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Realisasi	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran air	Poin	50,00	1,62	247.445	1,52	247.445	1,42	248.000	1,42	250.000	1,42	992.890	DINAS PKPLH
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3	Kg	6.692,00	8.097	-	9.797	19.998	11.855	21.000	14.345	21.500	14.345	62.498	DINAS PKPLH
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	-	100,0	46.000	100,0	46.000	100,0	47.000	100,0	48.000	100,0	187.000	DINAS PKPLH
Sasaran	Meningkatnya Pengendalian pemanfaatan ruang														
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Perencanaan Penataan Ruang	%	96,80	33,33	32.832	33,33	700.000	50,00	705.000	66,67	710.000	66,67	2.147.832	DINAS PUPR
Sasaran	Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah														
	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1.029	50	610.114	50	490.011	50	500.000	50	550.000	200	2.150.125	BPBD
		Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	3.000	2.500		2.500		2.500		2.500		10.000		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	1.029	100		150		150		150		550		
		Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	10	10		15		20		30		30		
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan selama masa tanggap darurat	%		100	191.553	100	170.000	100	172.000	100	174.000	100	707.553	DINAS SOSIAL
<b>Misi 4</b>	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima</b>														
Tujuan	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik														
Sasaran	Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah														
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	%	8,34	6	179.979.782	5	176.152.747	4	183.000.000	3	177.500.000	3	716.632.529	BKA
		Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu	%	90,00	100		100		100		100		100		
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menurunnya temuan Aset Daerah	Temuan	73,91	6	588.263	4	492.000	4	493.000	4	494.000	4	2.067.263	BKA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Realisasi	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target		Rp (x000)
				10	0	1.374.696	7	973.133	5	974.000	3	975.000	3	4.296.829	INSPEKTORAT
				100	100	4.693	65	7.644	70	8.000	75	8.200	75	28.537	INSPEKTORAT
				5,36	5,36	1.096.972	5,36	621.678	5,36	625.000	5,36	650.000	5,36	2.993.650,00	BAPENDA
				73,51	73,51		73,51		73,51		73,51		73,51		
				21,13	21,13		21,13		21,13		21,13		21,13		
				1	1		1		1		1		1		
Sasaran	Meningkatnya transparansi dan responsibilitas pelayanan publik														
				100	100	429.827	100	356.500	100	360.000	100	370.000	100	1.516.327	BAG. ORGANISASI
				47,87	60	122.558	70	153.999	80	155.000	90	156.000	90	587.557	DPMP TSP
				97,35	88,92	1.526.355	92,61	893.429	96,31	895.000	100,00	897.000	100	4.211.784	DINAS DUKCAPIL
				86,48	48,84	775.512	65,89	1.239.807	82,95	1.240.000	100,00	1.245.000	100	4.500.319	DINAS DUKCAPIL
				81,40	86	701.162	86	843.962	90	845.000	100	850.000	100	3.240.124	DINAS DUKCAPIL
				1	2	35.496	3	35.496	4	37.000	5	38.000	5	145.992	DINAS DUKCAPIL
				5	15	46.000	35	57.546	50	59.000	75	60.000	75	222.546	DISKOMINFO
				2	25	328.000	37,5	250.040	50	252.000	62,50	253.000	62,50	1.083.040	DISKOMINFO
					21,74	80.000	43,48	56.000	54,35	57.000	76,09	58.000	76,09	251.000	DISKOMINFO
					10,00	54.998	23,08	104.964	69,23	106.000	84,62	107.000	84,62	372.962	DISKOMINFO
				-	-	100.000	20	18.355.781	20	18.355.781	-	18.355.781	40	36.711.562	DINAS PMD
				-	100	1.066.316	100	404.316	100	406.000	100	410.000	100	2.286.632	DINAS PMD
				-	100	803.640	100	433.640	100	435.000	100	440.000	100	2.112.280	DINAS PMD
				100	100		100		100		100		100		
				100	100		100		100		100		100		
				100	-		20		20		20		20		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Realisasi	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target		Rp (x000)
	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pelayanan Kepegawaian	%	20	100	1.938.778	100	2.024.432	100	2.025.000	100	2.026.000	100	8.014.210	BKPP
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Layanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	%		60	534.717	70	496.639	75	500.000	80	505.000	80	2.036.356	BAGIAN PBJ
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penataan organisasi	%		100	429.827	100	356.500	100	360.000	100	370.000	100	1.516.327	BAGIAN ORGANISASI
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Kelitbangan Yang Dilaksanakan	Jenis	2	6	390.514	9	521.580	12	525.000	15	550.000	15	1.987.094	BAPELITBANG
		Meningkatnya Inovasi Daerah	%	34,78	100		100		100		100		100		
	Program Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya perencanaan Pengelolaan perbatasan	Dokumen	1	2	35.651	3	33.611	4	34.000	5	35.000	5	138.262	BAPELITBANG
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan	%	100	100	1.654.991	100	1.094.059	100	1.890.000	100	1.990.000	100	6.629.050	BAPELITBANG
		Konsistensi RPJMD dan RKPD	%	100											
		Konsistensi RKPD dan APBD	%	100											
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	701.807	100	640.981	100	660.000	100	680.000	100	2.682.788	BAPELITBANG
		Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100		100		100		100		100		
		Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100		100		100		100		100		
	<b>JUMLAH</b>					<b>454.420.041</b>		<b>611.159.590</b>		<b>434.346.376</b>		<b>470.742.426</b>		<b>1.952.142.653</b>	

## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagaimana diuraikan pada bab III, maka kerangka pendanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan didistribusikan pada program-program pembangunan daerah dan program perangkat daerah sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 7.1**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Derah Tahun 2021-2024**  
**Kabupaten Rote Ndao**

NO. REK	URAIAN	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>830,595,316,875</b>	<b>1.015,713,250,000</b>	<b>825,404,221,092</b>	<b>874,404,525,804</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>533,013,930,423</b>	<b>537,843,364,703</b>	<b>570,102,821,587</b>	<b>588,793,601,244</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	303,028,948,266	319,720,627,023	325,955,179,250	332,311,305,245
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221,491,968,957	210,996,729,680	221,546,566,164	248,373,894,472
5.1.05	Belanja Hibah	5,649,508,000	5,498,508,000	20,892,201,173	6,314,082,777
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2,843,505,200	1,627,500,000	1,708,875,000	1,794,318,750
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>121,824,266,829</b>	<b>324,712,138,167</b>	<b>95,474,683,061</b>	<b>124,733,550,633</b>
5.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23,939,562,711	82,267,168,167		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29,973,074,508	91,354,422,200		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	65,676,949,500	129,525,587,000		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,234,682,110	1,564,960,800		
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>24,132,769,623</b>	<b>21,400,000,000</b>	<b>7,470,000,000</b>	<b>7,843,500,000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24,132,769,623	21,400,000,000	7,470,000,000	7,843,500,000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>151,624,348,000</b>	<b>151,757,747,130</b>	<b>152,356,716,445</b>	<b>153,033,873,927</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1,734,694,000	1,868,093,130	2,257,216,929	2,724,235,112
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	149,889,654,000	149,889,654,000	150,099,499,516	150,309,638,815

Sumber :BKA Kab. Rote Ndao tahun 2021, diolah

**Tabel. 7.2**  
**Indikasi Rencana Rrogram Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun 2020-2024 Sebelum Perubahan**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2020		Realisasi 2020		
					Kinerja	Rp (x000)	Kinerja	Rp (x000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>URUSAN WAJIB</b>								
<b>1</b>	<b>LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR</b>								
	<b>1 PENDIDIKAN</b>								
	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal	Meningkatnya pendidikan anak usia dini (5-6) tahun	%	100	100	2.331.760	60,05	1.579.071	DINAS PKO
		Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (Usia 7-18 Tahun)	%	100	100		100		DINAS PKO
	Program Peningkatan pendidikan dan pengajaran	Meningkatnya partisipasi sekolah usia 7-15 Tahun	%	100	100	25.034.000	99,93	29.529.954	DINAS PKO
	Program Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	64	64,87	20.280.120	64,87	18.500.752	DINAS PKO
	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya kualitas guru	%	81,57	83,19	2.855.000	83,19	1.275.371	DINAS PKO
	<b>2 KESEHATAN</b>								
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	%	77,73	100	19.535.441	100	13.236.978	DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	%	88	90	1.653.897	90	677.340	DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	80	100	50.710.138	100	42.214.608	DINAS KESEHATAN
	<b>3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>								
	Program Pengembangan, Pengelolaan Jalan dan jembatan, sarana prasarana Kebinamargaan dan Jasa Konstruksi	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	37,77	44,29	60.014.711	43,48	46.507.633	DINAS PUPR
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air, Irigasi dan Bangunan Air Lainnya	Meningkatnya jaringan irigasi kondisi baik	%	55,94	61,55	7.457.785	60,19	6.596.333	DINAS PUPR
	Program Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	96,5	96,8	1.250.000	96,8	121.048	DINAS PUPR
	<b>4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								
	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan Permukiman Layak	%	73,95	75,23	16.344.180	83,30	15.561.003	DINAS PKPLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2020		Realisasi 2020		
					Kinerja	Rp (x000)	Kinerja	Rp (x000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penataan dan Pengendalian Bangunan	Meningkatnya penataan dan pengendalian bangunan	%	70,53	70,59	312.870	100	225.814	DINAS PKPLH
5	<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								
	Program Peningkatan Penegakan Peraturan perundang-undangan daerah	Persentase penegakan Perda	%	100	100	19.500	100	20.000	SATPOL PP
	Program Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Cakupan Ketertiban dan Ketentraman Umum	%	100	100	895.275	100	1.007.890	SATPOL PP
	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Cakupan perlindungan masyarakat	%	100	100	130.000	100	73.944	SATPOL PP
	Program Pengembangan wawasan kebangsaan dan penanganan daerah rawan konflik	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	671.200	100	643.499	KANTOR KESBANGPOL
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	%	100	100	1.187.389	100	577.870	BPBD
6	<b>SOSIAL</b>								
	Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	12.220 KPM/10.090 KK	100	1.054.800	82,2	792.219	DINAS SOSIAL
	Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	%	1.180 Orang	100	1.085.000	65,38	502.763	DINAS SOSIAL
	Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial dan peran serta kepemudaan	Orang	680 Orang	100	75.000	100	32.302	DINAS SOSIAL
	Program Penanganan Fakir Miskin	Meningkatnya Pelayanan dan penanganan fakir miskin	%	2.605 KK/14.291 KPM/19 Desa/Kel	100	511.194	98,3	360.430	DINAS SOSIAL
2	<b>LAYANAN URUSAN NON DASAR</b>								
1	<b>TENAGA KERJA</b>								
	Program Peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja	Meningkatnya Mutu / Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	%	55	60	510.000	38	596.671	DINAS TRANSAKER
	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja	%	100	100	150.000	100	68.777	DINAS TRANSAKER
2	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
	Program Pemberdayaan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	%	0,045	0,045	352.299	0,1	96.683	DINAS P3AP2KB
	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Menurunnya kekerasan terhadap anak (0-15 Tahun)	%	0,019	0,019	204.115	0,019	83.585	DINAS P3AP2KB
3	<b>PANGAN</b>								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2020		Realisasi 2020		
					Kinerja	Rp (x000)	Kinerja	Rp (x000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan pangan	%	65.917:16.840	67.894:17.008	160.000	37,28	112.093	DINAS PANGAN
	Program Pengembangan Sistim Distribusi dan Cadangan Pangan	Keterjangkauan pangan dan stabilnya harga	%	45	50	130.000	50	91.622	DINAS PANGAN
	Program Pengembangan Konsumsi dan penganekaragaman pangan	Tingkat konsumsi energi dan protein terhadap standar konsumsi energi dan protein	%	69,90	71,00	150.000	61,10	114.266	DINAS PANGAN
	Program Pengembangan Keamanan Pangan	Jumlah kasus pangan segar asal tumbuhan yang membahayakan	Kasus	10	8	250.000	6	74.811	DINAS PANGAN
4	PERTANAHAN								
	Program Penataan Pertanahan	Meningkatnya luas lahan bersertifikat	Ha	7,44	7,63	1.680.000	46 Ha	1.812.539	DINAS PKPLH
5	LINGKUNGAN HIDUP								
	Program Pengendalian dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengelolaan sampah	%	11,93	17,56	2.723.045	17,56	408.794	DINAS PKPLH
	Program Analisis dan informasi lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	%	65,49	65,63	837.600,0	65,63	195.992	DINAS PKPLH
6	ADM. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL								
	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	90,80	100	597.050,00	100	1.065.546	DINAS DUKCAPIL
	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	%	28,91	100	371.137	100	316.234	DINAS DUKCAPIL
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data	%	100	100	307.600	100	353.771	DINAS DUKCAPIL
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								
	Program Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, Pengembangan kelembagaan kemasyarakatan dan pelayanan sosial dasar	Meningkatnya Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Mandiri	Kelompok	10	10	2.405.000	100	2.425.423	DINAS PMD
		Meningkatnya PKK dan Posyandu Aktif	%	10	10		100		
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan	Meningkatnya kelompok binaan usaha masyarakat perdesaan	%	50	50	260.000	66	197.229	DINAS PMD
	Program Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Desa/Kelurahan	%	10	10	1.084.663	82,9	2.149.928	DINAS PMD
		Persentase Penyaluran Dana Desa/ Kelurahan dan ADD	%	100	100		98,99		DINAS PMD
	Program Pendayagunaan SDA dan TTG	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan dalam berinovasi	%	10	10	380.000	14,3	239.584	DINAS PMD
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2020		Realisasi 2020		
					Kinerja	Rp (x000)	Kinerja	Rp (x000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pengendalian Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	3,80	3,60	3.087.468	0,16	2.739.625	DP3AP2KB
	Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rasio akseptor KB	%	55,60	55,65	2.024.745	55,65	1.756.163	DP3AP2KB
9	PERHUBUNGAN								
	Program Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana dan fasilitas layanan perhubungan laut dan udara	Meningkatnya prasarana pelabuhan laut	Unit	24	2	2.000.000	0	-	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana dan fasilitas layanan perhubungan darat	Meningkatnya Prasarana/Fasilitas Layanan Perhubungan Darat	%	32,44	44,44	209.000	44,44	305.593	DINAS PERHUBUNGAN
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	Program Pengembangan Komunikasi Daerah	Pengembangan dan pemberdayaan informasi	%	56,8	100	260.000	100	477.716	DISKOMINFO
	Program Pengembangan Informatika Daerah	Meningkatnya layanan informatika daerah	%	13,5	38,46	1.230.000	38,46	1.017.479	DISKOMINFO
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
	Program Pengembangan dan pembinaan koperasi dan UMKM	Meningkatnya Modal Koperasi Aktif	Juta	84.857	88.285	382.500	85,15%	177.558	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG
12	PENANAMAN MODAL								
	Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal	Meningkatnya Penanaman Modal/Investasi	Rp	250.000	120.000	103.000	154.057	51.191	DPMPTSP
	Program Peningkatan Kerjasama Investasi	Meningkatnya jumlah investor	Investor	22	25	121.500	54	112.360	DPMPTSP
	Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Meningkatnya Ketaatan Berinvestasi	Investor	4	6	73.400	6	139.088	DPMPTSP
	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Transparansi Pelayanan Perizinan	Izin	1.500	1.550	345.000	541	213.144	DPMPTSP
13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
	Program Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	94	94,12	1.120.000	100	715.385	DINAS PKO
14	STATISTIK								
	Program Pengembangan statistik daerah	Meningkatnya sistim data dan statistik	%	67,00	100	65.000,00	100	115.264	DISKOMINFO
15	PERSANDIAN								
	Program Pengembangan persandian	Meningkatnya Keamanan Informasi	%	23,08	40	210.000	0	210.000	DISKOMINFO
16	KEBUDAYAAN								
	Program Pengembangan, Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Meningkatnya kelestarian kekayaan dan Keragaman Budaya Daerah	Dokumen	2	7	320.000	6	108.329	DISBUDPAR
17	PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2020		Realisasi 2020		
					Kinerja	Rp (x000)	Kinerja	Rp (x000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pengembangan Budaya Baca, Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatnya budaya baca dan tertib arsip pada OPD	Orang	1.300,00	1.400,00	275.000	1.400	432.443	BAG. PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN
<b>3</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>								
	<b>1 PARIWISATA</b>								
	Program Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Daerah	Kunjungan Wisatawan	Orang	4247	5000	385.000	3.606	385.000	DISBUDPAR
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Destinasi Pariwisata	Lokasi	1	1	2.320.015	5	3.436.854	DISBUDPAR
	Program Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan	Cakupan Desa Wisata	Desa	1	1	836.125	2	804.719	DISBUDPAR
	<b>2 PERTANIAN</b>								
	Program Peningkatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pertanian	Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Unit	9	15	4.237.459	2	4.247.190	DINAS PERTANIAN
	Program Pengembangan Tanaman Pangan	Meningkatnya Produktifitas Tanaman Pangan	Ton/Ha	4,2	4,36	800.000	3,5	313.083	DINAS PERTANIAN
	Program Pengembangan Tanaman Perkebunan	Meningkatnya Produktifitas Tanaman Perkebunan	Ton/Ha	5,23	5,71	450.000	2,4	88.132	DINAS PERTANIAN
	Program Pengembangan Tanaman Hortikultura	Produktivitas Tanaman Hortikultura	Ton/Ha	15	15	750.000	2,38	867.236	DINAS PERTANIAN
	Program Peningkatan Pembibitan dan Produksi Ternak	Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak	Ekor	500	510	428.000	320.594	165.778	DINAS PETERNAKAN
	Program Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Pengendalian terhadap penyakit menular temak	Ekor	2.400	2.400	498.000	1.430	619.107	DINAS PETERNAKAN
	Program peningkatan prasarana dan sarana peternakan	Cakupan peningkatan prasarana dan Sarana Peternakan	Unit	15	15	420.000	8	99.094	DINAS PETERNAKAN
	Program peningkatan agribisnis dan penyuluhan peternakan	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Ekor	2.838	5.200	500.000	3.070	75.392	DINAS PETERNAKAN
	<b>3 PERDAGANGAN</b>								
	Program Pengembangan dan pembinaan perdagangan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	%	0,8	0,8	3.776.310	0,85	299.753	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG
	<b>4 PERINDUSTRIAN</b>								
	Program Pengembangan dan pembinaan industri kecil dan menengah	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	0,08	0,08	480.000	0,12	2.226.017	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG
	<b>5 TRANSMIGRASI</b>								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2020		Realisasi 2020		
					Kinerja	Rp (x000)	Kinerja	Rp (x000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemberdayaan kawasan transmigrasi	Meningkatnya Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Unit	18	18	2.980.000	18	4.398.913	DINAS TRANSSNAKER
	Pembinaan kawasan transmigrasi	Meningkatkan taraf hidup dan perekonomian Transmigran	Kepala Keluarga	18	18	1.149.250	18	823.789	DINAS TRANSSNAKER
6	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	0,36	0,38	1.388.211	0,39	1.379.270	DKP
	Program Pembinaan Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan	Meningkatnya Jumlah Konsumsi Ikan	%	43,88	44,88	349.000	50,7	218.016	DKP
	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Ton	19.280	19.703	1.031.629	16.997	587.762	DKP
4	PENUNJANG URUSAN								
1	PERENCANAAN								
	Program Data, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan	%	100	100	1.831.000	100	1.391.109	BAPELITBANG
		Konsistensi RPJMD dan RKPD	%	100	100		100		BAPELITBANG
	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi	%	100	100	420.000	100	156.707	BAPELITBANG
	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya	Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemsosbud	%	100	100	425.000	100	220.044	BAPELITBANG
	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang IPW	%	100	100	443.000	100	205.189	BAPELITBANG
2	KEUANGAN								
	Program Peningkatan Pengelolaan perbendaharaan dan Kas daerah	Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	%	8	7	942.200	8,34	914.709	BKAD
	Program Peningkatan Pengelolaan Akutansi	Meningkatnya Pengelolaan Akutansi (Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Perda Pertanggung jawaban)	%	95	95	713.000	95	649.598	BKAD
	Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran	Meningkatnya pengelolaan Anggaran	%	95	95	1.879.290	95	2.065.076	BKAD
	Program Peningkatan Manajemen Aset Daerah	Cakupan Manajemen Aset Daerah	%	60	65	372.400	73,91	392.829	BKAD
	Program peningkatan retribusi dan pendapatan daerah lain-lain	Meningkatnya retribusi dan pendapatan daerah lain-lain	%	3,47	3,81	200.000	4,43	327.375	BAPENDA
	Program peningkatan pajak daerah	Meningkatnya pajak daerah	%	3,47	3,81	525.000	4,43	390.150	BAPENDA
	Program peningkatan pajak bumi dan bangunan	Meningkatnya pajak bumi dan bangunan	%	3,47	3,81	500.000	4,43	293.799	BAPENDA
	Program pembukuan, pelaporan dan penyuluhan PAD	Tertatanya pembukuan, pelaporan dan terlaksananya penyuluhan PAD	OPD	13 OPD	13 OPD	340.000	13 OPD	294.330	BAPENDA
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2020		Realisasi 2020		
					Kinerja	Rp (x000)	Kinerja	Rp (x000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengembangan dan Mutasi Aparatur	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	%	77	79	19.040.237	100	17.784.532	BKPP
	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	Cakupan Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur	%	15	16	1.896.307	100	1.084.800	BKPP
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
	Program Kelitbangan	Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan	Jenis	2	3	345.000	2	124.968	BAPELITBANG
5	PENGAWASAN								
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Menurunnya Jumlah temuan hasil pemeriksaan	Temuan	13 Temuan BPK	0 Temuan BPK	2.296.000	10 Temuan BPK	1.601.084	INSPEKTORAT
6	SEKRETARIAT DEWAN								
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	%	100	100	10.849.907	100	10.571.487	SETWAN
7	SEKRETARIAT DAERAH								
	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	100	6.789.424	100	13.366.501	BAG. UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	3.304.111	100	2.385.204	BAG. ADM PEMKESRA
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Penataan Produk Hukum Daerah	%	100	100	827.162	100	597.999	BAG. HUKUM DAN PERLUNG-UNDANG
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya pelayanan administrasi perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam	%	100	100	954.040	100	837.292	BAG. EKBANG DAN SDA
	Program Peningkatan Layanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya layanan administrasi pengadaan barang dan jasa	%	100	100	933.609	100	510.083	BAG. PBJ
	Peningkatan Pembinaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	%	100	100	765.000	100	393.119	BAG. ORTA
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	%	100	100	1.688.820	100	1.501.417	10 KECAMATAN
	Program Pembangunan dan pemberdayaan kelurahan	Cakupan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan	%	100	100	8.661.268	100	13.400.000	5 KECAMATAN
	Program Pembinaan KORPRI	Meningkatnya Pembinaan Korpri	%	100	100	242.850	100	120.404	SEKRETARIAT KORPRI
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	%	100	100	26.235.115	100	36.076.311	45 OPD
	<b>JUMLAH</b>					<b>353.987.121</b>		<b>327.702.925</b>	

**Tabel. 7.3**  
**Indikasi Rencana Rrogram Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun 2021-2024 Setelah Perubahan**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>1</b>	<b>NON URUSAN</b>													
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	342.464.448	100	358.722.768	100	358.749.345	100	367.718.079	100	1.427.654.640	46 OPD
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	%	100		100		100		100		100		
	<b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
<b>1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>													
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase partisipasi anak usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini	%	60,34	47.903.522	63,07	54.761.943	63,54	54.761.943	63,99	55.000.000	63,99	212.427.408	DINAS PKO
		Persentase partisipasi anak usia 7-18 tahun dalam Pendidikan Kesetaraan	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase partisipasi anak usia 7-15 tahun dalam Pendidikan Dasar	%	99,93		99,93		99,93		99,93		99,93		
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Progres Pelaksanaan Sinkronisasi Dapodik	%	84,57	189.650	89,53	175.000	94,49	177.000	99,45	179.000	99,45	720.650	DINAS PKO
<b>2</b>	<b>KESEHATAN</b>													
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	%	23,48	88.097.827	20	109.810.654	18	72.500.000	16	79.810.654	16	350.219.135	DINAS KESEHATAN
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100		100		100		100		100		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100		100		100		100		100		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100		100		100		100		100		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	%	100		100		100		100		100		
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (7-15 Tahun)	%	100		100		100		100		100		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp (x000)			
				Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15-59 Tahun)	%	100		100		100		100		100				
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (60 Tahun ke atas )	%	100		100		100		100		100				
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100		100		100		100		100				
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100		100		100		100		100				
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100		100		100		100		100				
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	%	100		100		100		100		100				
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	100		100		100		100		100				
		Meningkatnya Persentase Rumah Tangga ber PHBS	%	60		65		70		75		75				
		Meningkatnya Desa UCI ( <i>Universal Child Immunization</i> )	%	30		42		46		50		50				
		Meningkatnya Jumlah Desa Stop BABS	Desa	50		60		70		90		90				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Sertifikat Kompetensi	%	8,58	7.040.395	8,66	4.367.920	8,83	4.368.000	9,00	4.370.000	9	20.146.315,00	DINAS KESEHATAN		
		Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk	per 100.000 Penduduk	35		40		45		50		50				
		Rasio Tenaga Paramedis per 100.000 Penduduk	per 100.000 Penduduk	352,66		349,07		350,56		351,93		351,93				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Persentase Posbindu Aktif	%	100,00	92.400	100,00	316.848	100,00	318.000	100,00	320.000	100	1.047.248	DINAS KESEHATAN		
		Meningkatnya Persentase Pelayanan Posyandu	%	100		100		100		100		100				
<b>3</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>															
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya jaringan irigasi kondisi baik	%	63,32	19.154.422	64,80	4.428.137	66,17	4.500.000	67,44	4.550.000	67,44	32.632.559	DINAS PUPR		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Meningkatnya Pembangunan /Rehabilitasi Embung/Bangunan Air lainnya	Unit	247		250		253		256		256		
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak	%	79,29	4.810.336	100	9.650.000	100	3.250.000	100	3.300.000	100	21.010.336	DINAS PUPR
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan	Unit	3	1.818.628	6	745.149	9,00	745.149	12	750.000	12,00	4.058.926	DINAS PUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	79,36	1.453.294	100	6.395.030	100	1.400.000	100	2.000.000	100	11.248.324	DINAS PUPR
	Program Pengembangan Permukiman	Meningkatnya Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	%	20,54	350.000	26,14	100.000	31,74	105.000	37,34	110.000	37,34	665.000	DINAS PUPR
	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya penataan dan pengendalian bangunan	%	0,0084	270.000	0,0094	196.441	0,0103	198.000	0,0115	200.000	0,01	864.441	DINAS PUPR
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungan	%	100	100.000	100	50.000	100	51.000	100	52.020	100	253.020	DINAS PUPR
	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	47,42	44.240.562	51,77	112.337.549	56,12	32.800.000	60,46	46.574.311	60,46	235.952.422	DINAS PUPR
		Meningkatnya Panjang Jalan pariwisata terbangun	KM			15		30		45		45		
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pelaksana konstruksi yang memiliki sertifikat ketrampilan	%	15,45	75.000	18,85	75.000	22,25	76.000	25,65	77.000	25,65	303.000	DINAS PUPR
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Perencanaan Penataan Ruang	%	33,33	32.832	33,33	700.000	50,00	705.000	66,67	710.000	66,67	2.147.832	DINAS PUPR
<b>4</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		%											
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	%	100	195.200	100	95.200	100	96.000	100	97.000	100	483.400	DINAS PKPLH
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	82,87	11.637.871	88,76	20.544.381	94,42	7.900.000	100,00	20.000.000	100,00	60.082.252	DINAS PKPLH
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Utilitas Umum	Unit	-	89.487	20	7.680.000	30	182.000	40	184.000	40	8.135.487	DINAS PKPLH
<b>5</b>	<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN</b>													
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan Hukum Perda/Perkada	%	14	751.579	14	889.869	14	890.000	14	895.000	14	3.426.448	SATPOL PP

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Cakupan perlindungan masyarakat	%	80		80		80		80		80		
		Cakupan Ketertiban dan Ketentraman Umum	%	27		27		27		27		27		
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya penanggulangan kebakaran	%	100	20.000	100	20.000	100	30.000	100	35.000	100	105.000	SATPOL PP
	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	50	610.114	50	490.011	50	500.000	50	550.000	200	2.150.125	BPBD
		Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Warga	2.500		2.500		2.500		2.500		10.000		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Warga	100		150		150		150		550		
		Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	10		10		15		20		30		
6	<b>SOSIAL</b>													
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Pelayanan dan Penanganan Fakir Miskin	%	98,3	536.168	98,3	566.400	98,3	783.874	98,3	886.550	98,3	2.772.992	DINAS SOSIAL
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan selama masa tanggap darurat	%	100	191.553	100	170.000	100	172.000	100	174.000	100	707.553	DINAS SOSIAL
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase kebutuhan dasar disabilitas Luar Panti yang terpenuhi	%	33,0	351.450	49,12	535.324	68,76	351.450	78,59	351.450	78,59	1.589.674	DINAS SOSIAL
		Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi	%	80,0		100		100		100		100,0		DINAS SOSIAL
		Persentase Lansia tertinggal yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	2,17		10,90		19,56		23,90		23,90		
	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial dan peran serta kepemudaan	%	100	40.000	100	60.000	100	62.000	100	64.000	100	226.000	DINAS SOSIAL

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
<b>1</b>	<b>TENAGA KERJA</b>													
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	%	38	121.129	56,25	660.000	74,11	660.000	100,00	700.000	100,00	2.141.129	DINAS TRANSAKER
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	-	-	100	30.000	100	31.000	100	32.000	100	93.000	DINAS TRANSAKER
	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja	%	2	40.911	2	50.000	3	51.000	3	52.000	3	193.911	DINAS TRANSAKER
<b>2</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>													
	Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	%	67	141.851	67	172.108	67	174.000	67	175.000	67	662.959	DINAS P3AP2KB
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	%	0,09	60.801	0,08	60.801	0,07	65.000	0,06	68.000	0,06	254.602	DINAS P3AP2KB
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga	%	22	45.000	24	81.000	27	83.000	29	84.000	29	293.000	DINAS P3AP2KB
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Fasilitas Forum Anak	%	3,57	56.692	3,64	57.343	3,71	59.000	3,79	60.000	3,79	233.035	DINAS P3AP2KB
		Cakupan Desa Layak Anak	%	100		100		100		100		100		
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak (0-15 Tahun)	%	100	65.651	100,00	101.000	100,00	103.000	100,00	105.000	100,00	374.651	DINAS P3AP2KB
<b>3</b>	<b>PANGAN</b>													
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Informasi harga pangan pokok dan cadangan pangan	Dokumen	2	383.213	2	372.500	2	373.000	2	375.000	8	1.503.713	DINAS PANGAN
		Tingkat konsumsi energi dan protein terhadap standar konsumsi energi dan protein	%	61,10		67,90		74,70		81,60		82		
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase ketersediaan terhadap konsumsi pangan	%	176	70.000	177	70.000	172	71.000	170	72.000	170	283.000	DINAS PANGAN
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman di konsumsi	Sampel Komoditi	45	67.699	55	82.699	65	84.000	75	85.000	75	319.398	DINAS PANGAN
<b>4</b>	<b>PERTANAHAN</b>													
	Program Penatagunaan Tanah	Luas lahan bersertifikat	Hektar	92,00	655.000	138,00	325.000	184,00	326.000	230,00	327.000	230,00	1.633.000,00	DINAS PKPLH

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>5</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>													
	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengelolaan sampah	%	24,00	679.496	26,00	670.000	27	673.000	30	675.000	30	2.697.496	DINAS PKPLH
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Perencanaan Pengendalian Lingkungan Hidup	Dokumen	2,00	320.000	4	461.104	6	462.000	8	464.000	8	1.707.104	DINAS PKPLH
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	%	19,07	75.000	19,10	75.000	19,2	76.000	19,4	77.000	19,4	303.000	DINAS PKPLH
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran air	Poin	1,62	247.445	1,52	247.445	1,42	248.000	1,42	250.000	1,42	992.890	DINAS PKPLH
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3	Kg	8.097	-	9.797	19.998	11.855	21.000	14.345	21.500	14.345	62.498	DINAS PKPLH
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100,0	46.000	100,0	46.000	100,0	47.000	100,0	48.000	100,0	187.000	DINAS PKPLH
<b>6</b>	<b>ADM. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>													
	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	88,92	1.526.355	92,61	893.429	96,31	895.000	100,00	897.000	100	4.211.784	DINAS DUKCAPIL
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	%	48,84	775.512	65,89	1.239.807	82,95	1.240.000	100,00	1.245.000	100	4.500.319	DINAS DUKCAPIL
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data	%	86	701.162	86	843.962	90	845.000	100	850.000	100	3.240.124	DINAS DUKCAPIL
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya Profil Kependudukan	Dokumen	2	35.496	3	35.496	4	37.000	5	38.000	5	145.992	DINAS DUKCAPIL
<b>7</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>													
	Program Penataan Desa	Meningkatnya Penataan Desa	Desa	-	100.000	20	18.355.781	20	18.355.781	-	18.355.781	40	36.711.562	DINAS PMD
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan Pemerintahan Desa	%	100	1.066.316	100	404.316	100	406.000	100	410.000	100	2.286.632	DINAS PMD
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%	100	803.640	100	433.640	100	435.000	100	440.000	100	2.112.280	DINAS PMD
		Meningkatnya PKK Aktif	%	100		100		100		100		100		
		Meningkatnya Posyandu Aktif	%	100		100		100		100		100		
		Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan dalam berinovasi	Kelompok	-		20		20		20		20		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>8</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>													
	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Pengendalian Penduduk	%	100,0	638.004	100,0	50.000	100,0	51.000	100,0	52.020	100,00	791.024	DP3AP2KB
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio akseptor KB	%	86,44	3.859.562	86,44	3.599.302	86,30	3.599.302	86,30	4.109.000	86,30	15.167.166	DP3AP2KB
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya keluarga sejahtera	%	22	1.152.640	24	1.358.233	27	1.237.000	29	1.500.000	29	5.247.873	DP3AP2KB
<b>9</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>													
	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya pelayanan kepelabuhanan	%	30,89	10.000	38,61	10.000	46,33	10.500,00	57,92	11.000,00	57,92	41.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Prasarana/Fasilitas Layanan Perhubungan Darat	%	40,44	25.000	44,44	162.607	48,44	163.000,00	52,44	164.000,00	52,44	514.607,00	DINAS PERHUBUNGAN
<b>10</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>													
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi	Konten	15	46.000	35	57.546	50	59.000	75	60.000	75	222.546	DISKOMINFO
	Program Aplikasi Informatika	Meningkatnya layanan informatika daerah	%	25	328.000	37,5	250.040	50	252.000	62,50	253.000	62,50	1.083.040	DISKOMINFO
<b>11</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>													
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang melaksanakan RAT	Rp	90.051	30.000			93.689	31.000	95.563	32.000	95.563	93.000	DINAS KOPERASI, UKM,
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Jumlah KSP/USP Koperasi yang sehat	%	-	-	22	60.922	25	63.000	27	65.000	27	188.922	DINAS KOPERASI, UKM,
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	13	120.000	15	1.000.000	18	1.000.000	20	2.000.000	20	4.120.000	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG
		Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Unit	910		910		910		910		910		
		Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah yang produksi OODARO	Unit	120		140		160		180		180		
<b>12</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>													
	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Investasi berskala Nasional (PMA dan PMDN)	Perusahaan	66	36.030	70	40.000	75	41.000	81	42.000	81	159.030	DPMPPTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Ketaatan Berinvestasi	%	42	392.223	42	392.223	43	395.000	44	405.000	171	1.584.446	DPMPPTSP



NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	%	60	122.558	70	153.999	80	155.000	90	156.000	90	587.557	DPMPSTP
13	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>													
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	71,43	375.000	71,43	619.200	71,43	620.000	71,43	622.000	71,43	2.236.200	DINAS PKO
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya prestasi olah raga	Atlet	78	200.000	78	4.570.000	84	1.000.000	86	200.000	86,00	5.970.000	DINAS PKO
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan kapasitas kepramukaan	Orang	1.600	75.000	1.600	75.000	1.600	76.000	1.600	77.000	1.600	303.000	DINAS PKO
14	<b>STATISTIK</b>													
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya pengelolaan/pemanfaatan Rote Satu Data	%	21,74	80.000	43,48	56.000	54,35	57.000	76,09	58.000	76,09	251.000	DISKOMINFO
15	<b>PERSANDIAN</b>													
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Informasi	%	10,00	54.998	23,08	104.964	69,23	106.000	84,62	107.000	84,62	372.962	DISKOMINFO
16	<b>KEBUDAYAAN</b>													
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya Kelestarian Kekayaan dan Keragaman Budaya Daerah	%	6,59	96.901	7,69	50.000	8,79	51.000	9,89	52.020	9,89	249.921	DISBUDPAR
	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah	%	20	84.530	40	241.426	60	244.000	80	246.000	80	815.956	DISBUDPAR
17	<b>PERPUSTAKAAN</b>													
	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya kunjungan Perpustakaan	Orang	1.400	319.759	1.600	238.978	1.700	240.000	1.800	242.000	6.500	1.040.737	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN
18	<b>KEARSIPAN</b>													
	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya pengelolaan Arsip secara elektronik	%	4	47.500	13	43.262	22	44.000	33	45.000	33	179.762	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya penyelamatan Arsip	Dokumen	1	49.500	2	10.930	3	12.000	4	16.000	4	88.430	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN
	<b>URUSAN PILIHAN</b>													
1	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>													
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Bina Kelompok Nelayan	%	0,42	615.000	0,45	2.186.801	0,47	2.186.801	0,49	3.000.000	0,49	7.988.602	DINAS PERIKANAN
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Ton	3.738		3.820		4.124		4.292		15.974	-	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	51.19	615.120	53.50	285.000	55.64	290.000	57.78	295.000	57.78	1.485.120	DINAS PERIKANAN
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi Perikanan Budidaya	Ton	17.448	3.346.642	17.979	1.274.948	18.539	1.500.000	19.149	1.600.000	73.115	7.721.590	DINAS PERIKANAN
2	<b>PARIWISATA</b>													
	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Orang	9.000	419.232	15.000	1.472.887	21.000	750.000	30.000	1.000.000	30.000	3.642.119	DISBUDPAR
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Destinasi Pariwisata	Destinasi	6	84.543	11	10.242.538	16	3.000.000	21	5.000.000	21	18.327.081	DISBUDPAR
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya pelaku jasa usaha pariwisata yang ber CHSE	%	28,41	220.075	56,82	268.622	68,18	270.000	90,91	272.000	90,91	1.030.697	DISBUDPAR
		Meningkatnya SDM Kepariwisataan	%	4,55		4,55		4,55		4,55		4,55		
3	<b>PERTANIAN</b>													
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan Peningkatan Sarana Pertanian	%	13,04	3.059.248	17,86	17.701.090	17,86	3.000.000	17,86	3.100.000	65,11	26.860.338	DINAS PERTANIAN
		Meningkatnya Produktifitas Tanaman Padi	%	3,85		4,24		4,66		5,12		5,12		
		Meningkatnya Produktifitas Tanaman jagung	%	2,80		2,81		2,83		2,84		2,84		
		Meningkatnya Produksi gula lontar	Ton	948,79		949,74		950,69		951,64		951,64		
		Meningkatnya luas areal Tanaman kelor	Ha	18,00		-		20		21		21		
		Produktivitas Tanaman semangka	%	16,82		17,67		18,55		19,48		19,48		
		Produktivitas Tanaman bawang merah	%	7,33		7,70		8,08		8,48		15,79		
		Produktivitas Tanaman cabai rawit	%	5,09		5,35		5,61		5,90		5,90		
		Meningkatnya luas areal pertanian sehat / organik	Ha	-		-		5		5		10		
		Peningkatan sarana peternakan	Unit	11	2.278.000	12	2.222.730	13	2.225.000	14	2.230.000	50	8.955.730	
		Meningkatnya produksi sapi	Ekor	68.765		70.141		71.543		72.974		283.423		-
		Meningkatnya produksi kerbau	Ekor	19.059		19.154		19.250		19.346		76.809		
		Meningkatnya produksi kuda	Ekor	8.570		8.741		8.916		9.094		35.321		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Meningkatnya produksi babi	Ekor	52.368		53.939		55.557		57.224		219.088	-	
		Meningkatnya produksi domba	Ekor	26.283		27.071		27.883		28.720		109.957		
		Meningkatnya produksi kambing	Ekor	53.580		55.187		56.843		58.548		224.158		
		Meningkatnya produksi ayam pedaging	Ekor	200		210		221		232		863	-	
		Produksi peternakan IB (Inseminasi Buatan)	Ekor	100		105		110		116		431	-	
		Meningkatnya produksi telur	Butir	27.540		30.600		32.130		33.737		124.007	-	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya prasarana pertanian	Unit	2	1.201.800	6	17.148.913	6	2.500.000	6	2.550.000	20	23.400.713	DINAS PERTANIAN
		Meningkatnya luas lahan dengan dua musim tanam	Ha	24.804		26.044		27.346		28.714		28.714		
		Menurunnya luas lahan gagal panen karena kekeringan	Ha	1.463		1.390		1.320		1.254		1.254		
		Meningkatnya prasarana Peternakan	Unit	8	70.000	8		8		8		32		DINAS PETERNAKAN
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan hama penyakit	%	50	85.966	50	50.000	50	51.000	50	52.000	50	238.966	DINAS PERTANIAN
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pengendalian terhadap penyakit menular ternak	%	6	752.000	9	852.000	12	853.000	15	855.000	15	3.312.000	DINAS PETERNAKAN
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya usaha peternakan berizin	Ekor	6.250	200.000	6.563	170.805	6.891	175.000	7.236	180.000	26.940	725.805	DINAS PETERNAKAN
		Meningkatnya pengiriman ternak ke luar daerah	Ekor	3.000		3.150		3.308		3.473		12.931		
	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya penyuluhan dan pembinaan kelompok tani	%	100	363.600	100	300.000	100	305.000	100	310.000	100	1.278.600	DINAS PERTANIAN
		Meningkatnya status kelompok tani	Kelompok	134		140		142		145		145		
		Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan	%	4	40.000	6	40.000	8	42.000	10	44.940	10	166.940	DINAS PETERNAKAN

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	<b>PERDAGANGAN</b>													
	Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Unit	-	-	2	75.000	2	76.000	2	77.000	6	228.000	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG
		Terfasilitasinya pemasaran komoditi dan produk pertanian	Komoditi	-		1		1		1		3		
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terkontrolnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dokumen	2	30.000	2	90.000	2	91.000	2	92.000	2	303.000	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase usaha yang melakukan pengujian	%	55,60	120.000	56,00	70.000	58,00	71.000	60,00	72.000	60,00	333.000	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG
5	<b>PERINDUSTRIAN</b>													
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	0,69	7.968.396	1,08	5.778.724	1,81	5.957.076	3,62	8.100.000	3,62	27.804.196	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG
		Meningkatnya industri rumah tangga yang mendukung pariwisata	%	2		4		6		8		8		
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya Produk Olahan IKM yang memiliki label dan kemasan berstandar	%	1,78	150.000	2,23	99.999	2,36	102.000	2,55	105.000	2,55	456.999	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG
6	<b>TRANSMIGRASI</b>													
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi	Dokumen	-	-	-	-	1	450.000	1	475.000	2	925.000,00	DINAS TRANSSNAKER
		Perencanaan Pembangunan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata	Dokumen	-	-	-	-	1	235.000	1	240.000,00	2	475.000,00	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya pembangunan permukiman transmigrasi (Rumah dan Sarana Prasarana Pendukung)	Paket	1	249.256	5	245.000	5	246.000	5	247.000	16	987.256,00	DINAS TRANSSNAKER

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pembangunan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata	Rumah	-		5		5		5		16		
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Meningkatkan Taraf hidup dan Perekonomian Transmigran	%	64	223.805	68	245.000	71	246.000	72	247.000	72	961.805,00	TRANSNAKER
	<b>PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
1	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>													
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	3.589.778	100	4.015.491	100	4.017.000	100	4.018.000	100	15.640.269	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA
		Meningkatnya Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	100	925.264	100	894.998	100	896.000	100	897.000	100	3.613.262	
		Cakupan Penataan Produk Hukum Daerah	%	100	448.440	100	432.501	100	433.000	100	434.000	100	1.747.941	BAGIAN HUKUM
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya pelayanan administrasi perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam	%	100	1.062.885	100	639.886	100	640.000	100	641.000	100	2.983.771	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Meningkatnya Layanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	60	534.717	70	496.639	75	500.000	80	505.000	80	2.036.356	BAGIAN PBJ
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penataan organisasi	%	100	429.827	100	356.500	100	360.000	100	370.000	100	1.516.327	BAGIAN ORGANISASI
		Cakupan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	6.257.242	100	6.635.045	100	6.650.000	100	10.000.000	100	29.542.287	BAGIAN UMUM
2	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>													
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	%	100	7.966.125	100	6.624.822	100	6.625.000	100	6.650.000	100	27.865.947	SETWAN
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
1	<b>PERENCANAAN</b>													
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan	%	100	1.654.991	100	1.094.059	100	1.890.000	100	1.990.000	100	6.629.050	BAPELITBANG
		Konsistensi RPJMD dan RKPD	%											
		Konsistensi RKPD dan APBD	%											

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	701.807	100	640.981	100	660.000	100	680.000	100	2.682.788	BAPELITBANG
		Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100		100		100		100		100		
		Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100		100		100		100		100		
2	<b>KEUANGAN</b>													
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	%	6	179.979.782	5	176.152.747	4	183.000.000	3	177.500.000	3	716.632.529	BKA
		Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu	%	100		100		100		100		100		
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menurunnya temuan Aset Daerah	Temuan	6	588.263	4	492.000	4	493.000	4	494.000	4	2.067.263	BKA
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya retribusi dan pendapatan daerah lain-lain	%	5,36	1.096.972	5,36	621.678	5,36	625.000	5,36	650.000	5,36	2.993.650,00	BAPENDA
		Meningkatnya pajak daerah	%	73,51		73,51		73,51		73,51		73,51		
		Meningkatnya pajak bumi dan bangunan	%	21,13		21,13		21,13		21,13		21,13		
		Tertatanya pembukuan dan pelaporan PAD	OPD	1		1		1		1		1		
3	<b>KEPEGAWAIAN</b>													
	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pelayanan Kepegawaian	%	100	1.938.778	100	2.024.432	100	2.025.000	100	2.026.000	100	8.014.210	BKPP
		Cakupan Pembinaan Korpri	%	100	205.000	100	205.000	100	206.000	100	207.000	100	823.000	SEKRETARIAT KORPRI
4	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>													
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur	%	19	1.891.852	20	420.350	21	421.000	22	422.000	22	3.155.202	BKPP
5	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>													
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Kelitbangan Yang Dilaksanakan Daerah	Jenis	6	390.514	9	521.580	12	525.000	15	550.000	15	1.987.094	BAPELITBANG
		Meningkatnya Inovasi Daerah	%	100		100		100		100		100		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	Target	Rp (x000)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	<b>PENGLOLAAN PERBATASAN DAERAH</b>													
	Program Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya perencanaan Pengelolaan perbatasan	Dokumen	2	35.651	3	33.611	4	34.000	5	35.000	5	138.262	BAPELITBANG
	<b>PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
1	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>													
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya Jumlah temuan hasil pemeriksaan	Temuan	0	1.374.696	7	973.133	5	974.000	3	975.000	3	4.296.829	INSPEKTORAT
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Integritas Pencegahan Korupsi	%	100	4.693	65	7.644	70	8.000	75	8.200	75	28.537	INSPEKTORAT
	<b>KEWILAYAHAN</b>													
1	<b>KECAMATAN</b>													
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	220.000	100	358.735	100	360.000	100	361.000	100	1.299.735	11 KECAMATAN
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	6.804.309	100	6.667.605	100	6.670.000	100	6.675.000	100	26.816.914	11 KECAMATAN
	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	%	100	595.498	100	687.180	100	688.000	100	690.000	100	2.660.678	11 KECAMATAN
	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>													
1	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>													
620.608	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Cakupan Pelayanan Administrasi Partai Politik	%	100	630.608	100	620.608	100	621.000	100	622.000	100	2.494.216	KANTOR KESBANGPOL
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100	50.000	100	50.000	100	51.000	100	52.000	100	203.000	KANTOR KESBANGPOL
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan , Ekonomi , Sosial dan Budaya	%	67	263.631	100	297.938	100	299.000	100	300.000	100	1.160.569	KANTOR KESBANGPOL
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	%	100	117.000	100	111.345	100	112.000	100	1.130.000	100	1.470.345	KANTOR KESBANGPOL
<b>JUMLAH</b>					<b>830.595.316</b>		<b>1.005.713.250</b>		<b>825.404.221</b>		<b>874.404.525</b>		<b>3.517.591.531</b>	

## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator *outcome* dan *impact* dari pelaksanaan program pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dalam kurun waktu 2019 -2024.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dari penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

IKU yang termuat dalam RPJMD adalah IKU Kepala Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan Kepala Daerah secara umum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping pemenuhan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Sedangkan IKD merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) disajikan dalam tabel berikut :



**Tabel 8.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**  
**Kabupaten Rote Ndao**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing</b>									
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	64,16	62,39	65,62	67,08	68,54	70,00	70,00
2	Harapan Lama sekolah	Tahun	13,81	13,18	14,11	14,41	14,71	15,00	15,00
3	Kasus Kematian Ibu	Kasus		5	10	0	0	0	0
4	Prevalensi Stunting	%	40,00	25,83	23,48	20,00	18,00	16,00	16,00
5	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Orang		91,00	77	<35	<35	<35	<35
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	91,53	84,64	92,03	92,53	93,03	93,53	93,53
7	Laju pertumbuhan Penduduk	%	3,60	0,16	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>Misi 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata Yang Didukung oleh Pertanian dan Perikanan</b>									
8	PDRB Per Kapita ADHB	Ribu Rupiah	18.544	22.062	23.405	24.705	25.959	27.172	27.172
9	Kemiskinan Eskترم	%		16,14	15,00	10,41	5,41	0	0
10	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	70,00	56,40	67,30	78,20	89,10	100,00	100,00
11	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Miliar Rupiah		1.510	1.697	1.806	1.916	2.026	2.026
12	Produksi Sektor Pertanian	Ton	147.592	152.058	153.364	154.682	156.013	157.356	157.356
13	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	7,79	6,67	8,19	8,59	8,99	9,39	9,39
14	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	5.000	3.606	9.000	15.000	21.000	30.000	30.000
<b>Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan</b>									
15	Cakupan kualitas infrastruktur	%	65,49	66,89	69,78	80,14	82,40	84,59	84,59
16	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	44,29	43,48	47,42	51,77	56,12	60,46	60,46
17	Rasio Jaringan Irigasi	%	59,12	60,19	62,97	65,24	67,50	69,76	69,76
18	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	4.205	4.262	5.589	7.539	9.414	11.264	11.264
19	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	%	17,56	17,56	24,00	26,00	27,00	30,00	30,00
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	-	-	70,58	70,98	71,39	71,80	71,80
21	Emisi Gas Rumah Kaca	tCO2eq	460.662	460.662	460.662	460.662	460.662	460.662	460.662
22	Ketaatan terhadap RTRW	%	96,80	96,80	97,02	97,05	97,05	97,05	97,05
23	Desa Tangguh Bencana	Desa	10	10	10	15	20	30	30
<b>Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima</b>									
24	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	Predikat	CC	CC	CC	CC	B	A	A
25	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	N/A	N/A	65	69	71	71	71
26	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Poin	50,00	78,74	79	80	85	90	90

**TABEL 8.2**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**  
**TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>									
<b>A.</b>	<b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>								
1	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>								
1.1	Pertumbuhan PDRB	%	6,35	0,30	5,64	5,84	6,04	6,70	6,70
1.2	Laju Inflasi	%	2,5	-1,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
1.3	PDRB per Kapita ADHB	Ribu Rupiah	18.544	22.062	23.405	24.705	25.959	27.172	27.172
1.4	Indeks Gini	Poin		0,40	0,40 - 0,39	0,39 - 0,38	0,38 - 0,36	0,36 - 0,34	0,36 - 0,34
1.5	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	%	75,35	72,46	72,87	73,28	73,69	76,5-76	76,5-76
1.6	Persentase Penduduk Miskin	%	24,65	27,54	27,13	26,72	26,31	23,5-24	23,5-24
1.7	Indeks Kedalaman Kemiskinan	P1	3,89	5,36	3,32	2,75	2,18	1,63	1,63
1.8	Indeks Keparahan Kemiskinan	P2	0,84	1,35	0,73	0,62	0,51	0,40	0,40
1.9	Persentase kemiskinan Ekstrim	%		16,14	15,00	10,41	5,41	0	0
1.10	Jumlah kematian Ibu	Kasus		5	10	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Kesejahteraan Sosial</b>								
2.	<b>Ketenagakerjaan</b>								
2.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77,80	73,07	78,06	78,31	78,55	78,56	78,56
2.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,76	4,90	3,47	0,94	0,83	0,80	0,80
3	<b>Kinerja Pendapatan</b>								
3.1	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	3,81	4,43	4,13	4,16	4,20	4,25	4,25
4	<b>Pengelolaan Keuangan Daerah</b>								
4.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	<b>Pangan</b>								
5.1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	70,00	56,40	67,30	78,20	89,10	100,00	100,00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
6	<b>Pertanian</b>								
6.1	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Miliar Rupiah		1.510	1.697	1.806	1.916	2.026	2.026
6.2	Produksi Sektor Pertanian	Ton	147.592	152.058	153.364	154.682	156.013	157.356	157.356
6.3	Nilai Tukar Petani	Poin	105,8	101,41	101,61	101,92	102,33	102,84	102,84
6.4	Produksi Peternakan	Ekor	317.286	320.594	330.928	341.652	352.782	364.336	364.336
6.5	Produksi Kelautan dan Perikanan	Ton	19.667	18.838	21.186	21.799	22.663	23.441	23.441
7	<b>Pariwisata</b>								
7.1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	5.000	3.606	9.000	15000	21.000	30.000	78.606
7.2	Rata-rata lama tinggal	Hari	3	3	4	4	4	4	4
7.3	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Juta Rupiah		5.968	6.542	7.117	7.691	8.266	8.266
8	<b>Perdagangan</b>								
8.1	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	7,79	6,67	8,19	8,59	8,99	9,39	9,39
9	<b>Industri</b>								
9.1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	1,35	1,35	1,41	1,47	1,53	1,59	1,59
<b>II. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
<b>A. URUSAN WAJIB YANG BERAKITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>1. PENDIDIKAN</b>									
1.1	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100,00	60,05	60,34	63,07	63,54	63,99	63,99
1.2	Angka Partisipasi Kasar	%	104,01	104,01	100	100	100	100	100,00
1.3	Angka partisipasi murni	%	83,64	83,64	84,98	86,22	87,50	88,79	88,79
1.3.1	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ Paket A	%	90,28	90,28	90,96	91,43	92,00	92,57	92,57
1.3.2	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	%	77,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	85,00
1.4	Persentase penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100,00	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93
1.5	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6	Angka putus sekolah	Orang	27	27	15	3	1	0	0
1.6.1	Angka putus sekolah (APS) SD/ MI	Orang	20	20	10	0	0	0	0

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.2	Angka putus sekolah (APS) SMP/ MTs	Orang	7	7	5	3	1	0	0
1.7	Fasilitas Pendidikan								
1.7.1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	47,95	47,95	58,22	68,49	78,88	80,78	80,78
1.7.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	57,14	57,14	69,06	80,95	83,70	85,00	85,00
1.8	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	64,87	64,87	66,41	67,43	68,77	69,53	69,53
1.9	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (/10.000)	%	46,95	46,95	47,90	48,84	49,82	50,80	50,80
1.10	Rasio guru/murid perkelas rata-rata sekolah dasar	%	41,96	41,96	42,80	43,66	44,53	45,00	45,00
1.11	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	78,50	78,50	79,20	81,25	83,00	97,00	97,00
1.12	Persentase Kompetensi Guru	%	52,63	51,24	54,09	54,82	55,56	56,29	56,29
1.13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	83,19	83,19	84,86	86,55	88,28	90,00	90,00
<b>2</b>	<b>KESEHATAN</b>								
2.1	Balita Gizi Kurang	%	24,0	9,70	9,50	9,30	9,10	8,90	8,90
2.2	Jumlah kematian balita	Kasus	24	77	50	48	45	40	40
2.3	Jumlah kematian neonatal	Kasus	11	43	30	0	0	0	0
2.4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 100.000 Penduduk	27,0	27	35	40	45	50	50
2.5	Rasio daya tampung Rumah Sakit / Jumlah penduduk	Per 1.000 Penduduk	1	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
2.6	Impelentasi KTR pada 9 tempat (Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, dll)	Tempat		4	5	7	9	11	11
2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	89	56	100	100	100	100	100
2.8	Cakupan RT ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	55	62	60	65	70	75	75
2.9	Cakupan desa/kelurahan <i>universal child immunization (UCI)</i>	%	40	24	30	42	46	50	50
2.10	Tingkat kematian karena tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	3	6	0	0	0	0	0

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
2.11	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Per 1000 penduduk		3	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>								
<b>3.1</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>								
3.1.1	Panjang Jalan Kabupaten terbangun	Km	203,60	199,96	218,04	238,04	258,04	278,04	278,04
3.1.2	Jalan Strategis Desa Terbangun	Km	85,42	85,42	98,62	113,62	128,62	143,62	143,62
3.1.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	71,56	75,76	79,36	100	100	100	100
3.1.4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	59,12	61,31	63,32	64,80	66,17	67,44	67,44
3.1.5	Pembangunan dan Rehabilitasi Embung, Bendung/Bangunan Air lainnya	Unit	244	246	247	250	253	256	256
3.1.6	Persentase rumah tangga berakses air minum layak	%	78,02	76,99	79,29	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.7	Tempat Pemakaman Umum yang tertata	Lokasi	2	2	2	3	3	3	3
<b>3.2</b>	<b>Penataan Ruang</b>								
3.2.1	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah/kawasan perkotaan	%	19,10	19,10	19,24	19,84	20,00	20,00	20,00
3.2.2	Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan	%	0,0073	0,0073	0,0084	0,0094	0,0103	0,0115	0,0115
3.2.3	Kesesuaian antara perencanaan peruntukan ruang dan pemanfaatan ruang	%	96,80	96,80	97,02	97,05	97,05	97,50	97,50
<b>4</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	1.667	4.262	5.589	7.539	9.414	11.264	11.264
<b>5</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								
5.1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	%	0,75	0,75	0,72	0,71	0,69	0,68	0,68
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100	100	100	100	100	100
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kab/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
5.4	Tingkat waktu tanggap ( <i>respons time rate</i> ) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
5.5	Persentase penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100	100	100
5.6	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
5.7	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
5.8	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>6</b>	<b>SOSIAL</b>								
6.1	Persentase PMKS yang tertangani	%	65,38	65,38	65,38	65,38	65,38	65,38	65,38
6.2	Persentase keluarga fakir miskin yang diberdayakan	%	1,33	1,33	1,33	1,33	1,74	2,18	2,18
6.3	Cakupan peserta JKN/Jamkesda	Jiwa	78.004	78.847	80.127	89.789	89.789	89.789	89.789
6.4	Persentase Keluarga penerima manfaat yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	%	54,55	51,90	51,90	51,90	51,90	51,90	51,90
6.5	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	25,00	19,70	33,01	49,12	68,76	78,59	78,59
6.6	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	4,30	18,62	21,49	30,09	37,25	37,25
6.7	Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	10,90	2,17	10,90	19,56	23,90	23,90
6.8	Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	0	100	100	100	100	100
6.9	Persentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
6.10	Persentase desa yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS	%	100	97,48	100	100	100	100	100
<b>B.</b>	<b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
<b>1</b>	<b>TENAGA KERJA</b>								
1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77,80	73,07	78,06	78,31	78,55	78,56	78,56

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Perusahaan	25	50	55	60	65	70	70
1.3	Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	49	0	45	50	55	60	60
1.4	Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	29	36	46	71	101	136	136
1.5	Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	40	140	160	170	180	180	180
<b>2</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	3,5	4,69	4,0	4,5	4,7	4,7	4,7
2.3	Rasio KDRT	%	0,07	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
2.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	65,77	65,77	65,80	65,95	66,00	66,10	66,10
2.5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	91	91,20	93	95	97	100	100
2.6	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	85,50	90	95	97	100	100
2.8	Cakupan layanan pemulihan bagi anak perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>3</b>	<b>PANGAN</b>								
3.1	Ketersediaan pangan utama	%	51,94	37,28	37,46	37,65	37,83	38,02	38,02
3.3	Penanganan daerah rawan pangan	Desa	1	1	2	3	4	5	5
<b>4</b>	<b>PERTANAHAN</b>								
4.1	Luas lahan bersertifikat	Hektar	46	46	92	138	184	230	230
4.2	Realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	Ha		1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582
<b>5</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>								
5.1	Indeks kualitas air	Poin	0,68	50,00	62,08	62,18	62,28	62,38	62,38
5.2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	%	17,56	17,56	24	26	27	30	30
<b>6</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>								
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	91,28	91,28	93,40	94,27	95,76	100	100
6.2	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun	%	82,33	82,33	87,54	93,34	98,86	100	100
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	%	30,40	30,40	31,63	32,74	34,17	35,00	35,00
6.4	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	%	100	100,00	100	100	100	100	100
6.5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	91,28	91,28	93,40	94,27	95,76	100	100
6.6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>7</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>								
7.1	Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
7.2	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
7.3	Persentase Desa Siaga Aktif	%	46,43	46,43	48	50	52	54	54
7.4	Realisasi APBDes	%	100,0	98,99	100	100	100	100	100
7.5	Persentase Bumdes Berkembang	%	100,0	66,00	66	100	100	100	100



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
8	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>								
8.1	Total fertility rate (TFR)		3,24	3,60	3,50	3,50	3,40	3,40	3,40
8.2	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	100	100	100	100	100	100	100
8.3	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100
8.4	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/ Perkada	1	1	1	1	1	1	1
8.5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100
8.6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerja sama	2	2	2	2	2	2	2
8.7	Rasio akseptor KB	%	55,65	55,65	55,70	56	58	58	58
8.8	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49	%	46,09	46,09	47	47	47	48	48
8.9	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19)	%	17	17	18	18	18	18	18
8.10	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
8.11	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	%	18,53	7,15	7,00	6,75	6,50	6,50	6,50
8.12	Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	orang per desa/kel	1	1	1	1	1	1	1

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>9</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>								
9.1	Jumlah uji KIR angkutan umum	Kendaraan	190	297	487	677	867	1.057	1.057
9.2	Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan pada ruas jalan kabupaten	%	44,44	40,44	40,44	44,44	48,44	52,44	52,44
<b>10</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
10.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	1.18	1,18	1,34	1,50	1,66	1,82	1,82
10.2	Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah	%	2.17	2,17	2,17	100	100	100	100
10.3	Layanan administrasi Pemerintah (G2G) yang diimplementasikan	%	11.59	11,59	11,59	50,72	79,71	100	100
<b>11</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>								
11.1	Persentase koperasi aktif	%	80,10	85,15	100	100	100	100	100
11.2	Peningkatan Jumlah UMKM	%	77,09	76,79	100	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>								
12.1	Meningkatnya investasi berskala nasional	PMDN/ PMA	25	54	66	70	75	81	81
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	120.000.000.000	15.405.680.000	160.000.000.000	165.000.000.000	170.000.000.000	175.000.000.000	175.000.000.000
12.3	Realisasi investasi PMDN/PMA	Rupiah	120.000.000.000	62.590.685.000	100.000.000.000	100.000.000.000	105.000.000.000	110.000.000.000	110.000.000.000
12.4	Persentase Bangunan/Usaha Berijin	%	47,87	50	60	70	80	90	90
<b>13</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>								
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
13.2	Cakupan pembinaan atlet muda	%	36,64	36,64	38,74	41,61	44,45	44,45	44,45
<b>14</b>	<b>STATISTIK</b>								
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi (Rote Satu Data)	Belum Tersedia/Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>15</b>	<b>PERSANDIAN</b>								
15.1	Jumlah aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi	%	0	0	0	23,08	69,23	84,62	84,62
<b>16</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>								
16.1	Penyelenggaraan festival budaya dan pariwisata	kegiatan	3	1	1	4	5	5	16
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	situs	7	6	6	7	8	9	9
16.3	Meningkatnya Cagar Budaya yang di inventarisasi	unit	15	23	23	45	60	91	91
<b>17</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>								
17.1	Meningkatnya pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	1.400	969	1.400	1.600	1.700	1.800	7.469
17.2	Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	500	500	700	900	1.500	1.600	1.600
17.3	Meningkatnya koleksi judul buku perpustakaan	Buku	400	400	500	750	750	800	800
<b>18</b>	<b>KEARSIPAN</b>								
18.1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	9,09	9,09	9,09	13,64	13,64	13,64	13,64
<b>C.</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>								
<b>1</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>								
1.1	Produksi perikanan Tangkap	Ton	3.667	1.841	3.738	3.820	4.124	4.292	4.292
1.2	Produksi budidaya rumput laut	Ton	16.000	16.989	17.439	17.939	18.489	19.089	19.089
1.3	Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar	Ton	10	8,20	9	40	50	60	60
1.4	Konsumsi ikan	Kg/kapita	44,88	50,70	51,19	53,50	55,64	57,78	57,78
1.5	Cakupan bina kelompok nelayan	%	0,38	0,39	0,42	0,45	0,47	0,49	0,49
<b>2</b>	<b>PARIWISATA</b>								
2.1	Destinasi wisata yang dikembangkan	Destinasi	1	5	6	11	16	21	21
2.2	Jumlah Desa Wisata	Desa	2	2	3	4	5	6	20
2.3	Jumlah Usaha Pariwisata ber- CHSE	Usaha	N/A	N/A	50	100	120	160	160
<b>3</b>	<b>PERTANIAN</b>								
3.1	Produktivitas padi	Ton/Ha	4,85	3,50	3,85	4,24	4,66	5,12	5,12

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
3.2	Produksi Padi	Ton	91.064,00	109.972,03	111.071,75	112.182,47	113.304,29	114.437,34	114.437,34
3.3	Produksi Jagung	Ton	12.700,00	14.691,79	14.765,25	14.839,08	14.913,27	14.987,84	14.987,84
3.4	Produksi Sayur-Sayuran	Ton	23.000,00	23.247,56	23.363,80	23.480,62	23.598,02	23.716,01	23.716,01
3.5	Produksi Buah-Buahan	Ton	3.000,00	3.198,51	3.214,51	3.230,58	3.246,73	3.262,96	3.262,96
3.6	Produksi lontar	Ton	1.143,29	947,85	948,79	949,74	950,69	951,64	951,64
3.7	Cakupan bina kelompok petani	%	100	100	100	100	100	100	100
3.8	Jumlah Populasi Ternak Besar	Ekor	90.993	94.783	96.394	98.036	99.710	101.415	101.415
3.9	Jumlah Populasi Ternak Kecil	Ekor	125.176,00	128.379	132.231	136.197	140.283	144.492	144.492
3.10	Jumlah Populasi Ternak Unggas	Ekor	101.117	97.432	102.303	107.418	112.789	118.429	118.429
<b>4</b>	<b>PERDAGANGAN</b>								
4.1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0,77	0,85	1,42	2,13	2,84	3,55	3,55
<b>5</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>								
5.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	0,08	0,12	0,69	1,08	1,81	3,62	3,62
5.2	Peningkatan Produksi Oleh-Oleh Dari Rote (OODARO)	Rupiah	63.660.355.000	63.660.355.000	64.296.958.550	65.582.897.721	66.894.555.675	68.232.446.789	68.232.446.789
<b>6</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>								
6.1	Persentase transmigran lokal	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>D.</b>	<b>PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								
<b>1</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								
1.1	Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi dengan baik sesuai standar keprotokolan	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
1.3	Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100
1.5	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
1.6	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOP	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
1.7	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan fisik keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
1.8	Ketersediaan data potensi sumberdaya alam	%	100	100	100	100	100	100	100
1.9	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	%	50	55	60	70	75	80	80
1.10	Persentase ASN yang mengikuti Pekan Olahraga Seni dan Budaya (PORSENI) KORPRI	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>								
2.1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kab.Rote Ndao		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>E</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN</b>								
1.1	Dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
1.3	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>KEUANGAN</b>								
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	OPINI	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase SILPA terhadap APBD	%	7,00	8,34	6,00	5,00	4,00	3,00	3,00
2.3	Penetapan APBD		TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU
2.4	Persentase Pengelolaan Aset Daerah	%	87	73,91	60	50	50	50	50

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
2.6	Persentase Realisasi PAD	%	100	126,07	100	100	100	100	100
<b>3</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>								
3.1	Meningkatnya Jabatan pimpinan tinggi yang terisi pada instansi pemerintah	Orang	32	27	32	33	33	33	33
3.2	Jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	606	606	624	343	343	343	343
3.3	Meningkatnya pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah	Orang	2.748	2.748	2.798	2.848	2.898	2.948	2.948
3.4	Persentase kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	%	0,25	0,60	0,24	0,23	0,22	0,21	0,21
<b>4</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>								
4.1	Meningkatnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	16	7	20	30	40	50	50
4.2	Meningkatnya pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Orang	6	5	11	17	23	29	29
<b>5</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>								
5.1	Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan	Jenis	3	2	6	9	12	15	15
5.2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100,00	34,78	100	100	100	100	100
<b>6</b>	<b>PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH</b>								
6.1	Jumlah dokumen perencanaan kawasan perbatasan	Dokumen	1	1	2	3	4	5	5
<b>F</b>	<b>PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>								
<b>1</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>								
1.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	88,24	88,24	90,00	95	100	100	100
1.2	Jumlah Temuan BPK	Temuan	10	10	8	6	4	2	2
<b>G</b>	<b>KEWILAYAHAN</b>								
<b>1</b>	<b>KECAMATAN LOBALAIN</b>								
1.1	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	100	89	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>2</b>	<b>KECAMATAN ROTE BARAT DAYA</b>								
2.1	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
2.2	Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>3</b>	<b>KECAMATAN ROTE BARAT LAUT</b>								
3.1	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
3.2	Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>KECAMATAN ROTE BARAT</b>								
4.1	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	133,30	100	100	100	100	100
4.2	Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>5</b>	<b>KECAMATAN ROTE SELATAN</b>								
5.1	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	133,33	100	100	100	100	100
5.2	Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>6</b>	<b>KECAMATAN ROTE TENGAH</b>								
6.1	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	133,33	100	100	100	100	100
6.2	Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>7</b>	<b>KECAMATAN ROTE TIMUR</b>								
7.1	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
7.2	Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	100	81,81	100	100	100	100	100
<b>8</b>	<b>KECAMATAN PANTAI BARU</b>								
8.1	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
8.2	Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>9</b>	<b>KECAMATAN LANDU LEKO</b>								
9.1	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
9.2	Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>KECAMATAN NDAO NUSE</b>								
10.1	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	80	100	100	100	100	100
10.2	Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>KECAMATAN LOAHOLU</b>								
11.1	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100
11.2	Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100
<b>H</b>	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>								
<b>1</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>								
1.1	Cakupan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase Ormas/LSM yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	100
1.3	Persentase partai politik yang diverifikasi	%	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Cakupan pembinaan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>III. ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>									
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	Rp	901.167,00	901.167,00	975.712	1.050.257	1.124.801	1.199.345	1.199.345
2	Nilai Tukar Petani	Poin	105,80	101,41	101,61	101,92	102,33	102,84	102,84
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi non pangan per kapita	%	70,68	70,68	75,16	79,64	84,12	88,60	88,60
4	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	83,51	49,58	57,98	66,39	83,19	100	100



## **BAB IX**

### **P E N U T U P**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 merupakan dokumen yang sangat strategis sebagai acuan pembangunan Kabupaten Rote Ndao. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 memperhatikan permasalahan daerah, isu strategis regional, nasional maupun global, mengacu kepada RPJPD dan RTRW Kabupaten Rote Ndao, Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPJM Nasional dalam rangka sinkronisasi dan keselarasan perencanaan pembangunan. Perubahan RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD merupakan pedoman bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pembangunan daerah periode perencanaan Tahun 2019-2024. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, dengan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Untuk itu, seluruh perangkat daerah dilingkup pemerintah Kabupaten Rote Ndao harus menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
2. Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dijabarkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.
3. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah secara periodik.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah harus melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pada setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan sampai akhir periode RPJMD maka diperlukan pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Sebagaimana diketahui, tahun 2024 adalah tahun terakhir RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Penyusunan dokumen perencanaan RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada:

1. Arah kebijakan dan sasaran pokok rancangan RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045.
2. Rancangan RKP Tahun 2025 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Program prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rancangan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
4. Memperhatikan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, dan mengawal terwujudnya Kabupaten Rote Ndao yang bertumbuh, makmur, taat dan bersahabat (BERMARTABAT).